



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

- 231 Komitmen Perseroan
Company's Commitment
- 231 Dasar Hukum
Legal Basis
- 232 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan
Implementation of GCG Principles
- 234 Pedoman dan Kebijakan GCG
GCG Guidelines and Policies
- 235 Pemegang Saham
Shareholders
- 236 Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
General Meeting of Shareholders
(GMS)
- 237 Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) 2019
Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) 2019
- 246 Dewan Komisaris
Board of Commissioners



- 253 Komisaris Independen
Independent Commissioners
- 256 Direksi
Board of Directors
- 264 Kebijakan Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of the Board
of Commissioners and the Board
of Directors
- 265 Kebijakan dan Frekuensi Rapat
Dewan Komisaris bersama dengan
Direksi
Policy and Frequency of Joint
Meetings of Board of
Commissioners and Board of
Directors
- 270 Kebijakan atas Keberagaman
Komposisi Dewan Komisaris dan
Direksi
Diversity Policy of Board of
Commissioners' and Board of
Directors' Composition

- 273 Hubungan Afiliasi
Affiliate Relations
- 274 Komite Audit
Audit Committee
- 284 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination & Remuneration
Committee
- 290 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 319 Hubungan Investor
Investor Relations
- 321 Unit Audit Internal
Internal Audit Unit
- 324 Akuntan Publik
Public Accountant
- 325 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System
- 338 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

- 339 Kasus dan Perkara Penting
Case and Litigation
- 341 Akses Informasi dan Data
Perusahaan
Company's Information and Data
Access
- 342 Kode Etik
Code of Conduct
- 344 Inisiasi Anti Gratifikasi
Anti-Gratification Initiative
- 345 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
- 350 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka
Guidelines of GCG for Public
Companies

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Perseroan melakukan transformasi tata kelola demi meningkatkan transparansi. Berbagai perbaikan dilakukan, termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki pengalaman tinggi di sektor-sektor yang relevan dengan Perseroan.

The Company commenced governance transformation to increase transparency. Several improvements were made, including changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors with strong experience in relevant sectors with the Company.



KOMITMEN PERSEROAN

Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan GCG secara konsisten dan terus berupaya untuk memperbarui struktur, kebijakan dan proses usahanya untuk mencapai tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2019, Perseroan memulai Program transformasi yang mencakup upaya peningkatan atas pelaksanaan tata kelola Perseroan. Perubahan di dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan tekad Perseroan untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola secara keseluruhan.

Komitmen Perseroan terhadap GCG juga dapat dilihat dari peningkatan peran Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang secara proaktif dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya untuk menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola di seluruh organisasi dalam Perseroan.

Tata kelola perusahaan juga diperkuat melalui pelaporan rutin Direksi kepada Dewan Komisaris, perbaikan proses perencanaan tahunan, kerangka pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, peningkatan pada tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan penyempurnaan struktur pengambilan keputusan. Program perbaikan ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2020.

DASAR HUKUM

Penerapan praktik GCG Perseroan mengatur hubungan antara manajemen dengan pemangku kepentingan, serta pemegang saham. Secara keseluruhan, praktik GCG Perseroan berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- d. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)

COMPANY'S COMMITMENT

The Company has strong a commitment in implementing GCG consistently and continue to upgrade its structure, policies, business processes to achieve better governance.

In 2019, The Company commenced a Transformation Program which includes material improvements to the Governance Framework. The significant changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are testament to the Company's intention to increase transparency and improve overall governance.

The Company's commitment on Corporate Governance could also be observed from the enhancement to the operation of the Committees under the Board of Commissioners who proactively and responsibly assisted the Board of Commissioners conducting their supervisory functions to contribute to an improved level of governance in the entire Group.

Corporate governance was also improved through regular reporting by the Board of Directors to the Board of Commissioners, an improved annual planning process, and a more accountable decision making framework, enhancements to the operations of the Board Committees and improvements to the decision making structure. These improvements will progress further in 2020.

LEGAL BASIS

GCG practice regulates the relations between management stakeholders, and shareholders. Generally, the Company's GCG practice is implemented under these laws:

- a. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company
- b. General Guidelines of Good Corporate Governance issued by National Comitee of Governance Policy/KNKG
- c. Regulations of the Financial Services Authority (OJK), and
- d. Regulations of Indonesia Stock Exchange (IDX)

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Praktik GCG Perseroan turut memenuhi dan mematuhi 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan dari KNKG, yang dikenal dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kesetaraan, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. **Transparansi:** Perseroan menyediakan keterbukaan dan ketersediaan informasi yang jelas kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan prinsip transparansi, Perseroan melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menyajikan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, informasi bagi investor, serta informasi material atau relevan lainnya dalam situs Perseroan guna memudahkan para pemegang saham, pemangku kepentingan, serta publik untuk mengakses data-data terkait perkembangan Perseroan.
 - b. Melakukan proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait.
 - c. Melakukan proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi.
 - d. Menyampaikan informasi material dan siaran pers di situs Perseroan, situs IDX dan/atau surat kabar nasional.
 - e. Menyelenggarakan Paparan Publik maupun Investor/Analys Gathering untuk menyampaikan perkembangan perseroan.
 - f. Mengungkapkan kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan di dalam situs Perseroan.
2. **Akuntabilitas:** Prinsip ini menunjukkan bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait objektivitas, strategi, dan pencapaian Perseroan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam menerapkan prinsip ini, Perseroan melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menyajikan laporan atas kegiatan usaha dan keputusan Perseroan, khususnya dalam administrasi keuangan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Mengungkapkan tujuan-tujuan yang belum berhasil dicapai beserta dengan alasannya.
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan serta mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan transparan secara rutin.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The Company's GCG practice also complies with the 5 (five) principles of KNKG called TARIF, which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, as detailed below:

1. **Transparency:** The Company provides openness and access to its shareholders and stakeholders for clear information. The Company undertakes the following actions to implement this principle:
 - a. Provides and publishes Financial Statements, Annual Report, investor information, and other relevant or material information in Company's website to ease the Shareholders, stakeholders as well as public to access and get data regarding Company's updates.
 - b. Processes any resolutions of the Shareholders through holding of a General Meeting of Shareholders that complied with the Company's Article of Association and other related regulations.
 - c. Decision-making process of the Board of Commissioners and the Board of Directors were conducted through regular meetings of the Boards.
 - d. Discloses material information and Press Releases on the Company's website, IDX website and/or through national newspapers.
 - e. Holds a Public Expose or Investor/Analys Gathering to convey updates of the Company.
 - f. Discloses implemented policies by the Company on its website.
2. **Accountability:** This principle is to show the Company's responsibility toward its shareholders, stakeholders related to the Company's objectivities, strategies, and achievements to maintain its consistency in performing the duties and obligations. In implementing this principle, The Company has executed the following:
 - a. Provides business activities and the Company's decision reports, especially in financial administration to the Board of Commissioner, the shareholders, and other stakeholders.
 - b. Discloses yet to achieve objectives and reasons.
 - c. Carry out mandated and responsibilities and regularly report the updates transparently.



- d. Mempertanggungjawabkan laporan atas kegiatan usahanya dan mendapat pengesahan atas Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Mempersilakan auditor eksternal melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan dan mendapat opini dari auditor independen yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.
- f. Menerapkan sistem penilaian *Key Performance Indicator (KPI)* dan memperkenalkan *Objective Key Results ('OKR')* untuk para karyawan agar mampu memaksimalkan potensi dan kinerja masing-masing.
- 3. Tanggung Jawab: Fokus prinsip ini pada kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal-hal yang diterapkan oleh Perseroan guna menjunjung prinsip ini adalah:
 - a. Menata dan menaati Anggaran Dasar, Struktur GCG, Kebijakan CSR, dan Kode Etik
 - b. Mensyaratkan seluruh karyawan dan Manajemen untuk menandatangi pernyataan tunduk kepada Kode Etik Perseroan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan sekitar kantor dan kegiatan usaha Perseroan dengan mengadakan program-program tanggung jawab sosial.
- d. Provides business activities reports and obtains approval for Annual Report through General Meetings of Shareholders.
- e. Engaged an external auditor's to conduct assessments of the Company's financial statements and obtained unqualified opinion.
- f. Implements Key Performance Indicators (KPI) and introduced Objective Key Results as an assessment system for all employees in order to maximize their potentials and performance.
- 3. Responsibility: This principle focuses on performing applicable provisions and regulations as well as performing the Company's responsibility to society and environment. In order to implement this principle, the Company's conducts several activities, such as:
 - a. Maintaining and adhering to the Articles of Association, GCG Structure, CSR Policy, and the Code of Conduct.
 - b. Requiring a signature of all employees and Management on the compliance statement for the Company's Code of Conduct.
 - c. Contributing to the community and environment in the surrounding areas of the Company's office and business activities by conducting various social activities and CSR programs.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

4. Kemandirian: Prinsip ini menunjuk kepada tindakan Perseroan dalam mengatur usahanya secara independen dan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak luar yang bertentangan dengan hukum dan peraturan. Hal ini menunjukkan setiap keputusan yang dibuat oleh Perseroan bersifat objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek tetapi bebas dari tekanan pihak ketiga. Untuk itu, Perseroan melakukan beberapa hal seperti di bawah ini:
 - a. Masing-masing organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris, komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa adanya intervensi dan dominasi dari pihak lain. Masing-masing Komisaris Independen, masing-masing anggota Komite Audit memberikan pernyataan independensi sebelum diangkat.
 - b. Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk peran pengawasan dan Direksi untuk melakukan pengelolaan Perseroan secara profesional dan Independen.
 - c. Perseroan telah menerapkan dan terus meningkatkan praktik GCG.
5. Keadilan: Perseroan berlaku adil, setara dan wajar terhadap seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan beberapa hal berikut:
 - a. Selalu memberikan kesempatan yang sama dalam pemungutan suara pada saat RUPS.
 - b. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada pemangku kepentingan dengan memberikan pelatihan, seminar, ataupun lokakarya bagi semua tingkat karyawan.
 - c. Perseroan telah dan akan terus berupaya untuk selalu memberikan perlakuan yang adil dan proporsional kepada seluruh mitra kerja.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN GCG

Dalam praktik GCG, Perseroan berpedoman pada kebijakan tata kelola perusahaan yang di dalamnya mencakup pula pedoman-pedoman pokok pengelolaan Perseroan yang saling berkesinambungan dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Perusahaan
3. Pedoman Kerja
 - a. Pedoman Kerja Dewan Komisaris
 - b. Pedoman Kerja Direksi
 - c. Pedoman Kerja Komite Audit
 - d. Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi
 - e. Pedoman Kerja Audit Internal
 - f. Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

4. Independency: this principle refers to the Company's action in managing its business independently and professionally without any conflict of interest and external influences or pressure which violate applicable laws and regulations. This is to show that every decision made by the Company is objective by considering various aspects yet without any threats from third parties. Therefore, the Company conducts the following:
 - a. Each organ of the Company, namely: the GMS, the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners and the Board of Directors perform their functions and duties without any intervention and dominance by third parties. Each Independent Commissioner and each member of Audit Committee provides an independency statement before their respective appointment.
 - b. The shareholders have delegated part of its authorities to the Board of Commissioners for supervisory roles and the Board of Directors to manage the Company professionally and independently.
 - c. The Company has implemented and kept elaborating the GCG practice.
5. Fairness: The Company applies fair and equal behavior toward all stakeholders. Therefore, the Company has implemented the following:
 - a. Consistently provides an equal opportunity in voting process in the GMS.
 - b. Provides an equal opportunity to employees by providing training, seminar and workshop to all levels.
 - c. Applies an equal and proportional behavior toward all partners.

GCG GUIDELINES AND POLICIES

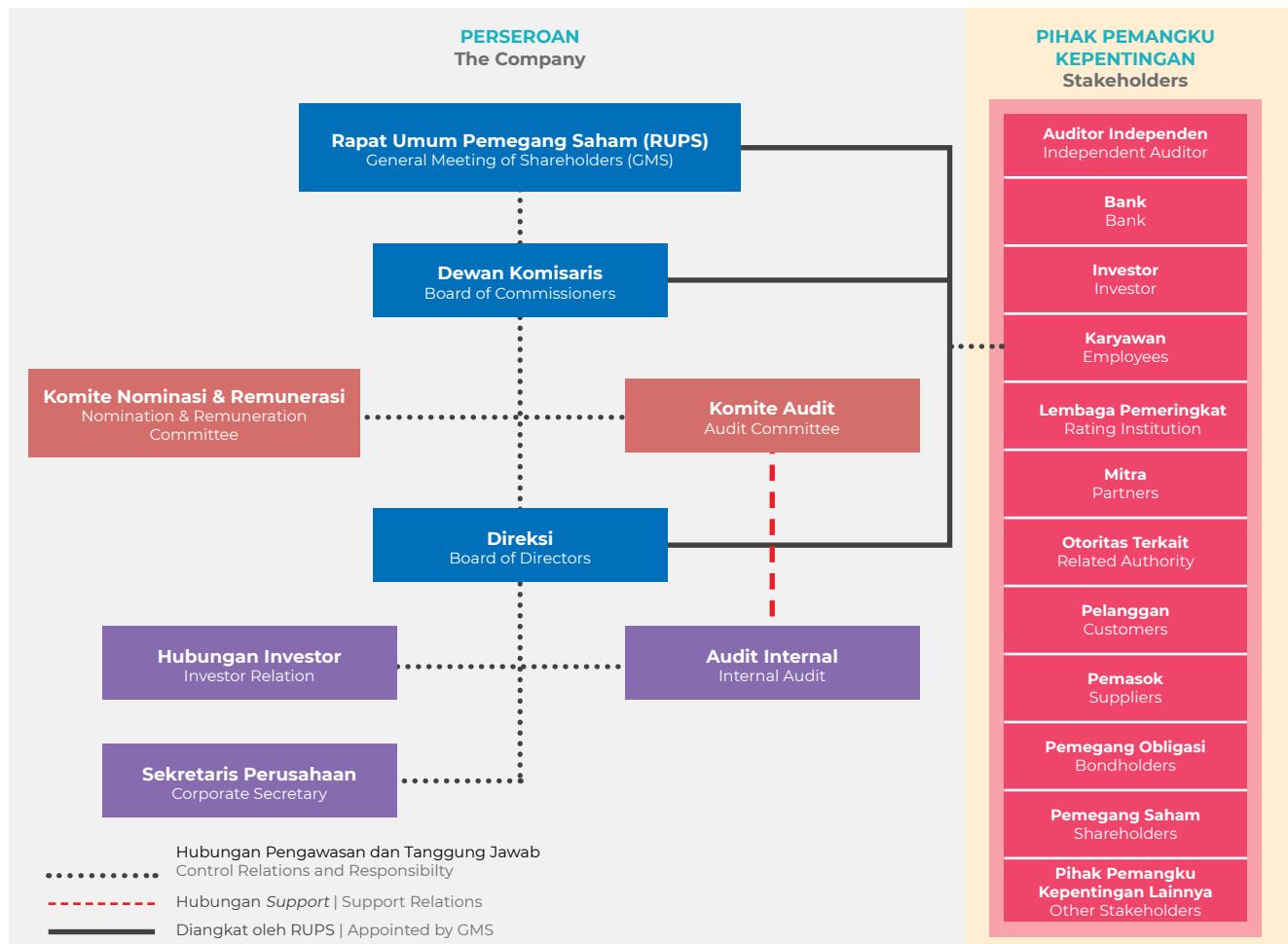
Within GCG practice, the Company is subject to GCG policies which include integrated and perpetual guidelines for corporate management to the GCG Principles, which are:

1. The Company's Articles of Association
2. The Company's Regulation
3. Work Guidelines/Charters
 - a. The Board of Commissioners Charter
 - b. The Board of Directors Charter
 - c. Audit Committee Charter
 - d. Nomination & Remuneration Committee Charter
 - e. Internal Audit Charter
 - f. Corporate Secretary Charter



4. Kode Etik Perseroan
5. Whistleblowing System
6. Tata Nilai dan Budaya Perseroan

4. The Company's Code of Conduct
5. Whistleblowing System
6. Company Values and Corporate Culture



PEMEGAN SAHAM

Perseroan tidak memiliki klasifikasi saham, hanya memiliki 1 jenis saham. Hak yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham adalah setara untuk hal-hal sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan suara pada saat pemungutan suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, baik itu setuju, tidak setuju, ataupun abstain.
2. Memiliki kesempatan untuk mengajukan mata acara untuk RUPS dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Perseroan, yakni diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS.
3. Berhak memberikan kuasa kepada pihak lain apabila Pemegang Saham berhalangan hadir dalam RUPS.
4. Dapat mengakses mata acara RUPS yaitu 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan.

SHAREHOLDERS

There is no share classification in the Company, it only has one type of stock. Each shareholder has an equal rights for the following:

1. Attending in the GMS and casting a vote, whether to vote for, against or abstain from voting in the GMS.
2. Having opportunity to propose an agenda for the GMS pursuant to the applicable regulations, which is to inform the Company at least 7 (seven) days prior to the GMS invitation.
3. Has a right to appoint a Proxy to represent him at the GMS if the respective shareholder is not available to attend the GMS.
4. Having access to obtain GMS agendas at least 21 (twenty-one) days prior to the set date.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

5. Memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

Hak dan kewajiban Pemegang Saham diatur secara jelas dan rinci pada Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diakses melalui situs resmi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat, tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan.

Wewenang RUPS

RUPS Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan.
5. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan.
7. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Having opportunity to ask question(s) in every discussion on each agenda item in the GMS.

The Company's Articles of Association regulates details of rights and obligations of the shareholders, and this can be accessed through the Company's official website.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The GMS is the Company's main organ that has the authorities beyond the Board of Commissioners or Board of Directors pursuant to the Company Law and/or Article of Association of the Company. In the GMS, the shareholders are allowed to use their rights to make a statement and receive explanation related to the Company's updates, subject to its relevance to the GMS agenda items, and as long as it does not contradict with the interests of the Company and in accordance with the Articles of Association and provisions of applicable laws. Resolutions of the GMS shall be based on the business interest of the Company.

Authority of the GMS

The Company's GMS has authority to:

1. Appoint, discharge, and/or replace a member of the Board of Directors by considering recommendations of Nomination and Remuneration Committee.
2. Appoint, discharge, and/or replace a member of the Board of Commissioners after considering recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
3. Approve the Annual Report including ratifying the financial statement as well as tasks of the Board of Commissioners and Board of Directors under the applicable laws and/or the Articles of Association.
4. Approve the use of the Company's net profit.
5. Approve compensation and other remuneration for the Directors and the Board of Commissioners.
6. Assign an independent public accountant firm to conduct a financial audit of the Company.
7. Approve amendments of the Articles of Association, referring to the applicable laws and regulations.
8. Make decisions through fair, open, and accountable process.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 2019

Pada 2019, Perseroan mengadakan 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu RUPST untuk Tahun Buku 2018 pada tanggal 18 April 2019. Proses penyelenggaraan RUPS dilaksanakan berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST 2019 dihadiri oleh 20.257.003.534 saham atau 89,957% dari 22.771.585.119 saham yang merupakan seluruh saham yang berhak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Tahap Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019 untuk Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

25 Februari 2019
4 Maret 2019
February 25,2019
March 4, 2019

PEMBERITAHUAN RUPST

25 Februari 2019 dan
4 Maret 2019

AGMS ANNOUNCEMENT

February 25, 2019 and
March 4, 2019

Pemberitahuan
RUPST disampaikan
melalui surat ke OJK
No. 048/LK-COS/
III/2019 dan No. 059/
LK-COS/III/2019

The AGMS
announcement was
sent to OJK in a letter
No. 048/LK-COS/
III/2019 and No. 059/
LK-COS/III/2019

12 Maret 2019
March 12, 2019

PENGUMUMAN RUPST

Pengumuman
melalui iklan di
harian Investor
Daily, situs BEI dan
situs Perseroan.
Penyampaian bukti
iklan ke OJK melalui
surat No. 071/LK-COS/
III/2019

AGMS NOTIFICATION

The Notification is
published via an
announcement in
Investor Daily
newspaper, IDX
website and
Company website.
Copy of the
announcement
was submitted to
OJK in a letter No.
071/LK-COS/III/2019

27 Maret 2019
March 27, 2019

PEMANGGILAN RUPST

Pernaggilan melalui
iklan di harian
Investor Daily, situs
BEI, situs Perseroan.
Penyampaian bukti
iklan ke OJK melalui
surat No.102/LK-COS/
III/2019

AGMS INVITATION

The Invitation is
published via an
announcement in
Investor Daily
newspaper, IDX
website and Company
website. copy of S
announcement was
submitted to OJK
with a letter No. 102/
LK-COS/III/2019

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) 2019

The Company convened 1 (one) General Shareholders Meeting which is AGMS in 2019, for the 2018 fiscal year, on April 18, 2019. The process to conduct the AGMS is subject to the OJK Regulation No.32 /POJK.04/2014 regarding the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, and the Articles of Association.

The 2019 AGMS was attended by shareholders representing 20,257,003,534 shares or 88.957% of 22,771,585,119 shares with voting rights as issued by the Company. Below is the process in establishing the 2019 AGMS for the 2018 fiscal year:

18 April 2019
April 18, 2019

RUPS TAHUNAN 2019 PT LIPPO KARAWACI TBK

THE AGMS 2019 OF PT LIPPO KARAWACI TBK

18 April 2019
April 18, 2019

RINGKASAN RISALAH RUPST

Ringkasan Risalah
RUPST disampaikan
melalui surat ke OJK
No. 202/LK-COS/
IV/2019

SUMMARY OF RESOLUTION OF THE AGMS

The summary of
resolutions of the
AGM was submitted
in a letter to OJK No.
202/LK-COS/IV/2019
on 18 April 2019.

Pengumuman
disampaikan melalui
web BEI dan web
Perseroan. Iklan Hasil
RUPST diterbitkan
pada tanggal 22
April 2019 dan
Penyampaian bukti
iklan melalui surat ke
OJK No. 215/LK-COS/
IV/2019.

The summary of
resolution of the
AGMS is published
on IDX website and
Company website.
Announcement
of AGM result in
newspaper was
published on 22 April
2019 and a Copy of
announcement was
submitted to OJK
with a letter to OJK
No. 215/LK-COS/
IV/2019

17 Mei 2019
May 17, 2019

RISALAH RUPS

- Risalah RUPS
disampaikan
melalui surat
kepada OJK No.
283/LK-COS/V/2019

MINUTES OF THE AGMS

- The minutes of
the AGMS was
submitted by a
letter to OJK No.
283/LK-COS/V/2019

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

1. Pengumuman RUPST pada 12 Maret 2019:
 - a. Pengumuman disampaikan paling lambat H-14 dari Pemanggilan RUPST.
 - b. Pengumuman penyelenggaraan RUPST dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Investor Daily, serta diunggah pada situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs Perseroan (www.lippokarawaci.co.id), yang terbit pada 12 Maret 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penyampaian bukti iklan Pengumuman melalui surat ke OJK No. 071/LK-COS/III/2019.
2. Pemanggilan RUPST pada 27 Maret 2019:
 - a. Pemanggilan ini disampaikan paling lambat H-21 dari RUPS.
 - b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS juga dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Investor Daily, serta diunggah pada situs BEI, dan situs Perseroan (www.lippokarawaci.co.id), yang terbit pada 27 Maret 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan ke OJK melalui surat No. 102/LK-COS/III/2019.
3. Penyelenggaran RUPST pada 18 April 2019:
 - a. RUPST diselenggarakan pada 18 April 2019 dimulai pada pukul 10:39 WIB dan selesai pukul 12:14 WIB bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, Ruang Mezzanine Ballroom, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat.
 - b. RUPST dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No. 101/SKKOM/LK-COS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.
 - c. Rapat tersebut diawali dengan penyampaian Tata Tertib Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya selama mengikuti Rapat berjalan, baik untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara rapat. Setelah semua pertanyaan ditanggapi, selanjutnya pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara dan hanya pemegang saham yang sah yang berhak mengeluarkan suara. Setiap satu saham mewakili satu suara pemegang saham.
 - d. Perseroan menunjuk Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta sebagai pihak independen dalam melakukan perhitungan dan/ atau memvalidasi suara serta akan mencatat jalannya RUPST dan membuat Akta Notaris.

1. Notification of the AGMS published on March 12, 2019:
 - a. the Notification shall be published at least 14 (fourteen) days prior to Invitation of the AGMS
 - b. The Notification of the 2019 AGMS for 2019 fiscal year, was published on March 12, 2019, in an advertisement in 1 (one) of Indonesian national newspaper, which is the Investor Daily, as well as IDX website and the Company's official website (www.lippokarawaci.co.id), both in English and Indonesian, and also to submit proof of Notification Advertisement through Letter No. 071/LK-COS/III/2019 to OJK.
2. Invitation to the AGMS published on March 27, 2019:
 - a. This announcement shall be published at least 21 (twenty-one) days prior to the date of AGMS.
 - b. The Invitation to invite the shareholders to attend the AGMS was published on March 27, 2019, in an advertisement in 1 (one) of Indonesian national newspaper, the Investor Daily, as well as IDX website and the Company's official website (www.lippokarawaci.co.id), both in English and Indonesian. Submission proof of Announcement advertisement through Letter No. 102/LK-COS/III/2019 to OJK.
3. The Company's AGMS held on April 18, 2019:
 - a. The AGMS held on April 18, 2019 at Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman and Harun No.44-48, Gambir, Central Jakarta, which commenced at 10.39 a.m (Western Indonesian Time) and closed at 12.14 p.m (Western Indonesian Time).
 - b. The AGMS was chaired by Mr. Theo L. Sambuaga as President Commissioner based on the decision of the Board of Commissioners No. 101/SKKOM/LK-COS/III/2019 dated March 27, 2019.
 - c. The AGMS started by declaring rules of the AGMS to the shareholders and/or their representatives, either to convey questions/ perception, and/or input for each agenda of the AGMS. After all the questions were responded to, the voting process was conducted using a ballot from only eligible shareholders. Every 1 (one) share represents 1 (one) vote.
 - d. The Company appointed Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., a notary in Jakarta, as an independent party in counting and/or validating the votes and minuted the GMS and draw a notarial deed of the GMS.



e. Pihak yang menghadiri RUPST 2019:

Pemegang saham : 88,957%

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Komisaris Independen : Sutiyoso

Direksi:

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Wakil Presiden Direktur : Hendra Sidin
- Direktur : Marshal Martinus
- Direktur : Wijaya Subekti
- Direktur Independen : Alwi Sjaaf

Komite Nominasi dan Remunerasi:

Sutiyoso (ketua)
Theo L. Slambuaga
(anggota)

Komite Audit : Lim Kuang Tak
(anggota)

Raymond Liu (anggota)

4. Ringkasan Risalah RUPST:

- a. Ringkasan Risalah RUPST dipublikasi setelah RUPS melalui IDXNet dengan surat No.202/LK-COS/IV/2019 tanggal 18 April 2019 di ikuti dengan iklan pengumuman pada Harian Investor Daily yang terbit pada 22 April 2019.
 - b. Iklan Keputusan Hasil RUPST dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berpedoman nasional, yaitu harian Investor Daily, serta diunggah ke situs BEI, dan situs Perseroan serentak pada 22 April 2019 serta penyampaian bukti iklan ke OJK melalui surat No.205/LK-COS/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
5. Penerbitan Risalah RUPST
- a. Risalah RUPST harus disampaikan paling lambat H+30 dari RUPST.
 - b. Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 283/LK-COS/V/2018 tanggal 17 Mei 2019

e. The AGMS 2019 was attended by:

Shareholders : 88.957%

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Theo L. Sambuaga
- Independent Commissioner : Sutiyoso

Board of Directors:

- President Director : Ketut Budi Wijaya
- Vice President Director : Hendra Sidin
- Director : Marshal Martinus
- Director : Wijaya Subekti
- Independent Director : Alwi Sjaaf

Nomination and Remuneration Committee:

Sutiyoso (chairman)
Theo L. Sambuaga
(member)

Audit Committee : Lim Kuang Tak
(member)

Raymond Liu (member)

4. Summary of resolutions of the AGMS:

- a. The summary was published in IDXNet right after the AGMS through Letter No. 202/LK-COS/IV/2019 dated 18 April 2019, followed by announcement in the Investor Daily newspaper issued on 22 April 2019.
- b. The summary of resolutions of the AGMS was published on April 22, 2019 in an Indonesian national newspaper, the Investor Daily, as well as IDX website and the Company's official website, and also through Letter No. OJK 205/LK-COS/IV/2019 dated April 22, 2019 submitted to OJK.

5. Issuance of resolution of the AGMS:

- a. The resolution shall be published at the latest 30 (thirty) days after the date of the AGMS
- b. Sent to OJK via Letter No.283/LK-COS/V/2018 dated May 17, 2019.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Keputusan dan Realisasi RUPST 2019

2019 AGMS Resolution and Realization

Mata Acara Rapat Pertama	Realisasi Realization	First Agenda
<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, di mana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Saptoto Agustomo dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini "wajar tanpa modifikasi", sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik Nomor 00097/2/1030/AU.1/03/0499-2/1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;</p> <p>3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (<i>acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2019. Has been implemented in 2019.</p>	<p>1. Approve and ratify the Company's Annual Report regarding the condition and running of the Company's business activities, which included the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year ended 31 December 2018, including reports on business activities derived from main business activities of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report;</p> <p>2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries consisting of Consolidated Financial Position Statements as at 31 December 2018 and Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Changes in Equity Reports and Consolidated Cash Flow Statements for the year ended that date that have been audited by Saptoto Agustomo from Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accountants with a "reasonable without modification" opinion, as evidenced in the Report of the Public Accountant Number 00097/2/1030/AU.1/03/0499-2/1/III/2019 dated 1 March 2019;</p> <p>3. Provide full release of responsibility to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that has been carried out for the financial year ended 31 December 2018 (<i>acquit et de charge</i>), insofar as their actions include related actions with business activities which are related to the main business activities of the Company reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company and the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2019.</p>

Mata Acara Rapat Kedua	Realisasi Realization	Second Agenda
<p>1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;</p> <p>2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp 694.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2019. Has been implemented in 2019..</p>	<p>1. Approve to not distribute dividends for the financial year ended 31 December 2018;</p> <p>2. Approve setting a fund of Rp 1 billion to be set aside as a reserve fund as referred to in Article 70 of the Company Law and Article 23 of the Company's Articles of Association;</p> <p>3. Agree that the remaining net profit of the Company after deducting dividends and reserve funds, namely Rp694 Billion (six hundred ninety four billion Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company.</p>

Mata Acara Rapat Ketiga	Realisasi Realization	Third Agenda
<p>1. Menunjuk Akuntan Publik Saptoto Agustomo dengan Nomor Izin Akuntan Publik No. AP 0499 dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019;</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2019. Has been implemented in 2019..</p>	<p>1. Appoint AP Saptoto Agustomo with Public Accountant License Number No. AP 0499 and KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners to conduct audit of the Consolidated Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiaries for the year ended December 31, 2019;</p> <p>2. Gives authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to determine the wage and other requirements for the KAP and determine the replacement KAP in the case where the appointed KAP is, for any reason, unable to complete the audit of the Company's Financial Statements in 2019.</p>



Mata Acara Rapat Keempat	Realisasi Realization	Fourth Agenda
<p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Theo L. Sambuaga dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Agum Gumelar, Bapak Farid Harianto dan Bapak Sutiyoso dari jabatan masing-masing selaku Komisaris Independen serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;</p> <p>2. Mengangkat Bapak John A. Prasetyo selaku Presiden Komisaris Independen, Bapak Anangga W. Roosdiono selaku Komisaris Independen, Bapak Stephen Riady, Bapak Kin Chan dan Bapak George Raymond Zage III masing-masing selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021;</p> <p>3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;</p> <p>4. Mengangkat kembali Bapak Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur, Bapak Marshal Martinus Tissadharma dan Bapak Alwi R. Sjaaf masing-masing selaku Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak John Riady dan Bapak Surya Tatang masing-masing selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.</p> <p>5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>6. Memberi kuasa substansi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2019. Has been implemented in 2019.</p> <p>Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Berita Acara RUPST No. 42 tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.</p> <p>Changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have been stated in the Deed of Amendment to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors and have been stated in the minutes AGMS No. 42 date 18 April 2019 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.</p>	<p>1. Accept the resignation of Mr. Theo L. Sambuaga, Mr. Agum Gumelar, Mr. Farid Harianto and Mr. Sutiyoso from their respective positions as President Commissioner and Independent Commissioners and release them of their duties and responsibilities from their respective positions, starting from the closing of this Meeting;</p> <p>2. Appoint Mr. John A. Prasetyo as Independent President Commissioner, Mr. Anangga W. Roosdiono as Independent Commissioner, Mr. Stephen Riady, Mr. Kin Chan, and Mr. George Raymond Zage III respectively as Commissioner, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2021;</p> <p>3. Respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting and release them of their duties and responsibilities from their respective positions, starting from the closing of this Meeting;</p> <p>4. Appoint Mr. John Riady and Mr. Surya Tatang as Directors, reappoint Mr. Ketut Budi Wijaya as President Director, Mr. Alwi R. Sjaaf and Mr. Marshal Martinus Tissadharma as Directors of the Company. Thus the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of the closing the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2021.</p> <p>5. Approve the authorization of the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of honorarium/salary, allowances, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.</p> <p>6. Giving the power of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the Meeting's decision on its own Notary deed and then notify the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia/</p>

Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan, dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris Independen : John A. Prasetyo
- Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
- Komisaris : Stephen Riady
- Komisaris : Kin Chan
- Komisaris : George Raymond Zage III

DIREKSI

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : John Riady
- Direktur : Surya Tatang
- Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
- Direktur : Alwi R. Sjaaf

In connection with the dismissal and appointment of the Company's management, thus the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2021 becomes as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

- Independent President Commissioner : John A. Prasetyo
- Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono
- Commissioner : Stephen Riady
- Commissioner : Kin Chan
- Commissioner : George Raymond Zage III

DIRECTORS

- President Director : Ketut Budi Wijaya
- Director : John Riady
- Director : Surya Tatang
- Director : Marshal Martinus Tissadharma
- Director : Alwi R. Sjaaf

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Mata Acara Rapat Kelima	Realisasi Realization	Fifth Agenda
<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 menjadi: "Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 9.200.000.000,00,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,-/saham."</p> <p>3. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 3 menjadi : "Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu". Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentianya, kecuali apabila tanggal pemberhentianya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham."</p> <p>4. Menyetujui Pasal 18 ayat 5 menjadi: "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu". Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentianya, kecuali apabila tanggal pemberhentianya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham."</p> <p>5. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 5 menjadi; Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas nasional , dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>6. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana disebutkan sebelumnya.</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2019. Has been implemented in 2019.</p> <p>Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah dinyatakan dalam Berita Acara RUPST No.42 tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H</p> <p>Changes to Article 3 of the Company's Articles of Association have been stated in the Deed of AGM's Minutes No.42 dated April 18, 2019 made by Notary Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H</p>	<p>1. Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association.</p> <p>2. Approve the amendment to Article 4 paragraph 1 to be the following: "The Company's authorized capital amounts to Rp. 9,200,000,000,000.00 (nine trillion two hundred million billion Rupiah) divided into 92,000,000,000 (ninety two billion) shares each with a nominal value of Rp 100.00 (one hundred rupiah) per share."</p> <p>3. Approve the changes to Article 15 paragraph 3 to be the following: "Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for the period of 1 (one) term from the closing of the General Meeting of Shareholders that appoints the member of the Board of Directors until the closing of the second annual General Meeting of Shareholders after their appointment date, without any prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Directors at any time. Such termination is valid from the closing of the Meeting which decides the termination, except if the date of dismissal is determined otherwise by the General Meeting of Shareholders."</p> <p>4. Approve the changes to Article 18 paragraph 5 to be the following: "Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders for the period of 1 (one) term, starting from the closing of the General Meeting of Shareholders that appoints the members of the Board of Commissioners until the closing of the second Annual General Meeting of Shareholders after their appointment date, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time. Such termination is valid from the closing of the Meeting which decides the termination, except if the date of dismissal is determined otherwise by the General Meeting of Shareholders."</p> <p>5. Approve the changes to Article 22 paragraph 5 to be the following: "Notification of dividends and temporary dividends is announced at least in 1 (one) Indonesian language daily newspaper with wide national circulation, with due observance of laws and regulations in the Capital Market sector."</p> <p>6. Approve to compile and restate all the provisions in the Articles of Association in connection with the changes as mentioned previously.</p> <p>7. Giving power and authority to the Directors of the Company with the power of substitution to take all necessary actions relating to the decision of the agenda of this Meeting, including compiling and restating all Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt notification of amendment to the Articles of Association, do everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and or changes to the amendments to the Articles of Association required by the authorized agency.</p>



Mata Acara Rapat Keenam	Realisasi Realization	Sixth Agenda
<p>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.</p> <p>2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/ atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, dengan cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas IV.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT IV, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV; ii. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; iii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT IV; iv. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; v. menentukan Jadwal PUT IV; vi. mendatangkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; vii. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; viii. mencatatkan saham tambahan Perseroan pada Bursa Efek dalam rangka PUT IV; ix. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT IV, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. <p>4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.</p> <p>6. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan dan/ atau diputuskan dalam rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Telah selesai seluruhnya pada tahun 2019. Completely executed in 2019.</p> <p>Peningkatan modal setelah Penawaran Umum Terbatas IV telah dinyatakan dalam akta nomor 37 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</p> <p>Increase of capital after Right Issue IV is stated in deed No.37 dated July 18, 2019 made by Notary Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H</p>	<p>1. Approve the Company's plan to conduct a Limited Public Offering IV (PUT IV) to Shareholders by issuing Pre-emptive Rights as much as 48,000,000,000 ordinary shares in the name with a nominal value of Rp100 per share offered in accordance with POJK 32/2015 which is an implementation of Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning Capital Market.</p> <p>2. Approve changes to the Company's Articles of Association in connection with decisions taken and/or approved in the agenda of the Meeting, including but not limited to amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning Capital, by increasing the Company's Issued Capital and Paid-up Capital in accordance with the results of the PUT IV.</p> <p>3. Gives power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out every and all actions relating to matters relating to PUT IV, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. determine with certainty the number of shares issued in relation to PUT IV; ii. determine the ratio of shareholders entitled to the Rights Issue; iii. determine the launching price in relation to PUT IV; iv. determine the date of the Register of Shareholders entitled to Rights Issue; v. determine the Schedule of PUT IV; vi. sign the documents required in the framework of PUT IV, including Notary deeds and their amendments and/or additions; vii. register the Company's shares in collective safekeeping in accordance with the applicable laws and regulations; viii. register additional shares of the Company in the Stock Exchange in the framework of PUT IV; ix. do all and every action that is needed in connection with PUT IV, without any action being excluded, all of them by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations and applicable regulations in the Capital Market. <p>4. Approve the recording of all New Shares on the Indonesia Stock Exchange in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>5. Ratify and approve measures that have been and will be carried out by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in the context of PUT IV to the Shareholders, including but not limited to making and/or delivering information including initial prospectuses, prospectuses and concise prospectuses.</p> <p>6. Amend the Company's Articles of Association in connection with matters discussed and/or decided at this Meeting, and restate the entire Articles of Association of the Company.</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Mata Acara Rapat Keenam	Realisasi Realization	Sixth Agenda
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substisi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.		7. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company both individually and jointly with the right of substitution to carry out all actions needed in the context of the implementation, effectiveness and/or legitimacy of matters submitted and/or decided in the entire agenda of the Meeting, including but not limited to restating part or all of the decisions in the Meeting agenda in a notary deed, making or requesting all the deeds, letters and documents required, present before the authorities/parties, submitting requests to parties/an authorized official to obtain approval including the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or report such matter to the competent authorities/parties and to make amendments and/or additions in any form necessary to obtain approval or receipt of the report, to submit and sign all requests and other documents, to choose a place of domicile and to carry out other actions that may be needed and to register and announce as referred to in the applicable laws and regulations one thing or another without being excluded.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2018

2018 AGMS Resolution and Realization

Mata Acara Rapat Pertama	Realisasi Realization	First Agenda
<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, di mana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi (unqualified opinion) sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/274.AGA/sat.1/2018 tanggal 4 April 2018;</p> <p>3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	<p>Telah direalisasikan pada 2018. Has been implemented in 2018.</p>	<p>1. Has approved and ratified the Company's Annual Report on its position and ongoing business activities, including the consolidated financial statement of the Company and its subsidiaries for the financial year ended on December 31, 2017, which also covers the Company's business activities report derived from its main business activities and also report of supervisory duties of the Board of Commissioners;</p> <p>2. Has approved and ratified the consolidated financial statement of the Company and its subsidiaries, consisting of Consolidated Statement of Comprehensive Profit and Loss, Statement of Change in Equity and Consolidated Cashflow Report as of December 31, 2017 as audited by Public Accountant Firm, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner with unqualified opinion as declared in its report No. R/274.AGA/sat.1/2018 dated April 4, 2018;</p> <p>3. Has granted a release and discharge (Acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their respective management and supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2017 (acquit et de charge), provided those actions including the actions related to the business activities derived from the Company's main business activities are reflected in the Consolidated Financial Statements and Annual Report of the Company for the year ended on December 31, 2017.</p>



Mata Acara Rapat Kedua	Realisasi Realization	Second Agenda
<p>1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp61.484.000.000 (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta Rupiah), atau Rp2,7 per saham atau sekitar 10% dari Laba Bersih Setelah Pajak;</p> <p>2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>3. Menyetujui bahwa siswa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan yaitu sebesar Rp551.688.000.000 (lima ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan;</p> <p>4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;</p> <p>5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal sehubungan dengan pembagian dividen tunai;</p> <p>6. Menyetujui jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut:</p> <p>JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 21 Juni 2018 • Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 22 Juni 2018 • Cum dividen tunai di Pasar Tunai: 26 Juni 2018 • Ex dividen tunai di Pasar Tunai: 27 Juni 2018 • Recording date yang berhak atas dividen: 26 Juni 2018 • Pembayaran dividen tunai: 6 Juli 2018 	<p>Dividen telah didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 6 Juli 2018 Dividend has been distributed to shareholders in 6 July 2018</p>	<p>1. Has approved distribution of final cash dividend aggregate in amount of Rp61,484,000,000 (sixty-one billion four hundred eighty-four million Rupiah), or Rp2,7 per share, or 10% of the Net Profit before Tax;</p> <p>2. Has approved and determined amount of reserve fund at Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) under the Article 70 in Act No.40 year 2007 regarding Limited Company, as well as Article 23 of the Article of Association;</p> <p>3. Has approved the remaining Net Profit after deducting the total dividend and reserve fund of Rp551,688,000,000 (five hundred fifty-one billion six hundred eighty-eight million Rupiah) to be recorded as the Company's Retained Earnings;</p> <p>4. Has approved cash dividend payment by implementing tax deduction under the applicable tax provisions;</p> <p>5. Has granted power and authority to the Company's Board of Directors to execute any procedure needed in distributing the cash dividend;</p> <p>6. Has approved the payment schedule of the distribution of the cash dividend, as follows: SCHEDULE OF CASH DIVIDEND PAYMENT <ul style="list-style-type: none"> • Cash Cum dividend in Regular and Negotiation Market: June 21, 2018 • Cash Ex dividend in Regular and Negotiation Market: June 22, 2018 • Cash Cum dividend in Cash Market: June 26, 2018 • Cash Ex dividend in Cash Market: June 27, 2018 • Recording Date: June 26, 2018 • Cash dividend payment: July 6, 2018 </p>
Mata Acara Rapat Ketiga	Realisasi Realization	Third Agenda
<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018 berdasarkan rekomendasi Komite Audit dengan kriteria antara lain sebagai berikut:</p> <p>1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kredibilitas serta track record yang baik;</p> <p>2. Merupakan anggota Kantor Akuntan Publik Internasional ternama, dan termasuk dalam peringkat 10 besar dunia;</p> <p>3. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka.</p>	<p>Telah direalisasikan sesuai rekomendasi Komite Audit tanggal 7 Januari 2019. Has been implemented according to recommendations of the Audit Committee dated January 7, 2019.</p>	<p>Providing authority to the Company's Board of Commissioners to appoint and assign registered public accountant firm according to Audit Committee's recommendation to audit the Company's book for 2018 fiscal year, based on the following criteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registered in OJK and has a good credibility as well as good record of achievements; 2. Member of reputable International Public Accountant Firm, and also one of the top 10 in world ranking; 3. Having adequate experience in auditing credible public companies, local companies, or multinational companies.
Mata Acara Rapat Keempat	Realisasi Realization	Fourth Agenda
<p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Chan Chee Meng dari jabatannya sebagai sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST;</p> <p>2. Mengangkat Bapak Hendra Sidin sebagai Wakil Presiden Direktur dan Bapak Marshal Martinus Tissadharma sebagai Direktur.</p>	<p>Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Berita Acara RUPST No. 14 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. Changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have been stated in the Deed of Amendment to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors and have been stated in the minutes AGMS No. 14 date 5 June 2018 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.</p>	<p>1. Accept resignation of Mr. Chan Chee Meng from his position as Director of the Company effective from the close of the AGM;</p> <p>2. To appoint and determine Mr. Hendra Sidin and Mr. Marshal Martinus Tissadharma, who will act respectively as Vice President Director and Director.</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Landasan Hukum

Mengacu pada Piagam Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (UUPT), POJK No. 33 /POJK.04/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri maka pengunduran diri tersebut wajib diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan ketiga landasan hukum tersebut.

Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya melalui nominasi dan merekomendasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kandidat calon anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi selanjutnya menominasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk selanjutnya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the organ which has the duty and collective responsibility to supervise and advise the Board of Directors and to ensure that Company has implemented GCG at all organizational levels or hierarchy.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. BOC accountability to the GMS is a manifestation of supervisory accountability for corporate management in the implementation of the principles of good corporate governance. The Board of Commissioners's performance is evaluated based on performance assessments elements, arranged independently by the Board of Commissioners. Assessment is carried out at each end of the closing. The Board of Commissioners' performance evaluation results are presented in the GMS.

Legal Basis

Pursuant to the Charter of the Board of Commissioners, a member of the Board of Commissioners shall be appointed and discharged by the GMS in accordance with the Law No. 40 year 2007, POJK No.33/POJK.04/2014, and Company's Article of Association. If member of the Board of Commissioners resigns, the resignation must be decided by the GMS taking into account the three legal foundations.

Appointment, termination and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the GMS shall consider recommendation from the Nomination and Remuneration Committee. The committee is formed to assist the Board of Commissioners in task implementation through nomination and recommending remuneration for the Board of Commissioners.

The appointment procedures of members of the Board of Commissioners as follows:

1. Remuneration and Nomination Committee provided recommendation of candidate member of the Board of Commissioners.
2. Furthermore, Remuneration and Nomination Committee provided the candidate member of the Board of Commissioners to be appointed by the GMS.



Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris tanggal 26 Februari 2016, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris, seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat), dan seorang Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara.

Board of Commissioners Criteria

Members of the Board of Commissioners shall meet following requirements at the appointment as well as during the term of office as stipulated in existing regulations:

1. Have a good character, morals and integrity;
2. Proficient in doing legal acts;
3. During 5 (five) years before the appointment and during term of duty:
 - a. Not declared bankrupt;
 - b. Not been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners that is declared guilty causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Not been convicted because of crimes that harmed state's financial and/or is related with financial sector;
 - d. Not been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners that while in the term of duty:
 - i. Do not hold an AGM;
 - ii. Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners is not accepted by GMS or do not give any accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS;
 - iii. Causing a licensed company which has an agreement, or registered to OJK not to fulfill the requirement to submit Annual Report and/or financial report to OJK.
 - e. Have a commitment to follow the regulations; and
 - f. Have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.

Board of Commissioners Composition

According to the Board of Commissioners Charter dated on February 26, 2016, the Board of Commissioners must at least consist of 3 (three) Commissioners, which consist of a President Commissioner, a Vice President Commissioner and a Commissioner. In term of, the Board of Commissioners consists of 2 (two) members, 1 (one) of these members shall be an Independent Commissioner. In addition, if the Board of Commissioners consist of more than 2 (two) members so the total of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of total number of the members. The Position of each member, including the President Commissioner, is equal.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Berdasarkan RUPST 5 Juni 2018, susunan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 1 Januari 2019 hingga 18 April 2019 adalah:

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Komisaris Independen : Agum Gumelar
- Komisaris Independen : Farid Harianto
- Komisaris Independen : Sutiyoso

Berdasarkan RUPST 18 April 2019, sejak ditutupnya RUPST tersebut, susunan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 18 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah:

- Presiden Komisaris Independen : John A. Prasetio
- Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
- Komisaris : Stephen Riady
- Komisaris : Kin Chan
- Komisaris : George Raymond Zage III

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Berdasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris, Presiden Komisaris memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris
2. Memastikan setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup
3. Mengusulkan untuk diadakannya rapat Dewan Komisaris
4. Memimpin RUPS
5. Memimpin rapat Dewan Komisaris
6. Memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
7. Memastikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite di bawahnya terlaksana, termasuk perihal ketertiban Risalah Rapat
8. Menerima Laporan kinerja dan pelaksanaan strategi operasional Perseroan.

According to resolution of AGMS dated June 5, 2018 below is the composition of the Company's Board of Commissioners for period Januari 1, 2019 to April 18, 2019:

- President Commissioner : Theo L. Sambuaga
- Independent Commissioner : Agum Gumelar
- Independent Commissioner : Farid Harianto
- Independent Commissioner : Sutiyoso

According to resolution of AGMS dated April 18, 2019, below is the changed composition of the Company's Board of Commissioners for period April 18, 2019 to December 31, 2019:

- Independent President Commissioner:
John A. Prasetio
- Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono
- Commissioner : Stephen Riady
- Commissioner : Kin Chan
- Commissioner : George Raymond Zage III

Term of Office of Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed for certain term of office under the Articles of Association and can be reappointed. Members of the Board of Commissioners are appointed for 1 (one) tenure which starts from the close of the appointing GMS until the close of second GMS after the appointment date, without limiting the rights of the GMS to discharge members at any time.

Duties and Responsibilities of President Commissioner

Commissioner In accordance to the Articles of Association of the Company and the Charter of the Board of Commissioners, the President Commissioner is obliged to:

1. Coordinate all activities of the Board of Commissioners
2. Ensure that each member of the Board is able to express opinions based on sufficient information
3. Propose to hold a Board of Commissioners' meeting
4. Chair a GMS
5. Chair meetings of the Board of Commissioners
6. Chair meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors
7. Ensure that implementation of the Board of Commissioners' meetings including meetings of its committees are conducted properly and minuted
8. Receive the Company's performance report and implementation of the operational strategy.



Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana angka 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
12. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu

Duties & Responsibilities of Board of Commissioners

In accordance to the charter of the Board of Commissioners, duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners is obliged to:
 - a. Conduct a supervision on the Company's management by the Board of Directors in general, both the Company or its business as well as provide advices to the Board of Directors.
 - b. Perform duties that are specifically given under the Articles of Association, the legislation, and/or resolution of GMS; and
 - c. Perform duties, responsibilities and authority in accordance to the Articles of Association and also resolution of GMS.
2. In implementing the supervision referred to point 1, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Company's strategic policies.
3. Commissioners must execute their duties and responsibilities as mentioned in point 1 with good intention, full of responsibility and prudence.
4. Commissioners are obliged to perform their duties and responsibilities independently.
5. Commissioners are obliged to implement and ensure the performance of Management Risk and the GCG Principles in every business activities of the Company for every level in organization.
6. Commissioners shall evaluate and approve the Company's work plan.
7. Commissioners are obliged to facilitate and encourage business development of the Company.
8. To support the effectiveness of performing duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee and other committees under applicable regulations.
9. The Board of Commissioners shall ensure the performance of the committees underneath to perform their duties effectively.
10. The Board of Commissioners is obliged to evaluate the performance of each committee that assists the Board in conducting its duties and responsibilities every fiscal year end.
11. For certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to conduct an AGM and/or other GMS according to its authority as stipulated in laws and the Article of Association.
12. The GMS is chaired by President Commissioner or a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board itself. If all members are absent or unavailable, it is not necessary to prove to any third

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Melakukan pengambilan keputusan dengan tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta penyelenggaraan RUPS.
5. Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
8. Wewenang sebagaimana point 4 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
9. Mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
10. Melakukan permintaan data, informasi dan/atau laporan perusahaan yang disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

party, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. If all members are absent or unavailable, then the GMS shall be chaired by the shareholders who are present in the GMS who are appointed from and by the participants of the GMS.

Authorities of Board of Commissioners

The Board of Commissioners has authorities as follows:

1. To approve and assist the Board of Directors in taking legal actions as regulated in the Articles of Association.
2. To make decisions without disregarding the Board of Directors' responsibilities on the Company's management.
3. To enter buildings and yards or other places owned by the Company collectively or individually any time during working hours with a right to examine every book, letter and other evidence; also to examine and compare with actual cash condition, and have a right to comprehend every activity performed by the Board of Directors.
4. May request to convene an GMS.
5. To temporarily terminate one or more member (s) of the Board of Commissioners due to violation of the Articles of Association and/or the applicable laws and regulations. The termination and its reason must be notified to the concerned individual.
6. Within 90 (ninety) days after the temporary termination, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS in order to decide whether to extend the termination or to reappoint for the same role, in which the concerned individual is allowed to attend the meeting in attempt to defend him/herself. The mechanism of the GMS follows point (3) as also stipulated in the Articles of Association.
7. To take action to manage the Company under certain conditions for certain period of time.
8. The authority mentioned in point 4 is regulated under Articles of Association.
9. To have authority to access all data, information and/or the Company's reports which required performing their duties and responsibilities.
10. To request all data, information and/or the Company's reports, conveyed through the Corporate Secretary.



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 24 Peraturan OJK No.33/POJK.03/2014, Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan dan perusahaan publik lain di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan ini hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat yang berlaku.

Berikut adalah daftar Dewan Komisaris Perseroan beserta dengan keterangan rangkap jabatan masing-masing:

Nama Name	Jabatan Di Perseroan Position In The Company	Jabatan Di Perusahaan/Lembaga Position In Companies/Institutions
John A. Prasetyo	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk. Independent Commissioner of PT Global Mediacom Tbk.
Anangga W. Roosdiono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Komisaris PT Semen Cibinong Tbk. Independent Commissioner of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Commissioner of PT Semen Cibinong Tbk.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Perseroan memiliki dua komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama 2019, penilaian kinerja Komite tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite tersebut telah melakukan peran mereka secara proaktif dan bertanggung jawab, yang menghasilkan peningkatkan kualitas tata kelola di seluruh organisasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Audit

Kriteria penilaian Komite Audit di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Komite Audit, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang

Concurrent Position of Board of Commissioners

According to Regulations of the Financial Services Authority (OJK) No.33/POJK.03/2014, commissioners are allowed to have concurrent positions as directors in not more than 2 (two) other listed or public companies, and commissioners in not more than 2 (two) other listed or public companies. If the members of the Company's Board of Commissioners do not have concurrent position as director in any other companies, then the members are allowed to have concurrent position as commissioners in at most in 4 (four) other listed or public companies. In addition, every member of the Company's Board of Commissioners is allowed to have concurrent position in at most 5 (five) positions in committees in other companies or public companies, where the members also serve as a member of Board of Commissioners or Board of Directors. This concurrent position can only be executed as long as it does not contradict with other prevailing laws and regulations. If there are other laws that regulate other provisions of the concurrent position which are different from OJK regulations, the more stringent regulations apply.

The below table lists concurrent positions of the Company's Board of Commissioners:

Performance Evaluation Committee under the Board of Commissioners

There are 2 (two) committees under the Board of Commissioners, which are: Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee. In 2019, the Board of Commissioners assessed performance of each committee in accordance to the GCG Principles and the Company's objectives, in which the Board of Commissioners declared that both committees have performed their roles in a proactive and responsible manner, contributing to an improved level of governance, for the entire Group.

Audit Committee Performance Evaluation Criteria

The evaluation criteria for the Audit Committee under the Board of Commissioners are as follows:
The Audit Committee carries out its duties, responsibilities and authority in accordance with the Audit Committee Charter, the Company's Articles of Association, applicable

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Piagam Dewan Komisaris yang telah diimplementasikan secara efektif sejak 26 Februari 2016 dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
5. POJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan transparan sesuai dengan perundangan yang berlaku sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Piagam ini membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Piagam Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

laws and regulations, and/or based on the decision of the General Meeting of Shareholders.

Nomination and Remuneration Committee Performance Evaluation Criteria

The evaluation criteria for the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Commissioners are as follows:

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties, responsibilities and authority in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and / or based on the decision of the General Meeting of Shareholders.

Board of Commissioners Charter

The Company has in place the Board of Commissioners Charter effective on February 26, 2016, which was prepared pursuant to:

1. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company.
2. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners emiten or Public Company.
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee emiten or Public Company.
4. IDX Regulation No. I-A recording the Registration of Shares and Equity also Shares Issued by the Listed Company.
5. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Implementation Guidance of Audit Committee.
6. The Articles of Association of the Company.

The Board of Commissioners charter was made to assist the Board of Commissioners in executing its duties and responsibilities optimally and transparently under the applicable laws and regulations in controlling performance of the Board of Directors so that the Company's purposes and objectives can be achieved in the interest of the Company. The Charter also serves as a guidelines for the Board of Commissioners to escalate the quality of implementation of GCG Principles.

The charter has been signed by all Commissioners; therefore, it must be adhered to and adopted by Commissioners. In the event of any violation to the Charter, then provisions as stipulated in the Articles of Association, Capital Market laws and regulations will apply.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2019

Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2019 mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengawal rencana transformasi strategis Perseroan yang dimulai sejak tahun 2019.
2. Mengawasi dan mendorong Direksi untuk mencapai target-target kerja yang telah disetujui.
3. Mengawasi Komite Audit dalam berkoordinasi dengan audit eksternal, audit internal, serta pelaporannya.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi dan komite di bawahnya melalui rapat reguler yang diadakan di sepanjang tahun 2019 guna memastikan pihak-pihak terkait menjalankan tugasnya secara efektif.
5. Menyetujui aksi korporasi Perseroan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penawaran umum terbatas iv dan beberapa divestasi aset antara lain kepemilikan dalam perusahaan yang memiliki rumah sakit di Myanmar, kepemilikan unit First Real Estate Investment Trust.
6. Sebagai bagian dari Program Transformasi, Dewan Komisaris, melalui Audit Komite, telah melakukan penelaahan atas Neraca, khususnya atas penilaian aset, provisi dan hutang. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Perseroan telah melakukan penyesuaian satu kali.

Performance of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners in 2019

Below are the list of duties and responsibilities conducted by the Board of Commissioners in 2019:

1. Oversaw the Company's strategic transformation plan which started in 2019.
2. Supervise the Board of Directors to deliver on its pre-approved targets.
3. Supervised Audit Committee to coordinate with external audit, internal audit, including its reports.
4. Periodically evaluated performance of the Board of Directors and committees under the Board of Commissioners through regular meetings, to ensure those parties performed duties well and effectively.
5. Approved corporate actions to be executed under the applicable laws and regulations including rights issue, and several asset divestment including divestment of the Company's ownership in a company that owned hospital in Myanmar, penjualan unit dalam First Real Estate Investment Trust.
6. As part of the Transformation Program, the Board of Commissioners, through the Audit Committee, completed a review of the Balance Sheet, in particular asset valuations, provisions and liabilities. As a result, the Company processed some one off adjustments.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS | Training for the Board of Commissioners

JOHN A PRASETIO PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN | Independent President Commissioner

No.	TANGGAL Date	JENIS KEGIATAN Name of Training	TEMPAT Venue	PENYELENGGARA Organizer
1	16-17 September 2019 September 16-17, 2019	Harnessing Frontier Technologies; Redesigning National, Regional and Global Architecture	Hotel Borobudur	CSIS Glogal
2	3 Desember 2019 December 3, 2019	Advancing Sustainable Financing through Capital Markets and Insurance Growth Conference	Jakarta	SDIP
3	3 Desember 2019 December 3, 2019	Indonesia in the Midst of World Trade Uncertainty	Jakarta	

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Pengangkatan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners' Criteria

Appointment of Independent Commissioners shall follow the below criteria:

- a. Not a person who works for the Company or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's business activities within the last 6 (six) months, unless for reappointment as an

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang usaha utama Perseroan; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK No. 33/POJK.04/2014. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Kepala Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan audit berikutnya.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Aspek Independensi	John A. Prasetyo	Anangga W. Roosdiono	Independency Aspects
Bukan orang yang bekerja atau memiliki otoritas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktivitas PT Lippo Karawaci Tbk dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat, kecuali untuk penunjukan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya;	✓	✓	Not a person who works for the Company or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise over the Company's business activities within the last 6 (six) months prior to the appointment, unless for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period;
Tidak memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, saham PT Lippo Karawaci Tbk;	✓	✓	Does not have any direct or indirect shares of PT Lippo Karawaci Tbk;
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Lippo Karawaci Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun pemegang saham mayoritas Perseroan;	✓	✓	Does not have any affiliation with PT Lippo Karawaci Tbk, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners or the Company's major shareholders;
Tidak memiliki hubungan bisnis, langsung maupun tidak langsung, terkait dengan aktivitas bisnis PT Lippo Karawaci Tbk.	✓	✓	Does not have any direct or indirect business relationship related to business activities of PT Lippo Karawaci Tbk.

Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri properti, dan sektor terkait lainnya serta terus meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan, di antaranya melalui pertemuan, seminar, kunjungan kerja, dan workshop.

Independent Commissioner of the Company for the next period;

- b. Does not have any direct or indirect shares of the Company;
- c. Does not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners or the Company's major shareholders; and
- d. Does not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.

Tenure

Tenure for the Independent Commissioner is at most 2 (two) consecutive periods. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods may be reappointed in the following period insofar the Independent Commissioner makes an independency statement in accordance with Article 25 of POJK 33/2014. If the Independent Commissiner serves as head of Audit Committee, then the Independent Commissioner can only be reappointed as an Audit Committee for 1 (one) upcoming period.

Independency Statement of Independent Commissioners

Training of Board of Commissioners

All Commissioners should keep abreast of the latest updates in economics, finance, property industry, and other related sectors and to continuously improve personal ability to the interest of the Company's improvement by attending seminars, professional visits and workshop.



No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Waktu Period	Tempat Place	Penyelenggara Organizer
1.	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 dan Arah Presiden RI The 2019 Financial Services Industry Annual Meeting and Directions from the President of the Republic of Indonesia	11 Januari 2019 January 11, 2019	Ritz Carlton – Pacific Place, Jakarta	OJK
2.	Cybersecurity in Digital 4.0 Ecosystem	24 Januari 2019 January 24, 2019	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	BEI
3.	Diskusi Ekonomi dan Politik 2019 Economic and Political Discussion 2019	14 Maret 2019 March 14, 2019	Main Hall BEI	KSEI
4.	Seminar Nasional Interaktif Pasar Modal 2019:Perekonomian Indonesia berbasis Digital guna melihat Strategi Investasi di Pasar Modal National Seminar 2019 of Capital Market Interactive: Indonesia's Digital Based Economy to Perceive Investment Strategies in the Capital Market	6 April 2019 April 6, 2019		IDEA
5.	Harnessing Frontier Technologies; Redesigning National, Regional and Global Architecture	16-17 September 2019 September 16-17, 2019	Hotel Borobudur	CSIS Glogal
6.	Advancing Sustainable Financing through Capital Markets and Insurance Growth Conference	3 Desember 2019 December 3, 2019		SDIP
7.	Indonesia in the Midst of World Trade Uncertainty	3 Desember 2019 December 3, 2019		

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dengan memberikan *on-boarding pack* yang berisikan penjelasan visi, misi dan budaya Perseroan, kode etik, struktur organisasi, lini bisnis Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Hal ini bertujuan agar setiap anggota Dewan Komisaris mampu memahami Perseroan lebih baik dalam waktu yang singkat sehingga dapat segera melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, diharapkan melalui program orientasi ini para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal sehingga dapat terjalin kerja sama sebagai suatu tim yang sinergis.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi, di mana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi atas KPI dari Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sekali setiap tahunnya.

Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Orientation Program for New Commissioner

The Company has an organized orientation program for new Commissioners by providing an on-boarding package which contains: the Company's vision, mission and culture, business lines, also charter of the Board of Commissioners. This package will assist new Commissioners to have better understanding in a short period so that they are able to immediately start executing their duties and responsibilities. Meanwhile, this program will aim at building an effective relationship among members of the Board of Commissioners so that each of them can work together properly as a synergic team.

Performance Assessment of Board of Commissioners

The policy of performance assessment of Commissioners and Directors are based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination Committee, in which the Company's Nomination and Remuneration Company will conduct assessment on KPI of the Boards. The assessment is conducted once in every year.

Criteria and Score of Board of Commissioners' Performance Assessment

Here are the criteria for assessing performance of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners shall implement its duties, responsibilities and authorities under the Charter of Board of Commissioners, the Articles of Association, the applicable laws and regulations, and/or resolution of a GMS.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan.
3. Dewan Komisaris menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris memantau dan memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan.
5. Dewan Komisaris memiliki Komite-Komite yang bekerja secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha perusahaan untuk kepentingan dan tujuan, serta mewakili Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

Berdasarkan Piagam Direksi, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kandidat calon anggota Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi selanjutnya menominasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk diangkat sebagai anggota Direksi.

Kriteria Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi, anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

2. The Board of Commissioners shall conduct supervision on management of the Company's business activities.
3. The Board of Commissioners shall organize and attend the Board of Commissioners' regular meetings under the prevailing laws.
4. The Board of Commissioners shall monitor and ensure continuous implementation of GCG.
5. The Board of Commissioners shall establish committees which will work properly and effectively to fulfill the applicable provisions.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the organ of the Company who is fully responsible for managing the company's business for its interests and purposes and represents the Company. The Directors also represent the Company both inside and outside the Court, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable regulations.

Legal Reference

According to the Charter of Board of Directors, a member of the Board of Directors shall be appointed and discharged by GMS. Recommendation to GMS regarding appointment, termination and/or replacement of members of the Board of Directors shall consider recommendation from Nomination and Remuneration Committee.

The procedures of appointment of member of the Board of Directors as follows:

1. Remuneration and Nomination Committee provided the recommendation of candidate of member of the Board of Directors.
2. Furthermore, Remuneration and Nomination Committee provided the candidate member of the Board of Directors to be appointed by the GMS.

Board of Directors Criteria

According to the Articles of Association, members of the Board of Directors shall meet the following general requirements:

1. Have a good character, moral and integrity;
2. Proficient in conducting legal acts;
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during term of office:
 - a. Not been declared bankrupt;
 - b. Not been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners that is declared guilty causing a company to be declared bankrupt;
- c. Not been convicted because of crimes that harmed state's finances and/or is related with financial sector;



- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

- Not been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners that while in the term of duty:
 - Did not hold an AGM;
 - Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners is not accepted by GMS or do not give any accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - Causing a licensed company which has an agreement, or registered to OJK not to fulfill the requirement to submit Annual Report and/or financial report to the OJK.
- Have a commitment to follow the regulations; and
- Have knowledge and/or expertise in the sectors needed by the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Ruang Lingkup Tugas	Duties and Responsibilities
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur President Director	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi rencana korporasi dan Unit Bisnis, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan, dan budaya Perseroan yang ditetapkan Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan, pelaksanaan tugas operasional khususnya di bidang audit internal, komunikasi dan kesekretariatan Perseroan, serta proses manajemen risiko Bertanggung jawab secara keseluruhan atas tugas dan wewenang Direksi, di mana salah satunya adalah untuk menyelaraskan seluruh gagasan dan inisiatif internal Perseroan serta memastikan terjadinya peningkatan kinerja Perseroan dan tercapainya sasaran usaha Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu oleh Dewan Komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> Coordinates, directs, controls, oversees and evaluates the plans of corporates and Business Units to ensure compliance with the Company's vision, mission, strategy, policy, and culture Coordinates the Company's management process, implementation of operational duties especially internal audit, communication and secretarial of the Company, and risk management process Responsible for the entire duties and authorities of the Board of Directors, including to align internal ideas and initiatives of the Company and to ensure improvement of the performance and in achieving business goals of the Company Convenes and leads the Board of Directors Meeting periodically according to the decree of the Board of Directors or other meetings if deemed necessary by the Board of Commissioners.
John Riady	Direktur/ Chief Executive Officer Director/ Chief Executive Officer	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan strategi dan mengarahkan seluruh kebijakan agar sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan Mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak baik bagi sustainabilitas Perseroan berdasarkan hasil analisis data dan fakta demi meningkatkan kompetensi utama dan keunggulan kompetitif Preseroan Memimpin fungsi-fungsi penting Perseroan termasuk perencanaan, governance, hubungan investor dan project management office. memimpin manajemen untuk focus dalam mencapai tujuan rencana transformasi dan meningkatkan implementasi good governance dalam proses perencanaan maupun eksekusi rencana kerja dan proses pengambilan keputusan. Menentukan strategi untuk ekspansi, seperti investasi, akuisisi, aksi korporasi, dan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Set strategies and assigns all policies that have been set by the Company Makes strategic decisions to positively impact the Company's sustainability based on the analysis of facts and data to increase the Company's main competency and competitive edge lead the key functions including planning, governance, investor relations and project management office. lead the management to focus in achieving the objectives of the transformation plan and to aim for a higher level of implementing good corporate governance from the planning process, execution of plan as well as decision making process. Contributes in activities of expansion, including investment, acquisition, corporate actions, etc

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Nama Name	Jabatan Position	Ruang Lingkup Tugas	Duties and Responsibilities
Surya Tatang	Direktur/ <i>Chief Financial Officer</i> Director/ Chief Financial Officer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang keuangan, anggaran dan pendanaan bagi Perseroan 2. Merencanakan, mencari dan memastikan ketersediaan dana untuk pengembangan Perseroan sesuai dengan rencana strategis Perseroan 3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi unit kerja dan perusahaan anak yang berada di bidang Finance & Treasury 4. Mengontrol, koordinasi dan evaluasi asset management. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plans, coordinates, directs, controls, supervises, and evaluates operational tasks for aspects including finance, insurance, budget and funding of the Company 2. Plans, collects, and ensures funding for the development of the Company according to the strategic plan of the Company 3. Coordinates and evaluates business units and subsidiaries under Finance & Treasury 4. Controls, coordinates and evaluates the Company's asset management
Marshal Martinus Tissadharma	Direktur/ <i>Chief Business Operations Officer</i> Director/ Chief Business Operations Officer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas strategi dan pengembangan rencana Perseroan dalam melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan unit usaha demi mencapai tujuan komersial 2. Merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas unit usaha 3. Menetapkan pedoman dan mekanisme kerja seluruh departemen, divisi, maupun Unit Bisnis untuk terus dikembangkan dan dievaluasi guna kelancaran seluruh operasional Perseroan 4. Melakukan penataan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas guna mengupayakan pencapaian target yang ditetapkan dalam rangka mencapai kemajuan bisnis Perseroan 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional harian dan kinerja para pejabat eksekutif di Unit Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Responsible for strategy and development of the Company's plan related to marketing and trading to encourage growth of business to achieve commercial goals 2. Plans, coordinates, controls, supervises, and evaluates operational tasks to improve efficiencies and productivities of business units 3. Set guidelines and work mechanisms for all departments, divisions, and business units with continuous development and evaluation for the Company's operational sustainability 4. Governs and supervises the entire operational activities of the Company to reach the target set for the Company's development 5. Coordinates, directs, controls, supervises, and evaluates daily operational tasks and the performance of executives of the Business Units
Alwi R. Sjaaf	Direktur/ <i>Chief Development Officer</i> Director/ Chief Development Officer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja serta strategi jangka panjang Perseroan 2. Mengendalikan, mengkoordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional di bidang, pembangunan proyek-proyek, pengembangan, studi kelayakan, dan aktivitas pertumbuhan Perseroan 3. Memberikan putusan sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam bidang Pengembangan Properti 4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup Pengembangan Perseroan 5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan strategi operasional Perseroan, konsolidasi komunikasi dan program-program untuk peningkatan kualitas layanan kepada customer, investor serta daya kompetitif Perseroan di pasar property 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plans, coordinates, directs, supervises, and evaluates the preparation and the implementation of budget and longterm strategy of the Company 2. Controls, coordinates, and evaluates tasks related to project constructions, development, feasibility studies, and growth activities of the Company 3. Produces decisions according to the scope of authority 4. Supervises policy implementation in the scope of the development of the Company 5. Coordinates and directs the establishment of the Company's operational strategy, consolidation of communication and programs to improve the service quality to customers, investors as well as the competitiveness of the Company in the property market



Wewenang Direksi

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya; serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Namun, kewenangan Direksi dibatasi untuk melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ,tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan
 - b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya
 - c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan
 - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain
 - e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain.
2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS:
 - a. Melakukan transaksi material atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di bidang pasar modal
 - b. Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau likuidasi Perseroan.

Authorities of Board of Directors

The Board of Directors has the rights to represent the Company in and out of court regarding any conditions in which bind the Company with other parties and vice versa; and also perform all actions, both regarding the management and ownership. However, the authorities are limited by the following:

1. Require approval of Board of Commissioners to:
 - a. Borrow or lend money on behalf of the Company (excluding to withdraw money from open credits, and for the Company's business activities)
 - b. Purchase/sell or acquire/release the rights on tangible assets of the Company except in conducting business activities.
 - c. Collateralize/guarantee any tangible assets of the Company.
 - d. Conduct or release equity investment in other companies;
 - e. Transfer; release rights or making debt collateral with a value more than 50% of the Company's total net assets in one financial year in one or several single transactions or related to one another.
2. Need approval of GMS:
 - a. To conduct material transaction of Conflict of Interest transaction under capital market regulations.
 - b. Transfer; release rights or making debt collateral with a value more than 50% of the Company's total net assets in one financial year in one or several single transactions or related to one another, except for conducting the Company's business activities.
 - c. To conduct amendment of the Articles of Association.
 - d. To perform merger, consolidation, acquisition, dissolution or liquidation of the Company.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 1 (satu) periode dari terhitung ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Direksi

Berdasarkan Piagam Direksi, pengurusan Perseroan oleh Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota Direktur, yang meliputi seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat) dan seorang Direktur.

Berdasarkan keputusan RUPST pada 5 Juni 2018, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketut Budi Wijaya : Presiden Direktur
- Hendra Sidin : Wakil Presiden Direktur
- Tjokro Libianto : Direktur
- Marshal Martinus : Direktur
- Richard H. Setiadi : Direktur
- Wijaya Subekti : Direktur
- Alwi R. Sjaaf : Direktur Independen

Berdasarkan keputusan RUPST pada 18 April 2019, sejak ditutupnya RUPST tersebut, susunan Direksi Perseroan adalah:

- Ketut Budi Wijaya : Presiden Direktur
- John Riady : Direktur
- Surya Tatang : Direktur
- Marshal Martinus : Direktur
- Alwi R. Sjaaf : Direktur

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai Peraturan OJK No.33/POJK.03/2014, Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tenure

Directors are appointed by the GMS for 1 (one) period started from the close of the GMS until close of third GMS after the appointment date, without limiting the right of the GMS to discharge members at any time. Directors whose tenure has expired may be reappointed by considering provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

Composition of Board of Directors

According to the charter of Board of Directors, the Company shall be managed by the Board of Directors which consists of at least 3 (three) members: a President Director, Vice President Director (if any) and Director.

According to resolution of AGMS dated June 5, 2018 below is the list of composition of the Board of Directors since the closing of the AGMS 2018:

- Ketut Budi Wijaya : President Director
- Hendra Sidin : Vice President Director
- Tjokro Libianto : Director
- Marshal Martinus : Director
- Richard H. Setiadi : Director
- Wijaya Subekti : Director
- Alwi R. Sjaaf : Independent Director

According to resolution of AGMS dated April 18, 2019 below is the composition of the Board of Directors since the closing of the AGMS 2019:

- Ketut Budi Wijaya : President Director
- John Riady : Director
- Surya Tatang : Director
- Marshal Martinus : Director
- Alwi R. Sjaaf : Director

Concurrent Position of the Board of Directors

According to Regulations of the Financial Services Authority (OJK) No.33/POJK.03/2014, Each Director may hold concurrent positions as directors in at most in 1 (one) other public company. This concurrent position can be executed insofar it does not contradict to other regulations.



Apabila anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Direksi tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan dan perusahaan publik lain di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan ini hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat yang berlaku.

If the members of the Company's Board of Directors do not have concurrent position as director in any other companies, then the members are allowed to have concurrent position as commissioners in at most in 4 (four) other listed or public companies. In addition, every member of the Company's Board of Commissioners is allowed to have concurrent position in at most 5 (five) positions in committees in other companies or public companies, where the members also serve as a member of Board of Commissioners or Board of Directors. This concurrent position can only be executed as long as it does not contradict with other prevailing laws and regulations. If there are other laws that regulate other provisions of the concurrent position which are different from OJK regulations, the more stringent regulations apply.

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Perusahaan Lain Position in Other Listed Companies
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur President Director	Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk, Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) President Director of PT Siloam International Hospitals Tbk, Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)
John Riady	Direktur Director	Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk. President Commissioner of PT Siloam International Hospitals Tbk.
Surya Tatang	Direktur Director	Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain Does not have any concurrent position in other companies
Marshal Martinus	Direktur Director	Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain Does not have any concurrent position in other companies
Alwi R. Sjaaf	Direktur Director	Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain Does not have any concurrent position in other companies

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang telah efektif sejak 23 Februari 2016 dan mengacu pada:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Direksi disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya

Charter of Board of Directors

The Company set the charter of Board of Directors effective on February 23, 2016 by referring to:

- Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company
- OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners emiten or Public Company (POJK 33/2014)
- IDX Regulation No. I-A recording the Registration of Shares and Equity also Shares Issued by a Listed Company.
- The Company's Articles of Association

The charter aims to provide guidelines for the Board of Directors in conducting its duties and responsibilities with transparency, full responsibilities, independency and fairness in order to achieve the Company's objectives and

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

Piagam Direksi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2019

Selama 2019, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Direksi mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPST pada 18 April 2019
2. Mengadakan Rapat Direksi.
3. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris.
4. Memastikan agar Perseroan berjalan sesuai dengan praktik GCG.
5. Membuat strategi bisnis dalam pengelolaan Perseroan dan anak-anak perusahaannya.

add value as expected by interested parties. In addition, this Charter will provide a clear relationship among members of the Board of Directors and the Company's other organs so that each party shall perform duties, responsibilities and authorities optimally and effectively.

The charter has been signed by all Directors; therefore, it must be obeyed and implemented by all Directors. In the event of any violation to the Charter, provisions as stipulated in the Articles of Association, Capital Market laws and regulations will apply.

Performance of Duties and Responsibilities of Board of Directors in 2019

In 2019, the Board of Directors' duties and responsibilities covered the following matters:

1. Organized the AGM on April 18, 2019
2. Organized Board of Directors' regular meetings every week in a month.
3. Organized joint meetings with the Board of Commissioners.
4. Ensured the Company's management runs in line with the GCG Practices.
5. Provided business strategy in managing the Company and its subsidiaries.

PELATIHAN DIREKSI | Training for the Board of Directors

KETUT BUDI WIJAYA PRESIDEN DIREKTUR | President Director

No.	TANGGAL Date	JENIS KEGIATAN Name of Training	TEMPAT Venue	PENYELENGGARA Organizer
1	15 Juni 2019 June 15, 2019	LK 2H 2019 Workshop/Planning	Oval room, IKG Lippo Village	PT Lippo Karawaci Tbk
2	11 September 2019 September 11, 2019	10 th Annual SID Directors Conference	Suntec Singapore Convention & Exhibition, Singapore	Singapore Institute of Director (SID)
3	16 September 2019 September 16, 2019	Forum Dialog Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan CEO Korporasi	Begawan Lounge, Radius Prawiro Tower, 3 rd floor, Bank Indonesia, Jakarta	Bank Indonesia
4	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Dialog 100 Ekonomi bersama Wakil Presiden M. Jusuf Kalla	West Java Ballroom, Hotel Westin, Jl. Rasuna Said, Jakarta	Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
5	31 Oktober 2019 October 31, 2019	CEO Networking 2019 dalam rangka peringatan HUT Pasar Modal ke 42	Grand Ballroom the Ritz Carlton, Pacific Place 4 th floor, Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organizations (SRO)
6	28 & 29 November 2019 November 28 & 29, 2019	Siloam Hospitals CEO Forum	Ballroom SHLV 11th floor, Siloam Hospital Lippo Village, Jakarta	Siloam Hospital Lippo Village
7	27 November 2019 November 27, 2019	Seminar Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia XVI 2019	Intercontinental Hotel 6 th floor, Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV, Jakarta	Real Estate Indonesia (REI)



Penilaian Kerja Direksi

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi, di mana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi atas KPI (*Key Performance Indicators*) dari Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sekali setiap tahunnya.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup aspek-aspek berikut:

1. Finansial (45%)
 - a) Persentase pencapaian pendapatan, EBITDA dan efisiensi (perbandingan dengan anggaran).
2. Pelanggan (20%)
 - a. Peningkatan kepuasan pelanggan
 - b. Memastikan parameter untuk mengukur, sistem untuk memantau dan memberi umpan balik berjalan dengan baik.
3. Proses Internal (20%)
 - a. Memperbaiki sistem & proses untuk meningkatkan produktivitas .
 - b. Proses operasional yang baik, seperti hasil audit serta penyelesaian dan tindak lanjutnya .
4. Sumber Daya Manusia (15%)
 - a. Perkembangan & pertumbuhan potensi.
 - b. Partisipasi aktif dalam inisiatif perubahan kultur sebagaimana diarahkan Dewan Komisaris.

Penilaian bagi KPI Direksi

Kinerja Direksi dievaluasi baik secara individual maupun kolektif oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penilaian atas kinerja anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan risalah rapat, presentasi di RUPS, kinerja Perseroan seperti yang disajikan dalam Laporan Tahunan dan kriteria lainnya.

Performance Assessment of Board of Directors

The policy of performance assessment for Directors and Commissioners is based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination Committee, in which the Company's Nomination and Remuneration Company will conduct assessment on KPI of the Boards. The assessment is conducted once in every year.

Assessment Criteria of Performance of Board of Directors

Performance assessment criteria of the Board of Directors includes the aspects described below:

1. Financial (45%)
 - a. Percentage of Revenue Attainment, EBITDA and efficiency (against budget)
2. Customer (20%)
 - a. Improvement in customer satisfaction level
 - b. Ensure the parameter to measure and system to oversee and give feedback are properly run.
3. Internal Process (20%)
 - a. Renew system and process to improve productivity
 - b. A good operational process, such as: audit report and its closure and follow-up
4. Human Resources (15%)
 - a. Potential growth and development
 - b. Actively participated in initiating culture change as approved by the Board of Commissioners.

KPI Assessment of Board of Directors

The performance of the Board of Directors is evaluated individually and collectively by the GMS. This assessment considers meeting resolutions, presentations at GMS, the Company's performance as provided in Annual Report, and other criteria.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Perseroan mendasarkan prosedur remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat 13 Akta No. 28 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) untuk para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam menjalankan fungsinya oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan melalui RUPS, yang akan memberikan persetujuan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen dan jumlah nominal per komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Honorarium;
- c. Incentif dan/atau;
- d. Tunjangan tetap dan/atau variabel

Pada 2019, jumlah kotor remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp4.290.922.413.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi bagi Direksi ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan kompleksitas tanggung jawab dan kinerja Direktur yang bersangkutan.

Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen remunerasi anggota Direksi terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Incentif dan/atau;
- c. Tunjangan tetap dan/atau variabel

REMUNERATION POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration Determination Procedure of Board of Commissioners

The Company's Board of Commissioners remuneration procedure refers to Article 11 para (13) of company Law, Deed No.28 year 2015 which stated salary, honorarium and other allowances (if any) for members of the Board of Commissioners shall be stipulated by the GMS from time to time, and its authorities can be delegated to the Board of Commissioners, under assistance of the Nomination and Remuneration Committee.

The GMS will provide approval in the stipulation of remuneration of the Board of Commissioners, then the GMS will grant authority to the Board of Commissioners to determine total remuneration for each member, with consideration upon the Nomination and Remuneration recommendation.

Remuneration Structure of Board of Commissioners

According to the Articles of Association and charter of the Nomination and Remuneration Committee, component and total amount per remuneration component of Board of Commissioners, consist of:

- a. Salary;
- b. Honorarium;
- c. Incentive and/or;
- d. Fixed and/or variable allowances.

In 2019, the gross amount of the Board of Commissioners' remuneration is Rp4,290,922,413.

Remuneration Determination Procedure of Board of Directors

Nomination and determination procedure of remuneration of the Board of Directors is determined by the Nomination and Remuneration Committee based on complexity level of its responsibilities and performance.

Remuneration Structure of Board of Directors

According to the Articles of Association and charter of the Nomination and Remuneration Committee, component and total amount per remuneration component of the Board of Directors, consist of:

- a. Salary;
- b. Incentive and/or;
- c. Fixed and/or variable allowances



Pada 2019, jumlah kotor remunerasi yang diberikan kepada anggota Direksi adalah sebesar Rp31.064.187.244.

Hubungan antara Remunerasi dan Kinerja Perseroan

Besaran remunerasi anggota Direksi disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi yang dikaitkan dengan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota Direksi; dan
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DENGAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris menentukan jadwal Rapat Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun sebelum memasuki tahun buku tersebut, dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama 2019, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) rapat Dewan Komisaris—1 (satu) rapat sebelum RUPST 18 April 2019 dan 5 (lima) setelah RUPST, dengan frekuensi kehadiran dari masing-masing Komisaris sebagai berikut:

In 2019, the gross amount of the Board of Directors' remuneration is Rp31,064,187,244.

Remuneration vs the Company's Performance

The Board of Directors' remuneration is formulated in accordance to each member's duties, responsibilities and authorities as related to:

1. The applicable remuneration under the Company's business activities and its peers with the same industrial scale;
2. Duties, responsibilities, and authorities of each member of the Board of Directors as related to the Company's achievements and performance;
3. Performance target and actual performance of each member of the Board of Directors; and
4. Allowance balance between fixed and variable.

POLICY AND FREQUENCY MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS WITH BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners Meeting Policy

The Board of Commissioners must organize a meeting at least once every 2 (two) months, except when deemed necessary by the President Commissioner or by at least 2 (two) Commissioners or by resolution of a Board of Directors meeting. The Board of Commissioners is obliged to organize regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months. The Board of Commissioners determines the meeting schedule for a year prior to the next financial year, and can be adjusted if necessary.

Meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner; if the President is absent or unavailable, which does not need to be proven to a third party, then the meeting will be chaired by an individual appointed by and from the members of the Board of Commissioners who is present. The Board of Commissioners meeting is valid and has the right to make enforceable decisions if more than one-half of total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings

In 2019, there were 6 (six) meetings of Board of Commissioners—1 (one) meeting before the AGMS 18 April 2019 and 5 (five) after the AGMS, with attendance frequency of each member, detailed as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

(Sebelum RUPST tanggal 18 April 2019) | (Before GMS April 18, 2019)

Nama Name	28 Februari 2019 February 28, 2019	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Theo L Sambuaga	✓	1	100
Farid Harianto	✓	1	100
Agum Gumelar	-	-	-
Sutiyoso	✓	1	100

(Setelah RUPST tanggal 18 April 2019) | (After GMS April 18, 2019)

Nama Name	23 Mei 2019 Mei 23, 2019	4 Juli 2019 July 4, 2019	25 Juli 2019 July 25, 2019	24 Oktober 2019 October 24, 2019	21 November 2019 November 21, 2019	Total kehadiran Total Attendance	% kehadiran % Attendance
John A Prasetio	✓	✓	✓	✓	✓	5	100
Anangga W Roosdiono	✓	-	✓	✓	✓	4	80
Stephen Riady	✓	✓	✓	-	✓	4	80
George Raymond Zage III	✓	✓	✓	✓	✓	5	100
Kin Chan	✓	-	✓	-	✓	3	60

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Agenda of Board of Commissioners' Meetings

Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants	Agenda Rapat Agenda Meeting
28 February 2019 February 28, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2018 Approval of Financial Statements year 2018
29 April 2019 April 29, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Pencapaian Kuartal I 2019 Financial Performance of Q1 in 2019
25 Juli 2019 July 25, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Pencapaian Semester I 2019 Financial Performance of First Semester in 2019
22 Agustus 2019 August 22, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Laporan perkembangan usaha Perseroan Company business development report
24 Oktober 2019 October 24, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Pencapaian Kuartal III 2019 Financial Performance of Q3 in 2019
21 November 2019 November 21, 2019	BOC dan BOD BOC and BOD	Perencanaan Anggaran Preliminary Budget

Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2019

Perseroan telah mengumumkan jadwal Rapat Dewan Komisaris pada awal tahun buku 2019 guna memudahkan para Komisaris dan Direksi dalam menyesuaikan agenda kerjanya.

Kebijakan Rapat Direksi

Direksi Perseroan mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat dapat dilakukan setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih

Schedule of 2019 Board of Commissioners' Meetings

The Company has announced the schedule for the Board of Commissioners Meetings at the beginning of the fiscal year 2019 to facilitate the Commissioners and Directors adjusting their work agendas.

Board of Directors Meetings Policy

The Board of Directors shall organize regular meetings once every month. A meeting may be held at any time by request of one or more Directors, by written request from one or more member(s) of the Board of Commissioners, or by written from one or more shareholders who altogether represent 1/10 (one-tenth) or more of the total of all the voting shares. The Board of Directors also shall organize a



dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang 2019, Rapat Direksi secara rutin sesuai dengan jadwal rapat yang sudah disepakati sejak awal tahun buku berjalan. Jika terdapat pembatalan rapat dari yang telah dijadwalkan, Sekretaris Perusahaan akan memberitahukan masing-masing anggota Direksi 1 hari sebelumnya. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 20 kali rapat Direksi dengan frekuensi kehadiran dari masing-masing Direktur, sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Total Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Ketut Budi Wijaya	20	18	90%
John Riady**	11	11	100%
Marshall Martinus	20	18	90%
Hendra Sidin*	9	9	100%
Tjokro Libianto*	9	5	56%
Richard Setiadi*	9	9	100%
Wijaya Subekti*	9	9	100%
Alwi Sjaaf	20	15	75%
Surya Tatang**	11	11	100%

*) Beliau efektif menjabat di Perseroan selama tahun 2019, mulai 1 Januari hingga 18 April 2019

He effectively served in the Company in year 2019, from January 1 until April 18, 2019

**) Beliau diangkat sebagai Direktur dalam RUPST 18 April 2019 | He was appointed as Director at the AGM on April 18, 2019

Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participant	Agenda Rapat Agenda
8 Januari 2019 January 8, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Tjokro Libianto Marshall Martinus Alwi R. Sjaaf Wijaya Subekti Richard H. Setiadi	<ol style="list-style-type: none"> Business Plan. Public Expose 2019 Updates on the internal restructuring Projects Others
15 Januari 2019 January 15, 2019	Hendra Sidin Tjokro Libianto Marshall Martinus Richard H. Setiadi Wijaya Subekti	<ol style="list-style-type: none"> Business Plan Audit of Financial Performance'18 Updates on Divestments Organization Governance Hospitals update Projects update Others
22 Januari 2019 January 22, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Tjokro Libianto Marshall Martinus Richard H. Setiadi Wijaya Subekti	<ol style="list-style-type: none"> Business Plan Audit of Financial Performance'18 Updates on Divestment Organization and HR Projects update IR Update Issues

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participant	Agenda Rapat Agenda
29 Januari 2019 January 29, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Tjokro Libianto Marshall Martinus Richard Setiadi Alwi R. Sjaaf Wijaya Subekti	1. LK Roadmap 2. Organization 3. Budget 2019 4. Others
06 Februari 2019 February 6, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Richard Setiadi Wijaya Subekti Alwi R. Sjaaf	1. Projects 2. Sales 3. Operation 4. IT System 5. Organization 6. Others
12 Februari 2019 February 12, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Marshall Martinus Richard Setiadi Wijaya Subekti	1. Marketing and Sales 2. Projects 3. Operation 4. Finance 5. IT System 6. Organization 7. Others
19 Februari 2019 February 19, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Tjokro Libianto Marshall Martinus Richard Setiadi Alwi R. Sjaaf Wijaya Subekti	1. Sales 2. Operations 3. Projects 4. Finance 5. IT System 6. Others
05 Maret 2019 March 5, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Marshall Martinus Richard Setiadi Wijaya Subekti Alwi R. Sjaaf	1. Sales 2. Operations 3. Projects 4. Finance 5. HR 6. Others
04 April 2019 April 4, 2019	Ketut Budi Wijaya Hendra Sidin Marshall Martinus Richard Setiadi Wijaya Subekti Alwi R. Sjaaf	1. Sales Update 2. Projects 3. Operation 4. IT and System 5. Finance 6. HR 7. Others
23 April 2019 April 23, 2019	John Riady Alwi R. Sjaaf Marshall Martinus Surya Tatang	1. Sales Update 2. Projects 3. Others
07 Mei 2019 May 7, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Alwi R. Sjaaf Marshall Martinus Surya Tatang	1. Sales Update 2. Projects 3. Finance Update 4. Others
21 Mei 2019 May 21, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus Alwi R. Sjaaf	1. Sales Update 2. Finance Update 3. Others
18 Juni 2019 June 18, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus Alwi R. Sjaaf	1. Project Update 2. Finance Update 3. Others
28 Juni 2019 June 28, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang	1. Budget 2019 Discussion



Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participant	Agenda Rapat Agenda
02 Juli 2019 July 2, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Marshall Martinus Surya Tatang	1. Sales Update 2. Budget 2019 3. Right Issue Update 4. Projects Update
23 Juli 2019 July 23, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus Alwi R. Sjaaf	1. Sales Update 2. Projects Update 3. Operation 4. Right Issue Update 5. Others
13 Agustus 2019 August 13, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus	1. Sales Update 2. Finance Update 3. Others
14 Oktober 2019 October 14, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus	1. 3Q 2019 Highlights
15 November 2019 November 15, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus	1. Preliminary Budget
11 Desember 2019 December 11, 2019	Ketut Budi Wijaya John Riady Surya Tatang Marshall Martinus	1. Final Budget

Jadwal Rapat Direksi 2020

Rapat Direksi pada 2020 dijadwalkan untuk diadakan setiap bulan sekali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama 2019, Direksi mengadakan 6 (enam) kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

2020 Meeting Schedule of Board of Directors

The Board of Directors' meeting for 2020 has been scheduled once a month.

Frequency and Attendance of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

In 2019, the Board of Directors conducted 6 (six) joint meetings with the Board of Commissioners, with detail of frequency and attendance as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Total Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Theo L Sambuaga*	Presiden Komisaris President Commissioner	1	1	100
Farid Harianto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	100
Agum Gumelar*	Komisaris Commissioner	1	1	100
Sutiyoso*	Komisaris Commissioner	1	1	100
John A Prasetio	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	5	5	100
Anangga W Roosdiono	Komisaris Commissioner	5	4	80
Stephen Riady	Komisaris Commissioner	5	4	80
George Raymond Zage III	Komisaris Commissioner	5	5	100
Kin Chan	Komisaris Commissioner	5	3	60

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Total Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Direksi Board of Directors				
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur President Director	19	17	89,5
John Riady **)	Direktur Director	8	7	87,5
Marshal Martinus	Direktur Director	19	17	89,5
Hendra Sidin *	Direktur Director	11	11	100
Tjokro Libianto *	Direktur Director	11	5	45,5
Richard Setiadi *	Direktur Director	11	11	100
Wijaya Subekti *	Direktur Director	11	10	90,1
Alwi R. Sjaaf	Direktur Independen Independent Director	19	15	78,9
Surya Tatang **)	Direktur Director	8	7	87,5

*) Beliau efektif menjabat di Perseroan di tahun 2019, dari 1 Januari 2019 hingga 18 April 2019

He effectively served as Director in year 2019, from January 1 2019 until April 18, 2019

**) Efektif menjabat di Perseroan sejak 18 April 2019 | Effectively served as Director as of April 18, 2019

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Directors and Commissioners Joint Meetings
Agenda

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Agenda
28 February 2019 February 28, 2019	Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2018 Approval of Financial Statements Year 2018
29 April 2019 April 29, 2019	Pencapaian Kuartal I 2019 Financial Performance of Q1 in 2019
25 Juli 2019 July 25, 2019	Pencapaian Semester I 2019 Financial Performance of First Semester in 2019
22 Agustus 2019 August 22, 2019	Laporan Perkembangan Usaha Perseroan Company Business Development Report
24 Oktober 2019 October 24, 2019	Pencapaian Kuartal III 2019 Financial Performance of Q3 in 2019
21 November 2019 November 21, 2019	Perencanaan Anggaran Preliminary Budget

KEBIJAKAN ATAS KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berimbang karena keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Perseroan; dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi; mempertimbangkan kompetensi kandidat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIVERSITY POLICY OF COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The diversity composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors will stimulate more objective and balanced decision as those are taken by considering various perspectives.

The Company has not yet prepared and set such written provisions regarding the diversity composition of the Boards in selecting and appointing members of the Boards, the Company is still considering diversity factors and competency of the candidates by referring to the applicable laws and regulations.



Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hingga 31 Desember 2019, tercatat sebagai berikut:

The diversity of composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2019, is listed as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Nama Name	Posisi Position	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Experience	Keahlian Expertise
John A Prasetio	Presiden Komisaris President Commissioner	69	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	Duta Besar untuk Korea Selatan, Anggota KNKG, Anggota Dewan Penasehat KADIN Indonesia, Direksi/ Komisaris berbagai perusahaan Multinasional & Nasional Ambassador to South Korea, KNKG Member, KADIN Indonesia Advisory Board Member, Directors/Commissioners of various Multinational & National Companies	Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Organisasi/ Birokrat Economy, Management, Business and Organization
Anangga W Roosdiono	Komisaris Independen Commissioner Independent	75	Sarjana Hukum, Magister Hukum Bachelor of Laws, Master of Law	Wakil Ketua Institute Arbitrasi Indonesia, Anggota KADIN Indonesia, Direksi/ Komisaris perusahaan nasional Deputy Chairperson of the Indonesian Arbitrator Institute, Member of KADIN Indonesia, Directors/Commissioners of the national	Hukum, Bisnis, dan Manajemen Law, Business and Management
Stephen Riady	Komisaris Commissioner	60	Sarjana & Magister Administrasi Bisnis Bachelor & Masters in Business Administration	Direksi/Komisaris perusahaan multinasional dan nasional Directors/Commissioners of multinational companies and national	Administrasi Bisnis Business Administration
George Raymond Zage III	Komisaris Commissioner	50	Sarjana Sains, CPA Bachelor of Science, CPA	Direksi/Komisaris perusahaan multinasional dan nasional Directors/Commissioners of multinational and national companies	Finance dan Investasi Finance and Investment
Kin Chan	Komisaris Commissioner	54	Sarjana dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor and Masters in Business Administration	Direksi/Komisaris perusahaan multinasional dan nasional Directors/Commissioners of multinational companies and national	Administrasi Bisnis Business Administration

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Direksi | Board of Directors

Nama Name	Posisi Position	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Experience	Keahlian Expertise
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur President Director	65	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	Komisaris PT Jababeka Tbk, Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk dan juga PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk Commissioners of PT Jababeka Tbk, President Commissioner of PT Siloam International Hospitals Tbk and also PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Ekonomi dan Akuntansi Economics and Accounting
John Riady	Direktur Director	34	Sarjana Filosafat Politik dan Ekonomi, Magister Administrasi Bisnis, Juris Doctor Bachelor of Philosophy in Politics and Economics, Masters in Business Administration, Juris Doctor	Editor, Dosen, Direktur/Komisaris perusahaan multinasional dan nasional Editor, Lecturer, Director/Commissioner of multinational and national companies	Politik, Ekonomi, Administrasi Bisnis, Pendidikan, Media Politics, Economics, Business Administration, Education, Media
Marshal Martinus	Direktur Director	45	Sarjana Matematika Komputasi Bachelor of Computational Mathematics	Wakil Direktur Management Property (2013) sebelum akhirnya menjadi Direktur Eksekutif. Tahun 2017, menjabat sebagai CEO Lippo Malls Indonesia. Deputy Director of Property Management (2013) before finally becoming Executive Director (2013). In 2017, he served as CEO of Lippo Malls Indonesia.	Hukum, Bisnis, dan Manajemen Law, Business and Management
Alwi R. Sjaaf	Direktur Independen Independent Director	59	Arsitektur Architecture	Direktur in PT Citatah Tbk, President Director in PT Reformed Cultural Center Director in PT Citatah Tbk, President Director in PT Reformed Cultural Center	Arsitektur Architecture
Surya Tatang	Direktur Director	43	Sarjana Sains Bachelor of Science	Direktur/Komisaris perusahaan multinasional dan nasional Director/Commissioner of multinational and national companies	Finance, Administrasi Finance, Administration



HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lainnya, serta Pemegang Saham Pengendali

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi maupun keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

AFFILIATE RELATION

Affiliate Relations among members of Board of Commissioners with the Board of Directors, and other members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders

The majority of members of the Board of Commissioners do not have any affiliations or financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Nama Name	Jabatan Positon	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with						Hubungan Financial Dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
John A Prasetyo	Presiden Komisaris President Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anangga W Roosdiono	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Stephen Riady	Komisaris Commissioner	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
George Raymond Zage III	Komisaris Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kin Chan	Komisaris Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lainnya, serta Pemegang Saham

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi maupun keuangan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliate Relations among members of Board of Directors with the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and Shareholders

The majority of members of the Board of Directors do not have affiliation or financial relationships with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Nama Name	Jabatan Positon	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with						Hubungan Financial Dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ketut Budiwijaya	Presiden Direktur President Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
John Riady	Direktur Director	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	
Marshal Martinus	Direktur Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alwi Sjaaf	Direktur Independen Director Independent	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Surya Tatang	Direktur Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya, yakni mengawasi jalannya Perseroan khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perseroan. Fungsi utama Komite Audit adalah untuk memantau, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, dan pelaporan keuangan, melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi, kualifikasi dan independensi dari auditor Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Komite Audit Perseroan dibentuk menurut Surat Keputusan Dewan Komisaris No.178/SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tertanggal 18 April 2019. Selain itu Komite Audit terbentuk sesuai dengan dasar-dasar hukum:

- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- POJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is established by and responsible directly to the Board of Commissioners in order to assist the Board in conducting its duties and functions to supervise the Company's management, especially quality of the Company's Financial Statements. The main function of the Audit Committee is to monitor, evaluate audit plans and implementation; as well as follow up the audit results in assessing the adequacy of internal control and financial statements; supervise implementation of accounting principles, qualification and independency of the Company's auditors, and compliance to the applicable laws and regulations.

Policy and Legal References

The Company's Audit Committee was established under the Board of Commissioners Decision No.178/SPDEKOM/ LK-COS/IV/2019 dated April 18, 2019. Moreover, the Audit Committee was also established under other legal references as follows:

- IDX Board Decision No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 regarding Law Number I-A on Registration of Shares and Equity Securities in addition to Shares Issued by the Listed Company.
- OJK Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.



Profil Ketua dan Anggota Komite Audit hingga 31 Desember 2019

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit.

Profile of Audit Committee members as of December 31, 2019

The Audit Committee shall at least consist of 3 (three) members which include Independent Commissioner and outside party of the Company. A member of Audit Committee who is an Independent Commissioner is appointed as Chairman of the Audit Committee.

Nama Name	John A. Prasetio	Peter John Chambers	Lim Kwang Tak	Raymond Liu
Jabatan Position	Ketua Chairman	Anggota Member	Anggota Member	Anggota Member
Periode Jabatan Position Period	2019-2021	2019-2021	2019-2021	2019-2021
Usia & Kewarganegaraan Age & Citizenship	WNI, 69 tahun year	WNA, 64 tahun year	WNI, 62 tahun year	WNI, 61 tahun year
Riwayat Pendidikan Educational background	<p>Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1973</p> <p>Bachelor of Economics, University of Indonesia</p>	<p>Sarjana Studi Bisnis (Finance and Accounting) dari The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia, dan juga lulusan diploma Chartered Accounting (Professional Audit), Australia.</p> <p>Bachelor of Business Studies (Finance and Accounting) from The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia, and also a graduate of the Chartered Accounting (Professional Audit) diploma, Australia.</p>	<p>Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia. Bachelor of Economics, University of Indonesia</p>	<p>PhD di bidang Kimia dari North Carolina State University, Master di bidang Kimia dari West Virginia Institute of Technology, Sarjana Kimia dari National Taiwan University</p> <p>PhD in Chemistry from North Carolina State University, Masters in Chemistry from West Virginia Institute of Technology, Bachelor of Chemistry from National Taiwan University</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Nama Name	John A. Prasetio	Peter John Chambers	Lim Kwang Tak	Raymond Liu
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019; POJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> <p>Based on the Decree of the Board of Commissioners No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019; POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work. Decision of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 Regarding Regulation No. I-A Listing Equity-Type Shares and Securities other than Shares Issued by Listed Companies</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.318/ SPDEKOM/ LK-COS/ VII/2018 tanggal 12 Juni 2019; POJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> <p>Based on the Decree of the Board of Commissioners No.318/ SPDEKOM/ LK-COS/ VII/2018 tanggal 12 Juni 2019; POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work. Decision of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 Regarding Regulation No. I-A Listing Equity-Type Shares and Securities other than Shares Issued by Listed Companies.</p>	<p>Diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019; Keputusan Ketua Bapepam No. KEP/643/ BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. KEP-00001/ BEI/ 01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> <p>Based on the Decree of the Board of Commissioners No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019 ; Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP/643/BL/2012 dated 7 December 2012 and the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange (IDX) No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 Regarding Regulation No. I-A Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by Listed Company.</p>	<p>Diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019; POJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> <p>Based on the Decree of the Board of Commissioners No.178/ SPDEKOM/ LK-COS/ IV/2019 tanggal 18 April 2019 ; Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP/643/BL/2012 dated 7 December 2012 and the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange (IDX) No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 Regarding Regulation No. I-A Listing Equity-Type Shares and Securities other than Shares Issued by Listed Companies.</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<p>Presiden Komisaris Independen Bursa Efek Indonesia, Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk.</p> <p>President Independent Commissioner of the Indonesia Stock Exchange, Independent Commissioner of PT Global Mediacom Tbk.</p>	<p>Advisor dan Komite Audit, Remunerasi, dan Risiko di Farallon Capital, PT Agincourt, PT XL Axiata, Indomines Pty Ltd, Sapex Ltd dan Axiata Malaysia Digital Services. Selain itu, beliau juga menjadi Ketua Komite Keamanan Siber dan anggota Komite Risiko Axiata.</p> <p>Advisor and Audit Committee, Remuneration and Risk at Farallon Capital, PT Agincourt, PT XL Axiata, Indomines Pty Ltd, Sapex Ltd and Axiata Malaysia Digital Services. In addition, he also serves as Chair of the Cyber Security Committee and a member of the Axiata Risk Committee.</p>	<p>Komisaris PT Trisula Textile Industries, Komisaris PT Mido Indonesia, Komisaris PT Trisula Internasional Tbk, Komisaris dan Senior Advisor PT Paramount Enterprise, anggota Komite Audit PT Multipolar Tbk.</p> <p>Commissioner of PT Trisula Textile Industries, Commissioner of PT Mido Indonesia, Commissioner of PT Trisula Internasional Tbk, Commissioner and Senior Advisor of PT Paramount Enterprise, a member of the Audit Committee of PT Multipolar Tbk.</p>	



Nama Name	John A. Prasetyo	Peter John Chambers	Lim Kwang Tak	Raymond Liu
Riwayat Pekerjaan Job Experiences	<p>Lihat profil Dewan Komisaris halaman 80</p> <p>Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun melakukan supervisi keuangan, telekomunikasi, dan investasi. Selama periode tersebut, ia telah menduduki sejumlah posisi penting di berbagai perusahaan termasuk Coopers and Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata dan Farallon Capital (sebagai penasihat).</p> <p>He has over 25 years of experience in financial, telecommunications and investment supervision. During this period, he held a number of important positions in various companies including Coopers and Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata and Farallon Capital (as advisor</p>	<p>Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun melakukan supervisi keuangan, telekomunikasi, dan investasi. Selama periode tersebut, ia telah menduduki sejumlah posisi penting di berbagai perusahaan termasuk Coopers and Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata dan Farallon Capital (sebagai penasihat).</p> <p>He has over 25 years of experience in financial, telecommunications and investment supervision. During this period, he held a number of important positions in various companies including Coopers and Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata and Farallon Capital (as advisor</p>	<p>Dia memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Touche Ross Management Consultants Darmawan & Co. Kemudian pada tahun 1991 beliau telah menjabat beberapa posisi Direktur atau Komisaris di antaranya: Direktur PT Trimex Sarana Trisula, Direktur PT Southern Cross Textile Industry, Direktur Trisula Corporation Pte Ltd, Komisaris PT Trisula Garmindo Manufacturing, Komisaris Utama PT Trimex Sarana Garment Industry, Direktur Utama PT Trisula Textile Industries, Direktur PT Trisula Insan Tiara, Direktur Utama PT Trimex Sarana Garment Industry. Pada tahun 2013, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit PT Siloam Hospitals International Tbk.</p> <p>He began his career at the Public Accounting Firm and Consultant Touche Ross Management Consultants Darmawan & Co. Then in 1991 he held several Director or Commissioner positions including: Director of PT Trimex Sarana Trisula, Director of PT Southern Cross Textile Industry, Director Trisula Corporation Pte Ltd, Commissioner of PT Trisula Garmindo Manufacturing, President Commissioner of PT Trimex Sarana Garment Industry, President Director of PT Trisula Textile Industries, Director of PT Trisula Insan Tiara, President Director of PT Trimex Sarana Garment Industry. In 2013, he was appointed as a Member of the Audit Committee of PT Siloam Hospitals International Tbk.</p>	<p>Dia mengawali karir profesionalnya sebagai Senior Research Scientist, yang berfokus pada penelitian pengolahan bubur kertas di International Paper, New York, USA (1992 -1996). Dia kemudian bergabung dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper sebagai R&D Manager (1996), sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Penjualan (1997) dan Komisaris (2005). Dia juga pernah masuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Tjiwi Kimia (2005 -2010). Dia juga pernah menjadi Chief Executive yang berpengalaman mengelola manajemen lebih dari 9 pabrik pulp di AS, Kanada, dan Prancis.</p> <p>He began his professional career as a Senior Research Scientist, focusing on pulp processing research at International Paper, New York, USA (1992-1996). He then joined PT Indah Kiat Pulp & Paper as R&D Manager (1996), before finally being appointed as Sales Director (1997) and Commissioner (2005). He has also been on the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Tjiwi Kimia (2005-2010). He has also been the Chief Executive with experience managing the management of more than 9 pulp mills in the US, Canada and France</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkat, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dimuat dalam situs Bursa Efek dan/atau situs Perseroan.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi kriteria independensi serta persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi atau non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit;
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada Pihak Lain;
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
6. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

Tenure

The tenure of members of the Audit Committee shall not be longer than the tenure of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and members may be reelected only for 1 (one) period. Independent Commissioners who serve on the Audit Committee can only be re-appointed on the Audit Committee for 1 (one) period of the next term of office of the Audit Committee. Members of Audit Committee are nominated and terminated by the Board of Commissioners, and this has to be reported to OJK and published on the IDX website and/or the Company's website.

Audit Committee Independence

All members of the Audit Committee have been appointed under the independency criteria as follows:

1. Were not insiders of public accountant firm, law firm, or other parties that provided audit, non-audit, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months before appointment by the Board of Commissioners;
2. Did not have authority and responsibility to lead, plan, or control Company activities within the last 6 (six) months before appointment by the Board of Commissioners, excluding serving as Independent Commissioner;
3. Do not own any shares, directly or indirectly, in the Company. If members have received shares as a result of a legal event, they must transfer the shares to another person no later than 6 (six) months after obtaining those shares;
4. Do not have any affiliate/family relationship by marriage and descent to the second degree, horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or the Company's majority shareholders;
5. Do not have direct or indirect business relationship with the Company's business activities;
6. Have high integrity, capability, knowledge and experience with adequate, and the ability to communicate effectively;



7. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari Anggota Komite Audit yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit;
10. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa ata kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni dalam melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan untuk memenuhi tujuan dan fungsinya dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk hal-hal yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan fee akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

7. At least one of the members must have education background about Accountancy and Finance;
8. Have to comply to the Audit Committee's code of conduct as stipulated by the Company;
9. Willingly to improve their competency through education, training, and seminar that support the functions as members of the Audit Committee;
10. Are obliged to have knowledge to analyze and interpret the Company's financial statements and business activities, also audit process, risk management, and regulations and laws in capital market or any other sectors.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee acts independently in conducting its duties and responsibilities, in which coordinating all activities to achieve the objectives and functions in providing advice to the Board of Commissioners on Financial Statement or other issues stated by the Board of Directors. Moreover, the Audit Committee also has other duties and responsibilities as mentioned below, to:

- a. Review the Company's financial information that will be released, such as: financial statements, financial projection, and other financial information;
- b. Review the Company's compliance to capital market laws and regulation and other regulations that are related and in line with the Company's activities;
- c. Provide independent opinion if there is disagreement between management and public accountant on the services given;
- d. Review independency, objectivity, scope of work, and fee of public accountant and provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment or dismissal of the external auditor;
- e. Review the audit implementation of internal auditor and supervise follow up actions by the Board of Directors on fact findings of internal audit;

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan sekaligus tidak menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan.
- f. Review on the implementation activities of risk management by the Board of Directors as long as the risk management committee under the Board of Commissioners has not yet been established;
- g. Review and report to the Commissioners regarding any complaint related to accounting process and financial statement reporting of the Company;
- h. Review and provide advice to the Board of Commissioners related to possibilities of conflicts of interest of the Company;
- i. Keep confidentiality of documents, data, and information of the Company as well as not using the information to achieve personal interest or in any ways that violate the law or are detrimental to the Company.

Rapat Komite Audit

Dengan berdasar pada Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit harus diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.
- 3. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
- 4. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/telekonferensi.
- 5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.

Audit Committee Meetings

In accordance with the Audit Committee Charter, the Committee's meetings shall be organized with provisions as follows:

- 1. The Audit Committee shall organize regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months;
- 2. Notice for convening the Audit Committee meeting must be submitted at least 3 (three) days before the meeting is held, except for meetings that have been scheduled since the previous meeting;
- 3. Audit Committee meeting notification can be made directly or by using the mail, e-mail, facsimile or telephone;
- 4. Audit Committee meetings can be implemented through formal meetings or by video/teleconference;
- 5. Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee. If the Chairman is unable to attend, the meeting shall be led by a member of the Audit Committee appointed at the meeting;



6. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selama 2019, Komite Audit Perseroan telah mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

6. Audit Committee meetings can only be held if attended by more than 1/2 (one half) the number of members of the Audit Committee;
7. Audit Committee meeting resolutions are taken based on consultation and consensus;
8. Each meeting of the Audit Committee shall be recorded in minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions, which is signed by all members of the Audit Committee present and is delivered to the Board of Commissioners.

In 2019, the Audit Committee organized 10 (ten) meetings, with frequency and member attendance detailed as follows:

Rapat Internal | Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Internal Total Meetings	Kehadiran Attendance
John A. Prasetio **	Ketua Chairman	9	100%
Peter John Chambers ***	Anggota Member	7	78%
Lim Kwang Tak	Anggota Member	9	90%
Raymond Liu	Anggota Member	9	90%
Farid Harianto*	Ketua Chairman	1	100%

* Bapak Farid Hariantto di tahun 2019 menjabat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 18 April 2019
Mr. Farid Hariantto in year 2019 served from January 1 until April 18, 2019

** Beliau mulai menjabat sejak tanggal 18 April 2019
He took office since April 18, 2019

*** Beliau mulai menjabat sejak 4 Juli 2019
He took office since July 4, 2019

Piagam Komite Audit

Dengan tujuan kepatuhan pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan dan menjaga lingkup kinerja Komite Audit ini, maka Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Audit yang efektif diberlakukan sejak 26 Februari 2016. Piagam tersebut telah diunggah pada situs resmi Perseroan, dan dapat ditinjau secara berkala serta diperbarui bila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Audit Committee Charter

In terms of compliance to GCG principles, also to maintain the Audit Committee's performance, therefore, the Company prepared and set a Charter of the Audit Committee effectively published on February 26, 2016. The Charter has been published on the Company's official website, so it can be reviewed periodically, and updated when it is deemed necessary, refined by considering the applicable provisions and regulations, with changes to be approved by the Board of Commissioners.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku

Pada 2019, Komite Audit telah menjalankan fungsinya untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, serta POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 13/2017"), maka Komite Audit Perseroan telah menyampaikan Laporan Komite Audit atas kegiatannya yang diselenggarakan selama tahun 2019, sebagaimana terangkum dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Dengan mengacu pada POJK No. 13/2017 Pasal 13 Komite Audit melakukan penelaahan antara lain atas independensi dan objektivitas Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, ruang lingkup audit, metodologi audit dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan Saptoto Agustomo dan KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan (KAP AAJMR) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 (Laporan Keuangan Q1 2019) bersama Internal Auditor dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menerima dan mengumumkan Laporan Keuangan Q1 2019.
3. Melakukan pembahasan dengan external auditor mengenai ruang lingkup, temuan-temuan dan hasil penelaahan auditor eksternal atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tengah Tahunan Perseroan dan Entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (Laporan Keuangan 1H 2019) dan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2019 (Laporan Keuangan Q3 2019).

Audit Committee Activities in the Financial Year

In 2019, the Audit Committee executed its duties well to assist and facilitate the Board of Commissioners in executing its supervisory tasks and functions on financial information, internal control, and assessment effectiveness for external and internal auditors, and compliance on the applicable laws and regulations.

To comply with the requirements under OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee and IDX Board of Directors Decision No. KEP-305/BEJ/07/2004 dated July 19, 2004 regarding Recording of Equity-Based Shares and Stocks in addition Stocks issued by Registered Companies, and POJK No.13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities (POJK No. 13/2017'), the Company's Audit Committee has published the Audit Committee Reports for its activities conducted in 2019, as summarized below:

1. With reference to POJK No. 13/2017 Article 13 The Audit Committee reviewed the independence and objectivity of the Public Accountant, the Public Accounting Firm, the scope of the audit, the audit methodology and provided recommendations to the Board of Commissioners in the appointment of Saptoto Agustomo and Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan (KAP AAJMR) as the Company's Public Accountant and Public Accounting Firms that would audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the year ended December 31, 2019.
2. Reviewed the Interim Financial Statements for the 3 (three) months ending March 31, 2019 (Q1 2019 Financial Report) with the Internal Auditor and provided recommendations to the Company's Board of Commissioners to accept and announce Q1 2019 Financial Statements.
3. Discussed with external auditors regarding the scope, key audit findings and results of external auditors work relating to the limited review of the Company's Consolidated Financial Statements for 6 (six) months ended on 30 June 2019 (IH 2019 Financial Statements) and for 9 (nine) months ended September 30, 2019 (Q3 2019 Financial Report).



4. Melakukan penelaahan atas aspek kualitatif dan integritas pelaksanaan pembukuan, audit dan laporan.
5. Melakukan penelaahan atas proses pengelolaan usaha dan risiko serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Melakukan pembahasan dan memberikan pengarahan kepada Internal Auditor mengenai rencana kerja dan fokus sasaran Internal Auditor, implementasi dan hasil dari sistem pengendalian internal untuk periode tahun 2019 dan juga temuan hasil pemeriksaan Internal Auditor di tahun 2019 dan prosedur tindak lanjut audit serta kecukupan sistem pengendalian internal.
7. Melakukan pembahasan atas surat dari KAP AAJAMR tentang pergantian Akuntan Publik/ audit partner in charge dari Bapak Saptoto Agustomo menjadi Bapak Tjun Tjun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui atas penggantian tersebut.
8. Melakukan pembahasan dengan external auditor mengenai ruang lingkup, temuan-temuan penting dan hasil kerja audit auditor eksternal atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
9. Dengan mengacu pada POJK No. 13/2017 pasal 14, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan ('KAP AAJAMR') atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan melaporkan hasil evaluasi tersebut sesuai dengan Laporan Komite Audit tanggal 15 Juni 2020.
4. Reviewed the qualitative aspect and integrity in bookkeeping, audits and reports.
5. Reviewed the management process for business and risk and compliance with applicable laws and regulations.
6. Discussed with and provided guidance to the Internal Auditor regarding Internal Audit work plan and focus, implementation and results of the internal control system for the 2019, also discussed on the internal audit findings, and follow-up on audit procedures and the adequacy of the internal control system.
7. Assessed and provide a recommendation to the Board of Commissioners on the replacement of the Company's Public Accountant from Mr Saptoto Agustomo to Mr. Tjun Tjun by taking into consideration the letter from KAP AAJAMR.
8. Conducted discussions with external auditors regarding the scope, key audit findings and results of external auditors work relating to the audit of the Company's Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2019.
9. Pursuant to POJK No. 13/2017 Article 14, the Audit Committee evaluates the implementation of providing audit services by the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners Public Accountant Firm ('KAP AAJAMR'), with Public Accountant Saptoto Agustomo for the Company's Financial Statements for the year ended on 31 December 2019 and reported according to Audit Committee Report dated 15 June 2020

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Perseroan sudah berjalan dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pengendalian Internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial, dan operasional kontrol.

Audit Committee Statement on Effectiveness of Internal Controlling System and Risk Management

The Internal Control System conducted by the Company is considered as active and adequate, in which it is reflected on the effectiveness of executing functions of Internal Control, such as: internal audit, risk management, compliance, financial, and operational control.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas terkait nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris agar berjalan secara objektif, efektif, dan efisien serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pembentukan komite dituangkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 179/SPDEKOM/LK-COS/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada:

1. POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi hingga 31 Desember 2019

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang sebagai ketua. Anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist in the duties of the Board of Commissioners in the objective, effective and efficient supervision process of the implementation of Nomination and Remuneration in order to enhance the quality, competency, and responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners to achieve the vision of the Company. Nomination and Remuneration Committee report to The Board of Commissioners and the appointment of Nomination and Remuneration Committee through the Board of Commissioners' Degree No. 179/SPDEKOM/LK-COS/IV/2019 dated April 18, 2019.

Policy and Legal Reference

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to:

1. OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of a Public Company.
2. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 23, 2015 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Public Companies.

Profile of Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2019

The Nomination and Remuneration Committee shall consist of at least 3 (three) members, with provision that one Independent Commissioner to become Chairman. Other members may be members of the Board of Commissioners, or outside parties or a person who is in managerial position under the Board of Directors in the Human Resources division.



Nama Name	Anangga W Roosdiono	Jonathan L. Parapak	Ishak Kurniawan
Jabatan Position	Ketua Chairman	Anggota Member	Anggota Member
Periode Jabatan Position Period	2019-2021	2019-2021	2019-2021
USia & Kewarganegaraan Age & Citizenship	WNI, 75 tahun 75 years old, Indonesia	WNI, 70 tahun 70 years old, Indonesia	WNI, 63 tahun 63 years old, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational background	<p>Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, tahun 1966 dan Magister Hukum dari Denver University, AS, tahun 1980. Dan mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan</p> <p>Bachelor of Laws from the University of Indonesia, 1966 and Masters of Law from Denver University, USA, 1980 , Doctor of Law from Pelita Harapan University.</p>	<p>Sarjana Teknik dan Master of Engineering Science dari University of Tasmania, Australia</p> <p>Bachelor of Engineering and Master of Engineering Science from the University of Tasmania, Australia</p>	<p>Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indonesia (1982); dan Master Bisnis Administrasi dari San Diego University, California, USA (1988).</p> <p>Bachelor of Civil Engineering from Petra Christian University, Surabaya, Indonesia (1982); and Master of Business Administration from San Diego University, California, USA (1988).</p>
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan</p> <p>Regulation of the Financial Services Authority No. 34/ POJK.04/2014 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan</p> <p>Regulation of the Financial Services Authority No. 34/ POJK.04/2014 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan</p> <p>Regulation of the Financial Services Authority No. 34/ POJK.04/2014 dated December 23, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidance of the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<p>Wakil Ketua Institute Arbitrer Indonesia, Anggota KADIN Indonesia, Direksi/Komisaris perusahaan nasional</p> <p>Deputy Chair of the Indonesian Arbitrator Institute, Member of KADIN Indonesia, Directors / Commissioners of national companies</p>	<p>Komisaris PT AsiaNet, PT Broadband Multimedia, dan Komisaris di beberapa perusahaan Lippo Group, termasuk PT Multipolar Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk.</p> <p>Commissioners of PT AsiaNet, PT Broadband Multimedia, and Commissioners at several Lippo Group companies, including PT Multipolar Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk.</p>	-

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Nama Name	Anangga W Roosdiono	Jonathan L. Parapak	Ishak Kurniawan
Riwayat Pekerjaan Job Experiences	Lihat profil Dewan Komisaris halaman 81	<p>Presiden Direktur PT Indosat, Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel), Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).</p> <p>President Director of PT Indosat, Secretary General of the Department of Tourism, Post and Telecommunications (Deparpostel), Member of the People's Consultative Assembly (MPR).</p>	<p>Bergabung dengan Lippo Karawaci sejak April 2008 sebagai HR Director. Sebelumnya, beliau telah 13 tahun berkecimpung di dunia perbankan, dengan mengawali karirnya sebagai Senior Financial Analyst di Household Finance Corporation, Pomona, California, US. Kemudian pada tahun 1991, beliau ditunjuk sebagai asisten untuk Customer Service Director, dan juga pernah menjabat sebagai Head of Operations Support pada Citibank Indonesia (1991-1993), hingga tahun 2008 beliau menjabat sebagai Country Human Resources Officer di Citibank Indonesia. Beliau memulai karir di bidang Human Resources sejak tahun 1999.</p> <p>Joined Lippo Karawaci since April 2008 as HR Director. Previously, he had 13 years of experience in banking, by starting his career as a Senior Financial Analyst of Household Finance Corporation, Pomona, California, US. In 1991, he was appointed as the assistant for Customer Service Director, and also served as the Head of Operations Support at Citibank Indonesia (1991-1993), until 2008 he served as Country Human Resources Officer at Citibank Indonesia. He started his career in Human Resources since 1999.</p>

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkatnya. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota tersebut dianggap tidak dapat lagi melakukan tugasnya.

Independensi dan Persyaratan Keanggotaan

Dalam rangka menjamin kualitas kerja serta menjunjung independensi dan objektivitas, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala macam intervensi, baik dari pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya serta bebas dari benturan kepentingan yang dapat mengganggu independensi anggota komite. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditunjuk telah memenuhi syarat independensi dengan kriteria sebagai berikut:

- Anggota lainnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi (selain Ketua) adalah pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Terms of Office

The tenure of the Nomination and Remuneration Committee members must not be longer than the tenure of the Board of Commissioners as determined in the Articles of Association. The replacement of a member of the Nomination and Remuneration Committee who is not from the Board of Commissioners, shall be done no later than 60 (sixty) days from the time that the member can no longer perform his duties.

Independency and Requirements of Nomination &

Remuneration Committee Members

To ensure professional quality and to uphold independency and objectivity, the Nomination and Remuneration Committee shall be free of any intervention, from either the shareholders or other stakeholders as well as free of any conflict of interest which might interfere with the independency of the Committee members. The Company's Nomination and Remuneration Committee members have been appointed based on independence requirements with the following criteria:

- Most of the members of the Nomination and Remuneration Committee (other than the Chairman) must not be officers that are in managerial level under the Board of Directors in division of Human Resources



2. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
3. Anggota Komite harus memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
4. Anggota Komite tidak dapat merangkap sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas manajemen Perseroan melalui pengembangan mekanisme nominasi dan remunerasi yang tepat berdasarkan prestasi yang dicapai serta kontribusi terhadap pertumbuhan Perseroan. Terkait dengan fungsinya, komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Memberikan saran untuk peningkatan program pengembangan kemampuan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.
4. Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi.
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Members who are from outside of the Company must not have any affiliation with the Company, Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders.
3. Members of the Nomination and Remuneration Committee must have experience related to Nomination and/or Remuneration.
4. Members of the Nomination and Remuneration Committee must not be in concurrent position to other Committees in the Company.
5. Members of the Board of Directors shall not be a member of the Nomination and Remuneration Committee

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist the Board of Commissioners in increasing the Company's management quality Company through development of an appropriate nomination and remuneration mechanism according to its achievements and contributions to the growth of the Company. In addition to that, this Committee bears certain duties and responsibilities as described below to:

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners about:
 - a. Composition of members' position of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - b. Policy and criteria required in the Nomination process.
 - c. Performance Evaluation policy for all members of the Boards of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Assist the Board of Commissioners in evaluating performance of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
3. Provide suggestions to improve competency development program for the member(s) of the Boards.
4. Nominate candidates with adequate qualification to be promoted as a member of the Boards to be recommended to the GMS.
5. Give recommendation to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration Structure;
 - b. Remuneration Policy;
 - c. Amount of Remuneration.
6. Assist the Board of Commissioners in evaluating performance of the members of the Boards to determine commensurate remuneration.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilakukan bila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite dan salah satu dari mayoritas anggota Komite merupakan Ketua Komite. Komite wajib mengadakan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali tiap 4 (empat) bulan.

Sepanjang 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan Rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Rapat Internal Internal Meetings			
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Internal Total Meetings	Kehadiran Attendance
Anangga W. Roosdiono	Ketua Chairman	4	100%
Jonathan L. Parapak	Anggota Member	4	100%
Ishak Kurniawan	Anggota Member	4	100%

Agenda Rapat Meeting Agenda		
Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
11 Maret 2019 March 11, 2019	1. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS tahunan	1. Provide recommendation for candidates to be nominated as members of BOC and BOD in the GMS.
26 Juni 2019 June 26, 2019	1. Mengkaji ulang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Kerangka upah dan tunjangan 3. Organisasi induk 4. Lain-lain	1. Review Nomination and Remuneration Committee Charter. 2. Compensation and benefits frame work. 3. Organization of the holding. 4. Others
26 September 2019 September 25, 2019	1. Mengkaji ulang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Organisasi Induk	1. Review Nomination and Remuneration Committee Charter. 2. Organization of the holding
28 November 2019 November 28, 2019	1. Kesesuaian kebijakan antara LPKR dan entitas anak 2. Kebijakan utama Sumber Daya Manusia	1. Conformity between LPKR policies and subsidiaries 2. Key Policies of Human Resources
12 Desember 2019 December 12, 2019	1. Persetujuan risalah rapat sebelumnya 2. Kebijakan SDM 3. Kode Etik dan Whistleblowing 4. Learning and Development (L&D) Roadmap	1. Approval of Previous Minutes of Meeting 2. HR Policies 3. Code of Conduct and Whistleblowing 4. Learning and Development (L&D) Roadmap

Nomination and Remuneration Committee meetings

can only be held if attended by a majority of the total number of members of the Nomination and Remuneration Committee and one of the majority members is the Chairman. Nomination and Remuneration Committee meetings are regularly held at least once every 4 (four) months.

During 2019, Nomination and Remuneration Committee organized 5 (five) meetings, and below is the table of attendance of the members:



Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan program kerja yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

Terkait dengan Fungsi Nominasi

1. Menyelenggarakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi bagi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan utama sumber daya manusia dan program pengembangan kemampuan manajerial.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris agar dapat disampaikan di dalam RUPS.

Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan remunerasi; dan
 - c. Kerangka remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi and Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan efektif berlaku sejak 24 November 2015. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman kerja agar anggota Komite dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan dan ketentuan OJK, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Report of Nomination and Remuneration Committee Activities

In 2019, Nomination and Remuneration conducted its work program, as generally described as follows:

Nomination Function:

1. Organized meetings 5 (five) times in a year.
2. Provided recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of the roles of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners
 - b. Policy and criteria that are needed in the nomination process for the candidates of BOD and/or BOC; and
 - c. Performance Evaluation Policy for the members of the BOD and/or BOC.
3. Provided recommendations regarding key policies of human resources and competency Development Managerial Program.
4. Provided recommendations for candidates who have the requirements to be nominated as members of BOD and/or BOC to the Board of Commissioners and to be communicated in the GMS.

Remuneration Function:

1. Provided recommendation to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration Structure;
 - b. Remuneration Policy; and
 - c. Remuneration framework.
2. Assisted the Board of Commissioners in assessing performance compared to remuneration of each members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company has the Nomination and Remuneration Committee Charter effective as of November 24, 2015. The Charter is a guideline so that the Nomination and Remuneration Committee can perform its duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, in accordance with applicable laws so that it can be accountable and accepted by interested parties.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Piagam ini akan dikaji secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyempurnaan apabila dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ibu Sri Mulyati Handoyo sejak 4 Mei 2015 yang dinyatakan oleh Surat Keputusan Direksi PT Lippo Karawaci Tbk No. 032/SK-DIR/COS-LK/V/2015 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan.

Dasar pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini merujuk pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan juga Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. 1.A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Status, Fungsi dan Pendirian

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Presiden Direktur. Fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh seorang individu atau unit kerja. Unit kerja tersebut harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab.

Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh salah seorang Direktur Perseroan atau pegawai lain yang memenuhi syarat. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Direksi harus menunjuk pengganti dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut. Selama kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau individu yang ditunjuk sementara untuk menjadi Sekretaris Perusahaan menunjuk persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

The Nomination and Remuneration Committee Charter conforms to the provisions of Regulation and is assessed once every year in order to enhance the needs and development of the Company based on applicable.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary Basis of Appointment

Mrs. Sri Mulyati Handoyo has served as Corporate Secretary effectively since May 4, 2015, stipulated by the Board of Directors Decision No. 032/SK-DIR/COS-LK/V/2015 regarding change of the Corporate Secretary.

Appointment of the Corporate Secretary refers to OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding Corporate Secretary of Public Companies, and also IDX Regulation No. 1.A regarding Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by a Public Listed Company. The Corporate Secretary can be appointed and terminated according to decision of Board of Directors.

Status, Function and Establishment

In the organization structure, the Corporate Secretary is under responsibility of a President Director. The function of the Corporate Secretary is conducted by an individual or a working unit. The working unit shall be led by a responsible individual.

The position of Corporate Secretary can be concurrently held by a Director of the Company or even an employee who fulfills the requirements. In terms of a position of Corporate Secretary being vacant, then the Board of Directors must appoint a replacement within 60 (sixty) days from the day the vacancy occurs. During the period of the vacancy, the position of Corporate Secretary can be concurrently held by a Director or the Company may temporarily appoint a Corporate Secretary from among members of the Board of Directors or Senior Management while making every attempt to conform to OJK Regulation No. 35/2014 dated December 8, 2014.



Profil Sekretaris Perusahaan



Sri Muljati Handoyo saat ini berusia 51 tahun. Perseroan menunjuknya sebagai Sekretaris Perusahaan pada tahun 2015 untuk menjadi penghubung atas nama Perseroan dengan OJK, BEI dan lembaga pasar modal terkait lainnya.

Beliau memulai karirnya di Perusahaan Lippo pada tahun 1992 di Lippo Development (1994-1997), PT Hotel Prapatan Tbk. (1997-2000), PT Link Net (2000-2002) dan PT Multipolar Corporation Tbk. (2002-2005). Beliau juga pernah bekerja untuk PT Titan Aneka Tambang (2006 hingga 2007) sebagai General Manager Sumber Daya Manusia dan Head Office Support. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, beliau menjabat sebagai Assistant Vice President of Corporate Service Division di PT Trikomsel Multimedia Tbk. Pada tahun 2011 Beliau bergabung dengan PT Lippo Karawaci Tbk dan ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 4 Mei 2015.

Beliau memperoleh Diploma Studi Bisnis dari William Business College, Sydney Utara, Australia pada tahun 1992 dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah dituangkan dalam Piagam Sekretaris perusahaan yang telah ditetapkan pada 23 Februari 2016, yakni:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Corporate Secretary Profile

Sri Muljati Handoyo

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Sri Muljati Handoyo is 51 years old. The Company appointed her as Corporate Secretary in 2015 to be the liaison on behalf of the Company with the OJK, IDX and other related capital market institutions.

She began her career with Lippo in 1992 at Lippo Development (1994-1997), PT Hotel Prapatan Tbk (1997-2000), PT Link Net (2000-2002) and PT Multipolar Corporation Tbk (2002-2005). She also worked for PT Titan Aneka Tambang (2006 to 2007) as General Manager of Human Resources and Head of Office Support. From 2008 to 2011, she worked at PT Trikomsel Multimedia Tbk as Assistant Vice President of Corporate Service Division. In 2011 Sri joined PT Lippo Karawaci Tbk and was appointed as Corporate Secretary in May 4,2015

She obtained a Diploma in Business Studies from William Business College, North Sydney, Australia, 1992 and graduated from School of Economics of Universitas Indonesia, in 1997.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are stated in the Charter of the Corporate Secretary, effectively stipulated on February 23, 2016, such as:

1. Following any updates of the capital market, especially the applicable laws and regulations in the capital market;
2. Providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners on compliance with laws and with regulation in the capital market;

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk:
 - a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk ketersediaan informasi dalam situs resmi Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - e. Pelaksanaan program orientasi kepada Perusahaan untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan.
3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing Corporate Governance, including:
 - a. Disclosing information to the public, including information availability in the Company's website.
 - b. Submission of reports to the OJK in a timely manner.
 - c. Organising and documenting the GMS.
 - d. Organising and documenting Board of Directors and Board of Commissioners meetings
 - e. Conducting orientation program for new Directors and/or Commissioners.
4. Acting as a liaison among the Company and its shareholders, the OJK, and other stakeholders.
5. Representing the Company in correspondence with the capital market authority according to authority given by the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi

1. Membantu persiapan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, di antaranya dengan melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. Membantu menyusun agenda rapat;
 - b. Menghubungi atau mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan kehadiran anggota Dewan Komisaris sehingga rapat mampu membuat keputusan yang sah dan mengikat;
 - d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio visual untuk kepentingan rapat Dewan Komisaris dan memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - e. Mengingatkan Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah yang akan dibahas;
 - f. Menyusun risalah rapat; dan
 - g. Memberikan saran mengenai hal-hal tata kelola perusahaan kepada Dewan Komisaris.
2. Membantu persiapan penyelenggaraan rapat Komite Audit dan/atau rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, di antaranya dengan melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. Membantu menyusun agenda rapat;
 - b. Menghubungi atau mengundang Komite Audit dan manajemen terkait untuk pertemuan sesuai dengan prosedur pemanggilan;

Duties and Responsibilities Related to the Board of Commissioners and Board of Directors

1. To assist the preparation of the meeting of the Board of Commissioners, by doing the following things:
 - a. To assist defining agendas of the meeting;
 - b. Contacting or inviting members of the Board of Commissioners to attend the meeting;
 - c. Ensuring the presence of members of the Board of Commissioners so that the meeting will be able to make a valid and binding decision;
 - d. Preparing materials, including audio-visual facilities for the Board of Commissioners meeting and ensure the materials are accepted well by all the members;
 - e. To remind the Board of Commissioners regarding matters related to the Company, the Article of Association, and applicable regulations for issues to be discussed;
 - f. To prepare Minutes of Meeting; and
 - g. To provide advices on matters of corporate governance to the Board of Commissioners
2. To assist the preparation of the Audit Committee meeting, including by doing the following:
 - a. To assist defining agendas of the meeting;
 - b. Contacting or inviting the Audit Committee and relevant management to a meeting pursuant to the invitation procedure;



- c. Memastikan kehadiran peserta rapat Komite Audit sehingga sehingga rapat mampu membuat keputusan yang sah dan mengikat;
 - d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio visual untuk kepentingan rapat Audit Komite dan memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh masing-masing peserta Rapat;
 - e. Menyusun risalah rapat Komite Audit; dan
 - f. Mendukung rencana dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.
3. Membantu Direksi mengadakan dan menyimpan serta mengelola dan melaporkan Daftar Pemegang Saham, dengan bekerja bersama Biro Administrasi Efek Perusahaan antara lain dalam:
- a. Administrasi;
 - b. Pencatatan saham;
 - c. Pemeliharaan daftar pemegang saham;
 - d. Pemeliharaan daftar khusus Direksi dan Komisaris;
 - e. Pemeliharaan daftar pemegang saham lebih dari 5% (lima persen). Sesuai peraturan yang berlaku.
4. Sekretaris Perusahaan dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum serta peraturan yang berlaku yang relevan dengan Perusahaan dan kegiatan usaha Perusahaan.
5. Sekretaris Perusahaan harus menjaga agar Perseroan dan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari telah mematuhi standar tata kelola perusahaan yang baik sesuai standar internasional.
6. Sekretaris Perusahaan beserta divisi lain yang relevan memastikan agar kebijakan dan petunjuk Direksi dikomunikasikan secara tepat dan baik kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perseroan Perusahaan termasuk para stakeholders.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Pemegang Saham

1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di antaranya dengan melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. Persiapan logistik untuk konvensi dari RUPS dan Laporan Tahunan;
 - b. Persiapan, distribusi pengumuman, pemanggilan dan agenda mata acara RUPS, kuasa (pernyataan penerima kuasa);
 - c. Persiapan tata tertib RUPS dan skenario untuk ketua RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris lain;

- c. Ensure the presence of members of the Audit Committee so the meeting will be able to make a valid and binding decision;
 - d. Preparing materials, including audio-visual facilities for the Audit Committee meeting and ensure the materials are accepted well by all the members;
 - e. To prepare Minutes of Meeting; and
 - f. To support improvement plan on corporate governance.
3. To assist the Board of Directors in making, storing, maintaining, and reporting the Register of Shareholders, by collaborating with the Shares Registrar, to do the following:
- a. Administration;
 - b. Listing of the shares;
 - c. Maintenance of a list of shareholders;
 - d. Maintenance of a special list of Directors and Commissioners;
 - e. Maintenance of a list of shareholders of more than 5% (five percent). In accordance with applicable regulations.
4. Corporate Secretary to provide input to the Board of Directors related to the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors by the Articles of Association and the laws and regulations relevant to the Company and the Company's operations.
5. Corporate Secretary shall ensure that the Company and the Board of Directors in conducting daily business activities are in compliance with international standard of good corporate governance.
6. Corporate Secretary and other divisions shall ensure that policies and guidelines of the Board of Directors are communicated precisely to relevant parties inside and outside the Company, including the stakeholders

Duties and Responsibilities Related to the Shareholders

1. Corporate Secretary is responsible for the General Meeting of Shareholders (GMS), including by doing the following:
 - a. Logistic preparation for convention of GMS and annual report;
 - b. Preparation, notification, announcement and agenda of the GMS, power of attorney (proxy statement);
 - c. Preparing the rules of the GMS as well as scenarios for the chairman of GMS, Board of Directors, and Board of Commissioners;

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

- d. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dari pemegang saham dalam RUPS; dan
 - e. Mempersiapkan berita acara RUPS bekerjasama dengan Notaris.
2. Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Investor Relation bertanggung jawab atas proses penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan, dengan melakukan hal-hal di bawah ini:
- a. Memastikan bahwa Laporan Tahunan memuat informasi yang disyaratkan peraturan terkait.
 - b. Memastikan bahwa Laporan Tahunan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan tersedia untuk pemegang saham paling lambat saat pemanggilan untuk RUPS atau selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak akhir tahun fiskal (mana yang lebih dulu); dan
 - c. Memastikan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan masuk dalam agenda/ mata acara RUPS Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Kepatuhan

1. Sekretaris Perusahaan wajib untuk mempersiapkan dan mengelola pernyataan pendaftaran dan melaporkan ke pasar modal dan otoritas bursa dalam rangka tindakan aksi korporasi Perseroan;
2. Sekretaris Perusahaan wajib untuk mengingatkan Direksi dan Dewan Komisaris agar setiap pembelian dan penjualan saham di Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk anggota keluarga mereka untuk dicatat dalam daftar khusus pemegang saham dan akan dilaporkan lebih lanjut untuk OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sekretaris Perusahaan wajib mengelola secara komprehensif kebijakan Perusahaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
4. Sekretaris Perusahaan wajib untuk memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Pemberian Informasi dan Hubungan dengan Stakeholders Perusahaan Perseroan

1. Hubungan Media dan Investor
Sekretaris Perusahaan memberi masukan kepada Public Relations dan Investor Relations dalam melakukan pengaturan mengenai metode dan proses pemberian informasi/berita oleh Perseroan dan prosedur komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi Perseroan sekaligus mengakomodasi

- d. Assisting the Board of Commissioners and Board of Directors in preparing answers to questions from shareholders at the GMS; and
 - e. Preparing the minutes of the GMS together with the notary
2. Corporate Secretary along with Investor Relation are responsible for the preparation and submission of the Annual Report, by doing the following:
- a. Ensuring the Annual Report contains the information required by the relevant regulations.
 - b. Ensuring the Annual Report is submitted in a timely manner to the Financial Services Authority (FSA) and available to shareholders no later than the announcement for the AGM, or no later than 4 (four) months after the end of the fiscal year (which ever comes first); and
 - c. Ensuring the approval of the Annual Report is including on the agenda of AGM.

Duties and Responsibilities Related to the Compliance

1. Corporate Secretary is required to prepare and manage the registration statement and report to the capital market and stock exchange authorities in the context of corporate action measures;
2. Corporate Secretary shall remind the Board of Directors and Board of Commissioners for every purchase and sale shares in the Company done by the Board of Directors and Board of Commissioners, including their family members to be recorded in a special register of shareholders and will be further reported to the FSA in accordance with the applicable laws.
3. Corporate Secretary shall comprehensively manage the Company's policies relating to good corporate governance; and
4. Corporate Secretary is obliged to fulfill other obligations as provided for in the legislation on the capital market.

Duties and Responsibilities Related to the Provision of Information and Relationship to Stakeholders

1. Relationship between Media and Investor
Corporate Secretary to provide input to the Public Relations and Investor Relations to make arrangement regarding method and process of giving information/ news by the Company and communication procedure so that it will give positive impact to the Company as well as accomodate infomation needs for the



kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal.

Informasi yang akan disampaikan kepada dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) meliputi:

- a. Informasi tentang Perseroan
 - b. Informasi tentang kegiatan usaha Perseroan
 - c. Informasi tentang kinerja keuangan; dan
 - d. Informasi lainnya.
2. Sekretaris Perusahaan membantu Perseroan untuk menjaga hubungan yang baik dengan instansi Pemerintah, pasar modal dan asosiasi yang terkait dengan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Kerahasiaan Informasi

1. Sekretaris Perusahaan sebagai pihak yang dianggap memiliki banyak informasi atas rahasia Perseroan wajib untuk setiap saat menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan selalu bertindak dengan bijaksana dalam menyikapi informasi Perseroan. Sekretaris Perusahaan dilarang untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau mengungkapkannya informasi rahasia kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadinya.
2. Sekretaris Perusahaan harus senantiasa bertindak dengan itikad baik dan menghindari konflik kepentingan.

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Guna meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya serta mengikuti perkembangan peraturan pasar modal, berikut adalah daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019:

Daftar Seminar/Training Dihadiri Oleh Sekretaris Perusahaan List of Seminars/Trainings Attended by Corporate Secretary

No.	Tanggal Date	Acara Seminar Training	Penyelenggara Organizer
1	20 Februari 2019 February 20, 2019	CEO Gathering 2019 – Optimalisasi Peran Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi CEO Gathering 2019 – Optimization of Financial Sector Role for Economic Growth	AEI
2	11 Maret 2019 March 11, 2019	Next Step in Sustainability Reporting : How to Start and Common Technical Issues in Reporting	BEI
3	14 Maret 2019 March 14, 2019	Diskusi Ekonomi dan Politik 2019 2019 Politics and Economics Discussion	BEI
4	28 Maret 2019 March 28, 2019	How to Report Gender Equality Water Occupational Health and Safety in Sustainability	BEI
5	25 April 2019 April 25, 2019	Business Reporting on the Sustainable Developments Goals	BEI
6	21 Agustus 2019 August 21, 2019	Kebijakan Investasi dan Ekonomi Pemerintah pasca Pemilihan Umum The Government's Economics and Investment Policy post-General Election	AEI

stakeholders in accordance with applicable law in capital market.

The information will be presented to the Stakeholders including:

- a. Information regarding the Company
 - b. Information regarding the business activities of the Company
 - c. Information on financial performance; and
 - d. Other informations.
2. Corporate Secretary assists the Company to maintain a good relationship with government institution, capital markets and associations related to the Company.

Duties and Responsibilities Related to the Confidentiality

1. Corporate Secretary is considered, as a party that has a lot of confidential information of the Company, is required to keep the confidentiality of those information and always act wisely in addressing the Company's information. Corporate Secretary is prohibited from using or abusing or disclosing confidential information to third parties for their personal use.
2. Corporate Secretary shall always act with good faith and avoid the conflict of interest.

Corporate Secretary Training Program

To enhance the competency of the Company's Corporate Secretary in conducting its functions and responsibilities as well as following the updates of stock market regulations, below is the list of training and competency development programs participated in by the Corporate Secretary in 2019:

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

No.	Tanggal Date	Acara Seminar Training	Penyelenggara Organizer
7	8 Oktober 2019 October 8, 2019	Seminar "Online Single Submission" Seminar, with the theme "Online Single Submission"	BEI - ICSA
8	12 November 2019 November 12, 2019	"Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: Menanti Gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju" "Indonesia's Preparation in Facing Global Economic Turbulence: Awaiting Actions from the Economics Team of Indonesia Forward Cabinet"	BEI - ICSA

BEI = Bursa Efek Indonesia | IDX = Indonesian Stock Exchange

ICSA = Indonesian Corporate Secretary Association

AEI = Asosiasi Emiten Indonesia | Indonesian Association of Issuers

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS')

Menyelenggarakan 1 (satu) RUPS, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 18 April 2019 (RUPST) dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') No. 32/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("POJK No. 32/2014").

Mengikuti ketentuan dalam POJK No. 32/2014, sebelum RUPS, Perseroan melakukan:

a. RUPST

- Pemberitahuan RUPST melalui surat No. 061/ LK-COS/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019.
- Pengumuman RUPST diiklankan pada tanggal 12 Maret 2019 di harian Investor Daily. Berhubung tidak ada usulan dari pemegang saham untuk agenda rapat, Perseroan menyampaikan Pemanggilan Rapat dengan agenda sebagaimana telah diberitahukan kepada OJK.
- Pemanggilan RUPST pada tanggal 27 Maret 2019 di harian Investor Daily.
- Pemanggilan RUPST juga mencantumkan penjelasan atas setiap agenda mata acara rapat untuk lebih memperjelas maksud mata acara agenda tersebut sehingga memudahkan Pemegang Saham dalam mempersiapkan keputusan mereka.
- Setelah pelaksanaan RUPST, Laporan Hasil RUPST diumumkan melalui website BEI serta Perseroan dan diiklankan pada tanggal 22 April 2019 di harian Investor Daily. Perseroan juga memuat pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPST pada hari yang sama dengan hari terbitnya iklan tersebut dalam 2 (dua) bahasa di situs Perseroan www.lippokarawaci.co.id pada bagian Shareholder Information.

Corporate Secretary's Implementation of Duties

In 2019, the Corporate Secretary conducted the following duties:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)

Held 1 GMS, which was AGMS on April 18, 2019 according to provisions under POJK No. 32/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders (POJK No.32/2014).

In line with new provisions under POJK No.32/2014, prior to GMS, the Company should conduct:

a. AGMS

- AGMS was informed through Letter No. 061/ LK-COS/III/2019 on March 12, 2019
- AGMS announcement was published on March 12, 2019 in Investor Daily. As the Company received no other recommendations from shareholders with respect to meeting agenda, the Company circulated the Meeting Invitation and agenda as informed to OJK.
- AGMS invitation was published on March 27, 2019 in Investor Daily.
- The AGMS invitation included explanation of each meeting agenda to clearly explain purpose of the agenda so that will ease the shareholders in making decision.
- After the AGMS, summary of the result of the AGMS was disclosed through the website of IDX and Company's and published on April 22, 2019 in Investor Daily. The Company also uploaded the announcement, invitation and the resolution on the same day as the publication on newspapers in 2 (two) languages in the Company website www.lippokarawaci.co.id in Shareholder Information menu.



b. Laporan realisasi pelaksanaan hasil RUPST:

- Mata acara 1 –** Telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPST.
- Mata acara 2 –** Keputusan pemegang saham untuk tidak membagikan dividen & telah diumumkan Perseroan melalui iklan pada harian Investor Daily tanggal 22 April 2019 dan web IDX net dan situs Perseroan pada tanggal 22 April 2019
- Mata acara 3 –** Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ir. Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito, SH sesuai Akta No 42 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lippo Karawaci Tbk No. AHU- AH.01.03-0211348 tanggal 18 April 2019
- Mata acara 4 –** Berdasarkan wewenang yang dilimpahkan dalam RUPST dan setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit tertanggal 10 April 2019, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Saptoto Agustomo dengan Nomor Izin Akuntan Publik No. AP 0499 dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagai akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 11 April 2019.

2. Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite

Sekretaris Perusahaan telah mengkoordinasi penyelenggaraan 19 kali Rapat Direksi, 6 kali Rapat Dewan Komisaris, 10 kali Rapat Komite Audit dan 4 kali Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan selama tahun 2019.

b. Report of AGMS implementation:

Agenda 1 – Executed and completed, and approved by the shareholders in AGMS.

Agenda 2 – Shareholders decided not to share dividends and the announcement was published in Investor Daily on April 22, 2019 and IDX website and the Company's official website on April 22, 2019.

Agenda 3 – Changes to the composition of the BOC and BOD was stated in a deed of Partial Resolution of the AGMS No 42 written by Notary & PPAT Ir. Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito, SH with the letter of notification received by the Minister of Law and Human Rights in accordance with Receipt of Notification of Data Changes of PT Lippo Karawaci Tbk No. AHU- AH.01.03-0211348 dated April 18, 2019

Agenda 4 – According to the authority granted through AGMS and by considering the recommendation of Audit Committee dated April 10, 2019 the BOC appointed public accounting firm Saptoto Agustomo with Public Accountant License Number No. AP 0499 and KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner, as the public accountant to audit Lippo Karawaci's Consolidated Financial Statements and its Subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2019 under the Board Resolution Letter dated on April 11, 2019.

2. Meeting of the Board of Directors, Commissioners and Committees

In 2019, The Corporate Secretary coordinated 19 BOD meetings, 6 BOC meetings, 10 Audit Committee meetings and 4 Nomination & Remuneration Committee meetings.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Jadwal Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite telah diatur dan diinformasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite terkait untuk periode 2020 dan akan disesuaikan kembali apabila diperlukan.

3. Kewajiban dan Kepatuhan Atas Peraturan Pasar Modal

Pelaksanaan kewajiban pelaporan yang telah dilakukan:

- a. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan sesuai Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 ("Peraturan X.K.2"):
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (audit) untuk periode 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, telah disampaikan melalui surat tertulis kepada OJK no: 062-ojk/LK-COS/III/2019 dan PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") dengan no : 062-idx/LK-COS/ III/2019 tanggal 6 Maret 2019, dan juga melalui OJK Net / IDXNet pada hari yang sama serta diiklankan di hari yang sama pada surat kabar Investor Daily. Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban ini.
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (penelaahan terbatas) untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, telah disampaikan melalui surat tertulis kepada OJK dan BEI tertanggal 30 April 2019 dan juga melalui Spe.OJK/ IDX.net pada tanggal yang sama. Perseroan menyampaikan kepada OJK dan BEI pemberitahuan melalui surat No. 235/LK-COS/ IV/2019 tanggal 30 April 2019. Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban
 - Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo - Karawaci Tbk dan Entitas Anak Tengah Tahunan (penelaahan terbatas) untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019, Perseroan telah menyampaikan ke OJK dan BEI melalui surat no: 409/LK-COS/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 bahwa terlambat menyampaikan kewajiban ini karena adanya aksi korporasi anak perusahaan.Sesuai dengan yang disampaikan melalui surat pemberitahuan tertulis kepada OJK dan BEI No. 460/LK-COS/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 dan juga melalui spe.OJK/ IDX.net pada tanggal yang sama. Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban ini.

Schedule of meetings of the Board of Directors, Commissioners and Committees for 2020 has been planned and informed to all members so that it may be adjusted when necessary.

3. Duties and Compliance with Capital Market Regulations

Obligatory reporting which had been conducted:

- a. Periodic Financial Statements submitted under BAPEPAM-LK Regulation No. X.K.2:
 - The Company's consolidated Financial Statements and its Subsidiaries (audited) for one-year period ended on December 31, 2018, submitted by written letter to OJK no: 062-ojk/ LK-COS/III/2019 and IDX no : 062-idx/LK-COS/ III/2019 dated March 6, 2019, as well as through OJK Net and IDX Net on the same day and advertised on the same day as well in Investor Daily newspaper. The Company complied with provisions in the Regulation No. X.K.2.
 - The Company's consolidated financial statements and its Subsidiaries (unaudited) for three-month period ended on March 31, 2019, submitted through written letter to OJK and IDX on April 30, 2019 as well as in Spe.OJK/IDX. net on the same day. The Company delayed in submitting the obliged reports due to a subsidiary's corporate action, which also had been informed through letter No. 235/LK-COS/ IV/2019 dated April 30, 2019. The Company complied with provisions in the Regulation No. X.K.2.
 - The mid-annual Consolidated Financial Statements (limited review) of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiaries for the 6-month period ended 30 June 2019 have been submitted by the Company to OJK and IDX through letter no: 409/LK-COS/VII/2019 dated July 31 2019. There was a delay in submitting this obligation due to corporate action of its subsidiary, which accordance with the written notification to OJK and IDX No. 460/LK-COS/VIII/2019 dated 30 August 2019 and also through spe.OJK/IDX.net on the same date. In this case, the Company has complied with Regulation No. X.K.2 related to the implementation of this obligation.



- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo - Karawaci Tbk dan Entitas Anak (penelaahan terbatas) untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2019, Perseroan telah menyampaikan ke BEI melalui surat tertulis No. 542/LK-COS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 terlambat menyampaikan kewajiban ini karena adanya rencana untuk melakukan penelaahan terbatas oleh Akuntan Publik. Sesuai dengan yang disampaikan melalui surat tertulis no. 583/LK-COS/XI/2019 tanggal 29 November 2019. Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban.
 - b. Laporan Tahunan 2018 telah disampaikan sesuai Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 pada tanggal 30 April 2018
 - c. Laporan Registrasi Saham bulanan disampaikan secara regular setiap bulan kepada OJK dan IDX melalui Spe.OJK/IDX.net
 - d. Laporan Hutang dalam Bentuk Valas disampaikan secara regular kepada OJK setiap bulan melalui Spe.OJK.
 - e. Laporan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan sebagai berikut:
- The Consolidated Financial Statements (limited review) of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiaries for the 9-month period ended September 30, 2019 have been submitted by the Company to the IDX with a written letter No. 542/LK-COS/X/2019 dated October 28, 2019. There was a delay in submitting this obligation due to a limited review conducted by the Public Accountant. In accordance with the written letter no. 583/LK-COS/XI/2019 dated 29 November 2019, the Company has complied with Regulation No. X.K.2 with respect to carrying out obligations.
 - b. Annual Report 2018 had been submitted according to POJK No.29/POJK.04/2016 on April 30, 2018.
 - c. Monthly Share Register report is regularly submitted to OJK and IDX through spe.OJK/IDX.net
 - d. Monthly Debt in Foreign Exchange report is submitted regularly every month to OJK via Spe.OJK.
 - e. Information disclosures are as follows:

Keterbukaan Informasi

Information disclosures

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
1	9 Januari 2019	008/LK-COS/I/2020	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan SJ OJK OJK Director for Service Sector	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of January 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
2	10 Januari 2019	007/LK-COS/I/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Laporan Informasi atau Fakta Material Penjualan Rumah Sakit di Myanmar oleh Anak Perusahaan Perseroan. Information Disclosure - the Sale of Hospital in Myanmar by LPKR's Subsidiary.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
3	13 Januari 2019	021/LK-COS/I/2020	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's MSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk per tanggal 31 Desember 2018 Monthly Report: Registration of Shareholders PT Lippo Karawaci Tbk as of December 31,2018	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
4	16 Januari 2019	015/LK-COS/I/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Memberikan Jasa Audit Informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Lippo Karawaci Tbk. Report on the Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that Provides the Annual Audit of Financial Information Services to PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Bapepam Regulation No.X.K.1 on Information Disclosure to be Immediately Announced to the Public
5	4 Februari 2019	026/LK-COS/II/2019	KPP PP2 BEI IDX CAH Corporate Valuation 2	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa Perihal : "S&P Turunkan Rating PT Lippo Karawaci Tbk menjadi CCC+". Explanation on News Article Regarding: "S&P Lower PT Lippo Karawaci Tbk Rating to CCC +".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
6	6 Februari 2019	032/LK-COS/II/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan SJ OJK OJK Director Service Sector	Konfirmasi Keterlambatan Laporan Keuangan Tengah Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk untuk Tahun 2018. Confirmation of the Delay in submission of 1H Financial Statement 2018.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
7	8 Februari 2019	036/LK-COS/II/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI MSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk per tanggal 31 Januari 2019 Monthly Report: Registration of Shareholders PT Lippo Karawaci Tbk as of January 31,2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
8	8 Februari 2019	037/LK-COS/II/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan SJ OJK OJK Director for Service Sector Taxable Business	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of January 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
9	25 Februari 2019	048/LK-COS/II/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Pemberitahuan Rencana RUPST PT Lippo Karawaci Tbk. Notification of Proposed AGMS Schedule.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company
10	26 Februari 2019	049/LK-COS/II/2019	IDX Net eReporting	Penjualan Saham PT Lippo Karawaci Tbk oleh Pemegang Saham Utama PT Inti Anugerah Pratama (IAP). Information Disclosure by Certain Shareholders: IAP sale of PT Lippo Karawaci Tbk shares.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Company



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
11	26 Februari 2019	050/LK-COS/II/2019	IDX Net e-reporting	Pembelian Saham PT Lippo Karawaci Tbk oleh PT Primantara Utama Sejahtera (PUS).	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
				Information Disclosure by Certain Shareholders: PUS acquisition of PT Lippo Karawaci Tbk shares.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Company
12	4 Maret 2019	057/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK	Bukti Iklan Pengumuman RUPST PT Lippo Karawaci Tbk	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
			OJK's CMSEH	Notification of Proposed AGMS Schedule.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company
13	4 Maret 2019	059/LK-COS/III/2019	KEPPM I OJK Direktur Utama BEI	Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan RUPST PT Lippo Karawaci Tbk Tahun Buku 2018.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
			OJK's CMSEH IDX President Director	Notification of Changes to the Schedule of AGMS.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company
14	4 Maret 2019	060/LK-COS/III/2019	Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Emenit 2 PP2 BEI	Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa tentang Dugaan Kasus Suap Meikarta.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX Head of Corporate Monitoring and Evaluation Unit 2 PP2	Explanation of News Article Regarding: Alleged Bribery Case.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
15	4 Maret 2019	061/LK-COS/III/2019	IDX Net e-reporting	Pemberitahuan RUPST PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
				Notice of Annual General Meeting of Shareholders of LPKT.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies General Meeting of Shareholders
16	6 Maret 2019	062/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of the Consolidated Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk for the year ended December 31, 2018.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
17	6 Maret 2019	063/LK-COS/III/2019	KEPPMI OJK Direktur Utama BEI	Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Copy of Published Summary Consolidated Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk for the year ended December 31, 2018 in Newspaper.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
18	6 Maret 2019	064/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release berjudul : "Laporan Keuangan Audit PT Lippo Karawaci Tbk 2018"	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Press Release titled : "PT Lippo Karawaci Tbk Audited For the FY 2018 Financial Results".	IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement
19	8 Maret 2019	066/LK-COS/III/2019	KEPPMI OJK Direktur Utama BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Monthly Report: Registration of Shareholders as of February 2019.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
20	8 Maret 2019	067/LK-COS/III/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk per 28 Februari 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
			OJK Director for Service Sector Taxable Business	Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of February 2019.	OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
21	12 Maret 2019	071/LK-COS/III/2019	KEPPMI OJK	Bukti Iklan Pengumuman Pemberitahuan RUPST PT Lippo Karawaci Tbk .	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
			OJK's CMSEH	Submission of a copy of Announcement of AGMS Plan.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company
22	12 Maret 2019	072/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Keterbukaan Informasi terkait Pengunduran Diri Anggota Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk ("Perseroan")	POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH IDX President Director	Information Disclosure on the Resignation of Board of Commissioners.	POJK No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors or Commissioners of Public Company
23	12 Maret 2019	073/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Penjualan Lippo Mall Puri.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH	Information Disclosure on the Proposed Sales of Lippo Mall Puri.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Company
24	12 Maret 2019	074/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Permohonan Pencatatan Saham Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).	POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
			OJK's CMSEHDX President Director	Information Disclosure to Request the Registration of Shares for Capital Increase without Pre-Emptive Rights.	POJK No.38/POJK.04/2014 on Capital Injection of Public Limited Companies without Rights Issue



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
25	12 Maret 2019	075/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release "Lippo Karawaci Dapatkan Dana USD 1 Miliar untuk Memulai Transformasi Strategis dan Umumkan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Baru."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Press Release titled : "Lippo Karawaci Received USD 1 Billion in Funding to Start Strategic Transformation and Announce New Board of Commissioners and Directors."	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
26	12 Maret 2019	076/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Pengumuman Keterbukaan Informasi tentang Bonds Tender.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Copy of Announcement of Bonds Tender.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
27	12 Maret 2019	077/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Execution of ASSA.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH IDX President Director	Information Disclosure on the Execution of Advance Share Subscription Agreement (ASSA).	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
28	12 Maret 2019	078/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Pemberitahuan Perubahan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun Buku 2018.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
			OJK's CMSEH IDX President Director	Notification of Revision of Venue of AGMS.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies General Meeting of Shareholders
29	12 Maret 2019	079/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material (Bonds Tender).	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH IDX President Director	Information Disclosure on the Launch of Bonds Tender.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
30	15 Maret 2019	081/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release berjudul : "Moody's Naikkan Prospek Peringkat PT Lippo Karawaci Tbk menjadi Stabil".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Press Release titled : "Moody's upgrades Lippo Karawaci's ratings outlook to Stable; Validates funding programme".	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
31	20 Maret 2019	090/LK-COS/ III/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan OJK OJK Director	Tanggapan surat OJK No. S-323 Perihal Keterbukaan Informasi PT Lippo Karawaci Tbk tanggal 12 Maret 2019. Response to OJK letter No. S-323 inquiring Information Disclosure dated 12 March 2019.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
32	20 Maret 2019	091/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul :"PT Lippo Karawaci Tbk Ditempatkan pada Rating Watch Positive oleh Fitch." Submission of Press Release titled: "PT Lippo Karawaci Tbk Placed on Positive Rating Watch by Fitch."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
33	20 Maret 2019	092/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Permohonan Penundaan Pengalihan Treasury Stock. Request for Extention Time of Transfer Treasury Stocks.	POJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka POJK No.30/POJK.04/2017 on Share Buyback by Public Limited Companies
34	21 Maret 2019	093/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's Capital Market MSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul : "PT Lippo Karawaci Tbk Cata Langkah Awal Positif dalam Program Pendanaan." Submission of Press Release titled: "Lippo Karawaci gains traction on funding programme; Pre-funding of USD280 million received."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
35	25 Maret 2019	114/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Pengumuman Bonds Tender. Submission of Announcement of Tender Bonds.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
36	25 Maret 2019	115/LK-COS/ III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul : "Para Pemegang Surat Utang Menunjukkan Keyakinan Terhadap Posisi Keuangan Lippo Karawaci." Submission of Press Release titled : "Noteholders Demonstrate Confidence in Lippo Karawaci's Financial Position."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
37	27 Maret 2019	102/LK-COS/ III/2019	KEPPM I OJK OJK's CMSEH	Bukti Iklan Pemanggilan RUPS T PT Lippo Karawaci Tbk. Submission of a copy of Invitation to AGMS.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies General Meeting of Shareholders



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
38	27 Maret 2019	103/LK-COS/III/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Laporan Tahunan 2018 PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of 2018 Annual Report.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
39	27 Maret 2019	124/LK-COS/III/2019	IDX Net e-reporting SPE OJK	Pemanggilan RUPS T PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
				Invitation to Annual GMS.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies GMS
40	28 Maret 2019	131/LK-COS/III/2019	IDX Net e-reporting SPE OJK	Penyampaian Pengumuman Bonds Tender.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
				Submission of Announcement of Bonds Tender Result.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
41	2 April 2019	141/LK-COS/IV/2019	Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK	Penjelasan terkait REIT.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK Deputy Commissioner for Capital Market Supervision	Explanation regarding REITs.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
42	8 April 2019	148/LK-COS/IV/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
			OJK Director for Service Sector Taxable Business	Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of March 2019.	OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
43	8 April 2019	149/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Monthly Report: Registration of Shareholders as of March 2019.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
44	11 April 2019	158/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Lippo Karawaci Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit.	POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
			OJK's CMSEH	Submission of Audit Committee Evaluation Report on the Implementation of Audit Services.	POJK No.13/POJK.03/2017 on the Employment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Service Activities

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
45	11 April 2019	161/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Perubahan dan /atau Tambahan Keterbukaan Informasi dalam rangka Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Lippo Karawaci Tbk. Changes and/or Additional Information relating to the Right Issue Plan.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
46	15 April 2019	167/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Penyampaian Perubahan dan/atau Tambahan KI kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Lippo Karawaci Tbk. Submission of Amendments and/or Additional Information Disclosure to Shareholders in the Context of Capital Additions through Right Issue PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
47	18 April 2019	180/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul: "Para Pemegang Saham Lippo Karawaci Menyetujui Right Issue dan Dewan Komisaris Baru." "Submission of Press Release titled: "Lippo Karawaci Shareholders Approve Right Issue and New Board Members."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
48	18 April 2019	181/LK-COS/IV/2019	Dewan Komisioner OJK OJK Board of Commissioners	Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Management Representation Letter For Financial Statement ending 31 December 2018 and 2017.	Peraturan Batepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Btepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
49	22 April 2019	202/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Hasil RUPS PT Lippo Karawaci Tbk. Announcement of AGMS Results.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies GMS
50	22 April 2019	203/LK-COS/IV/2019	KEPPMI OJK OJK's CMSEH	Laporan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Report on the Public Company Shares' Ownership.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
51	22 April 2019	207/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV. Cover Letter of Submission of Registration Statement of Right Issue IV.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
52	22 April 2019	213/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Pengumuman Informasi Mengenai Penawaran Umum Terbatas IV.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
			OJK's CMSEH IDX President Director	Information Disclosure relating to Right Issue.	POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
53	22 April 2019	214/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Pembentukan Komite Audit PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja KA
			OJK's CMSEH IDX President Director	Notification on the Establishment of the Audit Committee.	POJK No.55/POJK.04/2015 on the Setup and Work Implementation Guideline of AC
54	22 April 2019	215/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK	Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
			OJK's CMSEH	Submission of a Copy of Announcement relating to AGMS results.	POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies GMS
55	23 April 2019	217/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK	Kepemilikan Saham Perseroan atas nama John Riady.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
			OJK's CMSEH	Information Disclosure by Certain Shareholders: John Riady's shares in PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
56	25 April 2019	222/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK DiUt BEI	Pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Information Disclosure to the Shareholders of PT Lippo Karawaci Tbk.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
57	29 April 2019	227/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release Projek Rumah Sakit Myanmar.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Press Release of Myanmar Hospital Project.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
58	30 April 2019	235/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Kuartal I 2019 (Penelaahan Terbatas) PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of the Consolidated Financial Statement (Limited Review) for the 1st Quarter of 2019 of PT Lippo Karawaci Tbk.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
59	30 April 2019	236/LK-COS/IV/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release berjudul: "PT Lippo Karawaci Tbk Q1 2019 Catat Peningkatan 12% Pendapatan dan Posisi Neraca yang Kuat."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Press Release titled: "PT Lippo Karawaci Tbk Reports 1Q 2019 Results with 12% Increase Revenue and stronger Balance Sheet."	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
60	7 Mei 2019	247/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul: "Gateway Partners Ikuti Langkah George Raymond Zage III dan Chow Tai Fook Investasi di PT Lippo Karawaci Tbk." Submission of Press Release titled: "Gateway Partners Joins George Raymond Zage III and Chow Tai Fook in Investing in PT Lippo Karawaci Tbk."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
61	7 Mei 2019	248/LK-COS/V/2019	Direktur PP2 Kepala Division PP2 BEI Director Corporate Assessment2 DivisionHead Corporate Assessment2 BEI	Permintaan Penjelasan dan Reminder atas Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Respond to IDX Request for Explanation and Reminder of the Proposed Right Issue.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
62	9 Mei 2019	251/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Registration of Shareholders as of April 2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
63	9 Mei 2019	252/LK-COS/V/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK OJK Director for Service Sector	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of April 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
64	10 Mei 2019	263/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Surat Pengantar dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Lippo Karawaci Tbk. Cover Letter in regards to the Right Issue (PUT IV) of PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
65	10 Mei 2019	264/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Lippo Karawaci Tbk. Additional Information in the context of the Right Issue (PUT IV) of PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
66	10 Mei 2019	265/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Reissue Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi untuk Tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Management Representation Letter For Financial Statement ending 31 December 2018 and 2017.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
67	17 Mei 2019	283/LK-COS/V/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Risalah RUPST PT Lippo Karawaci Tbk. Submission of Minutes of AGMS.	POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka POJK No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of Public Limited Companies GMS
68	31 Mei 2019	307/LK-COS/V/2019	Dewan Komisioner OJK OJK Board of Commissioners	Surat Pernyataan Manajemen Bidang Akuntansi. Management Representation Letter For Financial Statement ending 31 December 2018 and 2017.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
69	10 Juni 2019	310/LK-COS/VI/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK OJK Director for Service Sector Taxable Business	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of May 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
70	10 Juni 2019	311/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Registration of Shareholders as of May 2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
71	10 Juni 2019	312/LK-COS/VI/2019	Dewan Komisioner OJK OJK Board of Commissioners	Surat Pernyataan Manajemen Bidang Akuntansi. Statement Letter from Management in Accounting.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
72	10 Juni 2019	315/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Surat Pengantar Untuk Tambahan Informasi Reg. 3 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Cover Letter for Updated Registration Statement 3 Right Issue	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
73	13 Juni 2019	321/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Audit). Reissue of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiary's Consolidated Financial Statement for the Year Ended 31 December 2018 (Audit).	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
74	14 Juni 2019	322/LK-COS/VI/2019	Direktur Utama BEI IDX President Director	Penyampaian Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Pengumuman Informasi PUT IV PT Lippo Karawaci Tbk. Disclosure of Additional Information and/or Changes Announcement of Right Issue IV of PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
75	14 Juni 2019	323/LK-COS/VI/2019	Direktur Utama BEI IDX President Director	Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (Tidak Diaudit). Reissue of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiary's Consolidated S which ended on 31 March 2019 (Unaudited).	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
76	14 Juni 2019	326/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Bukti Pengiriman Iklan Tambahan Informasi Terkait PUT IV kepada Publik via SPE OJK, IDX Net dan Web Perseroan. Proof of Submission of Advertisement for Additional Information Related to PUT IV to the Public via SPE OJK, IDX Net and the Company's Website.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
77	17 Juni 2019	332/LK-COS/VI/2019	Direktur Utama BEI IDX President Director	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Laporan Keuangan ke IDX. Application for Listing of Additional Shares on IDX.	
78	19 Juni 2019	341/LK-COS/VI/2019	IDX Net e-reporting	Jadwal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Lippo Karawaci Tbk. Rights Issue Schedule of PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
79	20 Juni 2019	343/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Penyampaian Press Release berjudul: "Laporan Keuangan Mendukung Incentif Pemerintah Tingkatkan Kepemilikan Rumah dan Hunian Terjangkau." Submission of Press Release titled: "LK Supports Government Incentives to Increase Home Ownership and Affordable Housing."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
80	27 Juni 2019	354/LK-COS/VI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul: "Peletakan Batu Pertama Axia III" Submission of Press Release titled: "Lippo Karawaci Announces Groundbreaking of AXIA III Development in Cikarang".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
81	8 Juli 2019	373/LK-COS/VIII/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK OJK Director for Service Sector Taxable Business	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of June 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
82	8 Juli 2019	374/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Registration of Shareholders as of June 2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
83	9 Juli 2019	378/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Disclosure of Changes in Ownership in a Listed Company (PT Lippo Karawaci Tbk in LPCK)	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
84	16 Juli 2019	384/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul : "PT Lippo Karawaci Tbk Berhasil Selesaikan Penawaran Umum Terbatasnya, Memperoleh Dukungan Signifikan dalam Rencana Perubahannya." Submission of Press Release titled: "PT Lippo Karawaci Tbk Successfully Completes its Right Issue, Gaining Significant Traction in Turnaround Plan".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
85	16 Juli 2019	385/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Lippo Karawaci Tbk. Appointment of additional members to the Audit Committee of PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit POJK No.55/POJK.04/2015 on the Setup and Work Implementation Guideline of Audit Committee
86	16 Juli 2019	386/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Pengiriman Prospektus PUT IV PT Lippo Karawaci Tbk. Submission of PT Lippo Karawaci Tbk IV Prospectus.	POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No.32/POJK.04/2015 on Capital Injection of Public Limited Companies through Right Issue
87	19 Juli 2019	393/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Laporan Kepemilikan Saham Pengurus. Disclosure of PT Lippo Karawaci Tbk Share Ownership by Commissioner or Director.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
88	19 Juli 2019	396/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK OJK's CMSEH	Penyampaian Press Release berjudul : "Fitch menaikkan satu tingkat peringkat PT Lippo Karawaci Tbk ke 'B-' dengan prospek stabil; Peningkatan kedua setelah S&P Global minggu lalu." Submission of Press Release titled: "Fitch upgrades PT Lippo Karawaci Tbk by one notch to 'B-' Rating and Stable outlook; Second upgrade following S&P's last week."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement
89	31 Juli 2019	406/LK-COS/VII/2019	Form E-012 IDX Net & SPE OJK	Laporan Kepemilikan Saham PT Inti Anugrah Pratama. Disclosure of Changes in Ownership by PT Inti Anugrah Pratama.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
90	31 Juli 2019	407/LK-COS/VII/2019	Form E-012 IDX Net & SPE OJK	Laporan Kepemilikan Saham PT Primantara Utama Sejahtera. Disclosure of Changes in Ownership by PT Primantara Utama Sejahtera.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
91	31 Juli 2019	408/LK-COS/VII/2019	Form E-012 IDX Net & SPE OJK	Laporan Kepemilikan Saham Sierra Inc. Disclosure of Changes in Ownership by Sierra Inc.	POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik POJK No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Public Limited Companies
92	31 Juli 2019	409/LK-COS/VII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Pemberitahuan Rencana Audit atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan. Notification of Limited Review on the 1 st Half 2019 Financial Statement.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
93	6 Agustus 2019	414/LK-COS/VIII/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK OJK Director for Service Sector Taxable Business	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of July 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
94	6 Agustus 2019	415/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Registration of Shareholders as of July 2019.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
95	13 Agustus 2019	423/LK-COS/VIII/2019	Kepala Division PP2 BEI	Pemberitahuan Rencana Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk Live 2019.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX Division Head for Corporate Assessment2	Notice of Public Expose Live 2019 Plan of PT Lippo Karawaci Tbk.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
96	13 Agustus 2019	431/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK	Penyampaian Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
			OJK's CMSEH	Submission of Audit Report on the Exercise and Allotment of Right Issue IV PT Lippo Karawaci Tbk.	POJK No.13/POJK.03/2017 on the Employment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Service Activities
97	22 Agustus 2019	447/LK-COS/VIII/2019	Kepala. Division PP2 BEI	Penundaan Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX Divisi Head for Corporate Assessment2	Notice of Postpone Public Expose.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
98	30 August 2019	460/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian LKKT PT Lippo Karawaci Tbk untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 (Penelaahan Terbatas).	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of the Consolidated Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk for the period ended June 30, 2019 (limited review).	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
99	30 August 2019	461/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Bukti Iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of Copy of Announced Summary Consolidated Financial Statement of PT Lippo Karawaci Tbk for the period ended June 30, 2019 in Newspaper.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
100	30 August 2019	462/LK-COS/VIII/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release berjudul: "PT Lippo Karawaci Tbk melaporkan Kinerja Keuangan 1H19 dengan Neraca yang lebih kuat dan posisi Likuiditas yang lebih baik Pasca dimulainya Penawaran Umum Terbatas".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of press release titled: "Lippo Karawaci Reports 1H19 Results With Stronger Balance Sheet And Improved Liquidity Position Following Commencement of Right Issue."	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
101	9 September 2019	475/LK-COS/IX/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
			OJK Director for Service Sector Taxable Business	Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of August 2019.	OJK Letter No.S-124/PM.23/2013

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
102	9 September 2019	476/LK-COS/IX/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Monthly Report: Registration of Shareholders as of August 2019.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
103	16 September 2019	482/LK-COS/IX/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Penyampaian Press Release berjudul: "PT Lippo Karawaci Tbk melengkapi perubahan Manajemen dengan Penunjukan yang sudah berpengalaman COO."	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			OJK's CMSEH IDX President Director	Submission of press release titled: "PT Lippo Karawaci Tbk completes management revamp with appointment of proven COO."	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
104	20 September 2019	493/LK-COS/IX/2019	Direktur Penilaian Perusahaan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Emitter 2 Penilaian Perusahaan	Permintaan Penjelasan Atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2019	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			Corporate Assessment Director Division Head for Corporate Monitoring and Evaluation 2 PP	Respond to IDX Request for Explanation relating to Financial Statement of 30 June 2019.	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
105	07 Oktober 2019	511/LK-COS/X/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
			OJK Director for Service Sector Business Financial Assessment	Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of September 2019.	OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
106	10 Oktober 2019	519/LK-COS/X/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Monthly Report: Registration of Shareholders as of September 2019.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
107	28 Oktober 2019	542/LK-COS/X/2019	Direktur Utama BEI	Pemberitahuan Rencana Penelaahan Terbatas atas Laporan Keuangan Q3 PT Lippo Karawaci Tbk untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX President Director	Notification of a Limited Review Plan for the Q3 Financial Statement of PT Lippo Karawaci Tbk for the Period ended 30 September 2019	IDX Regulation No.I-E Kep-306/ BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
108	29 Oktober 2019	545/LK-COS/X/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Rencana Pengalihan Saham Tresuri	POJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
			OJK Director for Service Sector BFA	Proposed Plan of Treasury Shares Transfer	POJK No.30/POJK.04/2017 on Share Buyback by Public Limited Companies



Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
109	31 Oktober 2019	550/LK-COS/X/2019	Ka. Dep Pengawas Pasar Modal 2B Dep.Head for Capital Market Supervisory 2B	Laporan Pengendali Perusahaan Terbuka Report of the Controller of the Public Company	POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka POJK No.9/POJK.04/2018 on the Takeover of Public Limited Companies
110	6 November 2019	556/LK-COS/XI/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK OJK Director for Service Sector Taxable Business	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk. Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of Oktober 2019.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013 OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
111	8 November 2019	560/LK-COS/XI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PPKR. Monthly Report: Registration of Shareholders as of Oktober 2019.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
112	26 November 2019	578/LK-COS/XI/2019	Ka.Div Penilaian Perusahaan 2 BEI Division Head for Corporate Assessment 2 IDX	Tanggapan atas Reminder Pelaksanaan Public Expose 2019 Response of Reminder Public Expose 2019	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
113	28 November 2019	582/LK-COS/XI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul : "PT Lippo Karawaci Tbk Mengumumkan Kerjasama Komprehensif dengan Softbank Corp., Jepang untuk memberikan solusi berbasis Teknologi" Submission of press release titled: PT Lippo Karawaci Tbk Announces Comprehensive Cooperation with Japan's Softbank Corp. on innovative Tehnology based Solution	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
114	29 November 2019	583/LK-COS/XI/2019	Direktur Utama BEI IDX President Director	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Kuartal III 2019 (Penelaahan Terbatas) PT Lippo Karawaci Tbk. Submission of the Consolidated Financial Statement (Limited Review) for the 3rd Quarter of 2019 of PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement
	29 November 2019	584/LK-COS/XI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI OJK's CMSEH IDX President Director	Penyampaian Press Release berjudul: " PT Lippo Karawaci Tbk menunjukkan traksi positif, melaporkan Meningkat 11,3% menjadi Rp8,27 Triliun Pasca Penyesuaian Laba satu kali yang dibukukan pada 9 bulan 2019" Submission of press release titled: "PT Lippo Karawaci Tbk Show Positive Traction, Reports 9 months 2019 results as Revenue increased by 11.3% to Rp8.27 Trillion post adjustment for one time Sale".	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 on Information Submission Requirement

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Daftar Korespondensi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019
List of the Company's Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

No.	Tanggal Date	No. Surat Letter No.	Tujuan Addressee	Perihal Subject	Peraturan Regulation
115	2 Desember 2019	587/LK-COS/XI/2019	Direktur Utama BEI	Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX President Director		IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement
116	9 Desember 2019	597/LK-COS/XI/2019	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK	Laporan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Lippo Karawaci Tbk.	Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
			OJK Director for Service Sector Taxable Business	Monthly Report: Data on Foreign Debt/Liabilities as of November 2019.	OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
117	9 Desember 2019	598/LK-COS/XI/2019	KEPPM OJK Direktur Utama BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Lippo Karawaci Tbk.	Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
			OJK's CMSEH IDX President Director	Monthly Report: Registration of Shareholders as of November 2019.	Bapepam Regulation No.X.K.2 on Regular Financial Statement Submission Requirement
118	11 Desember 2019	604/LK-COS/XII/2019	Direktur Utama BEI	Penyampaian Materi Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX President Director	Submission of Public Expose Material	IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement
119	11 Desember 2019	605/LK-COS/XII/2019	Plh. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa	Klarifikasi permintaan penjelasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 30 Juni 2019 ('LKTT 2019')	
			Acting Director for Service Sector Taxable Business	Clarification on Mid-year Financial Statement Review 30 June 2019 ('LKTT 2019')	
120	19 Desember 2019	610/LK-COS/XII/2019	Direktur Utama BEI	Laporan Pelaksanaan Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk	Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
			IDX President Director	PT Lippo Karawaci Tbk Public Expose Implementation Report	IDX Regulation No.I-E Kep-306/BEI/07-2004 on Information Submission Requirement

OJK = Otoritas Jasa Keuangan · BEI = Bursa Efek Indonesia · IDX = Indonesian Stock Exchange

Paparan Publik

Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Investor Relation menyelenggarakan Paparan Publik /Public Expose pada tanggal 16 Desember 2019 di Aryaduta Hotel Lippo Village. Laporan hasil Paparan Publik /Public Expose telah disampaikan kepada IDX tanggal 19 Desember 2019.

Public Expose

Corporate Secretary and Investor Relation organized a Public Expose on December 16, 2019 in Aryaduta Hotel Lippo Village. The Public Expose report was submitted to IDX on December 19, 2019.



Persiapan dan Pelaksanaan Aksi Korporasi

Divisi Sekretaris Perusahaan berpartisipasi aktif dalam mendukung proyek-proyek korporasi Perseroan. Pada tahun 2019, kami merupakan bagian dari tim kerja dalam:

- Di Maret 2019 pengumuman rencana transformasi strategis untuk memperkuat neraca, memperbaiki likuiditas, dan menghasilkan pendapatan melalui investasi pada proyek-proyek utama yang sedang berjalan.
- Pada April 2019, menyelesaikan penjualan kepemilikan di dua perusahaan patungan layanan kesehatan di Myanmar kepada dua anak usaha tidak langsung dari OUE Lippo Healthcare Limited ("OUELH") senilai USD19,5 juta.
- Pada Juni - Agustus 2019, proses melunasi fasilitas pinjaman sindikasi UBS-DB senilai USD50 juta.
- Pada April - Juli 2019, persiapan penyampaian pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas ('PUT') IV hingga diperolehnya pernyataan efektif dari OJK dan selesainya pelaksanaan dan penjatahan PUT IV dan menyiapkan akta peningkatan modal disetor bersama notaris.

Siaran Pers

Keterbukaan informasi mengenai Perseroan juga tampak melalui berbagai siaran pers yang dipublikasikan. Berikut adalah siaran pers terkait Perseroan sepanjang 2019:

TANGGAL Date	TOPIK Topic
6 Maret 2019 March 6, 2019	Laporan Keuangan Audit LPKR 2018: Pendapatan Naik 18% YoY Dan Ebitda Naik 42% YoY LPKR 2019 Audited Financial Statements: Revenue Increase 18% YoY and Ebitda Rise 42% YoY
12 Maret 2019 March 12, 2019	Lippo Karawaci Dapatkan Dana USD 1 Miliar untuk Memulai Transformasi Strategis Lippo Karawaci Receives USD 1 Billion to Starting Strategic Transformation
15 Maret 2019 March 15, 2019	Moody's Naikkan Prospek Peringkat Lippo Karawaci menjadi Stabil, S&P menjadi CreditWatch Positif. Moody's Raised Prospect of Lippo Karawaci's Rating to Stable, S&P to Positive CreditWatch.
20 Maret 2019 March 20, 2019	Lippo Karawaci Ditempatkan Pada Rating Watch Positive oleh Fitch. Lippo Karawaci Placed at Positive Watch Rating by Fitch.
21 Maret 2019 March 21, 2019	LPKR Catat Langkah Awal Positif dalam Program Pendanaan. LPKR Records Positive Initial Steps in Funding Programs.
18 April 2019 April 18, 2019	Para Pemegang Saham Lippo Karawaci Menyetujui Right Issue dan Dewan Komisaris serta Direksi Baru Lippo Karawaci's Shareholders Approve Right Issue and Board of Commissioners and New Directors
29 April 2019 April 29, 2019	Lippo Karawaci Menyelesaikan Penjualan Rumah Sakit di Myanmar Lippo Karawaci Completes Hospital Sale in Myanmar
30 April 2019 April 30, 2019	Laporan Keuangan Lippo Karawaci Q1 2019 Catat Peningkatan 12% Pendapatan Dan Posisi Neraca Yang Kuat Lippo Karawaci Q1 2019 Financial Report Record 12% Increase in Revenue and Strong Balance Sheet Position

Preparation and Execution of Corporate Action

Corporate Secretary division actively participated in supporting the Company's corporate projects. In 2019, we were part of a team in working on:

- In March 2019, the announcement of the strategic transformation plan to strengthen balance sheet, improve liquidity and generate returns through investments in existing key projects.
- In April 2019 completion process of the sale of its interests in two healthcare joint ventures in Myanmar to two indirect wholly owned subsidiaries of OUE Lippo Healthcare Limited ("OUELH"), for USD19.5 million.
- In June - August 2019, process of fully repaid USD 50 mn UBS-DB syndicated loan.
- In April - July 2019 preparing the submission of registration statement of Rights Issue IV until obtaining the effective letter from OJK and completion of subscription exercise and allotment and preparing for deed to increase the paid up capital with the notary.

Press Release

Information disclosures of the Company are supported with the following list of press releases in 2019 as stated below:

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

TANGGAL Date	TOPIK Topic
7 Mei 2019 May 7, 2019	Gateway Partners Ikuti Langkah George Raymond Zage III Dan Chow Tai Fook Investasi di Lippo Karawaci Gateway Partners Invest in Lippo Karawaci, Follow the Steps of George Raymond Zage III and Chow Tai Fook
20 Juni 2019 June 20, 2019	Lippo Karawaci Mendukung Insentif Pemerintah Tingkatkan Kepemilikan Rumah dan Hunian Terjangkau. Lippo Karawaci Supports Government Incentives to Increase Ownership of Affordable Homes and Residential Properties.
27 Juni 2019 June 27, 2019	Lippo Karawaci Mengumumkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Axia III Di Cikarang Lippo Karawaci Announces Ground Breaking of Axia III Construction in Cikarang
16 Juli 2019 July 16, 2019	Lippo Karawaci Berhasil Selesaikan Penawaran Umum Terbatasnya, Memperoleh Dukungan Signifikan Dalam Rencana Perubahannya Lippo Karawaci Successfully Completed a Limited Public Offering, Gained Significant Support In the Amendment Plan
19 Juli 2019 July 19, 2019	S&P Global Meningkatkan Peringkat Lippo Karawaci ke 'B-' Dengan Prospek Stabil S&P Global Upgrade Lippo Karawaci's Rating to 'B-' with a Stable Outlook
22 Juli 2019 July 22, 2019	Fitch Menaikkan Satu Tingkat Peringkat Lippo Karawaci ke 'B-' Dengan Prospek Stabil; Peningkatan Kedua Setelah S&P Global Minggu Lalu Fitch Raised Lippo Karawaci's Rating to 'B-' with a Stable Outlook; the Second Increase After S&P Global's Last Week
30 Agustus 2019 August 30, 2019	Lippo Karawaci Melaporkan Kinerja Keuangan 1H19 Dengan Neraca Yang Lebih Kuat Dan Posisi Likuiditas Yang Lebih Baik Pasca Dimulainya Penawaran Umum Terbatas Lippo Karawaci Reports 1H19 Financial Performance With A Stronger Balance Sheet and Better Liquidity Position After the Commencement of Limited Public Offering
12 September 2019 September 12, 2019	Lippo St. Moritz Puri Bersama Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Resmikan Kegiatan Tanam 2.074 Pohon Pucuk Merah Di Lingkungan Apartemen St. Moritz Puri Jakarta Barat Lippo St. Moritz Puri and the Indonesian Ministry of Environment & Forestry Officially Inaugurates 2,074 Planting of pucuk Merah Trees in the Apartment St Environment Moritz Puri West Jakarta
16 September 2019 September 16, 2019	Lippo Karawaci Melengkapi Perubahan Manajemen Dengan Penunjukkan Chief Operating Officer Yang Sudah Berpengalaman Lippo Karawaci Completes Management Transformation by Appointing an Experience Chief Operating Officer
31 Oktober 2019 October 31, 2019	Lippo Cikarang Melaporkan Pertumbuhan Normal Pendapatan, Meningkat Sebesar 5,8% Menjadi Rp1.060 Miliar Di 9 Bulan Pertama Tahun 2019 Lippo Cikarang Reports a Normal Revenue Growth, Increases 5.8% to Rp1,060 Billion in the First 9 Months of 2019
6 November 2019 November 6, 2019	Tenant Gathering Lippo Mall East Side Lippo Mall East Side Tenant Gathering
7 November 2019 November 7, 2019	Grand Opening RSU Syubbanul Wathon: Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin Meresmikan Rumah Sakit Hasil Kemitraan PBN, Yayasan Syubbanul Wathon, dan Lippo Group Grand Opening of Syubbanul Wathon Public Hospital: Indonesian Vice President K.H. Ma'ruf Amin Inaugurates PBN Partnership Hospital, Syubbanul Wathon Foundation, and Lippo Group
11 November 2019 November 11, 2019	Lippo Cikarang Serah Terima 508 Unit Apartemen Dengan Nilai Investasi Rp520 Miliar Lippo Cikarang Hands Over 508 Apartment Units With an Investment Value of Rp 520 Billion
13 Novemver 2019 November 13, 2019	Lippo Cikarang Mengangkat M.C. Loh Seorang Pemimpin Real Estat Yang Sudah Berpengalaman Sebagai Chief Executive Officer Lippo Cikarang Appoints M.C. Loh A Real Estate Leader Experienced As Chief Executive Officer
27 November 2019 November 27, 2019	PT Lippo Karawaci Tbk Mengumumkan Kerjasama Komprehensif Dengan SoftBank Corp., Jepang Untuk Memberikan Solusi Berbasis Teknologi Inovatif PT Lippo Karawaci Tbk Announces Comprehensive Collaboration with SoftBank Corp., Japan to Provide Innovative Technology-Based Solutions
29 November 2019 November 29, 2019	Lippo Karawaci Menunjukkan Traksi Positif, Melaporkan Hasil 9M2019 Dimana Pendapatan Meningkat 11,3% Menjadi Rp 8,27 Triliun Pasca Penyesuaian Laba Satu Kali Yang Dibukukan Pada 9M2018 Lippo Karawaci Shows Positive Traction, Reports Results 9M2019 Where Revenues Increase 11.3% to Rp 8.27 Trillion After Profit Adjustment Booked in 9M2018



HUBUNGAN INVESTOR

Manajemen dan Hubungan Investor (IR) Perseroan sangat mementingkan hubungan baik dengan para investor lokal maupun asing, analis, *fund manager*, bankir investasi, pialang/broker, pemeringkat kredit, Kami senantiasa memastikan untuk selalu memberitahukan kepada para pemangku kepentingan kami tentang perkembangan strategi bisnis, kinerja keuangan, dan operasional kami.

Perseroan memiliki bagian khusus mengenai IR dalam situs resminya, di mana terdapat tersedia materi IR terkait dengan hasil laporan keuangan kuartalan. Siaran Pers, presentasi investor dan laporan keuangan secara kuartalan maupun setahun penuh, semuanya tersedia dan dapat diakses di situs resmi Perseroan. Selain itu, pengumuman resmi dan Siaran Pers juga dikirimkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), dicantumkan di situs resmi Perseroan serta diterbitkan bagi para analis dan media dalam rangka keterbukaan informasi.

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan akses bagi para pemangku kepentingan atas informasi yang komprehensif, tepat waktu, dan setara mengenai kegiatan Perseroan sehingga memudahkan mereka dalam membuat keputusan investasi. Perseroan memperlakukan seluruh pemegang sahamnya secara adil dan merata, serta menjaga agar para pemangku kepentingan lainnya serta para analis di seluruh dunia mendapatkan informasi yang memadai dan tepat waktu serta konsisten terkait aksi korporasi, termasuk perubahan dalam Perseroan atau kegiatan usahanya yang mungkin dapat mempengaruhi harga atau nilai sahamnya secara material.

Divisi IR Perseroan juga mengadakan rapat *one-on-one* dengan para analis riset untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti perkembangan keuangan dan operasional bisnis Perseroan. Kami juga mengadakan acara kunjungan ke proyek-proyek properti Perseroan bagi para analis dan investor guna meningkatkan pengetahuan mereka mengenai strategi bisnis dan operasional Perseroan.

Perseroan mengadakan paparan publik setidaknya satu kali dalam setahun untuk bertemu kembali dengan para pemangku kepentingan. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan komunitas investasi, pada tahun 2019, IR Perseroan mengadakan 154 pertemuan, dan banyak sekali berkomunikasi melalui telepon dengan para analis dan investor untuk membahas strategi bisnis serta operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Untuk memelihara, dan mendiversifikasi basis pemegang saham, secara aktif tim IR kami telah berpartisipasi dalam 28 konferensi lokal dan internasional, di Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

INVESTOR RELATIONS

The Company's management and Investor Relations (IR) teams place great importance on building strong relationships with local and foreign investors, analysts, fund managers, investment bankers, brokers and credit rating agencies. We continuously ensure all of our stakeholders are updated of our business strategy, financial performance and operations.

The Company has a dedicated IR section on our website where we publish our IR materials related to the financial results on a quarterly basis. Additionally, press releases, investor presentations and quarterly and full year financial reports are available on the corporate website. Official announcements and press releases are filed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), updated on our website and issued to analysts and media for coverage.

The Company is committed to providing stakeholders with comprehensive, timely and equal access to information about our activities to enable each the opportunity to make informed investment decisions. The Company treats all of our shareholders fairly and equitably and strives to maintain all of our shareholders, other stakeholders and analysts around the world well informed of corporate actions, including changes in the Company or its business which could materially affect the price or value of our shares, on a timely and consistent basis.

The Company's IR holds regular one-on-one meetings with research analysts to keep them abreast of our financial performance and business operations. We also have a site visit trip for analysts and investors covering our Company to our property projects, to increase their understanding of the Company's business strategy and operations.

The Company holds a public exposé once a year to touch base with its stakeholders. To communicate effectively with the investment community, in 2019, the Company's IR had 154 meetings, plus numerous phone calls with analysts and investors to discuss our business strategies and operations, as well as financial performance. To actively update, maintain and grow our diversified and robust shareholder base, our IR team attended 28 local and overseas conferences, in Asia, Europe and the USA.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Berikut adalah jadwal *roadshow* yang dilakukan oleh Investor Relations pada 2019:

Below is the list of roadshow schedule attended by:

TANGGAL KEGIATAN Date		JENIS KEGIATAN Events	TEMPAT Venue
Januari January	15 - 16	Nomura Indonesia All Access 2019	Jakarta, Indonesia
Februari February	25 - 27	J.P. Morgan 2019 Global Emerging Markets Corporate Conference	Florida, USA
	27 - 28	Citi 16th Annual Asia Pacific Investor Conference 2019	Singapura Singapore
Maret March	25 - 28	22nd Credit Suisse Asian Investment Conference	Hongkong
April April	5	CLSA Lippo Karawaci Management Roadshow (11:30 - 17:00)	Jakarta, Indonesia
	10	BAML Indonesia Corporate Day	Jakarta, Indonesia
	10	Mandiri NDR	Singapura Singapore
Mei May	09 - 10	Maybank KE Invest Asia Conference	Singapura Singapore
	15 - 17	UBS ASEAN Conference	New York and San Francisco, USA
	20 - 24	HSBC NDR	Boston, Chicago, Texas, USA
	29 - 31	BAML Emerging Markets Debt and Equity Conference	Florida, USA
Juni June	5 - 6	Deutsche Bank 23rd Annual European Leveraged Finance Conference	London, UK
	25	Euromoney 2nd Annual Asia Sustainable & Responsible Capital Markets Forum	Hongkong
	26	Citi ASEAN C-Suite Investor Conference 2019	Singapura Singapore
	27	Citi Asia-Pacific Property Conference 2019	Hongkong
	28	CIMB 13th Annual Indonesia Conference	Bali, Indonesia
Agustus August	5	HSBC NDR	Singapura Singapore
	7	Citi Indonesia Investor Conference	Jakarta, Indonesia
	14	Credit Suisse 2019 Indonesia Conference	Singapura Singapore
September September	4 - 5	Citi's GEM Conference New York 2019	New York, USA
	16	UBS Corporate Invitation: OneASEAN Conference 2019	Bangkok, Thailand
	23 - 24	CLSA NDR	Boston, New York, USA
	25	J.P. Morgan Emerging Markets Credit Conference	London, UK
	26 - 27	Citi NDR	Stockholm, Sweden and Toronto, Canada
	Sep 30 - Oct 1	CLSA NDR	UK and Europe
November November	7	Nomura Asian High Yield Corporate Day 2019	Hong Kong
	8	Maybank KE NDR	Hong Kong
	11 - 12	CLSA NDR	London, UK



UNIT AUDIT INTERNAL

Dasar Hukum Penunjukan

Audit Internal dibentuk Perseroan berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, diangkat berdasarkan pada surat keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi auditor internal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal.

Profil Ketua Audit Internal



Warga negara Indonesia, 55 tahun. Bapak Arthur meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1988.

Beliau juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bagi Kepala Satuan Pengawas Internal di Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) pada tahun 2013 dan menyandang gelar Professional Internal Audit.

Beliau memiliki karir profesional dalam bidang Teknologi Informasi, Akunting, dan Auditing dalam berbagai perusahaan sebelum bergabung dengan salah satu anak usaha Perseroan PT Artha Sarana Prima sebagai VP Security Guard pada tahun 1999. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Lippo Karawaci Tbk dari 2000 hingga 2003. Setelah itu, beliau menjabat berbagai posisi penting di Perseroan dan anak-anak usahanya.

Struktur dan Komposisi Audit Internal

Pada 2019, Unit Audit Internal Perseroan memiliki 18 anggota yang berdedikasi penuh dan kompeten dalam bidangnya. Unit Audit Internal bertanggung

INTERNAL AUDIT UNIT

Legal Basis of Appointment

The Internal Audit unit was established by the Company based on OJK Regulation No.56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding Establishment and Guidelines of the Internal Audit Unit Charter. Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director, appointed based on the Board of Directors' decision after obtaining the approval of the Board of Commissioners by considering the fulfillment of the requirements to become an internal auditor as stipulated in the Internal Audit Unit Charter.

Profile of Head of Internal Audit

Arthur F. Kalesaran

Ketua Audit Internal

Head of Corporate Internal Audit

He is an Indonesian citizen, 55 years old. Mr. Kalesaran graduated from University Padjadjaran, Bandung in 1988 with Accounting degree majoring in Economics.

He attended special education and training for Head of Internal Audit Unit at the Center for Development of Accounting and Finance (PPAK) in 2013 and he also holds the Internal Audit Professional certification.

He had professional careers in IT, Accounting, and Auditing in several companies prior to joining as VP Security in Company subsidiary PT Artha Sarna Prima in 1999. Later, he served as Director of PT Lippo Karawaci Tbk from 2000-2003. Subsequently he served in key positions in the Company and its subsidiaries.

Structure and Composition of Internal Audit

In 2019, the Company's Internal Audit consisted of 18 fully dedicated and competent members. This unit is directly responsible to the President Director and provides reports

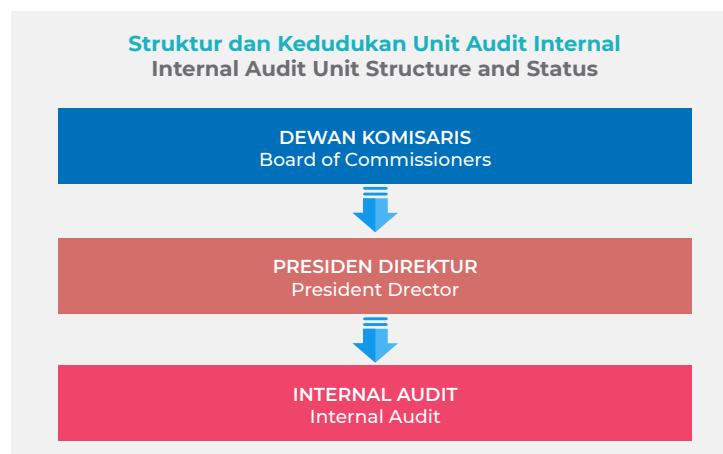
TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal diberitahukan secara tertulis kepada OJK.

related to its duties to the Board of Commissioners (through the Audit Committee) as well as to the President Director.

An auditor, member of the Internal Audit is responsible directly to the head of the Internal Audit. Every appointment, replacement or termination of the head of Internal Audit Unit shall be immediately notified to the OJK.



Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal bertugas untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektivitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman dan limit-limit yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas akurasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakukan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, audit reguler maupun audit khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus didukung oleh auditor yang independen, kompeten dan profesional.

Internal Audit Unit Structure and Status

Duties and Responsibilities

Internal Audit performs the following duties to:

1. Assist the President Director and Board of Commissioners, especially the Audit Committee appointed by the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the implementation of internal control and risk management to be in line with the Company's policies.
2. Develop and implement an annual plan of Internal Audit.
3. Review independency, efficiency, and effectiveness of all management functions in the Company.
4. Assess the effectiveness of the internal control system, including compliance to policies, procedures, guidelines and limits that have been set.
5. Assess the reporting system as well as assess the accuracy and timeliness of reporting to management.
6. Assess the feasibility and fairness of accounting guidelines and treatment used and test compliance with the accounting policies and guidelines that have been established.
7. Conduct internal audits effectively by doing Current Audits, Regular Audits or Special Audits. Those internal audit activities are supported by the independent, competent, and professional auditors.



8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.

Selain itu, Unit Audit Internal juga bertanggung jawab dalam:

1. Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan Komite Audit.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan Komite Audit.
3. Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
4. Menyampaikan laporan berkala dan ringkasan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
5. Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam

8. Results of audit findings are reported directly to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee).
9. Perform inspection and assessment of the efficiency and effectiveness of finance accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
10. Provide improvement advice and information objectively regarding activities examined at all levels of management.
11. Monitor, analyze and report implementation of following-up actions that have been suggested.
12. Work closely with the Audit Committee.
13. Develop programs to evaluate the quality of internal audits carried out.
14. To investigate if there are indications of fraud, embezzlement or other indications adverse to the Company.

Moreover, Internal Audit is responsible for the following, to:

1. Submit a flexible annual audit plan to the Audit Committee to be reviewed and approved.
2. Execute the annual audit plan that has been approved including special duties requested by the President Director and the Audit Committee.
3. Maintain professional auditor members whose knowledge, skills and experience are sufficient to perform duties.
4. Submit periodic reports, a summary of audits to the President Director and the Audit Committee.
5. Assist investigations on suspected significant irregularities in the Company and submit the audit results to the President Director and Audit Committee.

Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sejak 23 Februari 2016. Perseroan membentuk Divisi Audit Internal untuk membantu menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan objektif terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Piagam Audit Internal telah diumumkan di dalam situs Perseroan. Piagam Audit Internal dapat ditinjau secara berkala atau diperbarui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Internal Audit Charter

The Company set the Internal Audit Charter effective as of February 23, 2016. The function of the Internal Audit Division is to assist the Company in managing the audit functions and Internal Audit provides independent and objective assessment of the effectiveness of risk management, internal control and compliance to the corporate governance process of each work unit and daily process.

The Internal Audit Charter is published on the Company's website. The Internal Audit Charter may be reviewed periodically, or updated when it is deemed necessary for a more refined considering applicable provisions and regulations as approved by the Board of Commissioners.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal

Selama 2019, Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan di 105 lokasi usaha Perseroan dan menerbitkan 217 laporan hasil pemeriksaan. Seluruh laporan yang merangkum semua temuan hasil audit telah disampaikan kepada tiap manajemen unit usaha dan telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi audit.

Berdasarkan hasil temuan yang terangkum dalam laporan kepada Manajemen Perseroan, beberapa hal yang akan terus dikembangkan oleh Perseroan adalah:

1. Peningkatan kualitas pengendalian internal untuk mencegah bahaya kebakaran, terkait dengan peralatan dan perlengkapan pencegahan bencana dan peralatan pemadam kebakaran.
2. Peningkatan kepatuhan pada peraturan, perizinan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama pemantauan atas izin-izin Perseroan serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan lainnya.
3. Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan dan pencatatan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan.
4. Meningkatkan ketataan pada Peraturan Perusahaan serta SOP yang berlaku.

Pemeriksaan internal yang dilakukan meliputi penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian kuartalan dan tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Atas penelaahan laporan keuangan tersebut, tidak terdapat temuan material yang terjadi di dalam Perseroan.

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Saptoto Agustomo telah ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 18 April 2019 ('RUPST 2019') untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak.

RUPST 2019 juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

Perseroan telah menerima surat dari KAP AAJAMR No. 225119/SAT/1114 sehubungan dengan penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Perseroan.

Audit Internal Activities

In 2019, Internal Audit examined 105 locations of the Company's business and provided 217 audit result. All reports summarized all audit findings and were submitted to each management business unit with the following-up actions according to the audit recommendations.

In accordance to the summarized findings in the reports to the Company's Management, there are several issues to be developed:

1. Improving the quality of internal control to prevent fire hazards, related to disaster prevention equipment and fire fighting equipment.
2. Improving compliance to the applicable regulations, licensing and legislation, especially monitoring of the Company's permits as well as the compliance to other regulations.
3. Improving supervision on financial management and records to improve accountability and transparency of the financial management.
4. Improving compliance to the Company's regulations as well as applicable SOPs.

Those Internal examinations include the Company's quarterly and annual consolidated financial statements ended on December 31, 2019.

Based on the examinations on financial statements, there was no material finding in the Company.

PUBLIC ACCOUNTANT

Independent Public Accountant (KAP), Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner and Public Accountant Saptoto Agustomo was appointed by the AGMS held on 18 April 2019 ('AGMS 2019') to perform an audit on Consolidated Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk and its Subsidiaries.

AGMS 2019 also gave authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to determine the wage and other requirements for the KAP and determine the replacement KAP in the case where the appointed KAP is, for any reason, unable to complete the audit of the Company's Financial Statements in 2019

The Company has received a letter from KAP AAJAMR No. 225119/SAT/1114 related to replacement of the accountant who has given the task of auditing the Company.



Dewan Komisaris berdasarkan wewenang yang diberikan RUPST 2019 telah memutuskan untuk menyetujui rekomendasi penggantian Akuntan Publik dari Bapak Saptoto Agustomo menjadi Bapak Tjun yang diajukan Komite Audit Perseroan sesuai surat dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan.

Perseroan telah melaporkan perubahan Akuntan Publik ke OJK sesuai surat No. 194/LK-COS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

KAP yang ditunjuk tersebut tidak memberikan jasa lain selain audit atas buku Perseroan. Total biaya audit yang diberikan kepada KAP selama 2019 adalah sebesar Rp2,2 miliar.

Berikut adalah nama KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan Perseroan selama 5 tahun terakhir:

The Company has received a letter from KAP AAJAMR No... The Board of Commissioners as authorized by the AGMS 2019, resolved to approve the recommendation of the Audit Committee to replace the Public Accountant from Mr. Saptoto Agustomo to Mr. Tjun Tjun considering the letter from Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar and Partner.

The Company has reported the change of Public Accountant to OJK by letter No. 194/LK-COS/V/2020 dated 27 May 2020.

The appointed KAP did not provide any other services than the general audit of the Company's books. Total fee for auditing during 2019 was Rp2.2 billion.

Following is the list of KAP and auditor's name who conducted audit activities on the Company's financial statement for the last 5 (five) years.

Tahun Year	KAP IAP	Nama Auditor Auditor's Name
2015	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Didik Wahyudiyanto
2016	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Didik Wahyudiyanto
2017	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Saptoto Agustomo
2018	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Saptoto Agustomo
2019	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Tjun Tjun

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko yang efektif merupakan salah satu hal terpenting bagi keberhasilan Perseroan agar dapat mencapai keseimbangan antara risiko yang diambil atas keputusan bisnis dan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Tujuan dari manajemen risiko dapat dicapai dengan penerapan kerangka manajemen risiko yang sehat, terdiri dari:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk berbagai area risiko yang dihadapi Perseroan seperti Risiko yang memiliki pengaruh signifikan, Risiko yang bersifat material serta Risiko Umum.
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas pada berbagai jenjang jabatan.
3. Proses manajemen risiko yang memadai, pemantauan risiko dan proses pengendalian risiko.
4. Infrastruktur yang memadai untuk berjalannya perseroan, seperti sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Effective risk management is one of the most important things for the success of the Company in order to achieve a balance between the risks taken on business decisions and the level of profit generated. The objectives of risk management can be achieved by implementing a sound risk management framework, consisting of:

1. Comprehensive risk management policies for various risk areas faced by the company such as Risks that have significant influence, Risks that are material in nature and General Risks.
2. Appropriate organizational structure with clear definitions of roles and responsibilities at various levels of position.
3. Adequate risk management processes, risk monitoring and risk control processes.
4. Adequate infrastructure for the operation of the company, such as the Information Technology and Human Resources system.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Perseroan menyadari bahwa pengelolaan risiko wajib dilakukan secara aktif dalam rangka mengurangi dampak dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, Perseroan mengelola dan memitigasi risiko dengan berbagai instrumen seperti lindung nilai keuangan dan asuransi.

Pada tahun 2019, Perseroan tetap terus mempertahankan strategi pengelolaan risiko yang telah terbukti efektif diterapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan juga aktif mengevaluasi seluruh faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi. Perseroan berupaya untuk menyeimbangkan risiko tersebut sehingga pada akhirnya dapat mencapai kinerja yang lebih solid sebagai hasil upaya usaha Perseroan.

Penjabaran Risiko yang Dihadapi Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran risiko yang potensial dihadapi oleh Perseroan dan berbagai cara mitigasinya:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan

Sejalan dengan kompleksitas industri properti yang terus bertambah dan juga ukuran aset Perseroan yang semakin bertambah, risiko yang dihadapi juga semakin kompleks. Perseroan senantiasa mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan keseluruhan roda bisnisnya, baik yang dapat dikendalikan secara internal maupun risiko yang di luar kendali Perseroan. Risiko yang bersifat internal akan coba dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya oleh Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama potensinya dan dampaknya bagi Perseroan. Salah satu risiko eksternal dan juga utama adalah risiko dari fluktuasi pasar properti yang selama beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada hasil usaha Perseroan.

Risiko Fluktuasi Pasar Properti

Industri real estat di Indonesia mengalami siklus dan terkait erat dengan perubahan kondisi makro ekonomi nasional. Setiap perubahan pada inflasi, tingkat suku bunga acuan, pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar akan berdampak pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang mendukung serta permintaan terhadap produk properti Perseroan.

Fluktuasi kegiatan dan kondisi pasar properti dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha, prospek pertumbuhan dan kondisi keuangan Perseroan. Setiap

The Company realizes that risk management must be carried out actively in order to reduce the impact of various risks that may arise. Therefore, the Company manages and mitigates risks with various instruments such as financial hedges and insurance.

In 2019, the Company will continue to maintain a risk management strategy that has been proven effective in the previous year. In addition, the Company also actively evaluates all identified risk factors. The Company strives to balance these risks so that in the end it can achieve more solid performance as a result of the Company's business efforts.

Description Of Risk Faced By The Company

The following is a description of the potential risks faced by the Company and various ways of mitigation:

A. Main Risks That Have Significant Effects

In line with the increasing complexity of the property industry and the size of the Company's assets, the risks faced are also increasingly complex. The Company always anticipates various risks that may arise in running its entire business wheels, both those that can be controlled internally and risks that are beyond the Company's control. Internal risks will try to be controlled and minimized by the Company by applying the precautionary principle. External risks must be carefully identified as far as their potential and impact on the Company. One of the main external and also risks is the risk of fluctuations in the property market which in the last few years has had a direct impact on the Company's operating results.

Risk of Fluctuation in The Property Market

Real estate industry in Indonesia experiencing cycles and changes due to national macro economic condition. Every change in inflation, benchmark interest rate, national economic growth, exchange rates influences the Company to obtain funding with effective interest rates and which affects demand for the Company's property products.

The fluctuation of property market activities and conditions may negatively affect business activities, growth prospects and financial conditions of the



perlambatan pertumbuhan pasar properti di Indonesia dapat berdampak pada menurunnya kegiatan ekspansi Perseroan pada bidang kawasan perumahan, properti komersial, ritel dan rumah sakit.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

i. Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Properti

1. Risiko Meningkatnya Kompetisi di Pasar Properti Indonesia

Properti yang dikembangkan Perseroan di masa yang akan datang akan menghadapi kompetisi dari pengembang lainnya dalam hal lokasi, fasilitas, infrastruktur pendukung, pelayanan dan harga. Meningkatnya kompetisi antara pengembang properti dapat meningkatkan harga akuisisi lahan serta mengakibatkan kelebihan pasokan properti yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

2. Risiko pada Investasi dan Aksi Korporasi Perseroan

Perseroan memiliki berbagai bidang usaha yang dikelola oleh anak usaha. Usaha Perseroan meliputi Properti Business, Bisnis Healthcare, Bisnis Ritel, Bisnis Perhotelan, Bisnis Portfolio Management dan Bisnis Tata Kelola Kota Mandiri. Performa keuangan Perseroan akan bergantung pada performa anak usaha yang akan dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan.

Perseroan juga secara aktif melakukan berbagai investasi kepada proyek pengembangan baru properti, oleh karena itu Perseroan juga melakukan berbagai aksi korporasi. Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi dan aksi korporasi akan selalu menguntungkan.

3. Risiko Ketersediaan dan Tingkat Suku Bunga Pendanaan bagi Calon Pembeli Properti Perseroan

Perubahan tingkat suku bunga acuan adalah salah satu hal penting bagi tingkat penjualan Perseroan di mana sebagian pembeli melakukan pembelian dengan cara Kredit Pemilikan Rumah maupun Kredit Pemilikan Apartemen. Keputusan Bank Indonesia pada Oktober 2019 untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 5 persen akan berdampak positif bagi tingkat penjualan. Pada dasarnya, tingkat suku bunga acuan

Company. Every halt of growth in Indonesia's property market may affect the Company's expansion plan in residential areas, commercial property, retail and/or hospitals.

B. Material Risk with Direct and Indirect Potential Influence to the Company's Business Results and Financial Condition

i. Risks related to the Property Business

1. Risk of Increase Competition in Indonesia's Property Market

The property developed by the Company in future will face competition from other developers in terms of location, facilities, supporting infrastructure, service and price. The competition increase among property developers might increase acquired land price and also cause overstock properties and eventually will affect the Company's profitability.

2. Risk on Investment and Corporate Action of the Company

The Company has several businesses managed by its subsidiaries. The businesses are: property, healthcare, retail, hotel, portfolio management and township management. The Company's financial performance depends on the performance of its subsidiaries which will be consolidated to the Company's financial statement.

Moreover, the Company's also actively conducts various investments in new property development projects; thus, the Company's also carries out several corporate actions. Yet, there is no guarantee that every investment and corporate action will be beneficial.

3. Risk of Availability and Interest Rate of Funding for Potential Purchasers

Changes in the benchmark interest rate is one of the important things for the Company's sales level where some buyers make purchases by means of Housing Loans and Apartment Ownership Loans. Bank Indonesia's decision in October 2019 to reduce the benchmark interest rate by 25 basis points to 5 percent will have a positive impact on sales levels. Basically, the benchmark interest rate is correlated with the inflation rate. If the Government manages to

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

berkorelasi dengan tingkat inflasi. Apabila Pemerintah berhasil mempertahankan inflasi di level yang rendah, maka suku bunga perbankan juga memiliki kecenderungan tetap berada di level yang rendah.

4. Risiko Tidak Diperolehnya Semua Izin untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan Masing-masing unit bisnis Perseroan memerlukan izin-izin untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini. Apabila Perseroan gagal memperoleh izin yang diperlukan maka terdapat risiko adanya sanksi dari Pemerintah yang berupa penutupan, denda atau hukuman kurungan.
5. Risiko Konstruksi pada Tahap Pembangunan Properti Baru Konstruksi pengembangan baru memiliki risiko tertentu, seperti kurangnya pasokan bahan baku atau tenaga kerja yang berkualitas, masalah teknis, lingkungan atau geologis. Pemogokan, litigasi, cuaca, banjir atau kenaikan biaya yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek dan meningkatnya biaya.
6. Risiko Terlambat atau Tidak Selesaiya Suatu Proyek yang Sedang Berlangsung Maupun Proyek yang Masih dalam Tahap Perencanaan Kesuksesan Perseroan dan kinerja keuangannya tergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, memasarkan dan menjual proyek-proyek dan kemampuan Perseroan memadukan sumber pendanaan dengan kebutuhan dana yang tepat waktu. Kegiatan pembangunan yang dilakukan Perseroan mengandung berbagai risiko konstruksi, termasuk risiko keterlambatan dalam memperoleh izin yang diperlukan, ketersediaan bahan baku, kenaikan biaya konstruksi, bencana alam, dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga, serta risiko turunnya permintaan pasar selama proyek dalam pembangunan.
7. Risiko Ketergantungan kepada Para Kontraktor Perseroan menunjuk kontraktor pihak ketiga untuk mengerjakan proyek urban development, residensial dan ritel, yang antara lain terdiri dari pekerjaan konstruksi, *piling* dan pondasi, pembangunan dan instalasi, dekorasi interior, instalasi pendingin ruangan, *elevator*, taman dan *landscaping*. Sebagian besar perjanjian dengan kontraktor berupa pembayaran dalam jumlah tetap, namun apabila biaya kontraktor melebihi jumlah yang telah ditetapkan, umumnya kontraktor dapat

maintain inflation at a low level, the banking interest rate also tends to remain at a low level.

4. Risk of Failure in Obtaining All Permits Each business unit of the Company requires permits to execute its current business activities. If the Company fails to obtain those permits, there may be risks of government sanctions in the form of closing, fine, or legal restrictions.
5. Risk on New Property Construction New construction developments have certain risks, such as: lack of raw material supply or qualified workforce, technical issues, environment and geological problems. In addition, walkouts, litigation, weather, floods or unanticipated increased may result delay in project completion and additional costs.
6. Risks of Late or Discontinuation of On-going Projects or Planning-phase Projects The Company's success and its financial performance depend on its ability in identifying, developing, marketing and selling those projects; as well as the Company's ability to combine funding source with the timely needs. The Company's development activities contain various construction risks, including risk of delay in obtaining necessary permits, availability of raw materials, increases in construction costs, natural disasters, and dependence on thirdparty contractors, and the risk of falling market demand during construction projects.
7. Risk of Dependence to Contractors The Company appoints third-party contractors to work on urban development, residential and retail projects which include construction piling and foundation work, construction and installation, interior and decoration, air conditioning installations, elevators, parks and landscaping. Most of agreements with those contractors are in the form of payment in a fixed amount, but if the contractors' fees exceed the prescribed amount, generally the contractor can renegotiate with the Company to increase the



mengalami kesulitan keuangan atau hal lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga berakibat pada terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek atau terjadinya tambahan biaya yang harus ditanggung Perseroan.

8. Risiko Usaha yang Tidak Dapat Dikendalikan Terdapat beberapa risiko usaha yang tidak dapat dikendalikan seperti kebakaran, banjir, teroris dan bencana gempa. Perseroan mengelola risiko ini dengan melindungi aset-aset Perseroan melalui asuransi. Namun masih ada kemungkinan ada faktor risiko baru yang belum diidentifikasi pada saat ini, faktor risiko tersebut dapat dianalisa dan dilindungi oleh asuransi dikemudian hari.

ii. Risiko Terkait dengan Bisnis Healthcare

1. Risiko Perubahan Teknologi yang Sangat Cepat Terkait Peralatan Rumah Sakit Rumah sakit Perseroan menggunakan peralatan yang canggih dan mahal. Sering kali peralatan rumah sakit perlu di-upgrade karena inovasi yang sangat cepat sehingga peralatan yang dimiliki berpotensi menjadi usang atau tidak dapat memenuhi permintaan pasien. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi peralatan rumah sakit, dokter maupun pasien berpotensi beralih ke rumah sakit lain yang menyediakan peralatan yang lebih canggih.
2. Risiko Tidak Dapat Menarik atau Mempertahankan Dokter dan Tenaga Medis Lokal Kegiatan operasional rumah sakit Perseroan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para dokter dan tenaga medis lokal yang bekerja di rumah sakit Perseroan. Perseroan bersaing ketat dengan rumah sakit lain terutama yang berdekatan dengan lokasi rumah sakit Perseroan dalam hal merekrut dan mempertahankan para dokter dan tenaga medis lainnya. Dari segi peraturan, rumah sakit belum diperbolehkan untuk memperkerjakan tenaga dokter dan tenaga medis dari luar negeri yang belum memiliki surat Izin praktik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

payment, and the Company might have to bear these additional costs to complete the project. Besides, there is also risk that those contractors may have financial difficulties or other matters, which can affect their ability to complete the work, resulting delays in project completion or additional costs.

8. Uncontrolled Business Risk

There are several business risks that are uncontrolled or unpredictable, such as: fire, floods, terrorists and earthquake disasters. The Company manages those risks by protecting its assets with insurance. However, there are still possibilities of new risk factors which have not been identified yet; these risk factors must be analyzed and prevented by insurance in future.

ii. Risks related to the Healthcare Business

1. Risk on Fast Change of Technology in Hospitals' Equipment The Company's hospitals utilize sophisticated and expensive equipment. In fact, those equipments need to be upgraded quite often due to fast changes in innovations and technology, which caused the equipment owned by our hospitals to become obsolete or unable to meet patient demands. If the Company is not aware and does not keep up with new developments of hospital equipment, doctors, or nurses, then patients will potentially get treatment in other hospitals which provide more sophisticated equipment.
2. Risk of Inability to Recruit and Maintain Doctors and Local Medical Staff Operation the Company's hospitals are very dependent on the ability and expertise of doctors and local medical staff. Thus, the Company competes with other hospitals, especially those adjacent to our locations in terms of recruiting and retaining doctors and other medical staff. According to regulations, hospitals in Indonesia are not yet allowed to employ any doctors and medical staff from abroad who do not have a practice license from the Minister of Health of the Republic of Indonesia.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

3. Risiko Terjadinya Tuduhan Malpraktek, Kelalaian dan Tuntutan Hukum Lainnya pada Rumah Sakit Perseroan

Rumah sakit Perseroan menghadapi risiko klaim dari segi medis dan legal dan/atau tindakan dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit Perseroan. Munculnya klaim tersebut dapat mengganggu reputasi rumah sakit dan/ atau dokter yang dimiliki Perseroan.

4. Risiko Pembayaran yang Tidak Tepat Waktu dari Asuransi Kesehatan Swasta, Asuransi yang Disponsori Pemerintah, Klien Korporasi dan Klien Perorangan

Risiko penagihan piutang terjadi apabila para penjamin kesehatan swasta dan pemerintah (termasuk BPJS), serta klien korporasi ataupun pasien perseorangan gagal untuk membayar Perseroan secara tepat waktu dan secara penuh atas layanan yang diberikan oleh Perseroan. Ada kemungkinan bahwa asuransi kesehatan dan klien korporasi dapat mengubah rencana polis dan pertanggungannya dalam waktu sedemikian rupa sehingga layanan yang diberikan oleh Perseroan kepada pasien tidak lagi tertanggung. Selain itu, pasien perseorangan yang tidak memiliki asuransi kesehatan mungkin tidak mampu membayar biaya secara penuh atas layanan yang mereka terima.

Jika Perseroan tidak menerima pembayaran secara tepat waktu dan secara penuh dari asuransi kesehatan swasta, asuransi yang disponsori pemerintah (termasuk BPJS), klien korporasi maupun pasien perseorangan, maka hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Persaingan dari Rumah Sakit Lain
- Industri perawatan kesehatan sangat kompetitif. Umumnya, rumah sakit lain yang terdapat di daerah setempat menyediakan layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan. Di lokasi tertentu, Perseroan bersaing dengan rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta lain. Selanjutnya, di beberapa lokasi, rumah sakit Perseroan menghadapi persaingan dari rumah sakit di luar Indonesia, termasuk rumah sakit di Singapura dan Malaysia yang dapat memberikan layanan yang lebih kompleks. Beberapa dari para

3. Risk of Malpractice Allegations, Negligence and Other Law Conviction to the Company's Hospital
- The Company's hospitals may face the risk of medical claims and legal and/or actions from the authorities related to health service provided by the hospitals. Those claims can disrupt reputation of the hospitals and/or doctors.

4. Risk of Late Payment from Private Health Insurance, Insurance Sponsored by Government, Corporate and Individual Clients

The risk of accounts receivable collection occurs when health insurance providers, both private and public (including BPJS), as well as corporate clients or individual patients fail to make payments in full amount to the Company in a timely manner. It is a possibility for health insurance and corporate clients to change their insurance policy in a period that makes services provided by the Company no longer covered. Moreover, there are individual patients who may no longer able to pay in full for the service period.

If the Company does not receive payments on time in full amount from private insurance, public insurance (including BPJS), corporate clients and individual patient, it will cause a negative impact to the business activity, financial condition, and business results and business prospects of the Company.

5. Competition Risk from Other Hospitals

The healthcare industry is a very competitive industry. Generally, most other hospitals near to the locations of the Company's hospitals also provide similar services. In certain locations, our hospitals compete with both public and private hospitals. Furthermore, in several locations, our hospitals also compete with other hospitals out from Indonesia, i.e Singapore and Malaysia which are well known as credible hospitals and which provide more complex services. There are hospitals which are more established have better financial resources and own more



pesaing ini mungkin sudah lebih mapan dan memiliki sumber daya finansial, personil dan sumber daya lain yang lebih besar dibanding rumah sakit Perseroan dan mungkin mencari peluang untuk mendirikan fasilitasnya di Indonesia. Selain itu, di lokasi di mana rumah sakit Perseroan menjadi penyedia dominan atau satu-satunya penyedia layanan perawatan kesehatan di wilayah tersebut, pasien atau dokter mungkin mendukung rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya di kota-kota atau wilayah sekitarnya.

Beberapa pesaing Perseroan juga memiliki rencana untuk memperluas jaringan rumah sakit mereka, yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan pada Perseroan. Jika Perseroan terpaksa menurunkan harga layanan Perseroan atau tidak mampu untuk menarik pasien dan para dokter serta tenaga profesional kesehatan lain ke rumah sakit Perseroan, maka pada akhirnya hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Pencemaran Lingkungan dalam Pengoperasian Rumah Sakit Perseroan Kegiatan operasional Perseroan menggunakan bahan-bahan, proses atau instalasi tertentu yang diatur oleh peraturan mengenai lingkungan atau memerlukan izin tertentu. Bahan-bahan tersebut termasuk limbah medis atau bahan beracun lainnya, di mana sesuai dengan peraturan Pemerintah mengenai lingkungan, Perseroan harus mengamankan limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan masyarakat. Kelalaian tenaga kerja Perseroan dalam mengamankan limbah ini dapat berakibat Perseroan diharuskan membayar denda atau kerugian yang diakibatkan terhadap manusia, sumber alam atau properti di sekitarnya.
7. Risiko Munculnya Faktor-Faktor Eksternal yang Dapat Mempengaruhi Bisnis Unit Healthcare Perseroan Bisnis unit Healthcare Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang umumnya dihadapi oleh industri *healthcare*. Perseroan berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi dalam industri *healthcare* adalah memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien dan kemampuan mengendalikan biaya.

sophisticated systems and medical equipment, including larger numbers of human resources and staff. In addition, our doctors or other medical staff also have to serve patients in other hospitals out of town or regions surrounding our main or dominant location of the hospitals.

Some of the Company's competitors also have plans to expand their hospital network, which may lead to price and recruitment pressures on the Company's hospitals. If the Company is forced to reduce the service price, in other words, cannot attract more patients, doctors and other health experts, at the end, these factors will harm the Company's business activities, financial condition, results of operations and its prospects.

6. Environment Pollution Risk in Operation of the Company's Hospitals Most operations of hospitals require certain materials, processes and installations which are subject to environment regulations. The Company is obliged to secure waste of the use of materials, toxic materials in accordance with government regulation regarding the environment in order to prevent pollution and not endanger the community. The negligence of the Company's workforce in managing those wastes can cause the Company to pay a fine or losses of community support, natural resources or property in the vicinity.
7. Risk of Emerging External Factors that Affect the Company's Healthcare Business This healthcare business is influenced by general factors faced by healthcare industry. The Company believes that the challenge faced in the healthcare industry is to provide quality services to patients and the ability to control costs.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Di samping itu, bisnis unit Healthcare dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi industri *healthcare* seperti (i) perkembangan teknologi dan farmasi yang mengurangi kebutuhan untuk pelayanan kesehatan, (ii) perubahan demografi dan (iii) perubahan dalam proses distribusi pelayanan kesehatan atau faktor lain yang dapat meningkatkan biaya pelayanan kesehatan.

Jumlah pasien dan pendapatan yang dihasilkan dari fasilitas medis Perseroan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan siklus yang diakibatkan oleh sejumlah faktor seperti (i) jumlah angka pengangguran, (ii) kondisi cuaca dan siklus musim penyakit, (iii) kompetisi, (iv) faktor lain seperti keputusan pasien untuk menjalani perawatan medis tertentu.

iii. Risiko Terkait dengan Bisnis Retail

1. Risiko Terjadinya Krisis di Bisnis Industri Ritel di Indonesia

Secara historis, Perseroan mengembangkan proyek ritel dan komersialnya berdasarkan pola *strata-titled*. Beberapa tahun terakhir ini dan untuk waktu yang akan datang, Perseroan akan mengembangkan properti ritel dan komersial berdasarkan pola sewa, di mana Perseroan tetap memiliki hak atas tanah dan properti yang dikembangkan, dan kemudian menyewakan ruang ritel dan komersial kepada penyewa. Kinerja keuangan Perseroan sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan industri properti di Indonesia, khususnya untuk sektor ritel. Permintaan atas ruang ritel selama ini sangat dipengaruhi oleh hal seperti pelemahan kondisi ekonomi nasional, regional maupun lokal; menurunnya kondisi keuangan perseroan ritel besar; konsolidasi di sektor ritel Indonesia; berlebihnya pasokan ruang ritel di beberapa wilayah regional di Indonesia; meningkatnya pola belanja melalui katalog atau internet, dan juga beralihnya para penyewa yang menempati ruang ritel ke metode penjualan melalui *internet* atau *e-commerce*; perubahan peraturan perpajakan; dan perubahan peraturan Pemerintah.

2. Risiko Kehilangan *Anchor Tenant*

Setiap pusat perbelanjaan Perseroan memiliki *anchor tenant*. Kemampuan Perseroan untuk menjual dan menyewakan ruangan di pusat perbelanjaan Perseroan akan berkurang apabila Perseroan kehilangan *anchor tenant*.

In addition, the healthcare is influenced by other factors, such as: (i) technological and pharmaceutical developments that reduce needs of health service, (ii) demographical changes, (iii) health service distribution changes or other factors that can increase healthcare service costs.

The number of patients and income generated by the Company's medical facilities are influenced by economic and cycle factors caused by several factors, such as: (i) unemployment, (ii) weather condition and disease cycles, (iii) competition, (iv) other factors like patients' decisions to undergo certain medical treatment.

iii. Risks related to the Retail Business

1. Risk of Business Crisis in Retail Industry in Indonesia

Historically, the Company developed its retail and commercial projects based on the strata-titled model. However, in the past few years and the future, the Company will develop retail and commercial properties based on lease models, in which the Company retains rights to land and property developed, then rents its space to tenants. The Company's financial performance is very related to economic and property industry conditions in Indonesia especially in the retail sector. The demand for retail space has been significantly influenced by things such as weakening national, regional and local economic conditions; declining financial conditions of large retail companies; consolidation in the retail sector in Indonesia; overstock of retail space in several regions in Indonesia; increase shopping patterns through catalogue or the internet; as well as swift change of tenants who occupy retail space to e-commerce or internet selling basis; the change of tax regulations and government regulations.

2. Risk of Losing Anchor Tenants

Each of the Company's shopping center has anchor tenants. If the Company losses its Anchor Tenants, then the Company's ability to sell and rent retail space in the shopping centers will be reduced as well.



3. Risiko Kehilangan Tenant

Selain *Anchor Tenant*, pusat perbelanjaan Perseroan memiliki berbagai macam *Tenant* dari banyak sektor usaha. Pada beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan pola belanja masyarakat dari yang sebelumnya datang ke pusat perbelanjaan menjadi sebagian beralih ke pemesanan secara *online* atau digital. Perseroan menyadari adanya risiko beberapa *tenant* maupun sektor usaha yang sudah terdisrupsi oleh pola pembelanjaan baru ini. Oleh karena itu Perseroan telah secara aktif melakukan pemilihan *tenant* yang tidak terpengaruh terhadap disrupsi ini seperti sektor makanan dan minuman yang saat ini menunjukkan tren terus meningkat.

iv. Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Industri Perhotelan dan Hiburan

Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi industri perhotelan dan berada di luar kontrol Perseroan, dapat berdampak negatif terhadap bisnis unit Hospitality and Leisure Perseroan. Faktor-faktor tersebut meliputi ancaman terorisme, munculnya wabah penyakit menular, kenaikan harga tiket pesawat dan biaya lainnya atau faktor lain yang mengurangi jumlah wisatawan; meningkatnya kompetisi dari hotel lain yang dapat mengurangi tingkat okupansi dan pendapatan; meningkatnya biaya akibat inflasi, kenaikan gaji karyawan atau biaya lainnya; kondisi yang tidak menguntungkan di luar negeri yang dapat mengurangi keinginan untuk berlibur atau perjalanan bisnis, dan juga kondisi perekonomian nasional atau daerah tempat hotel Perseroan beroperasi; perubahan peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi berlakunya izin yang dibutuhkan untuk mengoperasikan hotel Perseroan; dan dampak negatif akibat krisis di industri perhotelan.

v. Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Portfolio Management

Perseroan saat ini mengelola 2 REITs, yaitu First REIT dan LMIRT. Sebagian dari pendapatan dihasilkan dari *management fee* kedua REITs tersebut. Selain itu, strategi daur ulang kapital Perseroan sangat terkait dengan kemampuan REITs dalam menerbitkan saham baru dan pendanaan melalui utang. Prospek Perseroan sebagian bergantung kepada kemampuan Perseroan menjual aset kepada First REIT dan LMIRT. Hasil penjualan aset tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk terus mengembangkan bisnis Perseroan.

3. Risk of Losing Tenants

In addition to Anchor Tenant, the Company's shopping center has a variety of Tenants from many business sectors. In recent years, there has been a change in the pattern of public spending from those who previously came to the shopping center to some who switched to ordering online or digital. The Company is aware of the risks of several tenants as well as the business sector that have been distracted by this new spending pattern. Therefore, the Company has actively selected tenants which are not affected by this disruption, such as the food and beverage sector, which is currently showing an increasing trend.

iv. Risks related to the Hotel Industry

Number of risk factors of the hospitality industry and beyond the Company's control may cause negative effect to the Company's Hospitality and Leisure business. Those factors are: threat of terrorism, the emergence of an infectious disease, increase in airline ticket price and other costs that might reduce number of tourists; increased competition with other hotels which potentially reduce occupancy and income levels; increase costs due to inflation, increase in employee salaries or other costs; disadvantageous conditions abroad which can decrease desire for vacations or business trips, as well as the national economic conditions or the area where our hotels operates; change in government regulations that could affect the permits needed to operate the hotels; and the negative impact of a crisis in the hospitality industry.

v. Risks related to Portfolio Management

The Company currently manages 2 REITs, such as: First REIT and LMIRT. Part of the revenue is generated from the management fees of both REITs. In addition, the Company's capital recycling strategy is very related to the ability of REITs in new shares issuance and debt funding. Partially, the Company's prospects depend on its ability to sell assets to the First REIT and LMIRT. The proceeds will be used to continue developing the Company's business.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

vi. Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Tata Kelola Kota Mandiri

Perseroan berkomitmen memberikan layanan setelah penjualan yang berkelanjutkan pada unit properti yang dijual. Perseroan melalui anak usaha mengelola beberapa kota mandiri, *mixed used development* serta tata kelola air limbah dan air bersih. Tata kelola kota mandiri ini bergantung terhadap perubahan peraturan pemerintah baik nasional maupun regional. Perseroan telah secara aktif mengelola risiko dengan penerapan prosedur standar operasi yang ketat serta perlindungan asuransi. Dalam hal tata kelola limbah dan air bersih, Perseroan secara aktif terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat terus menyediakan air bersih yang ramah lingkungan kepada penghuninya.

C. Risiko Umum

i. Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global. Perekonomian suatu negara memiliki kecenderungan tren siklikal, di mana ada masa pertumbuhan tinggi dan penurunan ekonomi. Krisis ekonomi Asia pada pertengahan tahun 1997 membawa Indonesia mengalami depresiasi nilai mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat bunga yang tinggi, gejolak sosial dan perubahan kondisi politik yang luar biasa. Krisis ekonomi 1997 menyebabkan banyak perseroan Indonesia yang mengalami gagal bayar pada saat jatuh tempo. Kondisi ini berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan investor, kreditur dan pada akhirnya berdampak pada iklim usaha di Indonesia. Dari tahun 1999 sampai 2002, Indonesia memasuki masa resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah.

Krisis ekonomi global yang berawal pada tahun 2008 menciptakan suatu periode di mana terjadi kekurangan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan pada institusi keuangan global, penurunan nilai pasar saham global, perlambatan ekonomi global dan jatuhnya permintaan berbagai komoditas. Pada beberapa tahun terakhir, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa mengalami penurunan peringkat kredit.

vi. Risks related to Township Development

The Company is committed to providing continuous after sale services for its sold property units. Through its subsidiaries, the Company manages several townships, mixed-use developments and waste and clean water management. This township management depends on the change of government regulation either national or regional. In addition, the Company actively manages the risks by implementing stringent SOPs and protecting with insurance. In the matter of waste management and clean water, the Company also actively improves quality of the service to keep providing clean water to the environment and residents.

C. General Risk

i. Macro and Global Economic Conditions

Changes in economic conditions are a common matter in the dynamics of the global economy. The economy of a country tends to have a cyclical trend, where there is a period of economic high growth and decline. The Asian economic crisis in mid 1997 caused Indonesia to suffer a currency depreciation, significant GDP decline, high interest rates, social turmoil and extraordinary changes in political conditions. The 1997 crisis caused many companies in Indonesia to experience default on debt maturity. This condition affects negatively on confidence level of investors, creditors and ultimately affects the business climate in Indonesia. From 1999 to 2002, Indonesia entered a recession with a relatively low growth rate.

The global economic crisis began in 2008, creating a period with credit shortage, decline in direct foreign capital investments, failure of global economic institutions, decline of global stock market, slowdown of global economy and falling demand for various commodities. In recent year, the developed countries like US, England and other countries in EU also suffered a decline in credit ratings.



Kondisi ekonomi global yang kurang baik sejak tahun 2008 tidak terlalu mempengaruhi makro ekonomi Indonesia. Namun tidak ada jaminan bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan terus pada kondisi meningkat. Penurunan perekonomian Indonesia maupun global akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat (*disposable income*). Kejadian ini dapat berpengaruh negatif terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan.

ii. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan terpapar risiko fluktuasi Rupiah terhadap mata uang asing seperti USD. Laba atau rugi selisih kurs akan mempengaruhi laba bersih Perseroan. Untuk keperluan persiapan laporan keuangan konsolidasi, akun-akun dalam laporan keuangan anak perseroan Perseroan yang berdomisili di luar negeri harus dikonversi ke Rupiah, sehingga akan terdapat selisih kurs. Nilai tukar Rupiah yang berfluktuasi terhadap mata uang asing, mengakibatkan implikasi negatif pada kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi ke depan dari pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul dari pergerakan nilai tukar. Perseroan juga aktif melakukan analisis sensitivitas baik pada pelemahan maupun penguatan mata uang Rupiah pada dampaknya terhadap laba Perseroan.

iii. Risiko Tidak Tersedianya Pendanaan

Perseroan membutuhkan pendanaan eksternal untuk membiayai modal kerja atau belanja modal untuk ekspansi usaha. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan dan biaya dari dana akan tergantung pada kondisi ekonomi dan pasar modal, tingkat suku bunga, ketersediaan dana dari bank atau kreditur lainnya, kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit ke sektor properti dan faktor-faktor lainnya.

iv. Risiko Perubahan Peraturan di Dalam Negeri

Perseroan berkomitmen untuk mentaati semua peraturan perundangan-undangan, peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku di Republik Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada peraturan Pemerintah, dan membutuhkan persetujuan dan perizinan

The disadvantageous global economic conditions since 2008 did not significantly affect Indonesia's macro economy. Though, there is no guarantee that Indonesia's economy will be continuously improving. The decrease of Indonesia's and/or the global economy will have an impact on the increase of interest rates and inflation which also affects disposable income. This event can negatively affect the business and results of the Company's operations.

ii. Risk of Currency Exchange Rate

The Company experienced fluctuation of Rupiah to USD exchange rate. This resulting profit and loss from these discrepancies will be reflected in the Company's net profit. In preparing consolidated financial statements, accounts in financial statements of the Company's subsidiaries domiciled abroad must be converted to Rupiah, so that there will be a currency exchange difference. The Rupiah exchange rate which fluctuates against foreign currencies may have negative implications on the financial condition and results of the Company's operations.

The Company closely monitors fluctuations in foreign exchange rates and future expectations of the market so that it can take steps to mitigate risks that may arise from exchange rate movements. The Company is also active in conducting sensitivity analysis both in the weakening and strengthening Rupiah in its impact on the Company's profit

iii. Risk of Unavailability Funding

Normally, the Company requires external funding to finance working capital or capital expenditure for its business expansion. The Company's ability to obtain funding and costs will depend on economic conditions and capital markets, interest rates, availability of funds from banks or other creditors, regulation of Bank Indonesia and OJK regarding credit distribution to the property sector and other factors.

iv. Risk of Domestic Regulation Change

The Company is committed to complying with all laws and regulations, central and local government laws that prevail in the Republic of Indonesia. The Company's business is dependent on government regulations, as it requires approval and permission from the government. Changes and updates of the government would have

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

dari Pemerintah. Perubahan dan penambahan peraturan Pemerintah dapat berdampak negatif pada harga dan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usahanya.

v. Risiko Perubahan Peraturan Pada Negara Lain di mana Perseroan Juga Beroperasi

Perseroan juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundungan di mana bisnis anak usaha beroperasi di luar negeri. Melalui LMIRT dan First REIT, Perseroan mengoperasikan bisnis manajemen aset di bawah jurisdiksi negara Singapura. Perseroan telah secara aktif beradaptasi terhadap segala perubahan peraturan yang berlaku.

vi. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Perseroan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan bersikap lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

vii. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perseroan mengelola risiko suku bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang yang tepat dan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

viii. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan, secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perseroan secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas aktual untuk memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembayaran dari hutang yang akan jatuh tempo.

adverse effects to pricing and ability to develop the Company's business.

v. Risk of Overseas Regulation Changes where the Company Operates

The Company is obliged to comply with laws and regulations of countries where its subsidiaries operate. Through LMIRT and First REIT, the Company operates management asset business under the jurisdiction of Singapore. The Company actively updates and adapts to the changes of regulations.

vi. Credit Risk

Credit Risk is the risk when the company suffers losses arising from customers, clients or counterparties who fail to meet their contractual obligations. The Company manages credit risk by setting limits on the amount of risk acceptable for each customer and being selective in choosing banks and financial institutions, by only choosing the reputable ones.

vii. Interest Rate Risk

Interest rate risk arises primarily due to loans with floating interest rates. The Company manages interest rate risk through a combination of fixed and floating interest rate loans, along with consistent monitoring on the impact of interest rate movements to minimize the negative impact to the Company.

viii. Liquidity Risk

This is the risk arising when the Company's cash flow position shows that its short-term earnings are not enough to cover short-term expenses. The Company manages its liquidity risk by maintaining an adequate level of cash and cash equivalents to cover its commitments in normal operations and continuously evaluates projected and actual cash flows, factoring in the maturity dates of its financial assets and liabilities.

The Company regularly evaluates the actual cash flow projection to ensure the availability of funds to meet operational needs and payment of due liabilities.



ix. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Perseroan memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perseroan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar global.

x. Risiko Ketergantungan Kepada Pemerintah Daerah dalam Perpanjangan Perjanjian-Perjanjian Tertentu yang Dimiliki Perseroan

Kelangsungan dari beberapa perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan akan bergantung pada izin perpanjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Misalnya, Perseroan mengoperasikan Aryaduta Hotel Pekanbaru berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 55 tanggal 17 September 1993 (Perjanjian Build, Operate, Transfer/BOT), antara Perseroan dan Pemerintah Daerah. Perjanjian BOT tersebut memberikan Perseroan hak untuk membangun dan mengoperasikan hotel tersebut namun tidak memberikan hak atas tanah. Masa berlaku Perjanjian BOT adalah 25 tahun dengan pilihan untuk perpanjangan selama 10 tahun, namun tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Daerah akan menyetujui perpanjangan Perjanjian BOT tersebut.

xi. Risiko Kegagalan Teknologi Informasi

Kinerja sistem dan teknologi informasi Perseroan sangat penting bagi operasi bisnis Perseroan. Kegagalan sistem yang menyebabkan gangguan dalam layanan atau ketersediaan sistem Perseroan dapat mempengaruhi operasional atau pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan telah menerapkan upaya perlindungan dan keamanan jaringan, server Perseroan rentan terhadap virus komputer, pembobolan dan gangguan serupa dari peretasan atau gangguan yang tidak sah. Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat mengakibatkan interupsi, penundaan, kehilangan atau kerusakan data, yang semuanya dapat memiliki efek merugikan material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha dan merugikan reputasi bisnis Perseroan.

xii. Risiko Pengeluaran Biaya Tambahan Sehubungan Dengan Masalah Lingkungan

Perseroan tunduk kepada hukum dan peraturan yang mengatur lingkungan hidup, yang antara lain mewajibkan pemilik real estat untuk memeriksa dan membersihkan limbah berbahaya dalam lahan properti. Sesuai peraturan, pemilik properti harus menanggung biaya pembersihan limbah

ix. Price Risk

This is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices. The Company is exposed to price risk as it owns investments classified as Available for-Sale financial assets. The Company manages this risk by regularly evaluating the financial performance and market price of its investments while continuously monitoring global market developments.

x. Risk of Dependence on Regional Government related to the Extension of Certain Agreements of the Company

Renewing the Company's Agreements The continuity of several agreements held by the Company will depend on renewal permits granted by Regional Governments. For example, the Company operates Aryaduta Hotel Pekanbaru according to the Cooperation Agreement No.55 dated September 17, 1993 (the BOT) between the Company and the Regional Government. The BOT agreement grants right to the Company to build and operate the hotel, but has no right on the land. The validity period of the BOT agreement is for 25 years with an option for extension of 10 years, however, there is no guarantee that the regional government will approve the extension of the BOT Agreement.

xi. Risk of Information Technology Failure

The Company's information technology system is very important for its business operations. System failure can cause disruptions in services or availability of the Company's system may adversely affect the Company's operations or revenue. Although, the Company implements network protection and security, its servers are vulnerable to computer viruses, burglary and other disturbances from hacking or unauthorized interference. The occurrence of any of these issues can result in interruption, delay, lost or damaged data and eventually material damage to the Company's business reputation.

xii. Risk of Additional Expenses related to Environmental Problems

The Company complies with laws and regulations that regulate the environment, which oblige real estate owners to inspect and clean up hazardous waste on the property. In accordance with regulations, property owners must bear costs of cleaning toxic waste. If there was negligence

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

beracun, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan itu kemungkinan akan signifikan. Apabila ada kelalaian dari pemilik properti sehubungan dengan hal tersebut maka dapat mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi lainnya. Perseroan telah menyiapkan berbagai antisipasi strategis untuk mengurangi dampak risiko-risiko tersebut di atas terhadap kinerja maupun kelangsungan hidup Perseroan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk semua anak usaha dan Perseroan induk melalui beberapa mekanisme, seperti aplikasi pada operasional usaha kajian rutin dan implementasi indikator kinerja utama. Setiap unit bisnis terlibat secara aktif dalam mengelola risiko, sehingga risiko tertentu dapat dimitigasi. Budaya risiko selalu ditekankan sehingga akan menjadi bagian yang terintegrasi dari semua aspek usaha Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk menjaga kepatuhan dan keteraturan Perseroan dalam menerapkan praktik GCG secara keseluruhan. Sistem pengendalian internal diterapkan di seluruh level organisasi dan jabatan. Seluruh anggota perusahaan diharapkan mampu menerapkan prinsip preventif (pencegahan kondisi yang tidak diinginkan), detektif (pendektesian dan perbaikan kelemahan) dan direktif (pengupayaan hal yang diinginkan) dalam kegiatan sehari-hari.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Dalam rangka melaksanakan sistem pengendalian internal sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko, Perseroan membentuk Satuan Audit Internal yang bertugas untuk memastikan implementasi manajemen risiko di seluruh unit.

Hingga saat ini, Perseroan telah menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yakni COSO ERM Framework (*Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*).

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan kepastian dalam menjaga dan mengamankan aset Perseroan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian

from the property owner related to this matter, it will cause them to pay fine or other sanctions. The Company has prepared various strategic anticipations to reduce the impact of the above-mentioned risk toward performance and sustainability of the Company.

Review of Risk Management System Effectiveness

The Company implements risk management in all its subsidiaries and head office through several mechanisms, such as: application to routine business operation reviews and implementation of Key Performance Indicators. Every business unit is actively involved in managing risk, to the point where those certain risks can be mitigated. The culture of risk management is always emphasized so that it will be integrated into all business aspects of the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control system has a function to maintain the Company's compliance and orderliness in implementing GCG practices. The Internal Control system is applied to all organizational levels and positions. All members of the Company are expected to be able to act preventively (avoiding unwanted conditions), detect (detection and correction of weaknesses), and direct (efforts to set goals) in their daily activities.

Appropriation of International Control System with COSO

For the purpose of implementing the internal control system related to implementation of risk management, the Company established Internal Audit with the duty of ensuring the implementation of risk management in all units.

Until now, the Company has implemented internal control activities that refer to the internationally recognized framework, called COSO ERM (Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & Communication and Monitoring).

Evaluation of Internal Control System Effectiveness

The Internal control system aims to obtain the security of the Company's assets; ensuring the availability of accurate reporting; improving compliance with applicable regulations; reducing the impact of financial losses or irregularities including fraud and violation of prudential



keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Secara berkala, Perseroan melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan dipatuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional, terutama bila terdapat peraturan baru.

KASUS DAN PERKARA PENTING

Pada 2019, Perseroan menghadapi beberapa kasus dan perkara penting sebagai berikut:

aspects; and improving organizational effectiveness and cost efficiency. The Company periodically evaluates the effectiveness of internal control systems to ensure compliance with all applicable regulations and laws in all operational activities, especially if there is new regulation.

CASE AND LITIGATION

In 2019, the Company deal with several important cases, which detailed as follows:

Perkara Cases	Status Terakhir Perkara Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara Object of the Case
Penggugat Plaintiff: GMTD	Masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD dinyatakan kalah di tingkat kasasi di Mahkamah Agung	Tanah Seluas 60.000 m ² Land of 60,000 sqm .
Tergugat Defendant: Najmiah Muin dan/and Fatimah Kalla	Still under Judicial Review Process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD lost the case by cassation in Supreme Court.	
Penggugat Plaintiff: GMTD	Masih dalam melakukan upaya hukum pidana dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali	GMTD dinyatakan kalah di tingkat kasasi di Mahkamah Agung	Tanah Seluas 68.929 m ² Land of 68,929 sqm
Tergugat Defendant: John Tandiary	Still under conducting a criminal lawsuit with the intention of being used to conduct a judicial review	GMTD lost the case by cassation in Supreme Court.	
Penggugat Plaintiff: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar	Tanah Seluas 84.141 m ² Land of 84,141 sqm
Tergugat Defendant: Tajuddin Molla	Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD won the case in High Court of Makassar.	
Penggugat Plaintiff: GMTD	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung	Tanah Seluas 21.023 m ² Land of 21,023 sqm
Tergugat Defendant: H Najmiah Muin, Muhyina Muin, Muh. Nur Majmul Muin, Bobby Sunardi Edward, Lenny Setiono, Daeng Bombong, BPN Kota Makassar	Still under to conduct a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.	GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court.	
Penggugat Plaintiff: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD telah dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Tanah Seluas 4.691 m ² Land of 4,691 sqm
Tergugat Defendant: Kantor Pertanahan kota Makassar Land Office of Makassar	Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD has lost the case in Makassar State Administrative High Court.	
Penggugat Plaintiff: Mutiara Dg Ngintang	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar	Tanah Seluas 12.700 m ² Land of 12,700 sqm
Tergugat Defendant: GMTD	Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD won the case in High Court of Makassar.	
Penggugat Plaintiff: Hj Diana Chaeruddin	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Seluas 19.995 m ² Land of 19,995 sqm
Tergugat Defendant: GMTD	Still under a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.	GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court of the Republic of Indonesia.	

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Perkara Cases	Status Terakhir Perkara Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara Object of the Case
Penggugat Plaintiff: Drs H. Andi Mappaturung Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD lost the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 10.358 m ² Land of 10,358 sqm
Penggugat Plaintiff: Siti Aminah Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court.	Tanah Seluas 7.613 m ² Land of 7,613 sqm
Penggugat Plaintiff: Kartini Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD won the case in High Court of Makassar	Tanah Seluas 40.040 m ² Land of 40,040 sqm
Penggugat Plaintiff: Junaid Dg Sanre Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam upaya hukum proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Makassar Still under review in High Court of Makassar.	GMTD dinyatakan menang di Pengadilan Negeri Makassar GMTD won the case in Makassar District Court.	Tanah Seluas 19.288 m ² Land of 19,288 sqm
Penggugat Plaintiff: Mariama Dg Bau Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD lost the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 20.000 m ² Land of 20,000 sqm
Penggugat Plaintiff: Andi Mappaturung Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD won the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 20.134 m ² Land of 20,134 sqm
Penggugat Plaintiff: Josef Lirungan Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD won the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 2.117 m ² Land of 2,117 sqm
Penggugat Plaintiff: Chiandra Th dan / and Cicilia Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD won the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 9.173 m ² Land of 9,173 sqm
Penggugat Plaintiff: Abdul Karim Dg Sirua Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Makassar Still under appeal process in High Court of Makassar		Tanah Seluas 49.550 m ² Land of 49,550 sqm
Penggugat Plaintiff: Sona Dg Selo Tergugat Defendant: GMTD	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar GMTD won the case in High Court of Makassar.	Tanah Seluas 60.000 m ² Land of 60,000 sqm



Perkara Cases	Status Terakhir Perkara Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara Object of the Case
Pengugat Plaintiff: Tarman Bin H. Kiman, Sarkinah Binti H. Kiman, Dedeh Marwati Binti H. Kiman, Emar Martinah Binti H. Kiman, HJ. Icih Binti H. Bahrudin, H. Engkos Binti H. Bahrudin, HJ. Nesih	Kasasi telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia Cassation has processed in Supreme Court of Republic of Indonesia	LPCK dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Mahkamah Agung LPCK lost the case in Supreme Court	Tanah Seluas 38.770 m ² Land of 38,770 sqm
Tergugat Defendant: LPCK			
Pengugat Plaintiff: Udi Bin Uji, H. Karna Alias H. Samin Bin Karim, Tatang Suganda Bin Rohadi, Titin Kartika Binti Rohadi, Ade Handri Bin Rohadi, Linda Wati Binti Rohadi, Euis Sutari Binti Rohadi, Purnamasari Binti Rohadi, Ning Nisanah Binti Rohadi, Karyati Sri Muningsih Binti Rohadi, Nurlela Sari Binti Rohadi, Undar Prayoga Alias Jusup N. Bin Rohadi, Euis Marlina Binti H. Acep, Enyang Yonita Binti H. Acep, Nuri Binti H. Acep, dan/and Suharto Bin H. Acep	Berencana untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Plan to conduct judicial review to Supreme Court of the Republic of Indonesia Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia	LPCK dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Mahkamah Agung LPCK lost the case in Supreme Court LPCK dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat LPCK lost the case in West Java High Court	Tanah Seluas 36.320 m ² Land of 36,320 sqm Tanah Seluas 15.620 m ² Land of 15.620 sqm
Tergugat Defendant: LPCK			

Sejak tanggal 15 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang atas dugaan suap terkait pengajuan perijinan proyek Meikarta yang dimiliki oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas asosiasi. Sampai dengan tanggal persetujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, kasus ini telah memasuki tahap persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung. Manajemen PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, sedang melakukan evaluasi atas hasil persidangan dan penyelesaian kasus ini dan belum dapat mengambil kesimpulan serta terdapat ketidakpastian atas potensi dampak hukum yang mungkin dapat ditimbulkan dari proses pemeriksaan kasus ini terhadap LC dan MSU, entitas asosiasi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dan data mengenai Perseroan melalui situs resmi Perseroan yang tersedia dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, melalui Laporan Tahunan yang diterbitkan setiap tahun, melalui Laporan Keuangan Perseroan, pemberitaan melalui media massa, *mailing list*, serta produk-produk pemasaran Perseroan. Selain itu, para pemangku kepentingan dapat melayangkan permintaan informasi melalui surat tertulis dengan mengirimkannya kepada:

Since October 15, 2018, the Corruption Eradication Commission has examined several person for alleged bribery related to the submission of permits for the Meikarta's project that owned by PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), an associate. Until the date of approval for the issuance of the interim consolidated financial statements, this case has entered the trial phase in Bandung Corruption Court. PT Lippo Cikarang Tbk (LC)'s management still evaluate the results of the trial and adjudication of this case and is not able to have a conclusion and there is uncertainties on the potential law suit that might arised from the investigation of the case to LC and MSU, an associate.

COMPANY'S INFORMATION AND DATA ACCESS

All Stakeholders are able to access information and data about the Company through the Company's official website available in two languages, Indonesian and English; by its Annual Reports, Financial Statements, Media Coverage, Mailing List, Bulletin, and Marketing Products of the Company. Moreover, stakeholders are able to request for information through written letter with address below:

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Sekretaris Perusahaan

PT Lippo Karawaci Tbk
Menara Matahari Lt. 22 Jl. Boulevard Palem Raya No. 7,
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten – Indonesia
Tel. : +62 21 2566 9000
Fax. : +62 21 2566 9098
Email : corsec@lippokarawaci.co.id

KODE ETIK

Pokok Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku secara universal bagi seluruh karyawan Perseroan yang terlibat dalam hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan Kode Etik mencakup beberapa pokok nilai yaitu:

1. Integritas dan benturan kepentingan
2. Kepatuhan terhadap peraturan atau perundangan (internal dan eksternal)
3. Pertanggungjawaban sebagai karyawan
4. Menghargai sesama karyawan dan pedoman dalam berhubungan karyawan lain, perusahaan, pelanggan, pihak ketiga seperti pemasok/vendor/konsultan, pesaing, dan lainnya.

Tujuan kebijakan Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam memahami dan melaksanakan kepatuhan peraturan-peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum.
2. Merupakan pedoman pelaksanaan norma-norma dasar, sikap dan tindakan karyawan dalam menjalankan tugas serta pengambilan keputusan dalam mencerminkan citra dan nama baik Perseroan.
3. Memberikan pemahaman kepatutan dalam menjalin hubungan dan memastikan kesamaan serta konsistensi sikap maupun tindakan karyawan dalam implementasi pekerjaan sehari-hari.
4. Memastikan adanya keseragaman dan konsistensi sikap maupun tindakan dalam implementasi pekerjaan sehari-hari.

Isi Kode Etik

Kode etik karyawan berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan dengan sesama karyawan yang terdiri dari:
 - a. Kerja sama antar karyawan, baik hubungan antar sesama karyawan atau rekan kerja; hubungan dengan bawahan; hubungan dengan atasan;
 - b. Keadilan perlakuan dan objektivitas keputusan
 - c. Larangan pelecehan dan intimidasi

Corporate Secretary

PT Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00 Menara Matahari Lippo
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten – Indonesia
Tel. : +62 21 2566 9000
Fax. : +62 21 2566 9098
Email : corsec@lippokarawaci.co.id

CODE OF CONDUCT

Scope of Code of Conduct

The Code of Conduct applies for all employees who are related to either work relations with a permanent or contract status, including the Board of Commissioners and Board of Directors. The scope of Code of Conduct includes:

1. Integrity and conflict of interest
2. Compliance to laws and regulations (internal and external)
3. Accountability as employees
4. Respect to other employees and guidelines in relationships among other employees, companies, customers, also third parties such as: suppliers/vendors/consultants, competitors, and others.

Purpose of the Code of Conduct are as follows:

1. Be a guideline for the Company in understanding and complying with the applicable laws and ethics value.
2. Be a guideline in implementing fundamental norms, employee behavior in executing duties and making decisions in representing the good image and reputation of the Company.
3. Provide an understanding about appropriateness in developing relationships and to ensure employees' consistent behavior in their daily work.
4. Ensure consistency in behavior in implementing daily work.

Code of Conduct Content

The content of the Code of Conduct is as follows:

1. Relations with Other Employees:
 - a. Cooperation among employees, such as relations between employees or work colleagues, relations with subordinates; relations with supervisions;
 - b. Fair treatment and decision objectivity;
 - c. Prohibition of harassment and intimidation



2. Hubungan dengan Perseroan yang terdiri dari:
 - a. Status kepegawaian
 - b. Benturan kepentingan
 - c. Disiplin waktu kerja
 - d. Penampilan dan cara berpakaian
 - e. Lingkungan dan keselamatan kerja
 - f. Akses informasi
 - g. Investasi pribadi
 - h. Media, publikasi, penampilan di muka umum
 - i. Aktivitas di luar Perseroan
 - j. Aktivitas politik
 - k. Penanganan informasi
 - l. Perlindungan hak cipta
 3. Hubungan dengan pelanggan
 - a. Penjualan dan pengiklanan produk
 - b. Penerimaan dan pemberian hadiah, bingkisan, dan/ atau pemberian lainnya
 - c. Larangan atas tindakan penyuapan
 4. Hubungan dengan pemasok (*supplier*), vendor (rekanan), termasuk *outsourcing* dan konsultan
 - a. Evaluasi yang objektif dalam pengadaan perlengkapan dan peralatan Perseroan
 - b. Larangan penerimaan kompensasi dari pemasok (*supplier*), vendor (rekanan termasuk *outsourcing*), dan konsultan
 - c. Kepatuhan Pemasok (*supplier*), vendor (rekanan termasuk *outsourcing*) dan konsultan terhadap kode etik
 - d. Konsultasi dan lobi dengan pemasok (*supplier*), vendor (rekanan termasuk *outsourcing*) dan konsultan
 5. Hubungan dengan pesaing (kompetitor)
 6. Hubungan dengan regulator
 - a. Kerja sama dengan regulator
 - b. Kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan
 - c. Kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan *fraud*
 - d. Pembayaran pajak dan retribusi resmi
 7. Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya
 - a. Kebijakan anti monopoli dan perlindungan konsumen
 - b. Tanggung jawab sosial Perseroan
 - c. Donasi
 - d. Lingkungan hidup
 8. Pelaporan atas pelanggaran atau potensi pelanggaran
2. Relations with the Company:
 - a. Employment Status
 - b. Conflict of Interest
 - c. Working time Discipline
 - d. Appearance and Dress Code
 - e. Occupational Environment and Safety
 - f. Information Access
 - g. Personal Investment
 - h. Media, publication, public appearance
 - i. Activity outside the Company
 - j. Political Activity
 - k. Information Handling
 - l. Copyright Protection
 3. Relations with Customers:
 - a. Product selling and advertising
 - b. Accepting and offering packages and/or other gifts
 - c. Prohibition on bribery
 4. Relations with suppliers, vendors, including outsourcing and consultants:
 - a. Objective evaluation in procurement of corporate equipment and tools;
 - b. Prohibition of accepting compensation from suppliers, vendors including, out-sourcing, and consultants,
 - c. Adherence of suppliers, vendors including outsourcing and consultant to the Code of Conduct;
 - d. Consultation and lobby with suppliers, vendors including out-sourcing and consultants.
 5. Relations with Competitors
 6. Relations with Regulators
 - a. Cooperation with regulators
 - b. Compliance to provisions/ regulations
 - c. Policy of anti-money laundering and fraud prevention;
 - d. Tax payment and official payments
 7. Relations with other Stakeholders:
 - a. Policy of anti-monopoly and consumer protection;
 - b. Corporate Social Responsibility;
 - c. Donations;
 - d. TheEnvironment
 8. Reporting on breaches or potential breaches

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Kode Etik

Perseroan memberikan buku kode etik bagi seluruh karyawan sebagai pedoman tata cara berperilaku sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan. Seluruh karyawan perlu mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh isi buku Kode Etik, yang selanjutnya

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Code of conduct booklet is distributed to all employees as a guideline for daily behavior in conducting jobs. Employees need to read thoroughly and comprehend the whole content of this Code of Conduct. At the end of this booklet, employees must sign in the last part of this book

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan komitmen pada formulir persetujuan yang terdapat di bagian akhir buku. Pernyataan komitmen karyawan kemudian didokumentasikan. Supervisor atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan penjelasan kepada karyawan bilamana dibutuhkan serta berkewajiban memberikan contoh dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari (*led by example*).

Setiap akhir tahun bersamaan dengan penilaian prestasi, setiap pejabat pimpinan unit wajib mendiskusikan kembali kebijakan etika yang berlaku kepada seluruh bawahannya dan kemudian bersama-sama membubuhkan kembali tanda tangan peryataan komitmen di lembar persetujuan. Perubahan isi Kode Etik akan diinformasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan diminta ulang untuk memberikan pernyataan komitmen pada lembar yang disediakan.

Penyebarluasan Kode Etik

Seluruh Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus mematuhi Kode Etik untuk memastikan terlaksananya hubungan yang wajar dan seimbang dengan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan melakukan sosialisasi kode etik melalui Buku Kode Etik dan evaluasi akhir tahun. Untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan, informasi mengenai Kode Etik tersedia di Situs Perseroan, dalam menu Investor Relations & Governance.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang 2019, tidak terdapat kasus pelanggaran besar Kode Etik di Perseroan, sehingga tidak ada sanksi berat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada karyawannya.

INISIASI ANTI GRATIFIKASI

Perseroan memberlakukan inisiasi anti gratifikasi di seluruh *level* organisasi. Ketentuan anti gratifikasi diatur dan dicantumkan dalam Kode Etik Perseroan yang ditetapkan sejak 8 Mei 2015, serta diunggah ke situs resmi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan memo internal No. 004/IM/HR/VI/2016 pada 10 Juni 2016 dan dipublikasikan kembali melalui memo internal No. 001/IM/ HR/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan kepada seluruh karyawan, termasuk jajaran Direksi, Komisaris, dan anggota keluarganya. Dengan melihat pentingnya keberadaan Kode Etik yang menjadi pedoman Utama bagi seluruh karyawan dalam bertindak, Perseroan memperbarui Kode Etik pada tanggal 21 Januari 2019 dan pengkinianya diunggah ke situs resmi Perseroan, termasuk Perseroan terus senantiasa melakukan sosialisasi kepada karyawan melalui media elektronik.

to show their commitment. This employee's commitment statement is stored in the employee's personnel file. Supervisors or the appointed officer is obliged to provide explanation to employees and also require to perform examples in daily work implementation, to lead by example.

At the end of every year, along with performance evaluation, each unit leader is obliged to re-discuss this applicable ethics policy and then both parties sign their commitment at the approval form. Amendment to the content of this Code of Conduct will be informed to all employees and they shall sign again to provide their commitment to the amendment.

Code of Conduct Dissemination

The Board of Commissioners, committees under the board of Commissioners, Board of Directors, and all employees must comply with the Code of Conduct to ensure the fair relationship with all stakeholders. The Company has socialized the Code of Conduct through its booklet and evaluated it by the end of the year. The Code of Conduct is published on the Company's official website in order to easily allow every party related to the Company's business to understand this Code of Conduct.

Sanction of Code of Conduct Violation

In 2019, there was no violation of the Company's Code of Conduct, thus, there is no sanction issued by the Company any employees.

ANTI-GRATUITY INITIATIVE

The Company enforces anti-gratuity initiatives at every level of the organization. Provisions regarding anti-gratuity are regulated under the Company's Code of Conduct stipulated on May 8, 2015, and also published on the Company's website. Moreover, the Company issued Internal Memo No.004/IM/HR/VI/2016 dated June 10, 2016, and republished with Internal Memo No. 001/IM/HR/II/2018 dated February 13, 2018, as effective for all employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and their family members. In view of the importance of the Code of Conduct as the main guidelines for all employees in their interactions, the Company has updated its Code of Conduct on January 21, 2019, which has been uploaded on the Company's official website, and continued to be socialized to all employees through electronic media.



Kebijakan anti gratifikasi menegaskan para karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan anggota keluarganya yang bernaung dalam PT Lippo Karawaci Tbk untuk tidak meminta, menerima, ataupun menjanjikan hadiah baik secara langsung maupun tidak langsung dari ataupun kepada pihak ketiga atas dasar kerja sama yang telah, sedang, dan/atau akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya potensi tindakan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku.

Pengawasan Gratifikasi

Apabila dalam hal penerimaan hadiah tidak dapat ditolak karena berkaitan dengan perayaan hari-hari raya keagamaan, maka setiap bentuk penghargaan yang diterima dengan nilai material wajib untuk disampaikan dan dilaporkan kepada divisi SDM atau atasan langsung. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada 2019, Perseroan mencatat terdapat 6 kasus gratifikasi, di mana seluruh gratifikasi tersebut telah diserahkan kepada Perseroan dan oleh Perseroan diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) Perseroan telah berjalan efektif sejak Februari 2016. Sistem pelaporan pelanggaran dikeluarkan untuk meningkatkan implementasi praktik terbaik di bidang GCG di lingkungan Perseroan dan berlaku untuk kepentingan internal perusahaan yang meliputi seluruh karyawan dan manajemen.

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang dibangun Perseroan dalam menjalankan pengendalian secara internal yang konsisten dan berkesinambungan, dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan untuk bersikap proaktif dalam menjaga ketertiban. Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, seluruh anggota perusahaan membantu menciptakan pelaksanaan kegiatan bisnis berbasis prinsip GCG serta membantu Perseroan memberantas segala pelanggaran ataupun potensi pelanggaran.

Perseroan selalu mengevaluasi sistem ini dan akan melakukan perbaikan apabila dirasa perlu.

This anti-gratuity policy asserts that all employees, members of BOC and BOD, and their family members refrain from asking, receiving, or promising gifts both directly and indirectly from/to third parties in terms of work agreements that have been done, ongoing, and/or about to start. The purpose of this policy is to prevent the possibility of actions that will affect the decision-making process that may harm the Company's interests, contradict its business ethics and prevailing laws.

Gratification Control

If an unavoidable exchange gifts occur, such as in celebrating religious holidays, then all forms of gifts/prizes with material values must be reported to the HR division or to the direct supervisor. Violations will be sanctioned under the prevailing regulations.

In 2019, the Company recorded 6 gratification cases, reflecting the effectiveness implementation of anti-gratuity policy and its campaign through the internal memos from the HR division of the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) policy has been effective since February 2016. The WBS was introduced in order to improve the implementation of GCG best practices in the Company's environment and was also applicable to the Company's internal interests including all employees and Management.

The Whistleblowing System is one of the inherent supervision mechanisms developed by the Company in performing consistent and continuous internal control by involving all employees to be proactive in maintaining orderliness. Through the Whistleblowing System, all employees will assist to conduct business activities based on GCG principles as well as assist the Company to eradicate any violation or potential violation.

The Company always evaluates the system and will make necessary changes if required.

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan membentuk sistem pelaporan pelanggaran yang berfungsi untuk:

1. Membantu Perseroan dalam meningkatkan produktivitas kerja melalui pemberantasan segala bentuk pelanggaran dan potensi pelanggaran.
2. Mengurangi potensi kerugian Perseroan melalui pencegahan dini sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaporan melalui berbagai saluran pelaporan pelanggaran.
3. Meningkatkan citra dan reputasi Perseroan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
4. Meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memenangi persaingan melalui pengelolaan operasional perusahaan yang semakin efisien.
5. Menciptakan iklim yang semakin kondusif serta mendorong seluruh karyawan untuk menyampaikan pelaporan terkait hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial maupun non finansial, termasuk yang dapat merusak nilai-nilai dan citra Perseroan.
6. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif segala bentuk laporan pelanggaran dan potensi pelanggaran.
7. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan menjaga keamanan informasi yang dilaporkan yang dikelola dalam database khusus.

Setiap pelaporan pelanggaran harus ditempatkan sebagai praktik dari GCG dan sistem manajemen risiko. Perseroan wajib menerima pelaporan pelanggaran dan potensi pelanggaran dari pelapor. Prinsip laporan harus mengandung itikad baik dan bukan suatu keluh kesah pribadi atas kebijakan ataupun praktik manajemen ataupun didasari niat buruk yang bersifat fitnah dan/ atau laporan palsu yang dapat menjatuhkan rekan kerja ataupun mencemarkan nama baik/reputasi seseorang.

Pelapor dikelompokkan 2 (dua), yaitu dari kalangan internal Perseroan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Senior Eksekutif, dan seluruh karyawan; serta kalangan eksternal yakni rekan kerja, pemasok, pelanggan, konsultan, vendor, outsourcing, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran harus disampaikan secara tertulis dan wajib mencantumkan identitas karyawan (untuk kalangan eksternal disertai fotokopi KTP dan nomor telepon) serta mendeskripsikan kronologi kejadian dan bila memungkinkan memberikan bukti-bukti pendukung. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) ataupun surat kaleng tidak akan ditindaklanjuti oleh Perseroan.

Main Purpose of Whistleblowing System

The Whistleblowing System has the following functions:

1. Assisting the Company to improve work productivity by eradication of any violations and potential violations.
2. Decreasing the Company's losses through early prevention as a follow-up action of the reports through various whistleblowing channels.
3. Building on the Company's image and reputation of having GCG.
4. Improving the Company's ability in leading competition by more efficient operational management.
5. Creating a more conducive climate and encouraging all employees to report any suspicious matters which might cause financial losses or potentially ruin the Company's values or reputation.
6. Simplifying management to effectively handle all violation and potential violation reports.
7. Protecting the confidentiality of identity of the whistleblower and protecting security of its information in special database.

Each report should be considered as the practice of Good Corporate Governance and Risk Management. The Company must receive violation reports and potential violations from the Whistleblower. The report should contain goodwill and not reflect a personal grievance on any policies or management practices or based on bad intentions, such as: defamatory and/or false statements that may defame a co-worker/person.

Whistleblowers can be divided into 2 (two) groups, such as: internal, including Board of Commissioners, Directors, Senior Executives, and all employees; and external, including the working partners, suppliers, customers, consultants, vendors, outsourcing, communities and other stakeholders.

Violation or potential violation reports must be submitted in writing and include the identity of employees (for external parties with copy of ID and phone number) and describe the chronological occurrence and if it is possible to also provide supporting evidence. Reports with no identity (anonymous) or anonymous letters will not be followed up by the Company.



Beberapa jenis pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah:

1. Korupsi, *fraud*, pencucian uang, *insider dealing*
2. Perbuatan yang melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya)
3. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau peraturan perundang-undangan lainnya
4. Pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan, atau nilai-nilai Perseroan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya
5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan Perseroan
6. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan/atau non-finansial terhadap Perseroan ataupun kerugian kepentingan Perseroan.
7. Pelanggaran segala kebijakan Perseroan, antara lain namun tidak terbatas pada peraturan perusahaan, kode etik perusahaan, kebijakan perusahaan, Standar Operating Procedure (SOP) beserta petunjuk pelaksanaannya.
8. Lainnya yang tidak mendukung terciptanya pelaksanaan GCG.

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan berbagai infrastruktur saluran pelaporan pelanggaran yang dapat memudahkan pelapor untuk menyampaikan laporan, yaitu melalui:

1. Surat tertulis kepada tim *Whistleblowing*, dengan cara dikirimkan langsung atau melalui pos.
2. Surat elektronik di whistleblower@lippokarawaci.co.id
3. Situs Perseroan di www.lippokarawaci.co.id sub menu *Whistleblowing*

Pelapor diharapkan dapat mengirimkan laporannya dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut terjadi dan khusus untuk kasus-kasus *fraud* paling lama 1 (satu) bulan setelah kejadian terjadi.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor jika diperlukan untuk melakukan klarifikasi.

Perseroan menjamin keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan

Here are the following types of violations or potential violations to be reported:

1. Corruption, fraud, money laundering, insider trading.
2. Violations to the law (including theft, violations against other employees or superiors, extortion, drugs use, harassment, other criminal acts).
3. Violations to tax regulations and other regulations.
4. Violation to the Company's Code of Conduct, its values or norms of decency in general.
5. Acts that endanger the health and safety or security of the Company.
6. Acts that may cause financial losses and/or nonfinancial losses or other losses to the Company.
7. Violation to all policies of the Company, including but not limited to the Company's regulation, Code of Conduct, the Company's policy, SOP and guidance in conducting it.
8. Other actions which do not support the implementation of GCG.

Submission of Violation Reports

The company provides various Whistleblowing channels that can facilitate the reporting, namely:

1. Written letter to Whistleblowing team, submitted either directly or by mail.
2. Sending email to the whistleblower@lippokarawaci.co.id
3. The Company's official website in www.lippokarawaci.co.id sub menu Whistleblowing.

The whistleblower is expected to submit the report, within a maximum, 2 (two) months after the incident occurred, and specifically for fraud cases a maximum of 1 (one) month after the incident occurred.

Protection for Whistleblower

The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity as well as the information which might be used to contact the Whistleblower if there is a need for clarification.

The Company guarantees information security and protection against retaliation from the reported subject or companies, any threats of physical safety, psychological

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum, keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat atau gaji, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan-catatan yang merugikan dalam file karyawan.

Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi atau oleh tim *Whistleblowing*, maka pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran disampaikan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan dapat menggunakan investigator independen ataupun auditor independen. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Tim *Whistleblowing*, maka laporan tersebut disampaikan kepada CEO Corporate, dan penanganan lebih lanjut akan dilakukan oleh Direksi, serta bila diperlukan dapat menggunakan investigator ataupun auditor independen.

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan, maka laporan disampaikan ke Tim *Whistleblowing*. Selanjutnya, Komite *Whistleblowing* akan memutuskan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan yang layak ditindaklanjuti akan dilanjutkan dengan proses investigasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau auditor internal ataupun oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait sumber daya manusia.

Pihak Pengelola Pengaduan

Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas atas efektivitas pelaksanaan penerapan sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan dan anak perusahaan. Pemantauan pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dapat diserahkan kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelanggaran dikelola oleh tim *Whistleblowing*, yang terdiri dari:

1. Komite *Whistleblowing*

Komite *Whistleblowing* diketuai oleh Presiden Direktur dan Talent Admin (HRG) Director Corporate yang bertanggung jawab memastikan sistem pelaporan pelanggaran dapat diimplementasikan di seluruh perusahaan dan anak perusahaan. Ketua Komite *Whistleblowing* dapat menunjuk anggota-anggota komite termasuk penetapan fungsi dan tugas setiap anggota serta masa keanggotaannya. Ketua komite wajib memastikan seluruh pelaporan ditindaklanjuti hingga selesai.

terror, the safety of property, legal protection, job security, pressure, delaying a promotion or an increase salary, demotion or rank, unfair termination, harassment or discrimination, and harmful records in the employees' file.

Authority in Handling Violation Reports

In terms of violations committed by members of the Board of Directors or the person who has a special relationship with the members of the Board of Directors or by the Whistleblowing Team, then violation or potential violation reports must be submitted to the Board of Commissioners and if necessary can use an independent investigator or an independent auditor. If the violation was committed by members of the Board of Commissioners or Whistleblowing Team, the report must be submitted to the CEO Corporate, where further handling shall be conducted by the Board of Directors and if it is deemed necessary, they may use independent investigator or independent auditor as well.

Meanwhile, in terms of violations committed by employees, then the report must be submitted to the Whistleblowing Team. Furthermore, the Whistleblowing Team will decide whether or not to follow up. The report follow up investigation will be conducted by the Internal Control Unit (SPI) or the internal auditor or by HR Special Audit for cases related to human resources.

Complaint Manager Party

The Board of Commissioners is responsible as supervisors of the effectiveness of practices and implementation of the Whistleblowing system in the Company and its subsidiaries. Monitoring the implementation of whistleblowing system may be submitted to the Board Commissioners.

The violation reports are managed by the Whistleblowing team, which consists of:

1. Whistleblowing Committee

Whistleblowing Committee is chaired by President Director and Talent Admin (HRG) Director Corporate who are responsible in ensuring this system can be implemented in the Company and its subsidiaries. The Head of the Committee may appoint members of the committee including determine their functions, individual assignments, and their tenure. The Head of the Committee is obliged to ensure all reports are followed up until solved.



2. Penanggung Jawab Whistleblowing

Setiap tahunnya, Komite Whistleblowing menunjuk anggota Direksi atau Senior Eksekutif secara bergantian yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran pada unit bisnis di bawah koordinasinya.

3. Fasilitator

Setiap penanggung jawab unit bisnis yang ditunjuk bertanggung jawab menetapkan setiap fasilitator pada divisi unit kerja di bawah koordinasinya. Para fasilitator mengupayakan agar budaya pelaporan pelanggaran dapat membudaya pada divisi di bawah koordinasinya.

4. Unit Investigasi

Setiap pelaporan yang masuk wajib dikoordinasikan oleh para fasilitator untuk disampaikan kepada penanggung jawab terkait. Selanjutnya penanggung jawab akan membahas setiap laporan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite Whistleblowing. Rapat tersebut akan menentukan laporan-laporan yang layak untuk ditindaklanjuti oleh unit investigasi. Unit investigasi terdiri atas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan dibantu oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait Sumber Daya Manusia. Unit investigasi bertanggung jawab melakukan investigasi kasus yang telah ditetapkan komite untuk mencari fakta, data, serta proses-proses yang harus dilakukan oleh auditor internal.

Jumlah Pengaduan

Pada 2019, Perseroan menerima 2 laporan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti ke divisi terkait.

Sanksi terhadap Pelaporan Pelanggaran

Perseroan akan memberikan sanksi kepada pelapor yang mengirimkan laporan berupa fitnah atau laporan palsu. Sanksi yang diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan, dan Perseroan tidak akan memberikan jaminan kerahasiaan maupun perlindungan kepada pelapor yang menyalahgunakan sistem pelaporan pelanggaran termasuk tuntutan pidana maupun perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik.

Perseroan sangat melindungi kerahasiaan laporan yang dilaporkan oleh pelapor, oleh karena itu jika Tim Whistleblowing terbukti membocorkan laporan maka Perseroan akan menindak hal tersebut dengan tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Whistleblowing Officer

Every year, the Whistleblowing Committee shall appoint an alternating member of the Board of Directors or Executive Senior who will be responsible for the implementation and socialization of the system to its business unit under their coordination.

3. Facilitator

Each appointed officer from a business unit shall appoint a facilitator in each unit/division under its coordination. All facilitators make serious efforts to instill the whistleblowing system to each division.

4. Investigation Unit

Every incoming report must be coordinated by facilitators to be conveyed to the relevant officer. Then, the officer will discuss every report in a meeting organized by the whistleblowing committee. The meeting will determine which reports that shall be followed up by the investigation unit. The Internal Control Unit (SPI) together with HR special audit investigates cases related to the human resources issue. The Internal Control Unit is responsible to execute any cases determined by the Committee to search for facts, data including any process need to be done by the internal auditor

Number of Reports

In 2019, the Company received 2 violation reports which were directly followed up to the respective units.

Sanction for Violation Reporting

The Company will sanction any whistleblower who sends a false or makes a slanderous report. The sanctions will be according to regulation that applies in the Company, and the Company will not guarantee the confidentiality and protection to any Whistleblower abusing the system including criminal prosecution as well as related unpleasant acts or defamation.

The Company strongly protects the confidentiality of the report which was reported by the whistleblower, therefore, if the Whistleblowing Team is proved to have divulged the reports, then the Company will take serious action against it by giving sanctions under applicable regulations.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan mendukung penerapan tata kelola perusahaan terbuka dengan menerima dan menyerap rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang disahkan pada 17 November 2015, sebagai berikut:

No.	REKOMENDASI Recommendation	DESKRIPSI Description
A	Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights Prinsip 1 Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelegaraan RUPS Increase the Value of GMS	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has a technical procedure for voting both in an open and closed manner that upholds the independence and interests of the shareholders	Sudah dilaksanakan melalui Tata Tertib RUPS Complied through Rules of GMS
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPST. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the AGMS	Sudah dilaksanakan melalui Risalah RUPS Complied as informed in resolution of GMS
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Resolutions of the GMS are made available on the Public Company's website for at least one year	Sudah dilaksanakan dalam situs Perseroan Complied – on the Company's website
	Prinsip 2 Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor Enhancing the Quality of Communication with Shareholders or Investor	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communications policy to deal with shareholders or investors	Sudah dilaksanakan dalam situs Perseroan Belum dilaksanakan Not yet Complied – on the Company's website
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs perusahaan. The Public Company discloses its communications policy to deal with shareholders or investors on its website	SudahBelum dilaksanakan dalam situs Perseroan Not yet Complied – on the Company's website
B	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris The Role of Board of Commissioners	
	Prinsip 3 Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening Membership and Composition of Board of Commissioners	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the Public Company's conditions	Sudah dilaksanakan dalam Piagam Dewan Komisaris Complied – BOC Charter
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the Board of Commissioners composition takes into account diversity in expertise, knowledge, and experience required	Sudah dilaksanakan dalam Piagam Dewan Komisaris Complied – BOC Charter



No.	REKOMENDASI Recommendation	DESKRIPSI Description
Prinsip 4 Principle 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Enhancing Quality of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners		
4.1	Dewan Komisaris dan mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The Self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance is disclosed in the Public Company's Annual Report	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of members of the Board of Commissioners should they be involved in financial crimes	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee runs its function as Nomination and Remuneration to assemble succession policy in the process of Nominating members of the Board of Directors	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
C	Fungsi dan Peran Direksi Function and Role of Board of Directors	
Prinsip 5 Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening Membership and Composition of Board of Directors		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Public Company's conditions and effectiveness in decision making	Sudah dilaksanakan dalam Anggaran Dasar Perseroan Complied – the Articles of Association
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of Board of Directors consists of diversity in expertise, knowledge, and experience required	Sudah dilaksanakan dalam Piagam Direksi Pasal 6 Complied – BOD Charter Article 6
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors that are in charge in Accounting or Finance should have expertise and/or knowledge in Accounting	Sudah dilaksanakan, dalam Profil Direksi di situs Perseroan dan Laporan Tahunan Complied – BOD Profile in Website and AR
Prinsip 6 Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Enhancing Quality of Duties and Responsibilities of Board of Directors		
6.1	Direksi dan mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's Annual Report	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan. The Board of Directors has a policy regarding resignation of members of the Board of Directors should they be involved in financial crimes	Diatur dalam AD dan Piagam Direksi Governed in AoA and BOD Charter
D	Partisipasi Pemangku Kepentingan Participation of the Stakeholders	

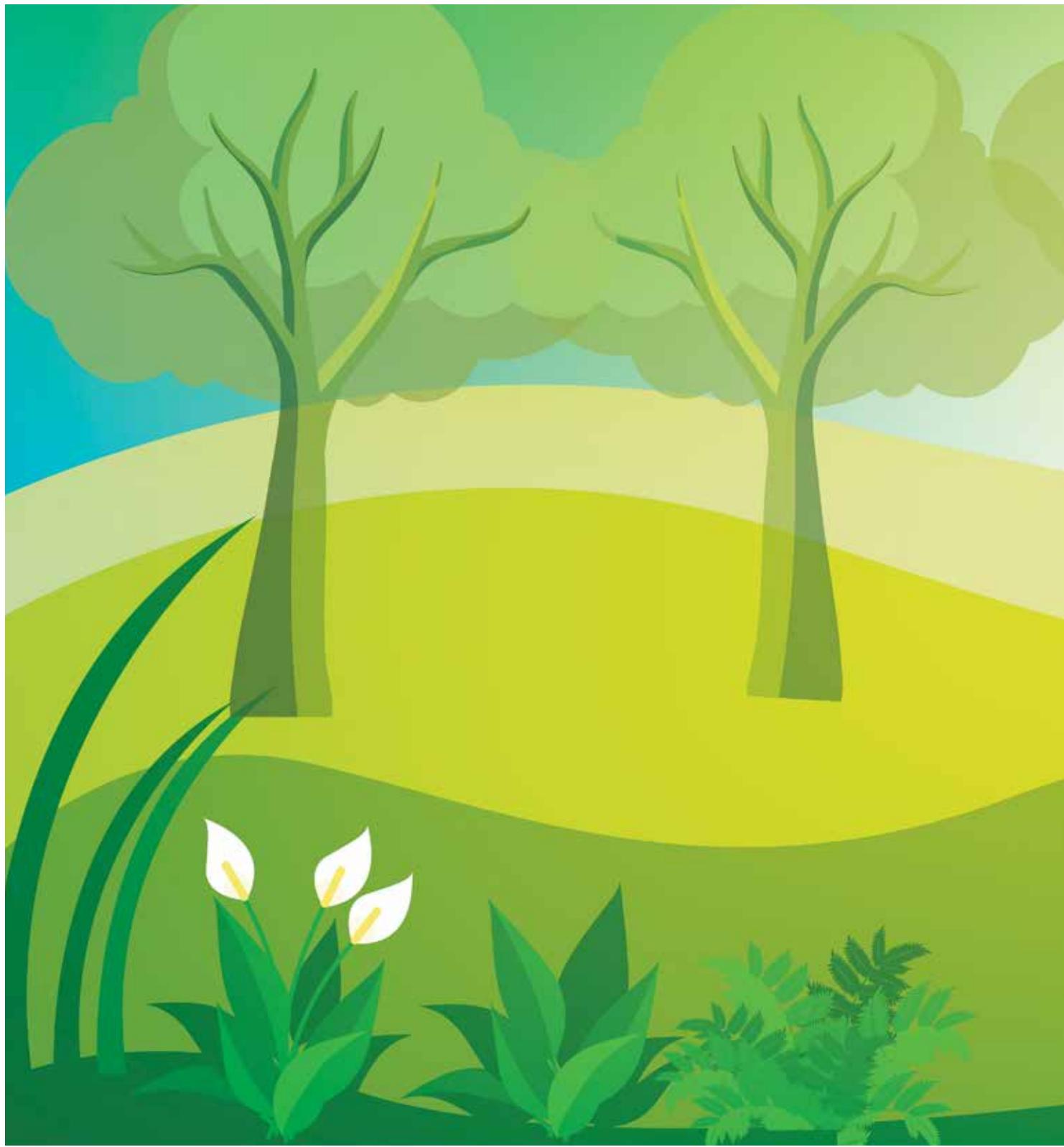
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

No.	REKOMENDASI Recommendation	DESKRIPSI Description
Prinsip 7 Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholders Participation		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. The Public Company has a policy to prevent insider trading	Sudah dilaksanakan, dalam Kode Etik Perseroan bab 3.7 Complied – Code of Conduct Point 3.7
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy	Sudah dilaksanakan, dalam Kode Etik Perusahaan Bab 7.3 Complied – Code of Conduct Point 7.3
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on the selection and enhancement of capacity of suppliers or vendors	
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran. The Public Company has a whistleblowing system policy	Sudah dilaksanakan, dalam situs Perseroan Complied - website
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy to provide long term incentive to the Board of Directors and the employees	Belum dilaksanakan Not Yet Complied
E	Keterbukaan Informasi Information Disclosure	
Prinsip 8 Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improving Information Disclosure		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs perusahaan sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes a wide range of information technology besides the website as its information disclosure media	Sudah dilaksanakan Complied
8.2	Kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership of at least 5%, aside from the disclosure of the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership through the majority shareholders and controlling shareholders	Belum dilaksanakan Not Yet Complied

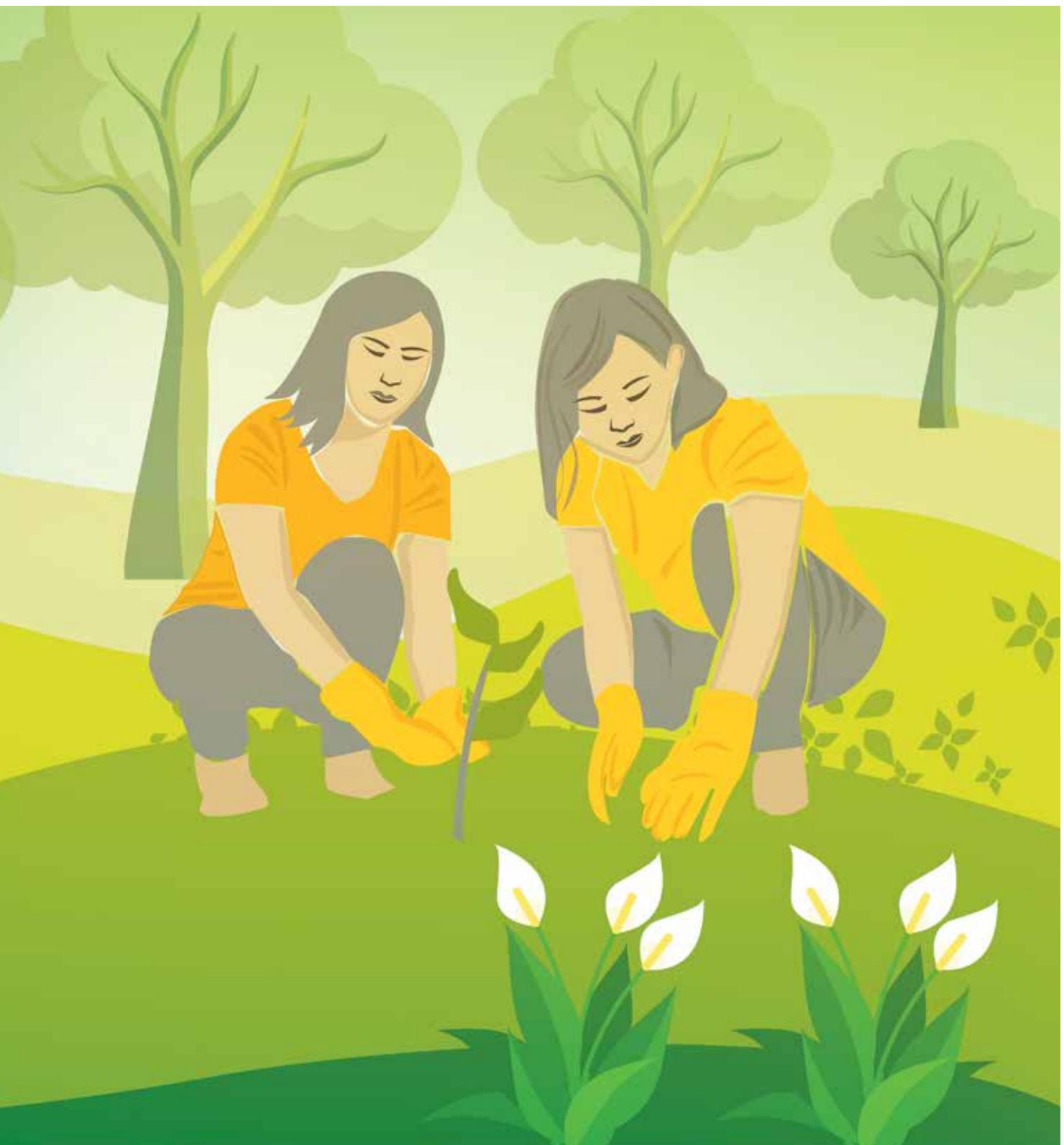
COFFEE
WALK





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



357 Prinsip dan Komitmen
Principle and Commitment

357 Kebijakan dan Pilar Program CSR
Perseroan
Policies and Company's CSR
Program Pillars

358 Dasar Hukum
Legal Reference

358 Realisasi Biaya
Cost Realization

358 Tata Kelola
Governance

359 Tanggung Jawab terhadap
Operasi yang Adil
Responsibility To Fair Operations

359 Tanggung Jawab Terhadap Hak
Asasi Manusia
Responsibility To Human Rights

359 Tanggung Jawab terhadap
Lingkungan
Responsibility to the Environment

360 Tanggung Jawab terhadap
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Responsiblity to the Occupational
Health and Safety

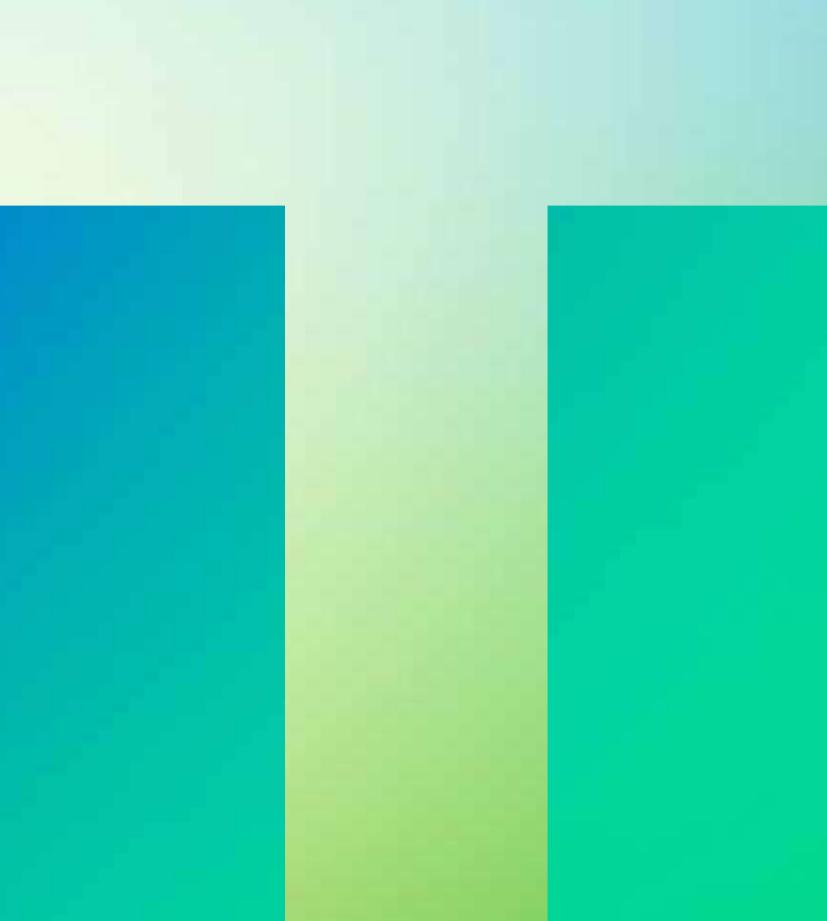
364 Tanggung Jawab terhadap Sosial
dan Masyarakat
Responsibility to Social and
Communities

367 Tanggung Jawab terhadap
Pelanggan
Responsibility To Consumers

369 Dampak atas Kegiatan
Impacts of Activities

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



Perseroan terus berkontribusi pada penciptaan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih, serta selalu mengedepankan kesetaraan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

The Company contributed in creating a better life quality of the people and cleaner environment, while prioritizing equality in running business activities.



PRINSIP DAN KOMITMEN

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis, Lippo Karawaci secara konsisten berupaya memberikan kontribusi positif terhadap semua elemen yang terlibat di dalam perjalanan usaha. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk turut berperan aktif dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kontribusi positif tersebut antara lain bisa dilihat dari peran Perseroan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pekerja, serta menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.

Dalam penciptaan lapangan pekerjaan, Perseroan selalu mengedepankan kesetaraan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tidak hanya soal gender, Perseroan juga sangat menghindari tindakan diskriminatif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan hak masyarakat adat. Perseroan juga aktif memberikan bantuan berupa dana ataupun barang untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), tidak terkecuali yayasan dan/atau organisasi keagamaan.

KEBIJAKAN DAN PILAR PROGRAM CSR PERSEROAN

Perseroan membagi kegiatan CSR ke dalam empat pilar, yaitu (1) kelestarian alam dan lingkungan, (2) ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, (3) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, (4) tanggung jawab terhadap barang dan jasa yang dihasilkan serta para konsumennya. Keempat pilar ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan bagi lingkungan dan masyarakat.

PRINCIPLE AND COMMITMENT

In line with business development and growth, Lippo Karawaci consistently aims to give positive contribution to all elements involved in business operations. This is in line with the Company's commitment in taking active role in fulfilling human rights, especially in creating a better life quality of the people and cleaner environment. The positive contribution can be seen in the Company's role in creating jobs, providing health facility for employees, and respecting economic, social, and culture rights of the surrounding communities.

In creating jobs, the Company always prioritizes equality in running business activities. Not only in gender, the Company also avoids discriminations, especially for the vulnerable groups such as disabled people, women, children, and indigenous people rights. The Company is also active giving financial aids or goods to help activities of organizations and Non-Profit Organizations (NGO), as well as foundations and/or religious organizations.

POLICIES AND PILLARS OF COMPANY'S CSR PROGRAM

The CSR programs of the Company are classified into 4 (four) pillars: (1) natural and environmental sustainability (2) employment, health, and safety, (3) social and community development, (4) responsibility for goods and services, as well as consumers. These pillars are expected to give significant contribution for the environment and people.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility



DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 3 dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyelenggarakan kegiatan CSR sendiri, melalui anak usaha, atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki visi dan misi serupa. Tujuannya agar semua pihak yang terlibat dapat memanfatkan sumber daya kolektif mereka untuk mencapai hasil maksimal.

REALASI BIAYA

Di tahun 2019, Perseroan mengeluarkan Rp7,54 miliar untuk seluruh program CSR di bidang lingkungan, K3, sosial dan kemasyarakatan, serta hal-hal yang terkait dengan konsumen.

TATA KELOLA

Kontribusi Perseroan untuk melakukan tanggung jawab sosial, baik di bidang pelestarian lingkungan ataupun hak asasi manusia, dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan *Sustainable Development Goals/SDG* (tujuan pembangunan berkelanjutan). Perseroan melibatkan peran serta

LEGAL REFERENCE

According to Article 1 Paragraph 3 of Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies, the Company can carry out its own CSR activity, or via subsidiaries, as well as by collaborating with other parties which have the same vision and mission. The purpose of this policy is to ensure every involved party is able to utilize its collective resources optimally in order to achieve maximum results.

COST REALIZATION

In 2019, the Company spent Rp7.54 billion on all CSR programs carried out in environment, Health, Safety, and Environment (HSE), social and community, and consumer related sectors.

GOVERNANCE

The Company's contribution in social responsibility, both in environmental preservation or human rights, is implemented according to prevailing regulations and in line with the Sustainable Development Goals (SDG). The Company invites participation from the society, employees, communities, and other stakeholders because its



masyarakat, karyawan, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya karena usahanya yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Perseroan berupaya mencari masukan dari para pemangku kepentingan agar usaha yang dilakukan bisa memberikan manfaat.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Perseroan berupaya menjalankan operasi yang adil dalam bisnisnya. Dalam hal ini, kami memiliki kebijakan untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi, karyawan dan para pekerja pihak ketiga dapat menjalankan tugas dengan baik, dan adanya sebuah sistem *Whistleblowing* untuk memastikan bisnis dilakukan secara transparan dan adil.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya. Hal ini tertuang di dalam Kode Etik Perseroan. Kami menjalankan tanggung jawab HAM di dalam Perseroan dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya sebagai faktor yang menentukan kapabilitas seseorang. Di luar Perseroan, kami melindungi hak asasi semua manusia yang terlibat atau terkena dampak dari usaha yang dilakukan. Berbagai kegiatan tanggung jawab sosial juga mencakup kepedulian terhadap HAM, seperti kontribusi yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Perseroan menyadari dampak yang disebabkan dari adanya perubahan iklim, dari segi cuaca sampai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Hal itu semakin memperkuat komitmen Perseroan sebagai perusahaan yang ramah terhadap lingkungan hidup, yang termanifestasi dari pembangunan proyek-proyek *green construction* dan *green building*.

Selain itu, kontribusi Perseroan dalam bidang lingkungan juga diwujudkan melalui berbagai program penghijauan. Dengan melakukan penanaman ribuan pohon di tahun 2019, kami berharap langkah ini dapat membantu pengurangan dampak negatif dari emisi karbon, serta penyerapan air dalam bencana banjir.

Perseroan memiliki berbagai sertifikasi dan penghargaan di bidang lingkungan. Kami menerima penghargaan Indonesia Green Award 2019 dari La Tofi School of CSR untuk pengurangan sampah plastik, penghematan air, dan pengembangan keanekaragaman hayati. Aktivitas CSR Perseroan juga menerima Sertifikasi Penghargaan dari Kabupaten Bekasi dan Gubernur Jawa Barat.

businesses have impact to the surrounding environment and lives. The Company asks for input from stakeholders to ensure its businesses bring benefits.

RESPONSIBILITY TO FAIR OPERATIONS

The Company aims to run fair operations in doing business. In this regard, we have policy to ensure the rights of consumers are fulfilled, employees and third party workers can perform their jobs well, and a whistleblowing system exists to have a transparent and fair business.

RESPONSIBILITY TO HUMAN RIGHTS

Human rights are strictly upheld by the Company in doing business. This is stated in the Company's Code of Conduct. We implement responsibility to human rights in the Company without factoring ethnicities, religions, races in determining someone's capability. Out of the Company, we protect human rights of all people involved or affected by our business. Many of our corporate responsibility activities cover concern on human rights, such as contribution to the disabled.

RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

The Company realizes the impact caused by climate change, from the weather and natural disaster occurring recently. These have strengthened the Company's commitment to be friendly to the environment, as manifested in the development of green construction and green building projects.

Moreover, the Company's contribution in environment is materialized in various green programs. By planting thousands of trees in 2019, we expect the steps can help reduce the negative impact of carbon emission, as well as absorbing water in floods.

The Company has many certifications and awards in environment. We received the Indonesia Green Award 2019 from La Tofi School of CSR for plastic waste reduction, water saving, and biodiversity development. The Company's CSR activities also received Certification of Appreciation from the Bekasi Regency and West Java Governor.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility



Pada 2019, Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Lippo Village kembali bekerja sama dengan Dinas Peternakan Tangerang untuk memberikan vaksinasi rabies gratis terhadap hewan peliharaan milik para penghuni.
2. Lippo St. Moritz Puri bersama Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI melakukan penanaman pohon sebanyak lebih dari 2.074 pohon guna mendukung program penghijauan di wilayah Jakarta.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia, memberlakukan kesetaraan gender dan kesetaraan kesempatan kerja, serta kesehatan dan keselamatan karyawannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 2019, terkait dengan bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1. Memastikan bahwa prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) telah diterapkan dengan baik di setiap proyek.
2. Melakukan pengecekan dan pengujian secara berkala pada sarana dan prasarana yang digunakan oleh Perseroan, termasuk terhadap mesin-mesin produksi dan pendukung pekerjaan.
3. Melakukan penggantian alat-alat kerja yang telah sampai pada akhir masa pakainya.
4. Sebanyak 29 mal jaringan Lippo Karawaci mengadakan pelatihan pemadam api, evakuasi gempa bumi, dan evakuasi menghadapi kerusuhan.

In 2019, the Company implemented numerous activities as follows:

1. Lippo Village cooperated with the Tangerang Animal Husbandry Office to provide free rabies vaccinations to residents' pets.
2. The Lippo St. Moritz Puri collaborated with the Indonesian Ministry of Environment & Forestry planted more than 2074 trees to support the greening program in the Jakarta area.

RESPONSIBILITY TO THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The Company prioritizes the fulfilment of human rights, implementation of the equality of gender and work opportunity, as well as health and safety of its employees, in compliance toward all applicable laws and regulations.

In 2019, in terms of employment, health and safety, the Company conducted the following activities:

1. Ensuring that the Standard Operating Procedures (*SOP*) are implemented properly in every project in the development stage
2. Periodically performing checks and tests on facilities and infrastructure used by the Company, including production machines and work support.
3. Renewing work equipment that had reached the expiration period.
4. 29 malls under Lippo Karawaci holding fire drills, earthquake evacuations, and social disturbance evacuations.



Ketenagakerjaan

Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja, berkreasi, dan berkembang kepada semua orang tanpa memandang perbedaan etnis, agama, ras, gender, ataupun kelas sosial. Pemilihan dan pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi dan evaluasi melalui mekanisme perekrutan, masa percobaan, dan orientasi pekerja. Rotasi, mutasi serta promosi jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan yang berimbang dan objektif.

Para karyawan memiliki hak untuk mendapat remunerasi yang memadai. Perseroan telah menerapkan sistem remunerasi normatif yang mengacu pada ketentuan pemerintah di seluruh unit bisnis, di antaranya adalah pemberian UMP/UMK sektoral, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (AK, AKK, JHT, JP), pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), penerapan cuti besar, penetapan unsur struktur dan skala upah. Selain itu, remunerasi para karyawan juga diberikan secara kompetitif sesuai target Perseroan di pasar tenaga kerja, berdasarkan survei pasar yang dilakukan secara rutin.

Perseroan mendukung terciptanya rotasi kerja, baik di dalam maupun antar unit kerja bahkan lintas Unit Bisnis. Hal ini meningkatkan kompetensi karyawan serta memperkuat *risk awareness* di berbagai unit kerja. Perpindahan karyawan ini dilakukan di semua tingkatan.

Perseroan juga telah menerapkan sistem pengaduan melalui kebijakan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Seluruh sistem pengaduan ini telah diatur dalam Peraturan Perusahaan serta formulir pengaduan masalah ketenagakerjaan yang terlampir dalam Kode Etik Perusahaan. Perseroan memiliki *e-mail hotline* yang menjadi alamat tempat bertanya serta pengaduan bagi seluruh karyawan dengan nama Helpdesk HRD (helpdeskhrd@lippokarawaci.co.id).

Kesehatan Kerja

Terkait kesehatan kerja, Perseroan memberikan manfaat (*benefit*) tambahan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, di samping yang sudah diwajibkan yaitu BPJS Kesehatan, serta pemberian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap.

Employment

The Company provides equal opportunities to work, create, and develop to all employees regardless of ethnicity, religion, race, gender, or even social status. The selection and recruitment for workers are based on the selection and evaluation through the recruitment mechanism, probation period, and worker briefing. The rotation, mutation and promotion are based on the results of balance and objective employee performance evaluations.

Employees have the right to obtain adequate remuneration. The Company has implemented a normative remuneration system in all business units referring to government regulations, such as provisions of sectoral UMP/UMK, BPJS of Health, BPJS of Employment (AK, AKK, JHT, JP), holiday allowances (THR), implementation of long leave, determination of structure and scale of wages. In addition, the remuneration of employees is also given competitively according to the Company's targets in labor market, regarding on regular market surveys.

The Company supports work rotation both inside and among business units, or even across business units. Its purpose is to increase the competence of employees and strengthen risk awareness in every business unit. The work rotation is held in every level.

The Company also provides a whistleblowing system. This complaint management system has been set out by the Company's Regulation and labor issue complaint forms stipulated in the Company's Code of Conduct. The Company provides hotline email, Helpdesk HRD (helpdeskhrd@lippokarawaci.co.id), which functions to address questions and complaints for all employees.

Health

In healthcare, the Company provides benefits of medical insurance and life insurance, in addition to the compulsory BPJS of Health, and Financial Institution Pension Funds (FIPF/DPLK) for permanent employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

Berikut adalah data mengenai jumlah karyawan yang sakit, ataupun meninggal dunia sepanjang tahun 2019:

- Data Karyawan Meninggal: 20 orang
- Data Karyawan Sakit:
 - Jumlah hari izin sakit setahun: 39.988 hari
 - Jumlah hari kerja/tahun: 243 hari
 - Total hari kerja/tahun seluruh karyawan: 3.886.785 hari
 - Rata-rata jumlah karyawan sakit setahun kerja: 1,03%
 - Persentase kehadiran: 98,97%

Keselamatan Kerja

Perseroan memberlakukan prosedur keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja proyek ataupun pengawas yang memantau lokasi proyek. Dengan ini, pekerja mampu menghasilkan kinerja optimal serta terhindar dari kerugian material dan imaterial. Prosedur Keselamatan Kerja dibuat berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur Manajemen dan para pekerja untuk melaksanakan kewajibannya dalam menciptakan sistem kerja dan fasilitas serta praktik kerja yang aman, memakai alat pelindung, tidak menyalahgunakan atau merusak fasilitas apapun yang telah disediakan.

Prosedur keselamatan kerja diterapkan pada semua kegiatan pekerjaan, mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja, kontraktor, pengunjung, dan siapa saja yang mungkin akan terpapar oleh operasi Perseroan. Seluruh level organisasi Perseroan wajib mematuhi semua peraturan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Indonesia.

Dalam hubungan antara manajemen dan pekerja yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3), manajemen akan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Tersedianya lingkungan kerja yang aman.
- Tersedianya sistem kerja yang aman.
- Tersedianya fasilitas untuk kesejahteraan pekerja.
- Tersedianya informasi, instruksi, pelatihan, dan pengawasan yang cukup diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pekerja aman dari cedera dan risiko kesehatan.
- Komitmen untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan pekerja di semua hal yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di tempat kerja.
- Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui manajemen K3 yang efektif.

The following are data on the number of illnesses and fatality levels on employees throughout 2019:

- Employee Fatalities: 20 persons
- Illnesses:
 - Total days of sick leave a year: 39,988 days
 - Total working days/year: 243 days
 - Total employee working days/year: 3,886,785 days
 - Average of sick employees in a working year: 1.03%
 - Attendance percentage: 98.97%

Work Safety

The Company implements compulsory work safety procedures for every worker and supervisor on project areas. Hence, workers can have maximum performance while avoiding material and immaterial losses. The Work Safety Procedures are based on Law No. 1/1970 concerning Work Safety, which regulates the management and all workers to perform their duty in creating a safe working system and facilities as well as working practices; wearing protective gear, and not mishandling or destroying provided facilities.

The work safety procedures are implemented in all working activities, covering all actions needed to avoid or minimize risks to health, safety and welfare of the workers, contractors, visitors, and anyone who might be exposed to the Company's operations. All levels in the Company's organization must comply with the Indonesian Health and Safety Environment (HSE) regulations.

In the relationship between the management and workers regarding to HSE aspects, the management will ensure the matters described below:

- Availability of safe working environments.
- Availability of safe working systems
- Availability of employee safety equipment.
- Availability of information, instructions, training and adequate supervision to promote employee safety and reduce risk of injury.
- Commitment to consult and cooperate with employees on any matter related to health, safety, and environment in the workplace.
- Commitment to continuously improve performance through effective HSE management.



Sedangkan setiap pekerja memiliki kewajiban untuk:

- Mematuhi praktik kerja yang aman, dengan maksud untuk menghindari cedera pada diri sendiri, orang lain, dan properti.
- Menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
- Memakai alat pelindung diri dan pakaian kerja yang ditetapkan.
- Mematuhi arahan yang diberikan oleh manajemen untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- Tidak menyalahgunakan atau merusak apa pun yang disediakan untuk kesehatan dan keselamatan
- Melaporkan semua kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan segera, tidak peduli seberapa pun kecilnya.
- Melaporkan semua potensi bahaya yang diketahui atau yang diamati tidak peduli seberapa pun kecilnya.

Departemen K3 bernaung di bawah Divisi Project Management yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan pemerintah terkait K3 disosialisasikan dan diterapkan di seluruh area kerja proyek Perseroan. Departemen ini berkewajiban untuk bekerja sama dengan para kontraktor yang ditunjuk untuk penggeraan proyek, guna memastikan prosedur K3 yang diterapkan para kontraktor sejalan dengan apa yang dilakukan Perseroan. Prosedur perundang-undangan K3 dipublikasikan melalui portal internal Perseroan yang dapat diakses oleh semua karyawan yang berkaitan dengan proyek pembangunan.

Semua tanggung jawab yang dipenuhi Perseroan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga merupakan upaya perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Untuk memastikan relasi yang terbentuk profesional dan berkeadilan, Perseroan selalu berpegang dan berupaya keras mematuhi regulasi dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Program-program sosial yang dijalankan Perseroan berpengaruh cukup besar terhadap kepuasan karyawan, baik secara finansial maupun kenyamanan dalam berkarya. Hal ini tercermin dari menurunnya tingkat pergantian karyawan (*turnover*) serta efisiensi anggaran perusahaan untuk rekrutmen dan membayar uang pisah (*pesangon*).

Meanwhile, every employee has the obligations to:

- Obey safe working practices, with the purpose to avoid injuries to themselves, other people, and property.
- Maintain personal and other people's health and safety.
- Wear personal protective equipment and proper work attire.
- Obey the guidance given by management for HSE.
- Avoid mishandling or destroying equipment provided for health and safety
- Report every work-related accident and incident as soon as possible, no matter how insignificant.
- Report every hazard potential known or examined no matter how insignificant.

The HSE department is operating under the Project Management Division which is responsible for ensuring that every government regulation regarding HSE is completely socialized and implemented for all Company's project working areas. This department is also responsible to collaborate with appointed project contractors for ensuring the contractors implement the same HSE procedures with the Company. The HSE regulations and procedures are published through the Company's internal portal which is accessible for all employees related to ongoing projects.

All responsibilities fulfilled by the Company in labour are its objective to maintain harmonious industrial relations between the management and employees. To ensure the relations are professional and fair, the Company should adhere and uphold regulations and provisions in labour applied in Indonesia.

Social programs implemented by the Company have big effects to employees' fulfilment, both in finance and work comfort. This is reflected in the decline of employee turnover and company budget efficiency for recruitment and severance pay.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

DATA TINGKAT KECELAKAAN KERJA | Working Accident Rate

Data	2019	2018	Data
Jam Kerja Aman	1,980,000	5,030,441	Total Safe Man Hours
Total Recordable Injury Rate (TRIR)	3.03	0	Total Recordable Injury Rate (TRIR)
Lost Time Injury Frequency (LTIF)	0	0.45	Lost Time Injury Frequency (LTIF)

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL DAN MASYARAKAT

Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat menjadi komitmen dan target Perseroan secara jangka panjang. Perseroan memastikan bahwa produk dan jasanya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik melalui kawasan hunian yang dibangun, rumah sakit, sekolah serta fasilitas lainnya. Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam proyek pembangunan dan pengembangan propertinya.

Melalui jaringan rumah sakit Siloam Hospitals, Perseroan terus meningkatkan jangkauan dan akses akan kesehatan, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam menerima fasilitas kesehatan yang layak. Perseroan juga secara berkala mengadakan seminar dan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat sebagai bagian dari program edukasi dan sosialisasi yang membangun.

Sepanjang 2019, Perseroan mengadakan berbagai kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan masyarakat, yaitu:

Pendidikan

- PT Lippo Karawaci Tbk. menyumbang fasilitas pendidikan berupa 47 unit komputer kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Perseroan dan beberapa perusahaan yang terafiliasi memberikan bantuan senilai Rp 1,5 miliar bagi mahasiswa berprestasi di 10 Perguruan Tinggi Negeri melalui Program Bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi Lippo (BMBL).
- PT Lippo Malls Indonesia, anak usaha Perseroan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada 1.000 anak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk daerah terpencil melalui Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) dan Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP).

RESPONSIBILITY TO SOCIAL AND COMMUNITIES

Contribution to social and society welfare is a long-term commitment and target of the Company. The Company ensures that its products and services will have positive impact to the society, either through developed residential areas, hospitals, schools and other facilities. The Company also aims to increase employment rate in its property development and projects.

Through Siloam Hospitals network, the Company continues to increase access and reach in the health sector, so the public finds it easier to get appropriate health facilities. Periodically, the Company initiates health seminars and checks for the communities as part of a constructive education and socialization program.

In 2019, the Company held several activities focusing on social and people's welfare:

Education

- PT Lippo Karawaci Tbk. donated educational facilities in form of 47 units of personal computers to Tangerang District Education Office.
- The Company and several affiliated companies provided assistance worth Rp1.5 billion for outstanding students in 10 State Universities through the Lippo Achievement Student Assistance Program (BMBL).
- PT Lippo Malls Indonesia, a subsidiary of the Company provided educational scholarship assistance to 1,000 children in several regions in Indonesia including remote areas through Pelita Harapan Education Foundation (YPPH) and Papua Hope Education Foundation (YPHP).



Kegiatan Sosial

4. Menyambut Tahun Baru Imlek 2019, Lippo Village menampilkan tarian tradisional Barongsai, pertunjukan Chinese Drums, wushu, dan lainnya pada Jumat, 1 Februari.
5. Untuk perayaan Paskah, Lippo Village menyelenggarakan Easter Eggstravaganza di Aryaduta Country Club, pada Minggu, 21 April.
6. Town Management Lippo Village kembali bekerja sama dengan Benton Junction mengadakan "Buka Puasa Bersama" anak-anak yatim yang tinggal di sekitar area Lippo Village, Jumat, 24 Mei.
7. Lippo Karawaci menyelenggarakan Festival Lippo Village 2019, dengan tema Tribal Grandeur, yang memfasilitasi penampilan Jember Fashion Carnaval (JFC) di Lippo Village, pada Sabtu, 23 November.
8. Lippo Village menyelenggarakan Konser Symphony of the Year untuk ketiga kalinya, yang berlangsung sejak 23 November hingga 14 Desember.
9. Town Management Lippo Village (TMD) Lippo Karawaci bersama dengan beberapa perusahaan terafiliasi, sekolah, unit retail dan komersial, penyewa dan penghuni bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 dengan melakukan upacara pengibaran bendera Merah-Putih.
10. Perseroan melanjutkan pemberian bantuan berupa dana ataupun barang untuk mendukung kegiatan-kegiatan masjid, gereja, Posyandu dan Karang Taruna di Desa Wadas, Margamulya dan Margakaya. Kegiatan-kegiatan yang dibantu antara lain termasuk olahraga, kesenian, pembangunan masjid atau mushola, dan bantuan dalam menyalurkan hewan kurban.
11. Saat bulan Ramadhan, Perseroan juga mengadakan buka puasa bersama dengan Dhuafa, yang dilanjutkan

Social Activities

4. Welcoming the Chinese New Year 2019, Lippo Village featured the traditional Lion dance, Chinese Drums performance, wushu and many more on Friday, 1 February.
5. Celebrating Easter, Lippo Village held Eggstravaganza in Aryaduta Country Club, Sunday, April 21.
6. Lippo Village Town Management cooperated with Benton Junction to hold an "Buka Puasa Bersama" with orphans who lived around the Lippo Village area, Friday, May 24.
7. Lippo Karawaci held the 2019 Lippo Village Festival, with the theme of Tribal Grandeur, which facilitated the appearance of Jember Fashion Carnaval (JFC) at Lippo Village, Saturday, November 23.
8. Lippo Village held the third Symphony of the Year Concert, which lasted from November 23 to December 14.
9. Town Management Lippo Village (TMD) Lippo Karawaci with several affiliated companies, schools, retail and commercial units, tenants and residents together celebrated the 74th Indonesian Independence Day by holding a Red-White flag raising ceremony.
10. The Company continued providing financial aids or goods to support activities of mosque, church, Posyandu and Karang Taruna in Wadas Village, Margamulya and Margakaya. The activities included sports, arts, mosque or prayer room constructions, and sacrificed animals donation.
11. In Ramadan, the Company held fast-breaking with the poor, followed by giving 200 Eid parcels.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

dengan pemberian bingkisan Lebaran.

12. Perseroan juga aktif terlibat dalam perayaan hari besar keagamaan, seperti Maulid, Isra Miraj, peringatan ulang tahun Hari Santri, pembangunan madrasah, dan lain-lain.
13. Di bidang olahraga, Perseroan juga aktif menyelenggarakan turnamen, seperti kompetisi sepakbola, dan lain sebagainya.

Kesehatan

14. Aryaduta Country Club Lippo Village, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang mengadakan kegiatan Donor Darah, pada Sabtu, 14 September, yang melibatkan lebih dari 100 pendonor dan menghasilkan 80 kantong darah.
15. Lippo Village kembali bekerja sama dengan Dinas Peternakan Tangerang untuk memberikan vaksinasi rabies gratis terhadap hewan peliharaan milik para penghuni.
16. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin meresmikan Rumah Sakit Umum (RSU) Syubbanul Wathon, rumah sakit kemitraan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yayasan Syubbanul Wathon, dan Siloam Hospitals yang berlokasi di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis, 7 November.
17. Perseroan juga melanjutkan program donor darah di San Diego Hills yang rutin diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam setahun, dengan melibatkan karyawan San Diego Hills, Matahari Karawang, serta Muspika Telukjambe Barat dan Timur.
18. Perseroan juga berkontribusi dalam pembangunan madrasah, masjid, dan fasilitas keagamaan lain di berbagai wilayah operasional Perseroan.



12. The Company is also active in the celebration of religious holidays, such as Maulid, Isra Miraj, Islamic Students Day, madrasa construction, etc.
13. In sports, the Company is also active in holding tournaments, such as soccer etc.

Health

14. The Aryaduta Country Club Lippo Village collaborated with the Indonesian Red Cross (PMI) Tangerang held a Blood Donation activity, on Saturday, 14 September 2019, which involved more than 100 donors and donating more than 80 bags of blood.
15. Lippo Village cooperated with the Tangerang Animal Husbandry Office to provide free rabies vaccinations to residents' pets.
16. Vice President K.H. Ma'ruf Amin inaugurated the Syubbanul Wathon General Hospital (RSU), the partnership hospital of Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU), the Syubbanul Wathon Foundation, and Siloam Hospitals located in Tegalrejo, Magelang, Central Java on Thursday , November 7.
17. The Company also continued blood donor program in San Diego Hills regularly held 3 (three) times a year, involving the employees of San Diego Hills, Matahari Karawang, and Muspika Telukjambe Barat dan Timur.
18. The Company also contributed in the construction of Islamic school, mosque, and other religious facilities in its operational areas.



Dukungan terhadap Pemerintah

19. Lippo Malls Indonesia menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) seluas 740 meter persegi di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 145 jenis layanan dan perizinan dari 14 instansi pemerintah.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN

Pelayanan terbaik untuk pelanggan merupakan prioritas Lippo Karawaci. Untuk meningkatkan kepercayaan serta memperoleh timbal balik atas kualitas produk serta mengukur kepuasan pelanggan, Perseroan menerapkan mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan.

Pada 2019, jenis keluhan yang disampaikan kepada Perseroan dari seluruh township yang telah diselesaikan dengan baik:

10 Jenis Keluhan Terbanyak 2019 | 10 Biggest Complaints in 2019

Jenis Keluhan	Type of Complaint
Utilitas-Meter Air	Utility-Water Meter
Taman/Kebersihan-Pemangkas Pohon	Park/Cleaning-Tree Pruning
Penerangan Jalan Umum-Mati	Public Street Light-Off
Masalah Hewan-Hewan Liar	Wild Animals Issues
Kebersihan-Saluran Air	Cleaning-Waterways
Taman/Kebersihan-Pemotongan Rumput	Park/Cleaning-Grass Cutting
Taman/Kebersihan-Penebangan/Pemotongan Pohon	Park/Cleaning-Tree Cutting
Kebersihan-Landscape	Cleaning-Landscape
Infrastruktur -Kualitas Jalan	Infrastructure-Road Quality
Sampah-Tidak Diangkut	Trash-Not Picked Up

Dalam pembangunan proyek yang dimiliki, Perseroan telah memikirkan yang terbaik bagi penggunanya, mulai dari infrastruktur, *public utilities*, *block plan*, pemanfaatan lahan, tata ruang, dan lain seterusnya. Setelahnya, Perseroan menciptakan konsep Town Management Development (TMD).

TMD menjaga agar kota yang telah dibangun dengan baik dapat terus berjalan dengan baik dan tetap terjaga sesuai dengan perencanaannya, agar manfaat utilitas yang dirancang dapat digunakan dengan optimal. TMD mengoperasikan infrastruktur kota seperti pengelolaan air bersih, kebersihan, renovasi bangunan hingga memberikan jasa-jasa bantuan yang secara berkala dibutuhkan penghuni. TMD siap membantu mereka mulai dari mengurus Pajak Bumi dan Bangunan hingga menyediakan tenaga-tenaga teknis yang dapat segera membantu memperbaiki kerusakan di properti yang telah dibeli.

Support for the Government

19. Lippo Malls Indonesia provided a 740 square meter Public Service Mall (MPP) at Lippo Plaza Keboen Raya Bogor, to provide facilities for the public to access 145 services and permits from 14 government agencies.

RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

Best services to customers are Lippo Karawaci's priority. To gain trust and feedback on product quality and measure consumer satisfaction, the Company implements a Customer Complaint Handling mechanism.

In 2019, various complaints submitted to the Company from townships which have been resolved properly:

In developing the projects, the Company has carefully planned for the best for customers, from infrastructure, public utilities, block plans, land use, spatial planning, and so on. Afterwards, the Company put forward the concept of Town Management Development (TMD).

TMD is responsible in maintaining the developed city to continuously run well and still align to its planning, so that the benefits of the designed utilities can be used optimally. TMD operates city infrastructure such as clean water management, cleaning, building renovation to providing assistance services that are regularly needed by residents. TMD is ready to help them from managing Land and Building Taxes to providing technical personnel who can immediately help repairing damages to property that has been purchased.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

Sistem informasi dirancang Perseroan untuk mengetahui sudah sampai di mana bantuan yang diberikan kepada masing-masing penghuni. Catatan historis setiap layanan ini sangat berharga bagi pengelola pemukiman, sebagai masukan dalam pengembangan layanan berikutnya.

Salah satu layanan utama yang dikelola TMD adalah pengelolaan air bersih di lingkungan proyek-proyek pengembangan. Perseroan menyadari bahwa sanitasi merupakan elemen penting dalam pembangunan kawasan. Sistem pengelolaan air limbah melalui fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP) milik Perseroan memberikan berbagai keuntungan yang tidak ternilai bagi penghuni maupun lingkungan, termasuk mencegah berbagai penyakit yang disebabkan buruknya sanitasi seperti disentri, kolera, demam berdarah, leptospirosis dan berbagai penyakit lain.

Kegiatan untuk Pelanggan

Pada 2019, Lippo Malls Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pelanggan dan tenant, yaitu:

1. Mengadakan *National Tenant Gathering* pada 28 Februari dengan tema 3 Dekade yang dihadiri 85% dari tenant mal Perusahaan.
2. Berkolaborasi dengan PT Aira Mitra Media untuk mengadakan *bazaar* dengan partisipasi 21 industri mikro di Lippo Mall Kuta, Bali.
3. Mengadakan acara yang melibatkan anak-anak *down syndrome* sebagai bagian dari perayaan Hari *Down Syndrome* Dunia.
4. Berpartisipasi dalam *Earth Hour* dengan mematikan lampu-lampu di mal-mal Lippo selama satu jam dari pukul 20.30 pada 30 Maret. Acara ini melibatkan para penggerak kepedulian lingkungan.
5. Mengadakan acara ngabuburit bersama lebih dari 4.000 anak yatim piatu di berbagai mal Lippo sebagai bagian dari bulan puasa.
6. Mengadakan *tenant gathering* di Gajah Mada Plaza untuk mendiskusikan perihal *cashless payment* dengan NOBU National Bank yang dihadiri 94 tenant.
7. Pluit Village mengadakan Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival 2019 yang merupakan acara tahunan APPBI.

Information system is designed to notify the position of assistance to residents. Historical records of each service are very valuable for residential managers as input in development of subsequent services.

One of the main services managed by TMD is clean water management in all development project locations. The Company realizes that sanitation is an important element in development areas. Wastewater management system through the Water Treatment Plant (WTP) facilities of the Company provides intangible benefits to the residents or environment, including to prevent various types of illness caused by sanitation, like diarrhoea, cholera, blood fever, leptospirosis and other illnesses.

Activity for Customers

In 2019, Lippo Malls Indonesia held activities involving customers and tenants:

1. Holding the National Tenant Gathering in February 28 with the theme 3 Decade participated by 85% of the Company's tenants.
2. Collaborated with PT Aira Mitra Media to hold bazaar with participation of 25 micro industries in Lippo Mall Kuta, Bali.
3. Holding events with down syndrome children as part of the World Down Syndrome Day.
4. Participated in Earth Hour by turning off lights in Lippo malls for one hours from 8:30 pm in March 30. The events involved environmental activists.
5. Holding fast breaking event with more than 4,000 orphans in Lippo malls as part of the fasting month.
6. Holding tenant gathering in Gajah Mada Plaza to discuss on cashless payment with NOBU National Bank participated by 94 tenants.
7. Pluit Village holding the 2019 Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival which is APPBI annual event.



DAMPAK ATAS KEGIATAN CSR

Pelaksanaan program-program sosial selama ini telah berdampak positif tidak hanya bagi Perseroan, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi karyawan, pelanggan (penghuni dan pengguna jasa), rekanan bisnis, serta masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan. Semua itu sejalan dengan semangat Perseroan yang selalu berupaya memberikan manfaat lebih dalam menjalankan usahanya. Tidak hanya berbisnis, tapi juga memberikan kontribusi yang berharga. Kami ingin agar semua produk dan jasa yang ada bisa memberikan hasil dan manfaat yang maksimal dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

IMPACT OF CSR ACTIVITIES

The implementation of social programs gives positive impact to the Company, and also provides huge benefits to employees, customers (residents and users), business partners, and the society and environment around the firm's operational area. It is in line with the Company's objective to continue giving benefits in doing business. Not only business, but also valuable contributions. We want to ensure that every product and service will deliver maximum results and benefits in the long term and sustainably.

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT LIPPO KARAWACI TBK

Member of the Board of Commissioners Statement of Responsibility for 2019 Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lippo Karawaci, Juni 2020

We, the undersigned, declare that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk has been presented in their entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk.

This statement is made truthfully.

Lippo Karawaci, June 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

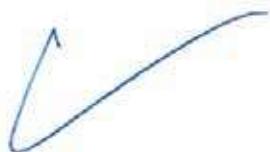


John A. Prasetio

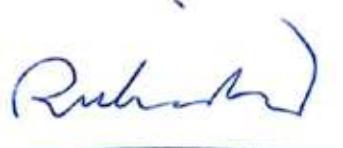
Presiden Komisaris Independen
Independent President Commissioner



Anangga Wardhana Roosdiono
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kin Chan
Komisaris
Commissioner



Stephen Riady
Komisaris
Commissioner



George Raymond Zage III
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT LIPPO KARAWACI TBK

Member of the Board of Directors Statement of Responsibility for 2019 Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Lippo Karawaci Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lippo Karawaci, Juni 2020

We, the undersigned, declare that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk has been presented in their entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Lippo Karawaci Tbk.

This statement is made truthfully.

Lippo Karawaci, June 2020

Direksi Board of Directors



Ketut Budi Wijaya
Presiden Direktur
President Director

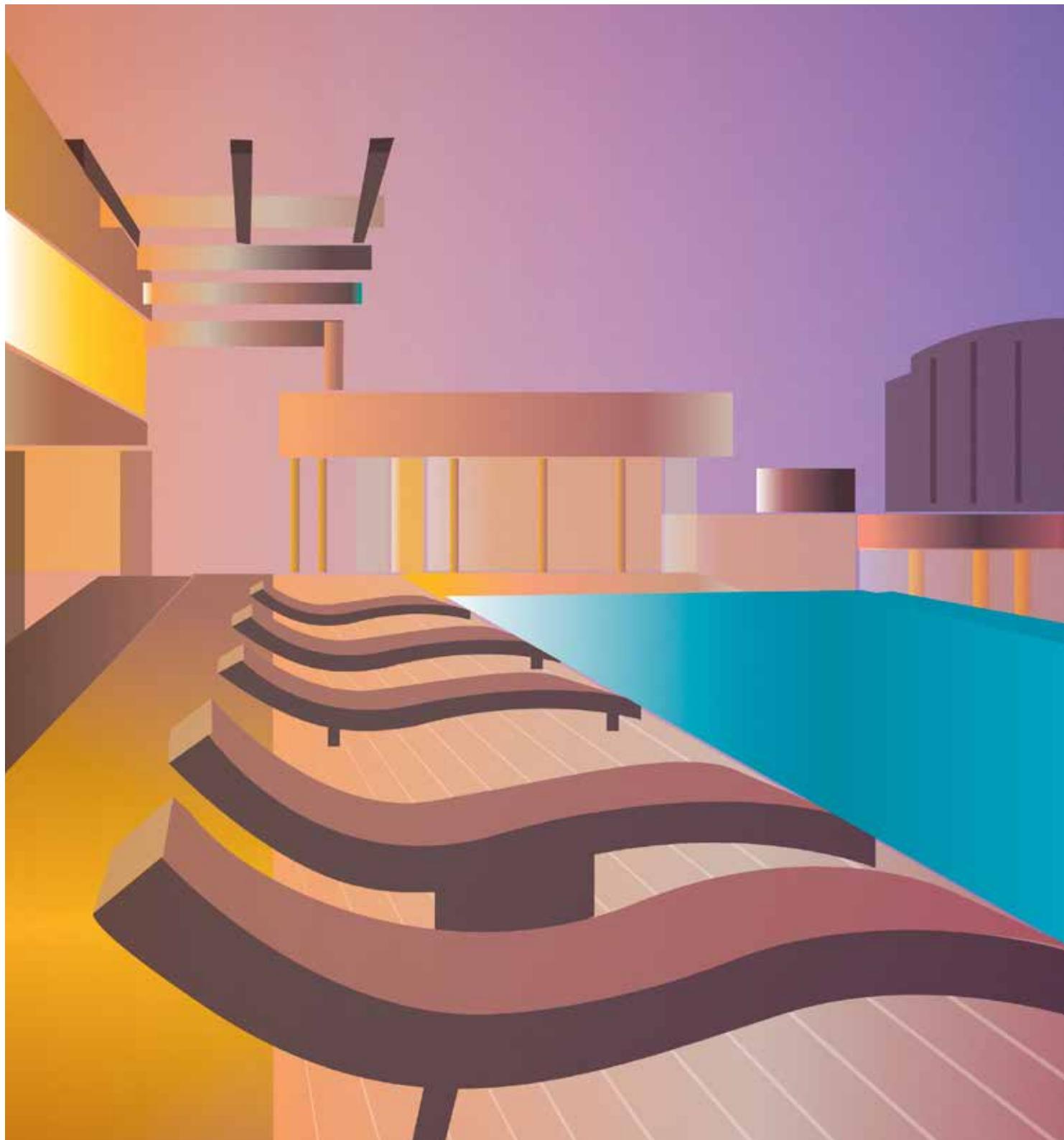


John Riady
Direktur
Director



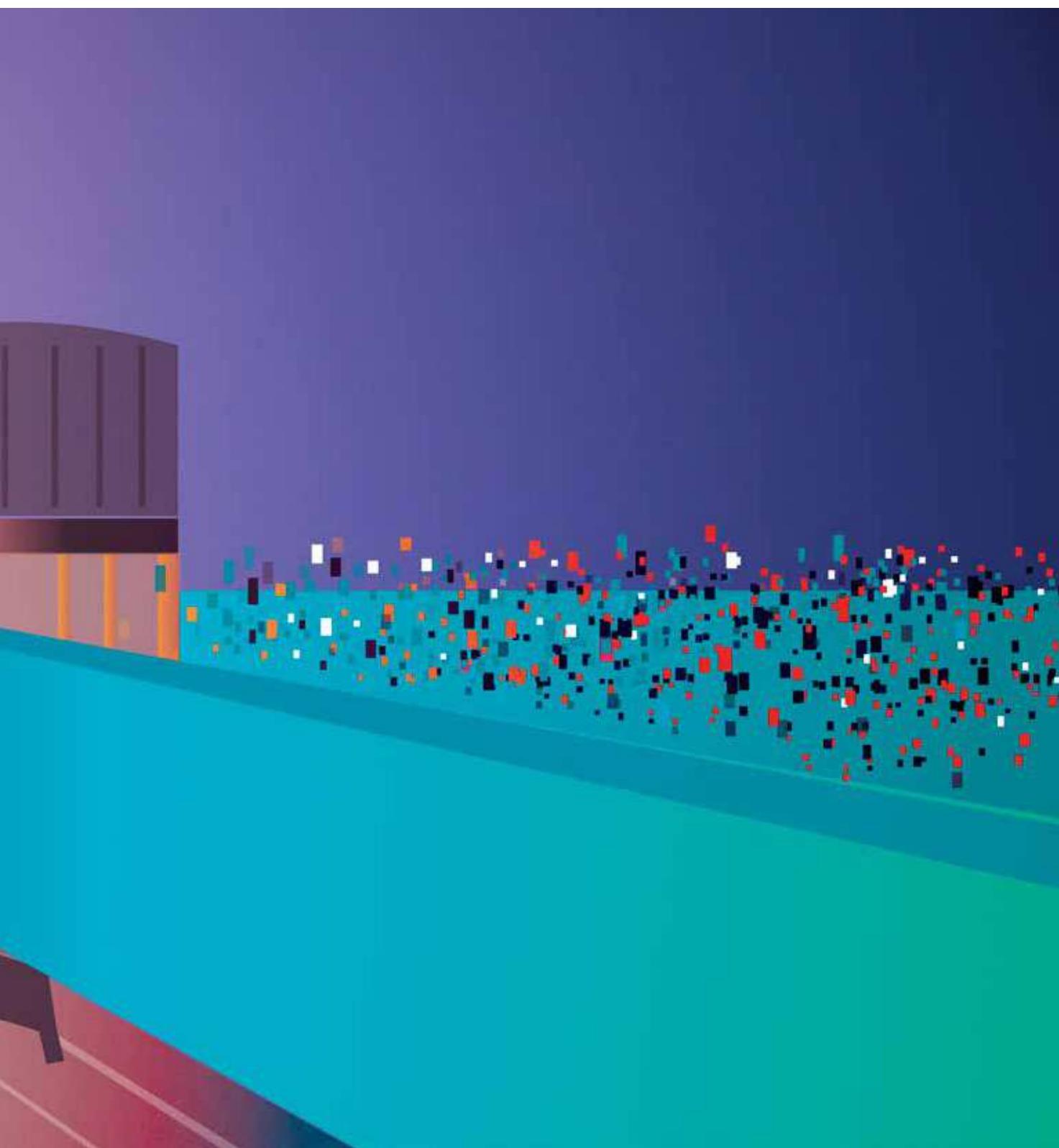
Marshal Martinus Tissadharma
Direktur
Director


Surya Tatang
Direktur
Director
Alwi Rubidium Sjaaf
Direktur
Director



LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PT LIPPO KARAWACI TBK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019
No.186/LK-COS/V/2020**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ketut Budi Wijaya
 Alamat Kantor : Menara Matahari Lt. 22
 Jln. Bulevar Palem Raya No. 7
 Lippo Karawaci,
 Tangerang 15811
 Alamat domisili : Jln. Percetakan Negara II/3
 (sesuai KTP) Johar Baru, Jakarta Pusat
 No. Telepon : (021) 2566 9000
 Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Surya Tatang
 Alamat kantor : Menara Matahari Lt. 22
 Jln. Bulevar Palem Raya No. 7
 Lippo Karawaci,
 Tangerang 15811
 Alamat domisili : Jln. Pejagalan I no. 28 B
 (sesuai KTP) Pekojan,Tambora
 Jakarta Barat
 No. Telepon : (021) 2566 9000
 Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lippo Karawaci, 22 Mei 2020
 Atas nama dan mewakili Direksi
PT LIPPO KARAWACI TBK



Ketut Budi Wijaya
 Presiden Direktur/
 President Director

**DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR PT LIPPO KARAWACI TBK
& SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019
No.186/LK-COS/V/2020**

We, the undersigned :

1. Name : Ketut Budi Wijaya
 Address : 22nd floor Menara Matahari
 7 Boulevard Palem Raya
 Lippo Karawaci,
 Tangerang 15811
 Residence : Jln. Percetakan Negara II/3
 (as in ID Card) Johar Baru, Central Jakarta
 Telp No. : (021) 2566 9000
 Title : President Director

2. Name : Surya Tatang
 Address : 22nd floor Menara Matahari
 7 Boulevard Palem Raya
 Lippo Karawaci,
 Tangerang 15811
 Residence : Jln. Pejagalan I no. 28B
 (as in ID Card) Pekojan, Tambora
 West Jakarta
 Telp No. : (021) 2566 9000
 Title : Finance Director

state that :

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Lippo Karawaci Tbk ("the Company");
2. The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;
3. a. All information contained in the Company's consolidated financial statements is complete and correct;
 b. The Company's consolidated financial statements do not contain misleading information or fact and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement is issued to the best of our knowledge and belief.

Lippo Karawaci, 22 May 2020
 For and on behalf of the Board of Directors
PT LIPPO KARAWACI TBK

Surya Tatang
 Direktur Keuangan/
 Finance Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00597/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2020

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350
www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Lippo Karawaci Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Lippo Karawaci Tbk ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan hal-hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 49.c dan 54.g atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang ketidakpastian potensi dampak hukum terhadap entitas asosiasi dan dampak atas pandemi virus corona (juga dikenal sebagai Covid-19) di Indonesia terhadap Grup di awal 2020 dimana terdapat ketidakpastian signifikan atas dampak pandemi virus corona terhadap kegiatan usaha Grup di masa mendatang. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated statements financial position of PT Lippo Karawaci Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Notes 49.c and 54.g to the accompanying consolidated financial statements which describes the uncertainty of the potential legal impact on the associate and the impact of the corona virus (also named as Covid-19) outbreak in Indonesia to the Group in early 2020 whereby there is significant uncertainty about the impact of the corona virus outbreak on the Group's business in the future. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Tjun Tjun

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 22 Mei/May 22, 2020



**PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

*As of December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/
Unit and Otherwise Stated)*

	Catatan/ Note	2019		2018		
		Rp	Rp	Rp	Rp	
ASSET						
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas	3, 9, 48, 50	4,685,129		1,818,430		
Piutang Usaha	4, 50					
Pihak Ketiga	48	2,092,391		2,393,509		
Pihak Berelasi	9	59,589		8,029		
Aset Keuangan Lancar Lainnya	5, 9, 46.d, 48, 50	1,838,828		1,938,934		
Persediaan	6	27,501,173		25,403,046		
Pajak Dibayar di Muka	20.c	661,125		522,662		
Beban Dibayar di Muka	7, 9, 46.b	359,015		353,633		
Uang Muka	16	--		608,263		
Jumlah Aset Lancar		37,197,250		33,046,506		
Total Current Assets						
Aset Tidak Lancar						
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	9, 48, 50	40,494		447,082		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	8, 9, 48, 50	877,769		1,069,211		
Investasi pada Entitas Asosiasi	9, 10	4,491,322		4,700,208		
Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur	9, 10	3,239,387		--		
Investasi pada Ventura Bersama	9, 11	--		145,985		
Properti Investasi	12	431,828		432,505		
Aset Tetap	13	5,369,030		5,397,911		
<i>Goodwill</i>	14, 51	666,593		583,979		
Aset Takberwujud	15	94,073		123,645		
Aset Pajak Tangguhan	20.b	107,271		66,774		
Uang Muka	16	1,155,068		1,666,136		
Tanah untuk Pengembangan	17	1,047,199		1,121,631		
Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya	18, 46.b	362,301		281,887		
Jumlah Aset Tidak Lancar		17,882,335		16,036,954		
JUMLAH ASET		55,079,585		49,083,460		
Total Non-Current Assets						
TOTAL ASSETS						
ASSETS						
Current Assets						
<i>Cash and Cash Equivalents</i>						
<i>Trade Accounts Receivable</i>						
<i>Third Parties</i>						
<i>Related Parties</i>						
<i>Other Current Financial Assets</i>						
<i>Inventories</i>						
<i>Prepaid Taxes</i>						
<i>Prepaid Expenses</i>						
<i>Advances</i>						
Total Current Assets						
Non-Current Assets						
<i>Due from Related Parties Non-Trade</i>						
<i>Other Non-Current Financial Assets</i>						
<i>Investments in Associates</i>						
<i>Investment in Infrastructure</i>						
<i>Investment Funds</i>						
<i>Investments in Joint Venture</i>						
<i>Investment Properties</i>						
<i>Property and Equipment</i>						
<i>Goodwill</i>						
<i>Intangible Assets</i>						
<i>Deferred Tax Assets</i>						
<i>Advances</i>						
<i>Land for Development</i>						
<i>Other Non-Current Non-Financial Assets</i>						
Total Non-Current Assets						
TOTAL ASSETS						

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

*As of December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/
Unit and Otherwise Stated)*

	Catatan/ Note	2019 Rp	2018 Rp	LIABILITIES AND EQUITY LIABILITIES
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	19, 50			Trade Accounts Payable
Pihak Ketiga	48	1,129,970	1,305,409	Third Parties
Pihak Berelasi	9	73,533	68,016	Related Parties
Beban Akrual	21, 48, 50	1,727,891	1,345,089	Accrued Expenses
Utang Pajak	20.d	284,554	331,181	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	50	280,631	107,271	Short-Term Employment Benefits Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	22, 48, 50	653,174	1,384,050	Short - Term Bank Loans
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	50			Current Portion of Long - Term Liabilities
Utang Bank	24	94,259	111,162	Bank Loans
Utang Sewa Pembiayaan	25	61,156	45,186	Finance Leases Obligation
Pinjaman Anjak Piutang	26, 50	20,665	74,000	Factoring Loan
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	23.a, 50	656,181	636,863	Other Current Financial Liabilities
Uang Muka Pelanggan	29	1,398,259	2,290,423	Advances from Customers
Pendapatan Ditangguhkan	9, 30, 46.b	344,876	352,809	Deferred Income
Laba Ditangguhkan atas				Deferred Gain on
Transaksi Jual dan Sewa Balik	9, 31, 46.b	156,102	153,462	Sale and Leaseback Transactions
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6,881,251	8,204,921	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Bank Jangka Panjang	24, 50	170,916	387,875	Long-Term Bank Loans
Utang Sewa Pembiayaan	25, 50	89,749	131,404	Finance Leases Obligation
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	9, 50	1,384	2,205	Due to Related Parties Non-Trade
Utang Obligasi	27, 48, 50	11,161,549	12,737,646	Bonds Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	23.b, 50	266,482	281,254	Other Non-Current Financial Liabilities
Liabilitas Imbalan Pascakerja	9, 28	370,952	345,699	Post-employment Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	20.b	69,792	63,050	Deferred Tax Liabilities
Uang Muka Pelanggan	29	595,303	892,033	Advances from Customers
Pendapatan Ditangguhkan	9, 30, 46.b	331,427	363,092	Deferred Income
Laba Ditangguhkan atas				Deferred Gain on
Transaksi Jual dan Sewa Balik	9, 31, 46.b	764,441	927,213	Sale and Leaseback Transactions
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13,821,995	16,131,471	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		20,703,246	24,336,392	Total Liabilities

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form are an integral part of these consolidated financial statements as a whole



**PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

*As of December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/
Unit and Otherwise Stated)*

	Catatan/ Note	2019 Rp	2018 Rp	EQUITY <i>Equity Attributable to Owners of the Parent</i>
EKUITAS				Capital Stock
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada				<i>Par Value - Rp100</i>
Pemilik Entitas Induk				<i>Authorized Capital - 92,000,000,000 shares as of December 31, 2019 and 64,000,000,000 shares as of December 31, 2018</i>
Modal Saham				<i>Issued and Fully Paid: 70,898,018,369 shares as of December 31, 2019 and 23,077,689,619 shares of December 31, 2018</i>
Nilai Nominal per Saham Rp100				<i>Additional Paid-in Capital - Net Difference in Transactions with Non-Controlling Interests</i>
Modal Dasar - 92.000.000.000 saham pada				<i>Other Equity Components</i>
31 Desember 2019 dan 64.000.000.000 saham pada 31 Desember 2018				<i>Treasury Stock</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				<i>Retained Earnings</i>
70.898.018.369 saham pada 31 Desember 2019	32	7,089,802	2,307,769	<i>Other Comprehensive Income</i>
dan 23.077.689.619 saham pada 31 Desember 2018				Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Tambahan Modal Disetor - Neto	33	10,529,940	4,080,770	Non-Controlling Interests
Selisih Transaksi dengan				Total Equity
Pihak Nonpengendali	34	2,540,899	2,540,899	
Komponen Ekuitas Lainnya	35	5,220,586	3,212,282	
Saham Treasuri	32	(216,524)	(216,524)	
Saldo Laba		3,004,896	5,021,807	
Penghasilan Komprehensif Lainnya	37	605,418	790,906	
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Pemilik Entitas Induk		28,775,017	17,737,909	
Kepentingan Nonpengendali	38	5,601,322	7,009,159	
Jumlah Ekuitas		34,376,339	24,747,068	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		55,079,585	49,083,460	

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form are an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018*

	Catatan/ Note	2019 Rp	2018 *) Rp	
PENDAPATAN	9, 39	12,320,248	11,452,799	REVENUES
Beban Pajak Final	20.a	(143,075)	(177,780)	Final Tax Expenses
PENDAPATAN NETO		12,177,173	11,275,019	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	40	(7,724,006)	(6,200,783)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		4,453,167	5,074,236	GROSS PROFIT
Beban Usaha	9, 41	(4,003,429)	(3,587,467)	Operating Expenses
Penghasilan Lainnya	43	721,361	2,361,854	Other Incomes
Beban Lainnya	43	(2,075,322)	(1,907,422)	Other Expenses
LABA (RUGI) USAHA		(904,223)	1,941,201	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
Beban Keuangan - Neto	42	(904,143)	(585,930)	Financial Charges - Net
Keuntungan Pencatatan Investasi pada Entitas Asosiasi dengan Nilai Wajar	44	--	976,104	Gain from Record of Investment on Association using Fair Value
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Neto	10, 11	143,201	(271,210)	Share in the Profit (Loss) of Associates and Joint Venture - Net
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK		(1,665,165)	2,060,165	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak	20.a	(396,253)	(397,480)	Tax Expenses
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(2,061,418)	1,662,685	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:
Rugi Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	28	(44,058)	(2,015)	Loss from Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	20.b	6,639	2,512	Income Tax Related to Items that will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items that may be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Kerugian dari Penjabaran Laporan Keuangan		(189,772)	(119,185)	Loss from Translation of Financial Statements
Keuntungan (Kerugian) dari Pengukuran Kembali Aset Keuangan yang Dikategorikan sebagai Tersedia untuk Dijual		13,813	(2,216)	Gain (Loss) on Remeasurement in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
TAHUN BERJALAN		(213,378)	(120,904)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(2,274,796)	1,541,781	Profit (Loss) for the Year Attributable to: Owners of the Parent Non-Controlling Interests Profit (Loss) for the Year
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income for the Year Attributable to: Owners of the Parent Non-Controlling Interests
Pemilik Entitas Induk		(1,983,299)	719,977	Profit (Loss) for the Year Attributable to: Owners of the Parent Non-Controlling Interests
Kepentingan Nonpengendali		(78,119)	942,708	Total Comprehensive Income (Loss) for the Year
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(2,061,418)	1,662,685	EARNING (LOSS) PER SHARE
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:				Basic, Profit (Loss) for the Year Attributable to Ordinary Shareholders of the Parent (In Full Rupiah)
Pemilik Entitas Induk		(2,202,399)	517,607	
Kepentingan Nonpengendali		(72,397)	1,024,174	
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		(2,274,796)	1,541,781	
LABA (RUGI) PER SAHAM				
Dasar, Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (Dalam Rupiah Penuh)	45	(43.84)	31.62	

*) Direklasifikasi (Catatan 55)

*) Reclassified (Note 55)

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

P.T. LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan

PT LIPPO KARAWACI TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2019 Rp	2018 *) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pelanggan		10,551,701	12,138,736	Collections from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(11,618,856)	(11,666,497)	Payments to Suppliers and Third Parties
Pembayaran kepada Karyawan		(2,020,790)	(1,830,211)	Payments to Employees
Penerimaan Bunga	42	233,412	108,414	Interest Received
Penerimaan dari (Penempatan pada) Restricted Funds	8	61,881	(356,797)	Received from (Placement in) Restricted Funds
Pembayaran Pajak		(544,353)	(514,770)	Taxes Payments
Pembayaran Bunga	42	(1,201,957)	(1,288,230)	Interest Payments
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(4,538,962)	(3,409,355)	Net Cash Flows Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Aset Tetap dan Perangkat Lunak	13, 15			Property and Equipment and Software
Pelepasan		333	2,524	Disposal
Perolehan		(603,504)	(909,710)	Acquisition
Perolehan Properti Investasi	12	(34,789)	(7,833)	Acquisition of Investment Property
Penerimaan Dividen		255,952	400,782	Receipt of Dividend
Pencairan Investasi pada Obligasi		--	5,000	Disbursement of Investment in Bond
Perolehan Saham dari Pemegang Saham Nonpengendali pada Entitas Anak	34	--	(13,754)	Acquisition Share of Non-Controlling Interest in Subsidiaries
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi	10	(12,750)	--	Placement of Investments in Associate
Pelepasan Investasi pada Entitas Asosiasi	10	511,935	1,614,080	Disposal of Investments in Associate
Penempatan Investasi pada Ventura Bersama	11	(59,446)	--	Placement of Investments in Joint Venture
Pelepasan Investasi pada Ventura Bersama	11	273,312	--	Disposal of Investments in Joint Venture
Pelepasan Investasi Lain-lain	8	275,000	946,239	Disposal of Other Investments
Akuisisi Entitas Anak, Setelah Dikurangi Kas yang Diperoleh	1.c, 51	(10,170)	(68,801)	Acquisition of Subsidiaries, Net of Cash Acquired
Pelunasan Utang atas Pembelian Saham Entitas Anak	23	--	(42,997)	Loan repayment of Acquisition Shares in Subsidiaries
Penempatan Investasi pada Reksa Dana	5	(12,107)	(92,800)	Placement of Investments in Mutual Funds
Pencairan Investasi pada Reksa Dana	5	60,173	74,948	Disbursement of Investments in Mutual Funds
Penempatan Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur	10	(3,253,623)	--	Placement of Investment in Infrastructure Investment Funds
Pencairan Dana yang Dibatasi Penggunaannya		--	5,000	Disbursement of Restricted Fund
Penempatan Uang Muka Pembelian Aset Tetap		(47,344)	(20,909)	Placement of Advances Purchase Fixed Assets
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(2,657,028)	1,891,769	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil dari Penerbitan Obligasi	27			Proceeds from Bond Issuance
Penerimaan		--	1,041,525	Received
Pembayaran		(1,162,709)	--	Payment
Biaya Emisi		--	(13,520)	Issuance Cost
Penerimaan dari (Pembayaran kepada) Pihak Berelasi - Neto	9	455,045	(410,633)	Received from (Payment to) Related Parties - Net
Hasil Penambahan Modal				Proceeds from Capital Stock through Preemptive Right and Issued
Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu				Received
Penerimaan		11,237,778	--	Issuance Cost
Biaya Emisi		(6,575)	--	
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek - Neto	22	(730,876)	(1,000)	Payment of Short-Term Bank Loans - Net
Penambahan Modal pada Entitas Anak	35, 38	665,721	--	Addition of Stocks in a Subsidiary
Biaya Emisi Entitas Anak		--	(1,990)	Issuance Cost of Subsidiary
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	25	(52,274)	(37,438)	Payment to Finance Lease Obligation
Penerimaan dari Pihak Ketiga		--	942,252	Proceed from Third Parties
Pembayaran Dividen Kepada:				Payment Dividend to:
Pemilik Entitas Induk		--	(61,360)	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali		(3,437)	(15,394)	Non-Controlling Interest
Pinjaman Anjak Piutang	26			Factoring Loan
Penerimaan		20,665	85,700	Received
Pembayaran		(74,000)	(10,121)	Payment
Pinjaman Bank Jangka Panjang	24			Long-Term Bank Loans
Penerimaan		17,385	45,000	Received
Pembayaran		(251,247)	(1,015,545)	Payments
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		10,115,476	547,476	Net Cash Flows Provided by Financing Activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole



**PT LIPPO KARAWACI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

	Catatan/ Note	2019 Rp	2018 *) Rp	
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO				NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS		2,919,486	(970,110)	<i>Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents at the End of the Year</i>
Dampak Kurs atas Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun		(52,787)	5,043	<i>Impact of Cash and Cash Equivalent Arising from Control in a Subsidiary</i>
Dampak Kas dan Setara Kas Atas		--	(91,205)	<i>Impact of Cash and Cash Equivalent Arising from the Lose of Control in Subsidiary</i>
Pengendalian pada Entitas Anak		--	336,542	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Dampak Kas dan Setara Kas Atas Hilangnya		--		
Pengendalian pada Entitas Anak		--		
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
AWAL TAHUN		<u>1,818,430</u>	<u>2,538,160</u>	
KAS DAN SETARA KAS				
AKHIR TAHUN		<u>4,685,129</u>	<u>1,818,430</u>	

*) Direklasifikasi (Catatan 55)

*) Reclassified (Note 55)

Tambahan Informasi aktivitas arus kas
disajikan dalam Catatan 52.

*Additional informations of cash flows activities
are presented in Note 52*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole*

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Lippo Karawaci Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana pada tanggal 15 Oktober 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 233 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh wMenteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-6974.HT.01.01.Th'-91 tanggal 22 Nopember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, Tambahan No. 3593 tanggal 4 Agustus 1992. Anggaran dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah dicatat dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No.AHU-AH.01.03-0300452 tanggal 19 Juli 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah dalam bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat seperti tanah, bangunan apartemen, mal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, perhotelan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pengangkutan, perdagangan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. Sampai dengan tanggal pelaporan, kegiatan utama Perusahaan dan entitas anak (Grup) adalah dalam bidang *Real Estate Development, Real Estate*

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

1. General

1.a. The Company's Establishment

PT Lippo Karawaci Tbk ("the Company") was established under the name of PT Tunggal Reksakencana on October 15, 1990 based on the Deed of Establishment No. 233, which was made in the presence of Misahardi Wilamarta, S.H., a Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. C2-6974.HT.01.01.Th'-91 dated November 22, 1991 and was published in the State Gazette No. 62, Supplement No. 3593 on August 4, 1992. The Company's articles of association has been amended several times, and the latest was by the Deed of Annual General Meeting of Stockholders No. 37 dated July 19, 2019, which was made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, concerning the approval to additional issued and fully paid capital. The change of deed was recorded and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-AH.01.03-0300452 dated July 19, 2019.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities include real estate, including but not limited to real estate that is owned or leased, which includes business development, buying, selling, leasing and operating a real estate such as land, apartment buildings, malls, shopping centers, hospitals, convention halls, hospitality, sports and other auxiliary facilities, urban development, development of a building for private use, accommodation, food and beverage provides, professional, scientific and technical activities, construction, transportation, trade, water management, waste water management, waste management and recycling, remediation activities, employment activities and other supporting businesses, either directly or indirectly through investments or divestments of capital in other companies.

The Company started commercial operations in 1993. As of the reporting date, the Company's and subsidiaries (Group) main activity is in the field of Real Estate Development, Real Estate Management & Services and Fund



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Management & Services dan Fund Management / Investment. Area kerja Grup meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan beberapa entitas anak yang berdomisili di Singapura, Malaysia, British Virgin Island, Vanuatu dan Seychelles.

Perusahaan berdomisili dan berkantor di Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Menara Matahari Lantai 22-23, Lippo Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten - Indonesia. Entitas Induk Utama Perusahaan adalah PT Inti Anugerah Pratama.

1.b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Penawaran umum perdana Perusahaan sejumlah 30.800.000 saham biasa kepada masyarakat dan telah dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (d/h Badan Pengawas Pasar Modal) No. S-878/PM/1996 tanggal 3 Juni 1996, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 1996.

Selanjutnya, Perusahaan menawarkan 607.796.000 saham biasa kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas I yang disetujui dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-2969/PM/1997 tanggal 30 Desember 1997. Saham-saham ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 1998.

Pada tanggal 30 Juli 2004, Perusahaan mengakuisisi dan menggabungkan beberapa perusahaan. Sebagai bagian dari proses merger tersebut, Perusahaan menerbitkan 1.063.275.250 lembar saham biasa baru sehingga jumlah saham beredar Perusahaan adalah sebanyak 2.050.943.750 lembar biasa saham. Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-19039.HT.01.04.Th.04 tanggal 30 Juli 2004.

Pada tahun 2004, Perusahaan menawarkan 881.905.813 saham biasa dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta menerbitkan sebanyak

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Management / Investment. The work area of Group, includes Sumatera, Java, Bali, Borneo, Sulawesi, Nusa Tenggara and several subsidiaries domiciled in Singapore, Malaysia, British Virgin Island, Vanuatu and Seychelles.

The Company is domiciled at Jl Boulevard Palem Raya No. 7, Menara Matahari 22nd - 23rd Floor, Lippo Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten - Indonesia. Ultimate Parent Entity is PT Inti Anugerah Pratama.

1.b The Company's Initial Public Offering

The Company's initial public offering of 30,800,000 shares was declared effective by the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) (formerly Capital Market Supervisory Board) in his Decree No. S-878/PM/1996 dated June 3, 1996, and was listed in the Indonesian Stock Exchange on June 28, 1996.

Subsequently, the Company offered 607,796,000 shares to its existing stockholders through Limited Public Offering I, as approved by the Decree of the Chairman of Bapepam-LK in his letter No. S-2969/PM/1997 dated December 30, 1997. These shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on January 16, 1998.

On July 30, 2004, the Company acquired and merged with several companies. As part of the merger, the Company issued 1,063,275,250 new common shares which increased the Company's total outstanding shares to 2,050,943,750 common shares. The increase of authorized, issued and fully paid capital was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-19039.HT.01.04.Th.04 dated July 30, 2004.

In 2004, the Company offered 881,905,813 common shares at par value of Rp500 (in full Rupiah) per share to the stockholders through Limited Public Offering II in connection with Preemptive Rights Issuance (PRII) and issued 529,143,448 Warrants Series I as a compliment to stockholders who exercised their rights in

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

529.143.448 Waran Seri I yang akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif hanya kepada pemegang saham yang melaksanakan pemesanan saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Penawaran tersebut telah disetujui melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.S-3357/PM/2004 tanggal 29 Oktober 2004. Saham-saham ini seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Januari 2005.

Pada tanggal 28 Juli 2006, Perusahaan melakukan pemecahan saham (*stock split*) dari satu saham menjadi dua saham. Jumlah saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 5.871.017.072 lembar saham biasa dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 26 Desember 2007, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Jumlah saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2007 adalah 17.302.151.695 lembar saham dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada bulan Desember 2010, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 4.325.537.924 saham biasa baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran melalui Surat Ketua Bapepam-LK No. S-10674/BL/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dan telah disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal yang sama. Saham-saham baru tersebut seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Desember 2010.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 2 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, yang terakhir disesuaikan dengan akta RUPSLB No.13 tanggal 9 Maret 2011, yang buat di hadapan notaris yang sama, pemegang saham menyetujui penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor atau 2.162.768.961 saham biasa.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

the Limited Public Offering II. This offering was approved by the Decree of the Chairman of Bapepam-LK in his Letter No. S-3357/PM/2004 dated October 29, 2004. These shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on January 20, 2005.

On July 28, 2006, the Company exercised stock split from one to two shares. The outstanding 5,871,017,072 shares as of December 31, 2006 have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

On December 26, 2007, the Company exercised stock split from Rp 250 (in full Rupiah) to Rp100 (in full Rupiah) per share. The outstanding 17,302,151,695 shares as of December 31, 2007 have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

In December 2010, the Company offered 4,325,537,924 common shares with a par value of Rp100 (in full Rupiah) to the stockholders through Limited Public Offering III in connection with PRII, this offering has received an effective notice of registration statement through the letter of the Chairman of Bapepam-LK No. S-10674/BL/2010, dated November 29, 2010 and was approved by the stockholders through a resolution of the Extraordinary General Meeting of Stockholders (EGMS) on same date. On December 29, 2010 these shares were listed in the Indonesian Stock Exchange.

Based on the Deed of EGMS No. 2 dated May 3, 2010 which was made in the presence of Unita Christina Winata, S.H., a Notary in Tangerang, which was recently updated by the Deed of EGMS resolution No. 13 dated March 9, 2011, which was made in the presence of same notary, the stockholders approved the issuance of new shares within the framework of the Non-Preemptive Rights Issuance (NPRI) with a maximum of 10% of paid-in capital or 2,162,768,961 common



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut dapat dilaksanakan sekaligus dan/ atau bertahap dalam jangka waktu dua tahun sejak disetujui oleh RUPSLB. Pada tanggal 6 Juni 2011 telah dilaksanakan penambahan 1.450.000.000 lembar saham biasa. Saham-saham baru tersebut seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juni 2011.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 19 yang dibuat di hadapan Notaris Unita Christina Winata, S.H., notaris di Jakarta dan Pemegang saham menyetujui melakukan perolehan kembali saham biasa yang beredar. Pada tahun 2011, jumlah saham biasa yang diperoleh kembali adalah sebesar 96.229.500 lembar saham biasa, sehingga jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 22.981.460.119 lembar saham biasa. Perolehan kembali saham ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam surat No. 005/LK-COS/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

Pembelian kembali saham biasa yang beredar dilakukan pada tahun 2012 sebanyak 209.875.000 lembar saham biasa yang beredar, sehingga jumlah saham beredar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 22.771.585.119 lembar saham biasa. Perolehan kembali saham ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam surat No. 175/LK-COS/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012.

Pada 27 Juni 2019, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 47.820.328.750 saham biasa baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 18 April 2019. Penawaran tersebut telah mendapat surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-72/D.04/2019 tanggal 13 Juni 2019. Saham-saham baru tersebut seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

shares. The NPRI can be implemented at once and/ or gradually within two years as approved by the EGMS. On June 6, 2011, the addition of 1,450,000,000 common shares has been issued. The new shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on June 8, 2011.

Based on the Deed of EGMS No. 19 dated November 15, 2011 which was made in the presence of Unita Christina Winata, S.H., a notary in Jakarta, the shareholders approved the repurchase (buyback) of outstanding common shares. In 2011, the number of common shares repurchased amounted to 96,229,500 shares, bringing the total number of ordinary common shares outstanding as of the December 31, 2011 amounted to 22,981,460,119 shares. The Company has reported this buyback to Bapepam-LK in its letter No. 005/LK-COS/I/2012 dated January 13, 2012.

The repurchase of the outstanding ordinary common shares made in 2012 totalling 209,875,000 shares, bringing the outstanding common shares as of December 31, 2012 amounted to 22,771,585,119 shares. The Company has reported this buyback to Bapepam-LK in its letter No. 175/LK-COS/VII/2012 dated July 13, 2012.

On June 27, 2019, the Company offered 47,820,328,750 common shares with a par value of Rp100 (in full Rupiah) to the stockholders through Limited Public Offering IV in connection with HMETD that was approved by the shareholders through the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 18, 2019. This offering has received an effective notice of registration statement through the letter from the Financial Services Authority No. S-72/D.04/2019 dated June 13, 2019. These shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on July 10, 2019.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

1.c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (Grup)

Berikut adalah rincian entitas anak yang signifikan yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian yang jumlah asetnya diatas Rp50.000:

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

1.c. Structure of the Company and its Subsidiaries (Group)

The details of significant subsidiaries consolidated in the consolidated financial statements which total assets above Rp50,000 are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiary	Tempat Kedudukan/ Domicile	Jenis Usaha Utama/ Main Business	Persentase Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership Percentage	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Percentage	Tahun Awal Beroperasi/ Year of Starting Operation	Jumlah Aset/ Total Assets	
						31 Desember/ December 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
Theta Capital Pte Ltd* dan/and entitas anak/subsidiary	Singapura/Singapore	Investasi/ Investment	100.00%	--	--	11,595,037	13,264,860
Theta Kemang Pte Ltd*	Singapura/Singapore	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	--	13,259,863
Lippo Karawaci Corporation Pte Ltd** dan/and entitas anak/subsidiaries	Singapura/Singapore	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	100.00%	--	--	943,687	612,956
LK Reit Management Pte Ltd** dan/and entitas anak/subsidiary	Singapura/Singapore	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	--	100.00%	--	943,729	957,989
Jesselton Investment Limited* dan/and entitas anak/ subsidiaries	Malaysia	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	100.00%	--	--	510,500	540,761
Peninsula Investment Limited* dan/and entitas anak/ subsidiary	Malaysia	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	--	100.00%	--	512,478	608,580
LMIRT Management Ltd **	Singapura/Singapore	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	--	100.00%	2007	254,371	476,870
PT Primakreasi Propertindo dan/and entitas anak/subsidiaries (0,05% kepemilikan dilownership in PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk)	Tangerang	Real Estat/ Real Estate	99,99%	0,01%	--	7,833,753	9,167,016
PT Arta Sarana	Bandung	Investasi, Perdagangan dan Jasal/ Investment, Trading and Services	--	90.00%	--	105,907	103,779
PT Nilam Biru Bersinar	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	106,224	106,430
PT Gloria Mulia	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	126,766	126,762
PT Graha Solusi Mandiri dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Jasa/ Services	--	100.00%	--	125,470	132,090
PT Mandiri Cipta Gemilang dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2003	5,849,775	5,396,990
PT Titian Semesta Raya	Jakarta	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	694,826	683,842
PT Bahtera Perkasa Makmur	Manado	Pembangunan, Padagangan, Percetakan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	2015	294,235	365,808
PT Bimasakti Jaya Abadi dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Pembangunan, Padagangan, Percetakan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	2011	629,266	672,752
PT Kuta Beach Paragon dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	438,788	434,095
PT Graha Buana Utama dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	425,891	421,153
PT Berkat Langgeng Jaya dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	--	425,233	420,490
PT Pamor Paramita Utama dan/and entitas anak/subsidiaries	Badung	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading and Services	--	100.00%	2013	419,390	414,648
PT Gunung Halimun Eloq *** ³⁾	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasal/ Trading, Development, Printing and Services	--	100.00%	2014	435,792	--
PT Satyagraha Dinamika Unggu	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	70.00%	2013	659,515	953,885
PT Lumbung Mas Trijaya dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan, Percetakan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	115,198	115,214
PT Karyatama Buana Cemerlang dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Pembangunan, Perdagangan, Percetakan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	94,950	94,952
PT Pancuran Intan Makmur	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan, Percetakan dan Jasal/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	2016	115,116	119,113



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Tempat Kedudukan/ Domicile	Jenis Usaha Utama/ Main Business	Persentase Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership Percentage	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Percentage	Tahun Awal Beroperasi/ Year of Starting Operation	Jumlah Aset/ Total Assets	
						31 Desember/ December 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
PT Cipta Mutiara Sukses	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan Percetakan dan Jasa/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	149,956	149,987
PT Manyala Harapan	Surakarta	Pembangunan, Perdagangan Percetakan dan Jasa/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	114,042	114,012
PT Andromeda Sakti	Bau - Bau	Pembangunan, Perdagangan Percetakan, Transportasi, Pertanian, Perbangkelan dan Jasa/ Development, Trading, Printing, Agriculture, Transportation, Workshop and Service	--	100.00%	2015	190,096	196,711
PT Sentra Dwimandiri dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan, Transportasi, Pertanian, Percetakan, Perbangkelan dan Jasa/ Trading, Development, Industry, Mining, Transportation, Agriculture, Printing, Workshop and Services	100.00%	--	--	6,056,936	3,627,500
PT Sentra Realtindo Development dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perbaikan Rumah Home Care	--	100.00%	2001	126,176	125,793
PT Golden Pradamas dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Real Estat/Real Estate	--	100.00%	--	911,974	918,364
PT Mulia Bangun Semesta dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	100.00%	2002	882,684	888,823
PT Villa Permata Cibodas dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan, Transportasi, Pertanian, Perbangkelan dan Jasa/ Trading, Development, Industry, Mining, Transportation, Agriculture, Workshop and Services	--	100.00%	1995	296,818	280,556
PT Muliasantosa Dinamika	Tangerang	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	1997	497,648	859,241
PT Senta Asritama Realty Development dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Instalasi dan Pengelolaan Air/ Installation and Water Treatment	--	100.00%	1994	283,915	325,137
PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Pengelolaan Kota/ Town Management	--	100.00%	1999	202,548	231,163
PT Manunggal Bumi Sejahtera dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan Percetakan dan Jasa/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	513,345	625,176
PT Asiatic Sejahtera Finance	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan Percetakan dan Jasa/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	2009	407,663	517,776
Bridgewater International Ltd*	Seychelles	Investasi dan Perdagangan/ Investment and Trading	--	100.00%	2006	3,951,196	985,880
Brightlink Capital Limited*	Malaysia	Investasi, Perdagangan dan Jasa/ Investment, Trading and Services	--	100.00%	--	102,451	106,825
Evodia Strategic Investment Limited*	Malaysia	Investasi, Perdagangan dan Jasa/ Investment, Trading and Services	--	100.00%	--	99,378	102,094
PT Wisma Jatim Propertindo dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Jasa/ Services	100.00%	--	--	8,903,745	5,998,169
PT Kemangparagon Mall dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	100.00%	--	1,435,816	1,544,648
PT Wahana Usaha Makmur dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	--	1,419,469	1,528,247
PT Almaron Perkasa dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2005	1,231,965	1,340,747
PT Gelora Raya Semesta	Tangerang	Perdagangan dan Pembangunan/ Trading and Development	--	100.00%	2013	180,282	190,233
PT Prima Aman Sarana	Jakarta	Jasa/ Services	--	100.00%	--	562,857	552,985
PT Kemang Multi Sarana	Jakarta	Real Estat dan Pembangunan Kota/ Real Estate and Urban Development	--	100.00%	2013	138,190	136,734
PT Lippinson Abadi dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	2,917,822	238,517
PT Kemuning Satiatama dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	2,912,558	2,571,411
PT Lippo Cicarang Tbk dan/and entitas anak/subsidiaries	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	1989	12,219,228	9,225,622
PT Great Jakarta Inti Development dan/and entitas anak/subsidiary	Bekasi	Pengelolaan Kota dan Real Estat/ Town Management and Real Estate	--	81.00%	1992	605,465	791,531
PT Tunas Pundi Bumi	Bekasi	Pengelolaan Kota/ Town Management	--	81.00%	2010	189,727	166,567
PT Tirta Sari Nirmala	Bekasi	Pengelolaan Air Bersih dan Limbah/ Clean Water and Waste Management/	--	81.00%	2011	142,628	174,124
PT Sinar Surya Timur	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	81.00%	2007	77,528	77,330
PT Waska Sentana	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	2014	622,972	652,310
PT Swadaya Teknopolis dan/and entitas anak/subsidiaries	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	2009	449,705	444,450
Premium Venture International Ltd dan/and entitas anak/subsidiary	British Virgin Island	Investasi/ Investment	--	81.00%	2015	449,630	444,375
Intellitop Finance Ltd	British Virgin Island	Investasi/ Investment	--	41.89%	2014	448,659	443,404
PT Cahaya Ina Permai dan/and entitas anak/subsidiaries	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	--	565,658	423,121
PT Megakreasi Cicarang Damai	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	--	244,251	138,472
PT Megakreasi Cicarang Permai dan/ and entitas anak /subsidiary	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	81.00%	--	2,179,510	2,335,916
PT Lippo Diamond Development ²⁾	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	41.31%	2015	201,695	610,757
PT Ariasindo Sejati dan/ and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	--	100.00%	--	535,056	195,138

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Tempat Kedudukan/ Domicile	Jenis Usaha Utama/ Main Business	Persentase Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership Percentage	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Percentage	Tahun Awal Beroperasi/ Year of Starting Operation	Jumlah Aset/ Total Assets	
						31 Desember/ Desember 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
PT Unitech Prima Indah dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2004	188,876	211,529
PT Karuna Persada Raya dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	121,813	105,481
PT Pendopo Niaga	Malang	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2004	121,813	105,481
PT Karuna Alam Damai dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	226,883	229,131
PT Jagatpertaala Nusantara	Depok	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2004	226,883	229,131
PT Kemang Village dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan/ Trading	--	100.00%	--	186,807	185,281
PT Menara Bhuminegah dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Jasa/ Services	--	100.00%	2005	79,446	79,446
PT Jaya Usaha Prima dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	--	135,025	133,046
PT Persada Mandiri Abadi	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	2005	135,019	133,040
PT Adhi Utama Dinamika	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	--	107,582	106,352
PT Menara Perkasa Megah dan/and entitas anak/subsidiaries	Surabaya	Real Estat dan Pengembangan Kota/ Real Estate and Urban Development	--	100.00%	2005	448,164	445,038
PT Pelangi Cahaya Intan Makmur dan/and entitas anak/subsidiaries	Surabaya	Perdagangan/ Trading	--	87.50%	--	358,428	355,312
PT Surya Mitra Jaya dan/and entitas anak/subsidiary	Surabaya	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	--	87.50%	2005	358,450	355,322
PT Kreasi Megalama Gemilang dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pembangunan, Industri, Agrisnis, Transportasi, Perdagangan dan Jasa/ Development, Industry, Agrisnis, Transportation, Trading and Services	--	100.00%	--	953,740	967,720
PT Lippo Malls Indonesia dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Jasa/ Services	--	100.00%	2002	953,708	975,051
PT Mulia Citra Abadi dan/and entitas anak/subsidiaries	Yogyakarta	Pembangunan, Perdagangan, Percetakan, Transportasi, Perindustrian, Pertanian, dan Jasa/ Development, Trading, Printing, Transportation, Industry, Agriculture and Services	--	100.00%	2012	376,530	405,686
PT Sky Parking Indonesia dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	100.00%	--	156,476	145,518
PT Sky Parking Nusantara dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	70.00%	2016	156,471	145,513
PT Sky Parking Utama	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	70.00%	2015	156,464	129,325
PT Irama Karya Megah	Surabaya	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	--	100.00%	--	255,713	254,524
PT Saputra Karya	Surabaya	Real Estat dan Pengembangan Kota/ Real Estate and Urban Development	--	100.00%	--	474,164	421,287
PT Anugerah Bahagia Abadi dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	100.00%	--	625,996	543,132
PT Internusa Prima Abadi	Jakarta	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan Transportasi, Pertanian, Percetakan dan Perbgkelan/ Trading, Development, Industry, Mining, Transportation, Agriculture, Printing and Workshop	--	85.00%	--	543,980	543,129
PT Bangun Bina Bersama dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	61.84%	--	543,971	542,634
PT Satriamandiri Idola Utama	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	--	61.84%	--	98,338	97,707
PT Direct Power dan/and entitas anak/subsidiaries	Bogor	Perdagangan, Real Estat, Industri, Percetakan, Agrisnis Transportasi dan Jasa/ Industry, Printing, Agrisnis Transportation and Services	--	100.00%	2007	127,632	127,829
PT Sarana Global Multindo dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Pembangunan, Transportasi, Perdagangan dan Jasa/ Development, Transportation Trading and Services	--	100.00%	--	521,756	522,838
PT Guna Sejahtera Karya dan/and entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Pembangunan, Industri, Agrisnis Pertanian, Perdagangan dan Jasa/ Development, Industry, Agrisnis, Gardening, Trading and Services	--	100.00%	--	521,280	522,351
PT Citra Sentosa Raya dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perdagangan, Real Estat, Industri Agrisnis, Transportasi dan Jasa/ Trading, Real Estate, Industry, Agrisnis, Transportation, and Services	--	100.00%	--	502,926	504,369
Rosenet Limited** dan/and entitas anak/subsidiary	British Virgin Island	Investasi/ Investment	--	100.00%	--	502,916	502,916
PT Sandiego Hills Memorial Park dan/and entitas anak/subsidiary	Karawang	Perdagangan, Pembangunan, Transportasi dan Jasa/ Trading, Development, Transportation and Services	--	100.00%	2006	669,238	565,120
PT Karyaalam Indah Lestari	Tangerang	Pembangunan, Perdagangan, Percetakan dan Jasa/ Development, Trading, Printing and Services	--	100.00%	--	164,878	161,375
PT Siloam International Hospitals Tbk dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	51.05%	2010	7,741,782	7,694,942
PT Siloam Graha Utama dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perdagangan, Pembangunan Transportasi dan Jasa/ Trading, Development, Transportation and Services	--	51.05%	--	104,840	112,959
PT East Jakarta Medika	Bekasi	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	49.64%	2002	104,824	112,887
PT Guchi Kencana Emas dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Pembangunan dan Jasa/ Development and Services	--	51.05%	--	116,977	180,178



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Tempat Kedudukan/ Domicile	Jenis Usaha Utama/ Main Business	Persentase Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership Percentage	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Percentage	Tahun Awal Beroperasi/ Year of Starting Operation	Jumlah Aset/ Total Assets	
						31 December/ December 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
PT Golden First Atlanta	Jambi	Kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi/ Healthcare and Pharmacy Wholesalers	--	51.05%	2004	107,537	106,872
PT Prawira Tata Semesta dan/and entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perdagangan, Pembangunan Industri, Pertambangan, Transportasi Darat, Pertanian, Percetakan, Perbangunan dan Jasa kecuali Jasa di bidang Hukum dan Pajak/ Trading, Development, Industry, Mining, Land Transportation, Agriculture, Printing Workshop and Services except Legal and Tax Services	--	51.05%	--	321,185	237,656
PT Balikpapan Damai Husada	Balikpapan	Kesehatan yang meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Balai Kesehatan, Poliklinik, serta Kegiatan Usaha Lain/ Healthcare including Hospital, Clinic, Health Centre, Polyclinic, and Other Related Services	--	42.39%	2008	191,275	198,423
PT Pancawarna Semesta dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan Percetakan dan Jasa/ Trading, Development, Printing and Services	--	51.05%	--	545,598	186,725
PT Diagram Healthcare Indonesia	Depok	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	40.84%	2006	279,224	156,179
PT Kusuma Primadana dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan Percetakan dan Jasa Kesehatan yang meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik, dan Balai Kesehatan, Poliklinik, serta Kegiatan Usaha Terkait/ Trading, Development, Printing and Healthcare including Hospital Services, Clinic, and Healthcare, Polyclinic and other related Services	--	51.05%	--	71,678	100,226
PT Adijaya Buana Sakti dan/and entitas anak/subsidiary	Tangerang	Jasa, Pembangunan Perdagangan, Perbangunan, Pengangkutan Darat, Perindustrian, Percetakan dan Pertanian/ Services, Development, Trading, Workshop, Land Transportation, Industry, Printing and Agriculture	--	40.80%	--	71,676	100,202
PT RS Siloam Hospital Sumsel	Palembang	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	35.93%	2012	147,284	100,068
PT Tunggal Pilar Perkasa dan/ and entitas anak/ subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan Percetakan dan Jasa/ Trading, Development, Printing and Services	--	51.05%	--	4,349,058	4,090,745
PT Gramari Prima Nusa	Medan	Jasa Kesehatan dan Rumah Sakit/ Healthcare and Hospitals	--	51.05%	2014	101,884	98,469
PT Krisolis Jaya Mandiri	Kupang	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	51.05%	2014	97,400	131,439
PT Ambon Bangun Nusa (d/h / formerly PT Kusuma Bhakti Anugerah)	Ambon	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa/ Trading, Industry and Services	--	51.05%	--	411,175	380,327
PT Agung Cipta Raya	Semarang	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	51.05%	--	380,535	380,585
PT Mega Buana Bhakti	Bangka	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa/ Trading, Industry and Services	--	51.05%	2017	291,671	310,179
PT Taruna Perkasa Megah	Yogyakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa/ Trading, Industry and Services	--	51.05%	2017	78,309	95,826
PT Tataku Bumi Karya	Bogor	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa/ Trading, Industry and Services	--	51.05%	2017	287,064	318,754
PT Kordinator Usaha Maju dan/and entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan Percetakan, Aribusnis dan Jasa/ Trading, Development, Printing, Aribusness and Services	--	51.05%	--	605,439	508,149
PT Medika Sarana Traliansi dan/and entitas anak/subsidiary	Badung	Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta/ Private Hospital Service	--	51.05%	1998	308,831	262,023
PT Trisaka Raksa Waluya	Badung	Jasa Kesehatan yang meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Balai Kesehatan, Poliklinik serta Kegiatan Usaha Terkait/ Healthcare Services including Hospitals, Clinic, Health Center, and other related services	--	51.05%	2012	117,786	105,939

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Tempat Kedudukan/ Domicile	Jenis Usaha Utama/ Main Business	Persentase Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership Percentage	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Percentage	Tahun Awal Beroperasi/ Year of Starting Operation	Jumlah Aset/ Total Assets	
						31 Desember/ Desember 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
PT Berlian Cahaya Indah	Tangerang	Jasa Kesehatan/ Healthcare Services	--	51.05%	2014	193,105	172,786
PT Sembilan Raksa Dinamika	Jakarta	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	2016	167,372	227,806
PT Saritama Mandiri Zamrud	Jakarta	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	2018	138,297	105,293
PT Aryamedika Teguh Tunggal	Jakarta	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	2019	194,263	178,523
PT Lintang Laksana Utama	Lubuk Linggau	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	2018	228,623	244,002
PT Gemilang Mulia Bekasi	Bekasi	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic and Healthcare	--	51.05%	--	138,228	138,575
PT Mahkota Buana Selaras dan <i>and</i> entitas anak/ subsidiaries		Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	--	1,854,798	1,885,478
PT Kirana Puspa Cemerlang	Jember	Jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, Polyclinic and Healthcare	--	51.05%	2018	384,566	406,620
PT Grha Ultima Medika	Mataram	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	51.05%	2015	76,474	68,590
PT Sumber Bahagia Sentosa	Cirebon	Pelayanan Kesehatan/ Healthcare	--	51.05%	2010	132,770	116,900
PT Anugrah Sentra Medika	Bekasi	Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Balai Kesehatan/ Hospital Services, Clinic, and Healthcare	--	51.05%	2008	163,440	165,453
PT Eramulia Pratamajaya dan <i>and</i> entitas anak/subsidiaries	Jakarta	<i>and other related services</i> Healthcare	100.00%	--	--	888,918	1,065,265
PT Siloam Karya Sejahtera	Jakarta	Perdagangan dan Jasa <i>Trading and Services</i>	--	100.00%	--	195,397	280,416
PT Sarana Dinamika Perkasa (d/h/ formerly PT Siloam Dinamika Perkasa)	Jakarta	Perdagangan, Pembangunan, Transportasi dan Jasa <i>Trading, Development,</i> <i>Transportation and Services</i>	--	100.00%	--	105,636	116,938
PT Buana Mandiri Selaras	Jakarta	Pembangunan dan Jasa <i>Development and Services</i>	--	100.00%	--	315,829	370,285
PT Waluya Graha Loka	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan Percetakan dan Jasa/ <i>Trading, Development,</i> <i>Printing and Services</i>	--	100.00%	--	140,991	153,500
PT Aryaduta International Management dan <i>and</i> entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Manajemen Hotel/ Hotel Management	--	100.00%	1998	138,534	113,362
PT Mega Indah Gemilang dan <i>and</i> entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Perdagangan, Pembangunan, Industri, Percetakan dan Jasa/ <i>Trading, Development, Industry</i> <i>Printing and Services</i>	100.00%	--	--	106,928	109,410
PT Graha Jaya Prajama dan <i>and</i> entitas anak/subsidiaries	Tangerang	Real Estat/Real Estate	100.00%	--	--	1,594,994	1,804,448
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk dan <i>and</i> entitas anak/subsidiary	Makassar	Real Estat/Real Estate	4.92%	57.76%	1997	1,107,518	1,252,862
PT Nuansa Indah Lestari dan <i>and</i> entitas anak/subsidiary	Jakarta	Perdagangan/ <i>Trading</i>	--	100.00%	--	266,323	290,069
PT Metropolitan Permaisemesta dan <i>and</i> entitas anak/subsidiaries	Jakarta	Perdagangan/ <i>Trading</i>	--	100.00%	--	248,886	272,598
PT Makassar Permata Sulawesi	Jakarta	Perdagangan/ <i>Trading</i>	--	100.00%	--	246,038	272,103
PT Tribuana Jaya Raya	Makassar	Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa/ <i>Trading, Development,</i> <i>Printing and Services</i>	--	87.67%	--	524,724	715,161

* Mata Uang Fungsional adalah USD

** Mata Uang Fungsional adalah SGD

*** Telah Didivestasi tahun 2018

1) Dekonsolidasi tahun 2018

2) Dikonsolidasi tahun 2018

3) Dikonsolidasi tahun 2019

* Functional Currency is USD

** Functional Currency is SGD

*** Divested 2018

1) Deconsolidated 2018

2) Consolidated 2018

3) Consolidated 2019

Pada 27 Juni 2019, PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 1.983.600.000 saham biasa baru atas nama dengan nilai nominal Rp500. Atas pelaksanaan PUT I, PT Kemuning Satiatama, entitas anak, menambah kepemilikan di LC menjadi

On June 27, 2019, PT Lippo Cikarang Tbk (LC), a subsidiary, offered Limited Public Offering I in connection with HMETD of 1,983,600,000 common shares with a par value of Rp500. Based on limited public offering I, PT Kemuning Satiatama, a subsidiary, has increased its ownership in LC becoming 2,085,811,178 shares equivalent to 77.84%.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

sebanyak 2.085.811.178 lembar saham setara dengan 77,84%, sehingga kepemilikan saham Grup pada LC meningkat dari 54,37% menjadi 81,00%. Selisih nilai investasi Grup pada LC sebelum dan sesudah pelaksanaan PUT I dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya (Catatan 35).

Berdasarkan akta notaris No. 57, 58 dan 59 pada tanggal 11 April 2019, Perusahaan melalui entitas anaknya PT Mandiri Cipta Gemilang dan PT Primakreasi Propertindo, keduanya entitas anak, mengakuisisi 9.500.000 lembar saham seri A dan 398.000.000 lembar saham seri B di PT Gunung Halimun Elok dengan nilai akuisisi masing - masing sebesar Rp1.990 dan Rp7.960. Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis (Catatan 51).

Pada tahun 2019, PT Bangun Bina Bersama (BBB), entitas anak, menerbitkan saham baru dengan nilai Rp379.437. Atas penerbitan saham pada entitas anak, BBB mencatat agio saham sebesar Rp375.518. Agio pada entitas anak tersebut sebesar Rp274.278 dicatat sebagai komponen ekuitas lain (Catatan 35).

Pada tanggal 21 Desember 2018, PT Jangkar Visindo Abadi (JVA) dan PT Jangkar Visindo Berlian (JVB), entitas anak, memperoleh 75% dan 25% saham PT Prima Mugi Jaya (PMJ) dari pihak ketiga, dengan nilai akuisisi sebesar Rp4.900. Pada tanggal akuisisi, PMJ belum beroperasi sehingga dicatat sebagai akuisisi aset. PMJ memiliki 20% kepemilikan atas GKCI. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 2019, PT Prima Mugi Jaya (PMJ) menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 19 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana PMJ telah mengakuisisi 154.500 saham, yang merupakan 30,9% dari seluruh modal PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI) dengan nilai akuisisi sebesar Rp12.747, sehingga kepemilikan PMJ atas saham GKCI menjadi 50,9% dan GKCI dicatat sebagai entitas anak. Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis bertahap (Catatan 51).

Berdasarkan akta notaris No. 75 tanggal 25 September 2018, PT Karyatama Buana Cemerlang (KBC), entitas anak, melepas kepemilikan 268.701 lembar saham di PT Mapalus Mancacakti (MM) kepada PT Estetika Inti Pesada, pihak ketiga. Berdasarkan akta notaris No. 76, tanggal

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

Thus, the Group's share ownership in LC increased from 54.37% into 81.00%. The difference in investment value in LC before and after offered Limited Public Offering I recorded as other equity components (Note 35).

Based on Notarial deeds No. 57, 58 and 59 dated April 11, 2019 the Company, through its subsidiaries, PT Mandiri Cipta Gemilang and PT Primakreasi Propertindo, both subsidiaries, acquired 9,500,000 shares series A and 398,000,000 shares series B in PT Gunung Halimun Elok with acquisition cost of Rp1,990 and Rp7,960, respectively. This transaction represents business combination (Note 51).

In 2019, PT Bangun Bina Bersama (BBB), a subsidiary, issued new shares with a value of Rp379,437. Upon the issuance of shares in a subsidiary, BBB recorded additional paid-in capital excess of par amounted to Rp375,518. The additional paid-in capital excess of par Rp274,278 in the subsidiary were recorded as other equity components (Note 35).

On December 21, 2018, PT Jangkar Visindo Abadi (JVA) and PT Jangkar Visindo Berlian (JVB), subsidiaries, have acquired 75% and 25%, respectively share ownership of PMJ from third party, with acquisition cost of Rp4,900. On acquisition date, PMJ has not yet started its commercial operation, therefore recorded as an asset acquisition. PMJ owned 20% of ownership in GKCI. Then, on February 13, 2019, PT Prima Mugi Jaya (PMJ) signed the Share Purchase Deed Number 19 made before Sriwi Bawana Nawaksari, SH, M.Kn, Notary in Tangerang Regency, where PMJ had acquired 154,500 shares, which constituted 154,500 shares, which constituted 30.9% of the total capital of PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI) with an acquisition value of Rp 12,747, so that PMJ's ownership of GKCI shares became 50.9% and GKCI was recorded as a subsidiary. This transaction is a gradual business combination (Note 51).

Based on notarial deed No.75 dated September 25, 2018, PT Karyatama Buana Cemerlang (KBC), a subsidiary, disposed 268,701 shares ownership in PT Mapalus Mancacakti (MM) to PT Estetika Inti Persada, third party. Based on notarial deed No. 76, dated September 25, 2018, KBC disposed

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

25 September 2018, KBC melepaskan
kepemilikan 1 lembar saham di MM kepada Nio
Yantony. Jumlah nilai pengalihan saham
sebesar Rp1.344 dan selisih nilai pelepasan
dan nilai investasi sebesar Rp83.724 dicatat
sebagai rugi atas pelepasan saham atas entitas
anak (Catatan 43).

Pada tanggal 18 September 2018, LK Reit
Management Pte. Ltd, entitas anak, menjual
seluruh kepemilikan sahamnya di Bowsprit
Capital Corporation Ltd (BCC) kepada OUE
Limited dan OUE Lippo Healthcare Limited,
keduanya pihak berelasi, dengan nilai
pelepasan sebesar SGD98,883,620 (setara
Rp1.040.386). Selisih nilai pelepasan dan nilai
investasi sebesar Rp656.959 dicatat sebagai
laba atas pelepasan saham (Catatan 43).

Pada tanggal 25 Juni 2018, PT Tunggal
Pilar Perkasa (TPP) dan PT Mahkota Buana
Selaras (MBS), keduanya entitas anak,
mengakuisisi 100% kepemilikan saham
di PT Sentosa Indonesia Jaya (SIJ) dan
PT Manajemen Perkasa Makmur (MPM)
dengan nilai akuisisi SIJ masing-masing
sebesar Rp1.875 dan Rp625 dan nilai
akuisisi MPM masing-masing sebesar
Rp46.084 dan Rp15.361. Pada tanggal
akuisisi, MPM dan SIJ belum beroperasi
sehingga dicatat sebagai akuisisi aset.

Pada tanggal 7 Juni 2018, PT Siloam
International Hospitals Tbk (SIH) dan PT Guchi
Kencana Emas (GKE), keduanya entitas anak,
memperoleh 0,01% dan 16,99% kepemilikan
saham nonpengendali di PT Golden First
Atlanta (GFA) dengan nilai transaksi sebesar
Rp11.450. Selisih nilai transaksi dan bagian
kepemilikan pihak nonpengendali yang
diperoleh sebesar Rp12.367 dicatat
sebagai selisih transaksi pihak nonpengendali
(Catatan 34).

Pada tanggal 7 Juni 2018, PT Prawira Tata
Semesta (PTS), entitas anak, memperoleh
3,06% kepemilikan saham nonpengendali
di PT Balikpapan Damai Husada (BDH)
dengan nilai transaksi sebesar Rp2.304. Selisih
nilai transaksi dan bagian kepemilikan pihak
nonpengendali yang diperoleh sebesar Rp419
dicatat sebagai selisih transaksi pihak
nonpengendali (Catatan 34).

Pada tahun 2018, PT Lippo Cikarang Tbk (LC)
melalui PT Megakreasi Cikarang Permai,
entitas anak, melakukan penilaian kembali atas

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

*1 shares to Nio Yantony. Total of shares transfer
value amounted to Rp1,344 and difference
between disposal value and investment value
amounted to Rp83,724 recorded as loss on
disposal shares of subsidiary (Note 43).*

*On September 18, 2018, LK Reit Management
Pte. Ltd., a subsidiary, disposed all of its shares
ownership in Bowsprit Capital Corporation Ltd
(BCC) to OUE Limited and OUE Lippo
Healthcare Limited, both related parties, with
disposal value of SGD98,883,620 (equivalent to
Rp1,040,386). Difference between disposal
value and investment value amounted to
Rp656,959 recorded as gain on disposal shares
of subsidiary (Note 43).*

*On June 25, 2018, PT Tunggal Pilar Perkasa
(TPP) and PT Mahkota Buana Selaras (MBS),
both subsidiaries, acquired 100% shares
ownership in PT Sentosa Indonesia Jaya (SIJ)
and PT Manajemen Perkasa Makmur (MPM)
with acquisition cost of SIJ amounted
to Rp1,875 and Rp625 and with acquisition
cost of MPM amounted to Rp46,084
and Rp15,361, respectively. At the acquisition
date, MPM and SIJ has not yet
started operation and therefore, recorded as an
asset acquisition.*

*On June 7, 2018, PT Siloam International
Hospitals Tbk (SIH) and PT Guchi Kencana
Emas (GKE), both subsidiaries, acquired
0.01% and 16.99% shares ownership in
PT Golden First Atlanta (GFA) with transaction
cost of Rp11,450. Difference in value of
transaction and non-controlling interest portion
acquired amounted to Rp12,367 recorded as
difference in transaction with non-controlling
interest (Note 34).*

*On June 7, 2018, PT Prawira Tata Semesta
(PTS), a subsidiary, acquired 3.06% shares
ownership in PT Balikpapan Damai Husada
(BDH) with transaction cost of Rp2,304.
Difference in value of transaction and non-
controlling interest portion acquired amounted to
Rp419 recorded as difference in transaction with
non-controlling interest (Note 34).*

*In 2018, PT Lippo Cikarang Tbk (LC) through
PT Megakreasi Cikarang Permai, a subsidiary,
performed the reassessment of the control over*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

pengendalian terhadap PT Lippo Diamond Development (LDD) yang sebelumnya dicatat sebagai investasi pada ventura bersama. Sejak April 2018, LC mengendalikan sehingga laporan keuangan LDD dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian LC (Catatan 11).

Berdasarkan Akta Notaris No.13, Tanggal 11 Mei 2018 Peak Asia Investments Pte. Ltd., (PEAK), entitas anak LC, melepas kepemilikan 14.000 saham di PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas anak, kepada Mas Agoes Ismail Ning dengan harga pengalihan sebesar Rp14. Kemudian LC melepas seluruh kepemilikan saham di PEAK kepada Hasdeen Holdings Limited, pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar USD 1. Atas pelepasan saham tersebut, selisih nilai transaksi pengalihan saham dan bagian investasi di PEAK dan MSU yang dialihkan sebesar Rp755.320 dicatat sebagai selisih transaksi pihak nonpengendali (Catatan 43).

Kemudian, MSU menerbitkan 14.000 saham baru yang diambil oleh PEAK dengan harga Rp4.050.000.

Sebagai akibat dari peningkatan modal pada MSU dan pelepasan seluruh kepemilikan saham PEAK, LC kehilangan pengendalian atas MSU. Atas hilangnya pengendalian atas MSU, selisih transaksi pihak nonpengendali sebesar Rp(14.220) direklasifikasi pada laba rugi dan laporan keuangan MSU tidak dikonsolidasi oleh Grup.

Atas perubahan ekuitas MSU sampai dengan saat hilangnya pengendalian, Grup mencatat selisih nilai investasi pada MSU sebesar Rp4.042.922 dicatat pada komponen ekuitas lainnya. Atas pelepasan bagian kepemilikan investasi pada MSU sebesar Rp2.025.000 direklasifikasi pada laba rugi (Catatan 35 dan 44).

Kemudian, sisa investasi pada MSU sebesar 49,72% diukur pada nilai wajarnya. Selisih investasi pada MSU sebelum dan setelah diukur kembali pada nilai wajarnya sebesar Rp976.104 dicatat pada laba rugi (Catatan 10 dan 44).

Pada tanggal 24 Desember 2018, Perusahaan melalui entitas anaknya Lippo Karawaci Corporation Pte. Ltd., PT Prudential Development, PT Sentra Dwimandiri dan

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

PT Lippo Diamond Development (LDD) which was previously recorded as an investment in joint venture. Since April, 2018, LC has assumed control of LDD, therefore, financial statements of LDD was consolidated in LC consolidated financial statements (Note 11).

Based on Notarial Deed No. 13, dated May 11, 2018 Peak Asia Investments Pte. Ltd., (PEAK), a subsidiary of LC, disposed 14,000 shares ownership in PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), a subsidiary, to Mas Agoes Ismail Ning with the transfer price of Rp14. Subsequently, LC disposed all share ownership in PEAK to Hasdeen Holdings Limited, a third party, with the transfer price of USD 1. Upon the disposal of the shares, the difference in value of transferred shares and portion of investment in PEAK and MSU amounted to Rp755,320 is recorded as difference transaction with noncontrolling interest (Note 43).

Subsequently, MSU issued 14,000 new shares that was exercised by PEAK with the price of Rp4,050,000.

As a result of the increase shares of MSU and disposal all shares in PEAK, LC lose of control on MSU. Upon the lose of control on MSU, the difference transaction with non-controlling interest amounted to Rp14,220 was reclassified to profit or loss and loss and the financial statement of MSU is not consolidated by the Group.

Upon change in equity of MSU until the losing of control, Group recorded difference in value of investment on MSU amounted to Rp4,042,922 recorded in other equity component. Upon disposal part of investment ownership in MSU amounted to Rp2,025,000 was reclassified in to profit and loss (Notes 35 and 44).

Subsequently, remaining investment on MSU of 49.72% was measured at its fair value. Difference of investment in MSU before and after remeasured at its fair value amounted to Rp976,104 was recorded in profit and loss (Notes 10 and 44).

On December 24, 2018, the Company, through its subsidiaries, Lippo Karawaci Corporation Pte. Ltd., PT Prudential Development, PT Sentra Dwimandiri and Jesselton

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Jesselton Investment Limited, mengakuisisi seluruh kepemilikan saham di Mainland Real Estate Ltd. (MRE), perusahaan yang tercatat di Republik Mauritius, dengan nilai akuisisi sebesar GBP1,091,552 (setara Rp24.244). Pada tanggal akuisisi, MRE belum beroperasi sehingga dicatat sebagai akuisisi aset.

1.d Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 18 April 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.15 tanggal 5 Juni 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Dewan Komisaris:			Board of Commissioners:
Presiden Komisaris	:	John A. Prasetio *)	President Commissioner
Komisaris	:	Stephen Riady	Commissioner
Komisaris	:	George Raymond Zage III	Commissioner
Komisaris	:	Kin Chan	Commissioner
Komisaris	:	Anangga W. Roosdiono *)	Commissioner
		--	
Dewan Direksi:			Board of Directors:
Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya	President Director
Wakil Presiden Direktur	:	--	Vice President Director
Direktur	:	John Riady	Director
Direktur	:	Surya Tatang	Director
Direktur	:	Marshal Martinus	Director
		Tissadharma	
Direktur	:	--	Director
Direktur Independen	:	Alwi Rubidium Sjaaf	Independent Director
* Merupakan Komisaris Independen			*) Represent Independent Commissioner

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Ketua	:	John A. Prasetio	
Anggota	:	Lim Kwang Tak	Chairman
Anggota	:	Raymond Liu	Member
Anggota	:	Peter John Chambers	Member
		--	Member

Corporate Secretary Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dijabat oleh Sri Mulyati Handoyo.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup mempunyai karyawan masing-masing sebanyak 10.967 dan 10.137 orang (tidak diaudit).

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Investment Limited acquired all shares ownership in Mainland Real Estate Ltd. (MRE) with acquisition cost of GBP1,091,552 (equivalent to Rp24.244), a company that registered in Republic of Mauritius. At the acquisition date, MRE has not yet started operation and therefore, recorded as an asset acquisition.

1.d. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on Partial Deeds of Annual General Meeting of Stockholders No. 42 dated April 18, 2019 and Annual General Meeting of Stockholders No. 15 dated June 5, 2018, which was made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Board of Commissioners:	
President Commissioner	
Commissioner	
Commissioner	
Commissioner	
Commissioner	
Board of Directors:	
President Director	
Vice President Director	
Director	
Director	
Director	
Director	
Independent Director	

**) Represent Independent Commissioner*

The Audit Committee composition as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

The Company's Corporate Secretary as of December 31, 2019 and 2018 is Sri Mulyati Handoyo.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group has 10,967 and 10,137 permanent employees, respectively (unaudited).



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri sebagaimana diungkap pada Catatan 1.c dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2. Significant Accounting Policies

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Measurement and Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis, except for these consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency as disclosed in Note 1.c and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.c. Pernyataan dan Interpretasi atas Standar Baru

Berikut adalah amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman";
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan";
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama";
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial di mana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal di mana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.c. New Standard and Interpretation of Standards

The following are amendments and improvement of standards and interpretation of standards effectively applied for the period starting on or after January 1, 2019, are as follows:

- PSAK 22 (*Improvement 2018*): "Business Combination";
- PSAK 24 (*Amendment 2018*): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- PSAK 26 (*Improvement 2018*): "Borrowing Cost";
- PSAK 46 (*Improvement 2018*): "Income Taxes";
- PSAK 66 (*Improvement 2018*): "Joint Arrangement";
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments".

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include financial statement of the Company and subsidiaries as stated in Note 1.c.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah di mana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation to reflect the financial position as a single business entity.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- (d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional beberapa entitas anak adalah mata uang asing (Catatan 1.c). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak dalam Grup yang menggunakan mata uang asing pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

1 USD	
1 SGD	
100 JPY	
1 AUD	
1 EUR	
1 GBP	
1 ZAR	

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- (e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss in profit and loss attributable to the parent.

2.e. Transaction and Balances in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries is Rupiah.

The functional currency of Subsidiaries in foreign currency (Note 1.c). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of subsidiaries in group use foreign currency at reporting date are translated at the closing rate at consolidated statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income.

Transactions during the period in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e., middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018
	Rp	Rp
1 USD	13,901	14,481
1 SGD	10,321	10,603
100 JPY	12,797	13,112
1 AUD	9,739	10,211
1 EUR	15,589	16,560
1 GBP	18,250	18,372
1 ZAR	993	1,005

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas di mana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- jika investasi menjadi entitas anak.
- jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.g. Investment in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- if the investment becomes a subsidiary.*
- If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- when the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.h. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

(1) Operasi bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

(2) Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.h. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e., the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as:

(1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the joint arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

(2) Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.i. Transaction and Balances with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to the reporting entity if any of following conditions applies:
 - (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - (viii) The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.j. Persediaan dan Tanah untuk Pengembangan

Persediaan real estat terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, rumah hunian, rumah gerai, pusat belanja, gedung kantor, apartemen, termasuk bangunan (rumah) dalam penyelesaian, dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah, serta kapitalisasi biaya pinjaman yang diperoleh untuk mendanai perolehan dan pematangan tanah sampai selesai. Biaya perolehan atas rumah hunian dan rumah gerai terdiri dari biaya konstruksi aktual.

Tanah yang dimiliki oleh Grup untuk pengembangan di masa mendatang dikelompokkan sebagai "Tanah untuk Pengembangan". Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah untuk pengembangan tersebut akan diklasifikasikan ke akun persediaan real estat, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

Persediaan dalam usaha pelayanan kesehatan (seperti obat-obatan, peralatan medis, makanan, minuman dan lainnya) dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata.

Persediaan dalam usaha perhotelan (seperti makanan, minuman dan lainnya) dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

All transactions and significant balances with related parties are disclosed in relevant Note.

2.j. Inventories and Land for Development

Real estate inventories, which mainly consist of acquisition cost of land under development, residential houses, shophouses, shopping center, office buildings, apartments and buildings (houses) under construction, are carried at the lower of cost and net realizable value (NRV). Cost is determined by using the average method. Cost of land under development includes cost of land improvement and development, capitalized interest obtained to finance the acquisition and development of land until completed. The cost of residential houses and shophouses consist of actual construction cost.

Land for future development of the Group is classified as "Land for Development". Upon the commencement of development and construction of infrastructure, the carrying costs of land for development will be reclassified to the respective real estate inventory, investment property or property and equipment accounts, whichever is appropriate.

The excess of carrying value of inventories over their estimated recoverable value is recognized as impairment loss under "Allowances for Decline in Value of Inventories" in profit and loss.

Inventories of healthcare business (e.g., medicines, medical supplies, food, beverage and others) are carried at the lower of cost or NRV. Cost is determined by using the average method.

Inventories of hospitality business (e.g., food, beverages and others) are carried at the lower of cost or NRV. Cost is determined by using the first-in-first-out method. Allowance for decline in inventory value is provided based on a review of inventory status at the end of period.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihannya tersebut.

2.k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka lainnya dibebankan sesuai dengan manfaat masing-masing biaya.

2.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

Properti investasi disusutkan selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and selling costs.

The amount of any write-down of inventories to NRV and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in NRV, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurred.

2.k. Prepaid Expenses

Other prepaid expenses are charged over the respective benefit of the expenses.

2.l. Investment Property

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset if, and only if, it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

Investment properties are depreciated over the economic useful life with a straight line method based on an estimated useful life of 20 years.

Landrights are carried at costs and not depreciated.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- d. Inisiasi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.m.Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit and loss as incurred while significant renovations and additions are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- b. *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- d. *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

Investment property is derecognized in, or disposed from the statement of financial position when it is permanently derecognized or retired and does not have any future economic benefit in which can be expected at its disposal. Gains or losses on derecognition or disposal of investment property is recognized in operation in the period of derecognition or disposal.

2.m.Property and Equipment

Property and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses, if any.

Landright are recognized at its cost and are not depreciated.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun/ Year	
Bangunan, Prasarana dan Renovasi	4 – 40
Taman dan Interior	5
Lapangan Golf dan Club House	20
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	4 – 8
Peralatan dan Perabot Kantor	3 – 10
Perlengkapan dan Peralatan Medis	3 – 10
Mesin dan Peralatan Proyek	3 – 10
Mesin Bowling	10
Arena Bermain	5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi periode berjalan pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian konstruksi.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Depreciation of property and equipment starts when its available for use and its computed by using straight line method based on the estimated useful life of assets as follows:

Bangunan, Prasarana dan Renovasi	4 – 40	<i>Building, Infrastructure and Renovations</i>
Taman dan Interior	5	<i>Parks and Interiors</i>
Lapangan Golf dan Club House	20	<i>Golf Course and Club House</i>
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	4 – 8	<i>Transportation Equipments and Vehicles</i>
Peralatan dan Perabot Kantor	3 – 10	<i>Furniture, Fixtures and Office Equipment</i>
Perlengkapan dan Peralatan Medis	3 – 10	<i>Tools and Medical Equipment</i>
Mesin dan Peralatan Proyek	3 – 10	<i>Machinery and Project Equipment</i>
Mesin Bowling	10	<i>Bowling Machinery</i>
Arena Bermain	5	<i>Playground Areas</i>

The cost of repairs and maintenance is charged to operation as incurred while significant renovations and additions are capitalized. The carrying value of the part replaced was written-off.

Own built property and equipment is presented as part of property and equipment as "Construction in Progress" and is stated at cost. All cost incurred related to the construction of such assets is capitalized as part of cost of construction in progress.

The accumulated costs will be transferred to the respective property and equipment items at the time the asset is completed or ready for use and is depreciated since the operation.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to operations in the asset is derecognized. At the end of each financial period, the Group reviews useful life, residual values, methods of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.n. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar asset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.n. Leases

Determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance operating leases if it transfers substantially all the risks and benefits incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership.

The Group as lessees:

At the commencement of the lease term under finance lease, the Group recognized assets and liabilities in their consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments. Each determined at the inception of the lease. The discount rate used in calculating the present value of the minimum lease payments is the rate implicit in the lease, if this is practical to determine, if not, the lessee's incremental borrowing rate is used. Initial direct cost of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy of leased asset is consistent with depreciable assets that are owned.

Under an operating lease, the Group recognizes lease payments as an expense on a straight line basis over the lease term.

The Group as lessors:

Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the consolidated statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant period rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

Group presents assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Jual dan sewa-balik

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa-balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama estimasi penggunaan aset.
- Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

2.o. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasi, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, are recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

Sale and Leaseback:

Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:

- *If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over estimated useful life of the assets.*
- *If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.*

2.o. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.p. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Penurunan nilai *goodwill*

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara periodik.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh *goodwill* merepresentasikan level terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.p. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Impairment of goodwill

Irrespective of whether there is any indication of impairment, goodwill is tested for impairment periodically.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each cash-generating unit, or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the synergies of the business combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree were assigned to those units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes and is not larger than an operating segment.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.q. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.q. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests on acquiree are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior period, a change in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurred, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete in its financial statements. During the measurement period, the acquirer adjusts, recognizes additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tanggal akusisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2.r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.r. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite life is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Perangkat lunak diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

2.s. Goodwill

Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi (jika ada) dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Goodwill tidak diamortisasi.

2.t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite useful life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Software is amortized over the economic useful life with the straight-line method based on the estimated useful life for 5 years.

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset, less its estimated residual value.

2.s. Goodwill

Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortized.

2.t. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

2.u. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

2.u. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal as well as constructive) as a result of past events and it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.v. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

2.w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan dari penjualan real estat diakui berdasarkan PSAK 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat" sebagai berikut:

- (i) Pendapatan dari penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.v. Business Combination between Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other exchange ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction of a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

If the entity that received the business, subsequently dispose the business entity acquired previously, the additional paid-in capital recorded before, can not be recognized as a realized gain or loss nor reclassified to retain earning.

2.w. Revenue and Expense Recognition

The Group recognizes revenue from the sale of real estate based on PSAK 44 "Accounting for Real Estate Development Activities" as follows:

- (i) Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:*
 - a. Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable;*

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- b. Harga jual akan tertagih;
- c. Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang;
- d. Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk membangun kavling tanah yang dijual seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan perundangan undangan; dan
- e. Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tanah tersebut.

(ii) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- a. Proses penjualan telah selesai;
- b. Harga jual akan tertagih;
- c. Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
- d. Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

(iii) Pendapatan penjualan pusat belanja, apartemen dan perkantoran diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian bila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dengan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi;
- b. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan
- c. Jumlah pendapatan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan handal.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- b. *The selling price is collectible;*
 - c. *The receivable is not subordinated to other loans in the future;*
 - d. *The land development process is complete so that the seller has no further obligations related to the lots sold, such as obligation to construct amenities or obligation to build other facilities applicable to the lots sold as provided in the agreement between the seller and the buyer or regulated by law; and*
 - e. *Only the lots are sold, without any requirement of the seller's involvement in the construction of building on the lots.*
- (ii) *Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:*
- a. *A sale is consummated;*
 - b. *The selling price is collectible;*
 - c. *The seller's receivable is not subject to future subordination against other loans which will be obtained by the buyer; and*
 - d. *The seller has transferred the risks and benefits ownership to the buyer through a transaction that in substance is a sale and does not have substantial continuing involvement with the property.*

(iii) *Revenues from sales shopping center, apartments and office are recognized using the percentage-of-completion method if all of the following conditions are met:*

- a. *The construction process has already commenced, i.e., the building foundation has been completed and all of the requirements to commence construction have been fulfilled;*
- b. *Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable; and*
- c. *The amount of revenue and the cost of the property can be reliably estimated.*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian aktivitas pengembangan adalah berdasarkan persentase aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah aktivitas yang harus dilaksanakan.

Apabila suatu transaksi real estat tidak memenuhi seluruh kriteria pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode uang muka sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi.

Beban pokok penjualan lahan siap bangun ditentukan berdasarkan taksiran biaya perolehan tanah ditambah taksiran beban lain untuk pengembangan dan pembangunan prasarana penunjang. Beban pokok penjualan rumah hunian dan rumah gerai ditentukan berdasarkan seluruh biaya aktual pengerjaan yang terjadi dan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengerjaan. Taksiran biaya untuk menyelesaikan pengerjaan disajikan dalam "Beban Akrual" yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Perbedaan antara jumlah taksiran biaya dengan biaya aktual pengerjaan atau pengembangan dibebankan pada "Beban Pokok Pendapatan" periode berjalan.

Pendapatan usaha pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa pelayanan kesehatan diberikan atau barang medis diserahkan kepada pasien.

Pendapatan sewa dan lain-lain diakui berdasarkan periode sewa yang berlaku dan ketika jasa telah diberikan kepada pelanggan. Pembayaran sewa dan iuran klub keanggotaan di muka disajikan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang masa sewa dan manfaat keanggotannya.

Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun pendapatan ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotannya.

Pendapatan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The method used to determine the level of development activity completion is based on a percentage of actual activities accomplished to total development activities that need to be accomplished.

If a real estate sale fails to meet all the criteria of full accrual method, revenue recognition is deferred and the transaction is recognized using the deposit method until all of the conditions of full accrual method are fulfilled.

Cost of land lots sold is determined based on the estimated acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvements and developments. The cost of residential houses and shophouses sold is determined based on actual cost incurred and estimated cost to complete the work. The estimated cost to complete is included in the "Accrued Expenses" account which is presented in the Consolidated Statements of financial position. The difference between the estimated cost and the actual cost of construction or development is charged to "Cost of Revenues" in the current period.

Revenues from medical services are recognized when medical services are rendered or when medical supplies are delivered to patients.

Rental revenue and other services are recognized based on their respective rental period and when the services are rendered to the customers. Rental and membership paid in advance are presented as deferred income and recognized as revenue over the period benefit.

Hotel and restaurant revenues are recognized when the goods or services provided to hotel guests or restaurant visitors. Revenue tuition and membership fees are deferred (presented under Deferred Income) and recognized as income over the period of its membership.

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur asset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.x. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk tahun tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari tahun sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang
 - i. bukan kombinasi bisnis; dan
 - ii. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

2.x. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit and loss for the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit and loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current period and prior years shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current period and prior exceeds the amount due for period those years, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current period and prior years shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous years is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. the initial recognition of *goodwill*; or
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:
 - i. not a business combination; and
 - ii. at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a. bukan kombinasi bisnis; dan
- b. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, jika dan hanya jika:

- 1) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- 2) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap tahun masa

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is:

- a. not a business combination; and*
- b. at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- 1) The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- 2) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. the same taxable entity; or*
 - ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future year in which significant amounts of deferred tax**

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

depan di mana jumlah signifikan atas
aset atau liabilitas pajak tangguhan
diperkirakan untuk diselesaikan atau
dipulihkan.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan
jika, dan hanya jika, Grup:

- 1) memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk
menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- 2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan
dasar neto atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.y. Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak dan liabilitas
pengampunan pajak diakui pada saat Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)
diterbitkan oleh Kantor Pajak dan tidak diakui
secara neto (saling hapus). Selisih antara aset
pengampunan pajak dan liabilitas
pengampunan pajak diakui sebagai tambahan
modal disetor.

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui
sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas pengampunan pajak pada awalnya
diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang
masih harus dibayarkan oleh Perusahaan
sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan
aet pengampunan pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh
Perusahaan untuk memperoleh pengampunan
pajak diakui sebagai beban pada periode
di mana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas
pengampunan pajak diukur sesuai dengan SAK
yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-
masing aset dan liabilitas pengampunan pajak.

2.z. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan
membagi laba atau rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa
entitas induk dengan jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa yang beredar dalam
suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba (rugi) per
saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau
rugi yang dapat diatribusikan kepada
pemegang saham biasa entitas induk dan
jumlah rata-rata tertimbang saham yang
beredar, atas dampak dari seluruh instrumen
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

*liabilities or assets are expected to be
settled or recovered.*

*The offset current tax assets and current tax
liabilities if, and only if, the Group:*

- 1) has legally enforceable right to set-off
the recognized amounts; and*
- 2) intends either to settle on a net basis, or to
realize the assets and settle liabilities
simultaneously.*

2.y. Tax Amnesty

*Tax amnesty assets and liabilities are
recognized upon the issuance of Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by
tax office and they are not recognized as net
amount (offset). The difference between tax
amnesty assets and tax Amnesty liabilities are
recognized as additional paid in capital.*

*Tax amnesty assets are initially recognized at
the value stated in SKPP.*

*Tax amnesty liabilities are initially measured at
the amount of cash or cash equivalents to be
settled by the Company according to
the contractual obligation with respect to
the acquisition of respective tax amnesty
assets.*

*The redemption money paid by the Company
to obtain the tax amnesty is recognized as
expense in the period in which the Company
received SKPP.*

*After initial recognition, tax amnesty assets
and liabilities are measured in accordance with
respective relevant SAKs according to
the classification of each tax amnesty assets
and liabilities.*

2.z. Earnings (Loss) per Share

*Basic earnings (loss) per share is computed by
dividing the profit or loss attributable to ordinary
equity holders of the parent entity by
the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period.*

*For the purpose of calculating diluted earnings
(loss) per share, the Group shall adjust profit or
loss attributable to ordinary equity holders of
the parent entity, and the weighted average
number of shares outstanding, for the effect of
all dilutive potential ordinary shares.*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2.aa. Saham Treasuri

Saham treasuri dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang modal saham di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Selisih lebih penerimaan dari penjualan saham treasuri di masa yang akan datang atas biaya perolehan atau sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang akun tambahan modal disetor.

2.bb. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.cc. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.aa. Treasury Stock

Treasury stock is recorded at its acquisition cost and presented as a deduction from capital stock under equity section of the consolidated statements of financial position. The excess of proceed from future re-sale of treasury stock over the related acquisition cost or vice-versa shall be accounted for as an addition or deduction from additional paid-in capital.

2.bb. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating officer to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.cc. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position if and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, fair value is added or reduced with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issuance of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal.

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition.

The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) **Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit and loss.

(ii) **Loans and Receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) *those loans and receivables that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*

(b) *those loans and receivables that upon initial recognition designated as available for sale; or*

(c) *those loans and receivables for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan Tersedia untuk Dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Keuangan Selanjutnya Liabilitas

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit and loss.

(ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset, if and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expired or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit and loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and Amortization) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and allocating of the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognized.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset, if and only if, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1);
- (ii) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); atau
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup se bisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan terjadi.

Lindung nilai

Dalam bisnis normal, Grup terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasuri tertulis dari manajemen, Grup menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas; atau
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); or*
- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Hedging

The normal course of the Group's business exposes it to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Group uses derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allow three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge; or*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Grup menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindungi nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Grup mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The Group uses hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting period in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash flow hedge

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial assets or liabilities, the related gain or loss previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment in the same period when hedging on forecasted cash flow affect profit or loss.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Group reclassifies the associated gains and losses that were recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Derivatif

Seluruh derivatif awalnya diakui dan selanjutnya dinyatakan pada nilai wajar. Kebijakan Grup menggunakan derivatif hanya untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi untuk derivatif dalam hubungan lindung nilai diuraikan dalam bagian di atas.

Kadangkala, Grup melibatkan derivatif untuk melindungi nilai beberapa transaksi tetapi kriteria lindung nilai yang ketat sesuai PSAK 55 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, meskipun transaksi memiliki alasan ekonomi dan bisnis, akuntansi lindung nilai tidak dapat diterapkan. Akibatnya, perubahan dalam nilai wajar derivatif tersebut diakui dalam laba rugi dan akuntansi untuk item yang dilindungi nilai mengikuti kebijakan Grup untuk item tersebut.

**2.dd.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat asumsi dan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah tercatat aset dan liabilitas tertentu pada akhir periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, asumsi akuntansi telah dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, terdapat asumsi akuntansi mengenai sumber ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan yang dapat mempengaruhi secara material jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya.

**i. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Asumsi Akuntansi yang Penting**

Pada tanggal pelaporan, manajemen telah membuat asumsi dan estimasi penting yang memiliki dampak paling signifikan pada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian , yaitu sebagai berikut:

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Secara umum, manajemen menganalisis kecukupan penyisihan piutang berdasarkan beberapa hal, yaitu antara lain menganalisis historis piutang tak tertagih, konsentrasi piutang masing-masing pelanggan, kelayakan kredit yang diberikan dan

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Derivatives

All derivatives are initially recognized and subsequently carried at fair value. The Group policy is to use derivatives only for hedging purposes. Accounting for derivatives engaged in hedging relationships is described in the above section.

Sometimes, the Group enters into certain derivatives in order to hedge some transactions but the strict hedging criteria prescribed by PSAK 55 are not met. In those cases, even though the transaction has its economic and business rationale, hedge accounting cannot be applied. As a result, changes in the fair value of those derivatives are recognized in profit and loss and accounting for the hedged item follows the Group's policies for that item.

**2.dd. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment**

The preparation of consolidated financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards requires the management to make assumptions and estimates that could affect the carrying amounts of certain assets and liabilities at end of reporting period.

In the preparation of these consolidated financial statements, accounting assumptions have been made in the process of applying accounting policies that may affect the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements. In addition, there are accounting assumptions on the sources of estimation uncertainty at end of reporting period that could materially affect the carrying amounts of assets and liabilities in the subsequent reporting period.

**i. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Assumptions**

At the reporting date, the management has made significant assumptions and estimates which have the most significant impact to the carrying amount recognized in the consolidated financial statements, as follows:

Allowance for Impairment of Receivable

In general, the management analyzes the adequacy of the allowance for impairment of receivable based on several data, which include analyzing historical bad debts, the concentration of each customer's accounts receivable, credit worthiness and



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

perubahan jangka waktu pelunasan. Analisis tersebut dilakukan secara individual terhadap jumlah piutang yang signifikan, sedangkan kelompok piutang yang tidak signifikan dilakukan atas dasar kolektif. Pada tanggal pelaporan, jumlah tercatat piutang telah mencerminkan nilai wajarnya dan nilai tercatat tersebut dapat berubah secara material pada periode pelaporan berikutnya, namun perubahan itu bukan berasal dari asumsi maupun estimasi yang dibuat pada tanggal pelaporan ini (Catatan 4 dan 5).

Penurunan Nilai Goodwill

Dalam melakukan estimasi penurunan nilai *goodwill*, manajemen Grup melakukan analisis dan *assessment* atas kemampuan unit penghasil kas, kondisi perubahan operasi entitas akuisision dan pengalihan unit penghasil *goodwill*. Bila terdapat indikasi penurunan kemampuan unit penghasil kas dalam menghasilkan kas dan manajemen berkeyakinan bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan kas, maka manajemen akan melakukan *impairment* atas *goodwill*. Bila terjadi perubahan operasional unit bisnis dan/atau unit penghasil kas telah dialihkan, maka seluruh nilai *goodwill* yang dicatat sebelumnya akan diturunkan nilainya. Nilai tercatat *goodwill* disajikan pada Catatan 14.

Estimasi Pajak Tangguhan

Pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada tahun mendatang, di mana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks di mana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat (Catatan 20.b).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

changes in a given period of repayment. The analysis is carried out individually on a significant amount of receivable, while the insignificant group of accounts receivable is carried on the collective basis. At the reporting date, the carrying amount of accounts receivable has been reflected at fair value and the carrying value may change materially in the subsequent reporting period, but the change, however, will not be attributable to the assumptions and estimates made as of this reporting date (Notes 4 and 5).

Impairment of Goodwill

In estimating the impairment of goodwill, the Group's management performs analysis and assessment of the ability of the cash generating unit, the change of the operating conditions of acquired entity and transfer of goodwill generating unit. If there are indications of a decrease in the ability of the cash generating unit in generating cash and management believes that the cash generating unit decrease the ability to generate cash, then the management will do the impairment of goodwill. If there is a change in the operational business units and/ or cash-generating unit has been transferred, the entire value of goodwill previously recorded will be impaired. The carrying value of goodwill is presented in Note 14.

Deferred Tax Estimation

Deferred tax assets recognition is performed only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future years, in which the temporary differences and tax losses can still be used. Management also considers the future estimated taxable income and strategic tax planning in order to evaluate its deferred tax assets in accordance with applicable tax laws and its updates. As a result, related to its inherent nature, it is likely that the calculation of deferred taxes is related to a complex pattern where assessment requires a judgment and is not expected to provide an accurate calculation (Note 20.b).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan
Properti Investasi**

Manajemen melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin dan peralatan medis di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap dan properti investasi, jika terjadi, diperlakukan secara prosepktif sesuai PSAK 25 (Revisi 2017) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" (Catatan 12 dan 13).

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja (Catatan 28).

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode di mana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

**Estimation of Useful Lifes of Property
and Equipment and Investment Property**

Management makes a yearic review of the useful lifes of property and equipment and investment property based on several factors such as physical and technical conditions and development of medical equipment technology in the future. The results of future operations will be materially influenced by the change in estimate as caused by changes in the factors mentioned above. Changes in estimated useful life of property and equipment and investment property, if any, are prospectively treated in accordance with PSAK 25 (Revised 2017), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" (Notes 12 and 13).

Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits (Note 28).

The Group determines the appropriate discount rate at end of reporting period by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle this obligation. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that has a similar year to the corresponding year of obligation. Other key assumption is partly determined by current market conditions, during the year in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact on recognition of actuarial gains or losses at the end of the period.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

**Estimasi Periode Amortisasi Biaya
Ditangguhkan**

Grup melakukan penelaahan berkala atas periode amortisasi biaya ditangguhkan berdasarkan periode yang tertera pada kontrak.

**ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan
Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan berikut dibuat manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh signifikan atas jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian:

**Pengakuan Pendapatan – Metode
Persentase Penyelesaian**

Pendapatan dari penjualan unit pusat belanja dan apartemen diakui menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui secara proporsional dengan jumlah beban yang menghasilkan pendapatan tersebut. Sebagai konsekuensinya, hasil penerimaan penjualan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan diakui sebagai liabilitas sampai penjualan tersebut dapat memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Fair Value of Financial Instruments

If the fair value of financial assets and liabilities recorded in the consolidated statement of financial position is not available in active market, it is determined using valuation techniques including the use of mathematical model. Input for this model derived from observable market data throughout the available data. When observable market data is not available, management judgment is required to determine the fair value. The considerations include liquidity and input models such as volatility for long-term derivative transactions and discount rates, prepayments, and default rate assumptions.

**Deferred Charges Amortization Period
Estimation**

Group makes a yearic review of deferred charges amortization period based on period stated on contract.

**ii. Important Judgment in the Determination
of Accounting Policies**

The following judgment made by management in the application of the Group's accounting policies that have significant effect on the amounts presented in the consolidated financial statements:

**Revenue Recognition – Percentage of
Completion Method**

Revenue from the sale of shopping centers, and apartment are recognized using the percentage of completion method. By this method, revenue is recognized proportionately with the cost that generates revenue. As a consequence, the sales proceeds that can not be recognized as revenue are recognized as a liability until the sale have met the criteria for revenue recognition.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Untuk menentukan persentase penyelesaian aktivitas pengembangan unit pusat belanja, dan apartemen, manajemen menggunakan pendekatan kemajuan fisik yang ditentukan berdasarkan laporan survei untuk masing-masing proyek atau bagian proyek (misal per menara apartemen). Manajemen melakukan penelaahan atas penentuan estimasi persentase penyelesaian. Manajemen menyadari bahwa ketidakcermatan dalam menentukan persentase penyelesaian pada tanggal pelaporan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengakuan pendapatan untuk periode pelaporan berikutnya, di mana koreksi material atas kesalahan tersebut dilakukan secara retrospektif (Catatan 39).

Pengakuan Pendapatan – Jasa Tenaga Ahli

Kebijakan dan sistem penagihan kepada pasien merupakan satu kesatuan atas semua biaya yang terdiri dari konsultasi dokter, pemakaian obat-obatan dan tindakan medis lainnya. Atas biaya konsultasi dokter tersebut, Rumah Sakit melakukan perhitungan tertentu untuk masing-masing dokter, melakukan pembayaran dan pemotongan pajak setiap bulan kepada dokter, meskipun tagihan kepada pasien belum tertagih sepenuhnya. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa tidak terjadi hubungan keagenan antara rumah sakit dengan dokter, dengan memperhatikan dampak manfaat dan risiko signifikan terkait pemberian jasa pelayanan medis oleh dokter kepada pasien. Tagihan atas jasa pelayanan medis diakui sebagai pendapatan saat kriteria pengakuan terpenuhi (Catatan 39).

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

To determine the percentage of completion of the development activities of shopping centers and apartments, the management uses physical progress approach that is determined based on the survey report for each project or the part of project (e.g., for each tower of apartment). The management conducted a review of determination of the estimated percentage of completion and it realized that a negligence in determining the percentage of completion at the reporting date can result in revenue recognition errors for the subsequent reporting period, in which the material error correction will be carried out retrospectively (Note 39).

Revenue Recognition – Professional Fees

Policy and billing system to the patient is an integral of over all charges consisted of consulting with the doctor, use of drugs and other medical procedures. Above the cost of consulting a doctor, the Hospital performs specific calculations for each doctor, make payments and taxed accordingly every month to the doctor, although a bill to the patient is not fully collectible. Management of the Group considered that there was no agency relationship between the hospital and its doctors, with consideration to the impact of the significant benefits and risks related to the provision of medical services by the doctors to patients. Bills for medical services are recognized as revenue when the recognition criteria are met (Note 39).



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas			Cash on Hand
(termasuk 2019: USD21,785, EUR2,478 2018: USD22,388, SGD3,188)	10,787	10,846	(include 2019: USD21,785, EUR2,478 2018: USD22,388, SGD3,188)
Bank			Cash in Banks
Rupiah			Related Party (Note 9)
Pihak Berelasi (Catatan 9)			PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	714,500	330,391	Third Parties
Pihak Ketiga			PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	175,436	146,638	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	104,933	93,270	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48,042	35,442	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	31,049	36,457	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	30,945	235	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia	12,708	4,711	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,101	8,428	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,058	36,497	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mega Tbk	2,636	13,426	Others (below Rp10,000 each)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	25,662	30,682	
Mata Uang Asing			Foreign Currencies
Pihak Berelasi (Catatan 9)			Related Party (Note 9)
PT Bank Nationalnobu Tbk			PT Bank Nationalnobu Tbk
SGD	401,642	3,400	SGD
Lain-lain	6,719	4,782	Others
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk			PT Bank CIMB Niaga Tbk
USD	681,603	4,856	USD
SGD	299,642	33,630	SGD
BNP Paribas, Singapura			BNP Paribas, Singapore
USD	125,099	73,982	USD
PT Bank OCBC NISP Tbk			PT Bank OCBC NISP Tbk
USD	13,613	119	USD
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	48,042	53,445	Others (below Rp10,000 each)
Jumlah Bank	2,739,430	910,391	Total Bank
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 9)			Related Party (Note 9)
PT Bank Nationalnobu Tbk	24,000	--	PT Bank Nationalnobu Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	263,473	243,153	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	254,268	55,764	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	233,771	303,676	PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	101,329	--	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	35,001	252,350	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	30,000	10,000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20,000	22,250	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	10,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Mata Uang Asing			Foreign Currency
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD	973,070	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD
Jumlah Deposito Berjangka	1,934,912	897,193	Total Time Deposits
Jumlah	4,685,129	1,818,430	Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu yang berlaku untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Tingkat Bunga			<i>Interest Rates</i>
Rupiah	5%-7.5%	3.75%-8.75%	<i>Rupiah</i>
Mata Uang Asing	2.9%	--	<i>Foreign Currencies</i>
Jangka Waktu	1 - 2 bulan/ months	1 - 3 bulan/ months	<i>Maturity Period</i>

4. Piutang Usaha

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
<i>Real Estate Development:</i>			<i>Real Estate Development:</i>
Apartemen	237,326	231,337	<i>Apartment</i>
Pengelolaan Kota dan Air	117,050	92,846	<i>Town Management and Water Treatment</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	89,159	145,034	<i>Others (below Rp50,000 each)</i>
Subjumlah	<u>443,535</u>	<u>469,217</u>	<i>Subtotal</i>
<i>Real Estate Management & Services:</i>			<i>Real Estate Management & Services:</i>
Rawat Inap dan Rawat Jalan	1,210,599	1,293,620	<i>Inpatient and Outpatient</i>
Pembayaran Kembali	336,122	439,401	<i>Consumers Financing</i>
Pengelolaan Kota dan Air	91,659	78,004	<i>Town Management and Water Treatment</i>
Asset Enhancements	64,056	99,860	<i>Asset Enhancements</i>
Jasa Manajemen	35,659	67,623	<i>Management Fees</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	81,803	74,538	<i>Others (below Rp50,000 each)</i>
Subjumlah	<u>1,819,898</u>	<u>2,053,046</u>	<i>Subtotal</i>
<i>Fund Management / Investments:</i>			<i>Fund Management / Investments:</i>
Jasa Manajemen	86,428	91,149	<i>Management Fees</i>
Subjumlah Piutang Usaha			<i>Subtotal Trade Accounts Receivable from Third Parties</i>
Pihak Ketiga	2,349,861	2,613,412	<i>Inpatient and Outpatient</i>
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(257,470)	(219,903)	<i>Consumers Financing</i>
Jumlah Piutang Usaha			<i>Subtotal Trade Accounts Receivable from Third Parties</i>
Pihak Ketiga - Neto	<u>2,092,391</u>	<u>2,393,509</u>	<i>Asset Enhancements</i>
Pihak Berelasi (Catatan 9)			<i>Management Fees</i>
<i>Real Estate Development:</i>			<i>Management Fees</i>
Lahan Siap Bangun	55,502	5,502	<i>Land Lots</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	9,227	7,287	<i>Others (below Rp10,000 each)</i>
<i>Healthcare:</i>			<i>Healthcare:</i>
Rawat Inap dan Rawat Jalan	362	742	<i>Inpatient and Outpatient</i>
Subjumlah Piutang Usaha			<i>Subtotal Trade Accounts Receivable from Related Parties</i>
Pihak Berelasi	65,091	13,531	<i>Healthcare:</i>
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(5,502)	(5,502)	<i>Inpatient and Outpatient</i>
Jumlah Piutang Usaha			<i>Subtotal Trade Accounts Receivable from Related Parties</i>
Pihak Berelasi - Neto	59,589	8,029	<i>Healthcare:</i>
Jumlah - Neto	<u>2,151,980</u>	<u>2,401,538</u>	<i>Less: Allowance for Impairment in Value</i>
			<i>Total Trade Accounts Receivable from Related Parties - Net</i>
			<i>Less: Allowance for Impairment in Value</i>
			<i>Total Trade Accounts Receivable from Related Parties - Net</i>
			<i>Total - Net</i>

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 50.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Contractual interest rates and maturity period of the time deposits are as follows:



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2019	2,018	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	225,405	163,266	Beginning Balance
Penambahan	251,950	62,139	Addition
Penghapusan	(214,383)	--	Write-off
Saldo Akhir	262,972	225,405	Ending Balance

Penambahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha dilakukan berdasarkan penelaahan saldo piutang masing-masing debitur pada akhir tahun.

Manajemen berpendapat penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan piutang usaha PT Asiatic Sejahtera Finance, entitas anak, sehubungan dengan pembiayaan atas kepemilikan unit properti kepada pelanggan. Piutang tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank J Trust Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bank Ganesha Tbk (Catatan 24).

Piutang usaha PT Siloam International Hospitals Tbk, entitas anak, dijadikan jaminan atas utang utang bank kepada PT KEB Hana Indonesia dan pinjaman anjak piutang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 22 dan 26).

Piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Piutang usaha dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 48 dan 50.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The movements in allowances for impairment in value of trade accounts receivable are as follows:

	2019	2,018	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	225,405	163,266	Beginning Balance
Penambahan	251,950	62,139	Addition
Penghapusan	(214,383)	--	Write-off
Saldo Akhir	262,972	225,405	Ending Balance

Additional of allowance for impairment in value of trade accounts receivable is based on the review of the status of each debtors at the end of the year.

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover the possibility of uncollectible trade accounts receivable.

Consumers financing receivables represent trade accounts receivable of PT Asiatic Sejahtera Finance, a subsidiary, in connection with the financing of property unit ownership to the customers. The receivables are used as collateral of loan obtained from PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank J Trust Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia and PT Bank Ganesha Tbk (Note 24).

Trade accounts receivable were used as collateral for short-term bank loan to PT KEB Hana Indonesia and factoring loan to PT CIMB Niaga Tbk obtained by PT Siloam International Hospitals Tbk, a subsidiary (Notes 22 and 26).

Trade accounts receivable denominated in Rupiah and foreign currencies. Trade accounts receivable in foreign currencies are presented in Notes 48 and 50.

5. Aset Keuangan Lancar Lainnya

5. Other Current Financial Assets

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Piutang Dividen (Catatan 9)	52,976	55,186	Dividend Receivable (Note 9)
Pihak Ketiga			Third Parties
Call Spread Option (Catatan 46.d)	1,327,694	1,304,015	Call Spread Option (Note 46.d)
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	230,139	217,529	Available-for-Sale Financial Assets
Unit Penyertaan Reksa Dana	116,112	145,726	Investments in Mutual Fund
Piutang Lain-lain - Neto	111,907	216,478	Other Accounts Receivable - Net
Jumlah - Neto	1,838,828	1,938,934	Total - Net

Piutang Dividen

Piutang dividen merupakan piutang dividen Bridgewater International Ltd, entitas anak, atas investasi entitas anak tersebut di First REIT dan LMIR Trust (Catatan 9).

Dividend Receivables

Dividend receivables represent dividend receivable of Bridgewater International Ltd, a subsidiary, from its investments in First REIT and LMIR Trust, respectively (Note 9).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Biaya Perolehan			At Cost
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)	342,772	342,772	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
Akumulasi Keuntungan yang Belum Direalisasi	112,462	99,852	Accumulated Unrealised Gain
Jumlah	455,234	442,624	Total
Reklasifikasi ke Aset Keuangan			Reclassified to Other Non-Current
Tidak Lancar Lainnya (Catatan 8)	(225,095)	(225,095)	Financial Assets (Note 8)
Jumlah - Neto	230,139	217,529	Total - Net

Unit Penyertaan Reksa Dana

Unit penyertaan reksa dana merupakan pemilikan unit reksa dana yang dikelola oleh PT Lippo Securities Tbk, pihak berelasi, melalui RDPT Lippo Terproteksi I dan V. PT Bowsprit Asset Management, entitas anak, melalui RDPT Bowsprit Property Fund II, III, IV, 5, 6, dan Dinfra Aoyama Commercial Fund. Nilai wajar unit reksa dana ditentukan berdasarkan Nilai Aset Bersih pada tanggal pelaporan.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai unit reksa dana yang dimiliki oleh Grup masing-masing sebesar Rp940 dan Rp2.420 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dicatat pada pendapatan atau beban lain-lain.

Investments in Mutual Fund

Investments in mutual fund are ownership of mutual fund units managed by PT Lippo Securities Tbk, a related party, through RDPT Lippo Terproteksi I and V. PT Bowsprit Asset Management, a subsidiary, through RDPT Bowsprit Property Fund II, III, IV, 5, 6, and Dinfra Aoyama Commercial Fund. The fair value of mutual fund units is determined based on net asset value as at reporting date.

Unrealized gains (loss) on the increase (decrease) in value of mutual fund units held by the Group for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp940 and Rp2,420, respectively, recorded as other incomes or expenses.

Piutang Lain-lain

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Tagihan atas Kerja Sama Operasi	46,665	46,665	Billing of Joint Operation
Piutang dari Operator dan			Receivables from Operator and
Perhimpunan Penghuni Mall	34,612	59,467	Tenant Association of Mall
Klaim ke Pihak Ketiga	21,674	2,324	Claim to Third Parties
Lain-lain	132,581	165,831	Others
Subjumlah	235,532	274,287	Subtotal
<i>Dikurangi:</i> Penyisihan			Less: Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	(123,625)	(57,809)	in value of Receivables
Jumlah - Neto	111,907	216,478	Total - Net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements in allowances for impairment in value of other accounts receivable are as follows:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Saldo Awal	57,809	22,003	Beginning Balance
Penambahan - Neto	65,816	35,806	Addition - Net
Saldo Akhir	123,625	57,809	Ending Balance



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Tagihan atas kerja sama operasi merupakan piutang kepada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). PT Lippo Cikarang Tbk, entitas anak, bekerjasama dengan KIJA untuk membangun akses jalan tol Japek KM 34+700. Kerjasama mencakup tukar menukar tanah dan membagi biaya proyek masing-masing 50%.

Piutang dari operator dan perhimpunan penghuni mall merupakan piutang atas talangan pembayaran service charge, perawatan dan perbaikan unit-unit mall yang telah dialihkan kepada pihak lain.

Klaim ke pihak ketiga merupakan piutang terkait biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Grup dan dapat ditagihkan kepada pihak ketiga, seperti piutang kepada asuransi, biaya perbaikan gedung sewaan yang dapat dikompensasikan kepada pemilik gedung, biaya pembangunan serta biaya lainnya yang dikeluarkan terlebih dahulu.

Manajemen berpendapat penyisihan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang lain-lain.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Billing of Joint Operation represents receivables from PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). PT Lippo Cikarang Tbk, a subsidiary, cooperates with KIJA to build Japek highway access of KM 34+700. The cooperation includes the exchange of land and share the project cost of 50%, respectively.

Receivables from operator and tenant association of mall represent receivables resulted from payment of service charge, repair and maintenance units of malls that have been transferred to another parties.

Claim to third parties represent receivable related to advance payment of expenses by the Group that can be charged back to the third parties, for example receivable to insurance company, repair expenses in rented building which can be reimbursed to the building owner, other construction costs and other expenditure payments in advance.

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover the possibility of uncollectible other accounts receivable.

6. Persediaan

6. Inventories

	2019 Rp	2018 Rp	
<i>Real Estate Development:</i>			<i>Real Estate Development:</i>
Tanah dalam Pematangan	19,029,983	18,044,589	<i>Land under Development</i>
Rumah Hunian dan Rumah Toko	2,728,325	2,758,538	<i>Residential Houses and Shophouses</i>
Apartemen	2,164,941	742,238	<i>Apartments</i>
Pusat Belanja	1,774,468	1,948,174	<i>Shopping Centers</i>
Lain-lain	9,035	9,035	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>25,706,752</u>	<u>23,502,574</u>	<i>Subtotal</i>
<i>Real Estate Management & Services:</i>			<i>Real Estate Management & Services:</i>
Tanah dalam Pematangan	880,124	681,925	<i>Land under Development</i>
Pusat Belanja	755,710	1,012,277	<i>Shopping Centers</i>
Barang Medis dan Non-Medis	212,220	189,368	<i>Medical and Non-Medical Supplies</i>
Hotel dan Restoran	3,808	4,881	<i>Hotels and Restaurants</i>
Lain-lain	47,921	12,021	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>1,899,783</u>	<u>1,900,472</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah Persedian	27,606,535	25,403,046	<i>Total Inventories</i>
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(105,362)	--	<i>Less: Allowance for Impairment in Value</i>
Jumlah - Neto	<u>27,501,173</u>	<u>25,403,046</u>	<i>Total - Net</i>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penambahan persediaan melalui reklasifikasi dari properti investasi adalah sebesar Rp130.744 (Catatan 12).

For the year ended December 31, 2019, addition of inventory through reclassification from investment property amounted to Rp130,744 (Note 12).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Tanah PT Waska Sentana, entitas anak,
seluas 97.000 m² dijadikan jaminan atas
fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan
dari PT Bank ICBC Indonesia (Catatan 22).

Tanah PT Waska Sentana, entitas anak,
seluas 38.901 m² dijadikan jaminan atas
fasilitas pinjaman yang diperoleh PT Lippo
Cikarang Tbk, entitas anak, dari PT Bank ICBC
Indonesia (Catatan 22).

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke tanah
dalam pematangan masing-masing sebesar
nilai dan Rp1.238.759 (termasuk bunga
obligasi sebesar Rp583.924) untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018 (Catatan 22, 24 dan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
persediaan tanah dalam pematangan terdiri
dari beberapa bidang tanah dengan masing-
masing luas kurang lebih 597 hektar,
seluruhnya terletak di Jakarta, Lippo Cikarang,
Tangerang, Karawang, Bali, Sulawesi Utara,
Nusa Tenggara Timur, Medan, Jambi,
Lampung, Cipanas, Yogyakarta, Surabaya,
Buton dan Makassar.

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban
pokok pendapatan masing-masing sebesar
Rp3.598.860 dan Rp1.947.432 untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018.

Persediaan, properti investasi dan aset tetap
Grup telah diasuransikan terhadap segala
bentuk risiko dengan jumlah pertanggungan
sebesar Rp16.092.679 dan USD21,652,469
pada tanggal 31 Desember 2019 dan
Rp18.337.165 dan USD20,159,469 pada
tanggal 31 Desember 2018. Manajemen
berpendapat bahwa nilai pertanggungan
asuransi tersebut cukup memadai untuk
menutup kemungkinan kerugian atas risiko
yang mungkin dialami.

Grup telah melakukan pencadangan
penurunan nilai persediaan terkait dengan
kerugian dari pemberhentian proyek yang
berlokasi di Gubeng, Surabaya (Catatan 46.e).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

*Land owned by PT Waska Sentana,
a subsidiary, for an area of 97,000 sqm used as
a collateral for a loan facility obtained by the
Company from PT Bank ICBC Indonesia
(Note 22).*

*Land owned by PT Waska Sentana,
a subsidiary, for an area of 38,901 sqm used as
a collateral for a loan facility obtained by
PT Lippo Cikarang Tbk, a subsidiary, from
PT Bank ICBC Indonesia (Note 22).*

*Borrowing costs capitalized into land under
development for the years ended December
31, 2019 and 2018 amounting to nil and
Rp1,238,759 (include bond interest amounted
to Rp583,924), respectively (Notes 22, 24 and
27).*

*As of December 31, 2019 and 2018, land
under development consist of several land
areas with the area of approximately
597 hectares, respectively, located in Jakarta,
Lippo Cikarang, Tangerang, Karawang, Bali,
North Sulawesi, East Nusa Tenggara, Medan,
Jambi, Lampung, Cipanas, Yogyakarta,
Surabaya, Buton and Makassar.*

*The amount of inventory charged to cost of
revenue amounted to Rp3,598,860 and
Rp1,947,432 for the years ended
December 31, 2019 and 2018, respectively.*

*The Group's inventories, investment property,
and property and equipment have been
insured against all risks, with sum insured
of Rp16,092,679 and USD21,652,469 as of
December 31, 2019 and Rp18,337,165 and
USD20,159,469 as of December 31, 2018.
The management believes that the amount
insured is adequate to cover any possible
losses.*

*Group has provided allowance for impairment
in value of inventories related to losses from
discontinued project located in Gubeng,
Surabaya (Note 46.e).*



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

7. Beban Dibayar di Muka

7. Prepaid Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Sewa	183,427	201,157	Rental
Beasiswa	66,942	47,335	Scholarship
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	108,646	105,141	Others (below Rp50,000 each)
Jumlah	359,015	353,633	Total

Beban sewa dibayar di muka terutama merupakan sewa unit properti rumah sakit dan hotel yang disewa dari First REIT (Catatan 9 dan 46.b).

Program beasiswa merupakan beasiswa yang diberikan kepada karyawan rumah sakit yang dibebankan selama masa pendidikan.

Prepaid expenses rental mainly represents rental of hospital and hotel properties leased from First REIT (Notes 9 and 46.b).

Scholarship program represents scholarship given to hospital's employees which will be charged to expense along education period.

8. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

8. Other Non-Current Financial Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	598,517	652,092	Restricted Funds
Investasi Lainnya	277,293	415,134	Other Investments
Lain-lain	1,959	1,985	Others
Jumlah	877,769	1,069,211	Total

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Restricted Funds

	2019 Rp	2018 Rp	
Giro			Current Account
Pihak Berelasi (Catatan 9)			Related Party (Note 9)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Nationalnobu Tbk	27,836	--	PT Bank Nationalnobu Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	80,119	82,329	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	3,066	6,447	Others (below Rp10,000 each)
Subjumlah	111,021	88,776	Subtotal
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi (Catatan 9)			Related Party (Note 9)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Nationalnobu Tbk	40,077	49,020	PT Bank Nationalnobu Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Permata Tbk	100,689	109,260	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79,637	106,785	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	73,158	84,242	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45,698	54,077	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	42,128	43,806	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35,116	48,742	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	22,726	27,726	Others (below Rp10,000 each)
Mata Uang Asing			Foreign Currency
BNP Paribas, Singapura - SGD	48,267	39,658	BNP Paribas, Singapore - SGD
Subjumlah	487,496	563,316	Subtotal
Jumlah	598,517	652,092	Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu untuk giro dan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Tingkat Suku Bunga			<i>Interest Rates</i>
Rupiah	1.50% - 6.00%	1.50% - 6.25%	<i>Rupiah</i>
Mata Uang Asing	0.50% - 1.25%	0.60% - 1.50%	<i>Foreign Currencies</i>
Jangka Waktu	2 - 10 tahun/ years	2 - 10 tahun/ years	<i>Maturity Period</i>

Investasi Lainnya

Saham KJJA dalam Penyelesaian, termasuk Keuntungan yang Belum Direalisasi (Catatan 5)/

Shares of KJJA under Settlement, included Accumulated Unrealized Gain (Note 5)

Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai/
Less: Allowance for Impairment in Value

Subjumlah - Neto/ Subtotal - Net

PT Supermal Karawaci

Ventura Capital Fund I LP

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

Investasi PT Supermal Karawaci merupakan investasi saham dengan kepemilikan saham di bawah 20% yang tidak memiliki kuotasi harga pasar saham.

Investasi Ventura Capital Fund I LP, merupakan investasi pada perusahaan ventura. Pada tanggal 11 Februari 2019, Peninsula Investment Limited bersama dengan PT Karya Kawan Bersama melakukan Perjanjian Pembelian Saham ("SPA") atas seluruh kepemilikan saham di Ventura Capital Fund I LP dengan nilai pelepasan sebesar Rp275.000. Selisih nilai pelepasan dan nilai investasi yang dilepas sebesar Rp139.881 sebagai laba pelepasan investasi lain (Catatan 43).

Saham KJJA dalam penyelesaian merupakan investasi yang intensnya untuk penyelesaian utang kepada pemegang saham nonpengendali pada entitas anak.

Manajemen Group berpendapat penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai wajar investasi.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Contractual interest rates and maturity period of current accounts and time deposits are as follows:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Tingkat Suku Bunga			<i>Interest Rates</i>
Rupiah	1.50% - 6.00%	1.50% - 6.25%	<i>Rupiah</i>
Mata Uang Asing	0.50% - 1.25%	0.60% - 1.50%	<i>Foreign Currencies</i>
Jangka Waktu	2 - 10 tahun/ years	2 - 10 tahun/ years	<i>Maturity Period</i>

	<i>Other Investments</i>	
	Domicili/ <i>Domicile</i>	2019 Rp
		2018 Rp
Bekasi	225,095	225,095
(6,993)	--	--
	218,102	225,095
Tangerang	57,373	57,373
Cayman Islands	--	131,710
--	1,818	956
	277,293	415,134

Investment in PT Supermal Karawaci represents investment in shares with the ownership below 20% which do not have quoted stock market prices.

Investment in Ventura Capital Fund I LP, represent investment on venture company. On February 11, 2019, Peninsula Investment Limited with PT Karya Kawan Bersama signed Shares Purchase Agreement ("SPA") for the entire shares ownership of Ventura Capital Fund I LP with disposal value amounted to Rp275,000. Difference between disposal value and investment value amounted to Rp139,881 recorded as gain on disposal of other investment (Note 43).

Shares of KJJA in settlement represents investment intended for settlement of payables to non-controlling interest of a subsidiary.

Group's management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover the possibility decrease of fair value of investment.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

9. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

9. Transactions and Balances with Related Parties

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of transaction and the account balances with related parties are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	Percentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets	2019 %	2018 %
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents					
PT Bank Nationalnobu Tbk	1,146,861	338,573		2.08	0.69
Piutang Usaha/ Trade Accounts Receivable					
PT Grahaputra Mandirikhasrama	50,000	--		0.09	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)/ Others (below Rp10,000 each)	15,091	13,531		0.03	0.03
Jumlah/ Total	65,091	13,531		0.12	0.03
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment in Value	(5,502)	(5,502)		(0.01)	(0.01)
Jumlah - Neto/ Net	59,589	8,029		0.11	0.02
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets					
Piutang Dividen/ Dividend Receivables					
Lippo Mall Indonesia Retail Trust	34,825	36,279		0.06	0.07
First Real Estate Investment Trust	18,151	18,907		0.04	0.04
Jumlah/ Total	52,976	55,186		0.10	0.11
Beban Dibayar di Muka/ Prepaid Expenses					
First Real Estate Investment Trust	110,917	109,368		0.20	0.22
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha/ Due from Related Parties Non-Trade					
PT Anho Biogenesis Prima Indonesia	32,764	33,231		0.06	0.07
PT Mahkota Sentosa Utama	5,774	408,997		0.01	0.83
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)/ Others (below Rp10,000 each)	13,478	17,670		0.02	0.04
Jumlah/ Total	52,016	459,898		0.09	0.94
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment in Value	(11,522)	(12,816)		(0.02)	(0.03)
Jumlah - Neto/ Total - Net	40,494	447,082		0.07	0.91
Dana yang Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds					
PT Bank Nationalnobu Tbk	67,913	49,020		0.12	0.10
Investasi pada Entitas Asosiasi/ Investment in Associates					
Lippo Malls Indonesia Retail Trust	2,495,453	2,444,390		4.53	4.98
PT Mahkota Sentosa Utama	1,673,360	1,724,144		3.04	3.51
First Real Estate Investment Trust	109,018	331,679		0.20	0.68
PT Sahid Cikarang International	105,838	104,600		0.19	0.21
PT TTL Residences	74,539	71,429		0.14	0.15
PT Asri Griya Terpadu	12,347	--		0.02	--
PT Hyundai Inti Development	11,498	10,580		0.02	0.02
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)/ Others (below Rp10,000 each)	9,269	13,386		0.02	0.03
Jumlah/ Total	4,491,322	4,700,208		8.16	9.58
Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur/ Investment in Infrastructure Investment Funds					
DINFRA Bowspirit Township Development USD	3,060,485	--		5.56	--
DINFRA Bowspirit Township Development IDR	178,902	--		0.32	--
Jumlah/ Total	3,239,387	--		5.88	--
Investasi pada Ventura Bersama/ Investment in Joint Venture					
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd	--	145,985		--	0.30

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Percentase terhadap Jumlah Liabilitas Percentage to Total Liabilities			
	2019 Rp	2018 Rp	2019 %	2018 %
Utang Usaha/ Trade Accounts Payable				
PT Kemang Mall Terpadu	35,626	24,300	0.17	0.13
PT Yoga Central Terpadu	16,731	15,917	0.08	0.07
PT Rekreasi Pantai Terpadu	10,512	17,225	0.05	0.07
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000) Others (below Rp10,000 each)	10,664	10,574	0.05	0.01
Jumlah/ Total	73,533	68,016	0.35	0.28
Pendapatan Ditangguhkan/ Deferred Income				
PT Matahari Putra Prima Tbk	234,413	254,679	1.13	1.05
PT Mulia Persada Pertwi	126,841	149,864	0.61	0.62
Jumlah/ Total	361,254	404,543	1.74	1.67
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik/ Deferred Gain on Sale and Leaseback Transactions				
First Real Estate Investment Trust	920,543	1,223,288	4.45	5.03
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha/ Due to Related Parties Non-Trade				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000) Others (below Rp1,000 each)	1,384	2,205	0.01	0.01
Liabilitas Imbalan Pascakerja/ Post-Employment Benefits Liabilities	3,413	1,766	0.02	0.01
Percentase terhadap Pendapatan/ Beban Terkait/ Percentage to Revenue/ Related Expense				
	2019 Rp	2018 Rp	2019 %	2018 %
Pendapatan/ Revenue				
PT Grahatama Mandirikharisma	250,000	--	2.03	--
PT Mahkota Sentosa Utama	65,610	838,158	0.53	7.32
PT Matahari Putra Prima Tbk	16,213	12,160	0.13	0.11
PT Mulia Persada Pertwi	13,614	15,106	0.11	0.13
PT Kemang Mall Terpadu	9,686	10,317	0.08	0.09
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000) Others (below Rp10,000 each)	81,842	71,272	0.66	0.62
Jumlah/ Total	436,965	947,013	3.54	8.27
Beban Usaha/ Operating Expenses				
PT Kemang Mall Terpadu	199,613	208,000	4.99	5.80
PT Rekreasi Pantai Terpadu	43,281	43,281	1.08	1.21
PT Yoga Central Terpadu	42,636	42,636	1.06	1.19
PT Multipolar Technology Tbk	37,040	48,875	0.93	1.36
PT Air Pasific Utama	13,000	1,600	0.32	0.04
PT Duta Wisata Loka	10,722	10,406	0.27	0.29
PT Anugrah Prima	9,647	10,985	0.24	0.31
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000) Others (below Rp10,000 each)	86,048	79,682	2.15	2.22
Jumlah/ Total	441,987	445,465	11.04	12.42
Beban Imbalan Kerja Jangka Pendek/ Short-Term Employment Benefits Expenses				
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci/ Directors, Commissioners and Key Management	35,355	34,117	0.88	0.95



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Relationship with the Company	Transaksi/ Transactions
PT Matahari Putra Prima Tbk	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Pendapatan ditangguhkan dan pendapatan sewa/ Deferred income and rental income
PT Mulia Persada Pertiwi	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Pendapatan ditangguhkan dan pendapatan sewa/ Deferred income and rental income
PT Bumi Lemahabang Permai	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Piutang Usaha dan beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Trade accounts receivable and non-interest bearing intercompany charges
Lippo Malls Indonesia Retail Trust	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang dividen dan investasi pada entitas asosiasi/ Dividend receivable and investment in associate
First Real Estate Investment Trust	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang dividen, beban dibayar di muka, investasi pada entitas asosiasi, laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik/ Dividend receivable, prepaid expense, investment in associate and deferred gain on sale and leaseback transactions.
PT Sahid Cikarang International	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
PT Mahkota Sentosa Utama	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi penyertaan saham, piutang pihak berelasi non-usaha dan penjualan lahan siap bangun / Investment in shares, due from related parties non-trade and sales of land lot
PT Hyundai Inti Development	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
PT TTL Residences	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
PT Anho Biogenesis Prima Indonesia	Entitas Asosiasi/ Associate	Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
DINFRA Bowsprit Township Development USD	Afiliasi/ Affiliated	Investasi pada dana investasi infrastruktur/ Investment in infrastructure Investment funds
DINFRA Bowsprit Township Development IDR	Afiliasi/ Affiliated	Investasi pada dana investasi infrastruktur/ Investment in infrastructure Investment funds
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd	Ventura Bersama/ Joint Venture	Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint venture
PT Kemang Mall Terpadu	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, Revenue management fee and rental expense
PT Rekreasi Pantai Terpadu	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, revenue management fee and rental expense
PT Panca Permata Pejaten	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Yogyakarta Central Terpadu	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang Usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Primatama Nusa Indah	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Palembang Paragon Mall	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Anugrah Prima	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Duta Wisata Loka	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Manunggal Wiratama	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Nature of transactions with related parties are as follows:

**Transaksi/
Transactions**

Pendapatan ditangguhkan dan pendapatan sewa/ Deferred income and rental income
Pendapatan ditangguhkan dan pendapatan sewa/ Deferred income and rental income
Piutang Usaha dan beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Trade accounts receivable and non-interest bearing intercompany charges
Piutang dividen dan investasi pada entitas asosiasi/ Dividend receivable and investment in associate
Piutang dividen, beban dibayar di muka, investasi pada entitas asosiasi, laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik/ Dividend receivable, prepaid expense, investment in associate and deferred gain on sale and leaseback transactions.
Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
Investasi penyertaan saham, piutang pihak berelasi non-usaha dan penjualan lahan siap bangun / Investment in shares, due from related parties non-trade and sales of land lot
Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
Investasi penyertaan saham/ Investment in shares
Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
Investasi pada dana investasi infrastruktur/ Investment in infrastructure Investment funds
Investasi pada dana investasi infrastruktur/ Investment in infrastructure Investment funds
Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint venture
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, Revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewa/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Relationship with the Company	Transaksi/ Transactions
PT Cibubur Utama	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewal/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Graha Nusa Raya	Entitas Anak dari Entitas Asosiasi/ Subsidiary of Associate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan jasa manajemen dan beban sewal/ Trade accounts receivable, trade accounts payable, revenue management fee and rental expense
PT Bank Nationalnobu Tbk	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Penempatan pada rekening giro, deposito berjangka dan dana yang dibatasi penggunaannya/ Placement of current accounts, time deposit and restricted fund
PT Duta Mas Kharisma Indah	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
PT Tirta Graha Sentana	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
PT Multipolar Technology Tbk	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Pengadaan perangkat keras dan lunak/ Procurement of hardware and software
PT Air Pasific Utama	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
PT Matahari Pasific	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing intercompany charges
PT Grahaputra Mandirikharisma	Entitas Sepengendali/ Entity under Common Control	Piutang usaha, penjualan lahan siap bangun / Trade accounts receivable, sales of land lot
PT Asri Griya Terpadu	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi penyeertaan saham/ Investment in shares
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci/ Directors, Commissioners and Key Management	Karyawan Kunci/Key Personnel	Imbalan Kerja/ Employee benefits

10. Investasi**10. Investments****a. Investasi pada Asosiasi****a. Investment in Associate**

Domicili/ Domicile	Persentase/ Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ Accumulated Share in Profit (Loss) Net	Akumulasi Penerimaan Dividen/ Accumulated Dividend Received	Akumulasi Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Accumulated Other Comprehensive Income	Reklasifikasi Menjadi Entitas Anak/ Reclassified into a Subsidiary	Penambahan Investasi/ Additional of Investment	Pelepasan Investasi/ Disposal of Investment	Dampak Selisih Kurs/ Impact of Foreign Exchange	Nilai Tercatat/ Carrying Value
%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust)	Singapura/ Singapore	30,92	3,784,555	1,519,452	(1,693,357)	(1,469,226)	--	74,232	--	279,797
PT Mahkota Sentosa Utama	Bekasi	49,72	2,239,956	(566,596)	--	--	--	--	--	1,673,360
First Real Estate Investment Trust (First REIT)	Singapura/ Singapore	4,30	2,120,567	459,791	(1,385,064)	2,800	--	--	(1,181,502)	92,426
PT Sahid Cikarang International	Bekasi	50,00	100,000	5,838	--	--	--	--	--	109,018
PT TTL Residences	Bekasi	25,00	66,620	10,904	(2,985)	--	--	--	--	105,838
PT Asri Griya Terpadu	Tangerang	39,23	12,750	(403)	--	--	--	--	--	74,539
PT Hyundai Inti Development	Bekasi	45,00	6,155	116,628	(111,285)	--	--	--	--	12,347
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000)/ Others (each below Rp1,000)			33,358	(19,972)	--	--	(4,117)	--	--	9,269
Jumlah/ Total			8,363,961	1,525,642	(3,192,691)	(1,466,426)	(4,117)	74,232	(1,181,502)	372,223
										4,491,322

Domicili/ Domicile	Persentase/ Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ Accumulated Share in Profit (Loss) Net	Akumulasi Penerimaan Dividen/ Accumulated Dividend Received	Akumulasi Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Accumulated Other Comprehensive Income	Reklasifikasi Menjadi Entitas Anak/ Reclassified into a Subsidiary	Penambahan Investasi/ Additional of Investment	Pelepasan Investasi/ Disposal of Investment	Dampak Selisih Kurs/ Impact of Foreign Exchange	Nilai Tercatat/ Carrying Value
%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust)	Singapura/ Singapore	30,92	3,570,550	1,361,912	(1,515,021)	(1,643,053)	--	214,005	--	455,997
PT Mahkota Sentosa Utama	Bekasi	49,72	2,239,956	(515,812)	--	--	--	--	--	1,724,144
First Real Estate Investment Trust (First REIT)	Singapura/ Singapore	10,60	1,904,701	431,462	(1,316,693)	2,808	--	215,866	(1,008,404)	101,939
PT Sahid Cikarang International	Bekasi	50,00	100,000	4,600	--	--	--	--	--	331,679
PT Surya Cipta Investama	Bekasi	49,81	32,965	62,097	(12,498)	(1,146)	--	--	(81,417)	104,600
PT TTL Residences	Bekasi	25,00	66,620	4,809	--	--	--	--	--	71,429
PT Hyundai Inti Development	Bekasi	45,00	6,155	111,660	(107,235)	--	--	--	--	10,580
PT Gamma Knife Center Indonesia	Tangerang	20,00	4,040	77	--	--	--	--	--	4,117
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000)/ Others (each below Rp1,000)			29,318	(20,049)	--	--	--	--	--	9,269
Jumlah/ Total			7,954,305	1,440,756	(2,951,448)	(1,641,391)	--	429,871	(1,089,821)	557,936
										4,700,208



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT Asri Griya Terpadu merupakan entitas asosiasi dari PT Wisma Jatim Propertindo yang diakuisisi pada tanggal 9 September 2019.

PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI) merupakan entitas asosiasi dari PT Prima Mugi Jaya yang diakuisisi pada tanggal 21 Desember 2018. Pada tanggal 13 Februari 2019, GKCI diakui sebagai entitas anak (Catatan 1.c dan 51).

Pada tahun 2019, Bridgewater International Limited, entitas anak, melakukan pelepasan atas unit First REIT sebanyak 49.123.700 unit dengan harga per unit SGD1,0173. Laba atas transaksi ini sebesar Rp338.837 dicatat sebagai penghasilan lain-lain pada laba rugi (Catatan 43).

Pada tahun 2018, Bridgewater International Limited, entitas anak, melakukan pelepasan atas unit First REIT sebanyak 83.593.683 unit dengan harga per unit SGD1,228. Laba atas transaksi ini sebesar Rp652.912 dicatat sebagai penghasilan lain-lain pada laba rugi (Catatan 43).

Pada tahun 2018, PT Menara Tirta Indah, entitas anak, melakukan pelepasan atas unit First REIT sebanyak 24.238.264 unit dengan harga per unit SGD1,410. Laba atas transaksi ini masing-masing sebesar Rp247.268 dicatat sebagai penghasilan lain-lain pada laba rugi (Catatan 43).

Penurunan investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2018 sebanyak 55.051.808 unit merupakan dampak pelepasan saham Bowsprit Capital Corporation (Catatan 1.c).

Informasi penambahan investasi pada entitas asosiasi terkait aktivitas non-kas diungkapkan dalam Catatan 52.

Pada tanggal 13 Desember 2018, PT Wisma Jatim Propertindo, entitas anak, melepas 49,81% kepemilikan sahamnya di PT Surya Cipta Investama, kepada PT Multipolar Tbk, pihak berelasi, dengan harga pelepasan sebesar Rp195.057. Selisih nilai pelepasan dan nilai investasi yang dilepas sebesar Rp113.642 sebagai laba pelepasan saham entitas asosiasi (Catatan 43).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

PT Asri Griya Terpadu is an associate of PT Wisma jatim Propertindo that was acquired on September 9, 2019.

PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI) is an associate of PT Prima Mugi Jaya that was acquired on December 21, 2018. On February 13, 2019, GKCI was recognized as subsidiary (Notes 1.c and 51).

In 2019, Bridgewater International Limited, a subsidiary, disposed 49,123,700 units of First REIT at the price per unit of SGD1,0173. Gain on disposal from the transaction amounted to Rp338,837 was recorded as other income in profit or loss (Note 43).

In 2018, Bridgewater International Limited, a subsidiary, disposed 83,593,683 units of First REIT at the price per unit of SGD1,228. Gain on disposal from the transaction amounted to Rp652,912 was recorded as other income in profit or loss (Note 43).

In 2018, PT Menara Tirta Indah, a subsidiary, disposed 24,238,264 units of First REIT at the price per unit of SGD1,410. Gain on disposal from the transaction amounted to Rp247,268, was recorded as other income in profit or loss (Note 43).

Decrease of investment in associate of 55,051,808 units as a result of shares disposal in Bowsprit Capital Corporation (Note 1.c).

Informations of additional investments in associates from non-cash activity is disclosed in Note 52.

On December 13, 2018, PT Wisma Jatim Propertindo, a subsidiary, disposed of 49.81% its shares ownership in PT Surya Cipta Investama to PT Multipolar Tbk, a related party, with disposal price of Rp195,057. Difference between disposal value and investment value amounted to Rp113,642 recorded as gain on disposal shares of associate (Note 43).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Sampai dengan Mei 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), merupakan entitas anak tidak langsung dari PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak. Kemudian setelahnya, LC kehilangan pengendalian pada MSU (Catatan 1.c dan 44), maka nilai wajar sisanya investasi pada MSU sebesar Rp2.239.956 dicatat sebagai perolehan awal investasi.

Nilai wajar bisnis MSU pada saat hilangnya pengendalian diukur berdasarkan Laporan Penilaian Independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan tanggal 4 Oktober 2018, penilai independen yang tidak berelasi dengan Perusahaan. Penilai adalah anggota MAPPI dan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam penilaian properti di lokasi yang relevan. Penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia Edisi VIII Tahun 2018 dan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3 dan tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia.

Pendekatan yang digunakan oleh penilai adalah:

1. pendekatan pendapatan dengan metode arus kas terdiskonto; dan
2. pendekatan nilai pasar dengan metode perbandingan perusahaan terbuka.

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jumlah Agregat Aset Lancar	13,109,304	9,755,773	Total Agregate of Current Assets
Jumlah Agregat Aset Tidak Lancar	33,185,555	36,694,651	Total Agregate of Non-Current Assets
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Pendek	3,413,637	5,660,519	Total Agregate of Current Liabilities
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Panjang	22,350,237	57,749,204	Total Agregate of Non-Current Liabilities
Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan	5,199,635	4,060,675	Total Agregate of Net Revenues for the Year
Jumlah Agregat Laba Setelah Pajak Tahun Berjalan	597,841	537,005	Total Agregate of Profit After Tax for the Year
Jumlah Agregat Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	543,521	(772,853)	Total Agregate of Other Comprehensive Income for the Period
Jumlah Agregat Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1,141,362	(235,848)	Total Agregate of Comprehensive Income for the Year

Harga publikasian unit REIT pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah SGD0.995 dan SGD0.985 untuk unit First REIT, dan SGD0.225 dan SGD0.182 untuk unit LMIR Trust. Selain REIT, tidak tersedia informasi berdasarkan kuotasi harga publikasian atas nilai wajar investasi pada entitas asosiasi tersebut.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Until May 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), was an indirect subsidiary of PT Lippo Cikarang Tbk (LC), a subsidiary. Subsequently, LC loses control on MSU (Notes 1.c and 44), therefore, fair value of remaining investment amounted to Rp2,239,956 was recorded as initial acquisition cost of the investment.

The business fair value of MSU at the time of the Company loss of control, based on the valuation report of Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan dated October 4, 2018, an independent appraiser which are not related with the Company. The appraisers are member of MAPPI and have appropriate qualifications and experience in the property valuation. The valuation is conducted using the Indonesian Valuation Standard VIII and Bapepams' Rule VIII.C.3 and the Code of Ethics of Indonesian valuation.

The approach used by the appraisers are:

1. income approach with discounted cashflow; and
2. market approach with comparative listed company approach.

The following is a summary of financial information of the associates as of December 31, 2019 and 2018:

The quoted market price of REIT units as of December 31, 2019 and 2018 are SGD0.995 and SGD1.985 for First REIT units, respectively, and SGD0.225 and SGD0.182 for LMIR Trust units, respectively. Beside REIT, there was no fair value information available based on quoted market price of the above investments in associates.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

b. Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Dana Investasi Infrastruktur USD	3,060,485	--	Infrastructure Investment Funds USD
Dana Investasi Infrastruktur IDR	178,902	--	Infrastructure Investment Funds IDR
Jumlah	3,239,387	--	Total

PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, menempatkan investasi pada Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) Bowsprit Township Development USD sebanyak 218.741.116 unit sesuai dengan Keterbukaan Informasi kepada publik yang telah diumumkan LC pada tanggal 9 Desember 2019.

LC juga menempatkan investasi pada DINFRA Bowsprit Township Development IDR sebanyak 177.170.631 unit.

PT Lippo Cikarang Tbk (LC), a subsidiary, placed investment in Investment Infrastructure Fund (DINFRA) Bowsprit Township Development USD of 218,741,116 units in accordance with Information Publication to public which was announced by LC on December 9, 2019.

LC also placed investment in DINFRA Bowsprit Township Development IDR of 177,170,631 units.

11. Investasi pada Ventura Bersama

11. Investments in Joint Venture

	Domisili/ Domicile	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ Accumulated Share in Profit (Loss) - Net	Penambahan Investasi/ Additional of Investment	Pelepasan/ Disposal	Nilai Tercatat/ Carrying Value	2019	
								%	Rp
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd								Myanmar	40.00
<hr/>									
	Domisili/ Domicile	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ Accumulated Share in Profit (Loss) - Net	Penambahan Investasi/ Additional of Investment	Reklasifikasi menjadi Entitas Anak/ Reclassified into a subsidiary	Nilai Tercatat/ Carrying Value	2018	
								%	Rp
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd								Myanmar	40.00
PT Lippo Diamond Development								Indonesia	51.00
Jumlah/ Total									

Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd

Pada tahun 2015, PT Waluya Graha Loka (WGL), entitas anak dan First Myanmar Investment Co., LTD (FMI) sepakat untuk membentuk ventura bersama melalui Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd (YSHPH) dengan jumlah modal sebesar USD13,187,500 dengan kontribusi sebesar USD5,275,000 (setara dengan 40% jumlah modal) dan USD7,912,500 (setara dengan 60% jumlah modal) masing-masing untuk WGL dan FMI.

Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd

In 2015, PT Waluya Graha Loka (WGL), a subsidiary, and First Myanmar Investment Co., LTD (FMI) entered into joint venture agreement through Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd (YSHPH) with total capital amount of USD13,187,500 with the contribution of USD5,275,000 (equivalent to 40% of capital) and USD7,912,500 (equivalent to 60% of capital) for WGL and FMI, respectively.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian ventura bersama antara WGL dan FMI, para *venturer* sepakat untuk meningkatkan modal ventura sebesar USD80,000,000 dalam kurun waktu tujuh tahun sejak dibentuknya ventura bersama, sesuai dengan kontribusi masing-masing *venturer*. Para *venturer* juga sepakat untuk memberikan pendanaan atas operasi kerja ventura bersama sesuai dengan masing-masing kontribusi.

Pada tanggal 9 Januari 2019 WGL melakukan Perjanjian Pembelian Saham Pun Hlaing International Hospital Limited (PHIHL) sebanyak 735.105 lembar saham. Pada tanggal 10 Januari 2019, WGL bersama dengan OUELH Healthcare Service Pte., Ltd. ("OHS") dan OUELH Healthcare Assets Pte., Ltd. melakukan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat ("CSPA") atas seluruh kepemilikan saham di YSHPH dan PHIHL dengan nilai pelepasan sebesar USD19,500,000. Selisih nilai pelepasan dan nilai investasi yang dilepas sebesar adalah Rp71.662 (Catatan 43).

PT Lippo Diamond Development

Pada tanggal 28 Oktober 2015, PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP), entitas anak, melakukan penandatangan kerja sama operasi dengan PT Diamond Realty Investment Indonesia (DRII), entitas anak Mitsubishi Corporation, untuk mengembangkan dua menara residensial mewah di Orange County, Lippo Cikarang, dengan nilai investasi sebesar USD100,000,000. Kontribusi kerja sama operasi ini adalah sebesar 51% dan 49% masing-masing untuk MKCP dan DRII.

Berdasarkan perjanjian ventura bersama MKCP dan DRII, para *venturer* sepakat untuk memberikan pendanaan atas operasi kerja ventura bersama sesuai dengan masing-masing kontribusi. Bila salah satu dari *venturer* tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembiayaan, maka pendanaan akan dilakukan melalui pinjaman kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penelaahan kembali yang dilakukan oleh Grup atas pengendalian terhadap PT Lippo Diamond Development (LDD), maka sejak April 2018, LDD dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 1.c).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

Based on joint venture agreement between WGL and FMI, the venturers agree to increase the venture capital amounting to USD80,000,000 proportionately contributed by each venturer in the period of seven years since the joint venture establishment. The venturers also agree to provide funding to the joint venture proportionately.

On January 9, 2019, WGL signed Shares Purchase Agreement ownership of Pun Hlaing International Hospital Limited (PHIHL) of 735,105 shares. On January 10, 2019, WGL with OUELH Healthcare Service Pte., Ltd. ("OHS") and OUELH Healthcare Assets Pte., Ltd. signed Conditional Shares Purchase Agreement ("CSPA") for the entire stake of YSHPH and PHIHL with disposal value of USD19,500,000. Difference between disposal value and investment value amounted to Rp71,662 (Note 43).

PT Lippo Diamond Development

On October 28, 2015, PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP), a subsidiary, and PT Diamond Realty Investment Indonesia (DRII), a subsidiary of Mitsubishi Corporation, entered into joint operation for developing of two towers of luxury residential in Orange County, Lippo Cikarang, with total investment value of USD100,000,000. The contribution of this joint operation is 51% and 49% for MCP and DRII, respectively.

Based on joint venture agreement, MKCP and DRII, the venturers agree to provide funding to the joint venture proportionately. If one of the venturers does not have sufficient fund for financing, the funding will be obtained from third party loan.

Based on reassessment of the control over PT Lippo Diamond Development (LDD) by the Group, therefore since April 2018, LDD was consolidated in the Company's consolidated financial statements (Note 1.c).



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2018:

	2018 Rp	
Jumlah Aset Lancar	99,343	Total of Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	354,412	Total of Non-Current Assets
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	284,764	Total of Non-Current Liabilities
Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan	147,117	Total Aggregate of Net Revenues for the Year
Jumlah Agregat Rugi Setelah Pajak Tahun Berjalan	(6,274)	Total Aggregate of Loss After Tax for the Year
Jumlah Agregat Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(6,274)	Total Aggregate of Comprehensive Loss for the Year

Tidak tersedia informasi berdasarkan kuotasi harga publikasian atas nilai wajar investasi pada ventura bersama tersebut.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The following is a summary of financial information on joint venture as of December 31, 2018:

12. Properti Investasi

12. Investment Properties

	2019				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31 Rp
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	78,399	--	--	(35,526)	Land 42,873
Bangunan	555,765	164,751	--	(207,340)	Building 513,176
Jumlah Biaya Perolehan	<u>634,164</u>	<u>164,751</u>	<u>--</u>	<u>(242,866)</u>	<u>Total Acquisition Cost 556,049</u>
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	201,659	34,684	--	(112,122)	Building 124,221
Nilai Tercatat	<u>432,505</u>				<u>Carrying Value 431,828</u>
	2018				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31 Rp
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	78,399	--	--	--	Land 78,399
Bangunan	547,932	7,833	--	--	Building 555,765
Jumlah Biaya Perolehan	<u>626,331</u>	<u>7,833</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>Total Acquisition Cost 634,164</u>
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	173,271	28,388	--	--	Building 201,659
Nilai Tercatat	<u>453,060</u>				<u>Carrying Value 432,505</u>

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Rental revenue earned and direct operating expenses from investment properties in the consolidated profit or loss are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Sewa	74,905	78,364	Rental Income
Beban Operasi Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang Menghasilkan Penghasilan Sewa	31,317	28,783	Direct Operating Cost Arises from the Rental Generated Investment Properties
Beban penyusutan properti investasi dialokasikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:			Depreciation charges that were allocated in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:
	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Pokok Pendapatan	12,464	10,500	Cost of Revenue
Beban Penjualan (Catatan 41)	22,220	17,888	Selling Expense (Note 41)
Jumlah	<u>34,684</u>	<u>28,388</u>	Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2019 terdapat reklassifikasi dari properti investasi ke persediaan (Catatan 6).

Nilai wajar properti investasi milik Grup pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.196.073.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup tidak melakukan pengukuran nilai wajar atas properti investasi. Nilai wajar yang disajikan dalam pengungkapan ini menggunakan nilai yang tertera atas pada Nilai Objek Pajak (NJOP) dan biaya perolehan.

Berdasarkan evaluasi mengenai nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

On 2019, there are reclassification from investment properties to inventories (Note 6).

The fair value of investment properties as of December 31, 2019 amounted to Rp3,196,073.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group did not make fair value measurements of the investment properties. The fair value presented in the form of Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) and acquisition cost.

Based on the evaluation of the value of investment properties as of December 31, 2019, management believes that there are no changes in circumstances indicate an impairment of investment properties.

13. Aset Tetap

13. Property and Equipment

	2019					
	1 Januari/ January 1, Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklassifikasi/ Reclassifications Rp	31 Desember/ December 31, Rp	
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung						
Tanah	765,989	6,221	--	59,682	831,892	Land
Bangunan, Prasarana dan Renovasi	2,282,908	97,443	60	381,100	2,761,391	Building, Infrastructure and Renovations
Taman dan Interior	22,096	1,260	--	--	23,356	Parks and Interiors
Lapangan Golf dan Club House	180,553	529	--	--	181,082	Golf Course and Club House
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	67,066	5,278	122	16	72,238	Transportation Equipment and Vehicles
Peralatan dan Perabot Kantor	1,191,815	205,689	122	118,101	1,515,483	Furniture, Fixtures and Office Equipment
Perlengkapan dan Peralatan Medis	2,407,311	239,993	1,859	61,009	2,706,454	Tools and Medical Equipment
Mesin dan Peralatan Proyek	375,707	13,903	--	(111,319)	278,291	Machinery and Project Equipment
Mesin Bowling	14,571	--	--	--	14,571	Bowling Machinery
Arena Bermain	3,144	205	--	--	3,349	Playground Areas
Subjumlah	7,311,160	570,521	2,163	508,589	8,388,107	Subtotal
Sewa Pembiayaan						
Perlengkapan dan Peralatan Medis	193,920	24,069	--	18,786	236,775	Under Capital Lease
Aset dalam Penyelesaian						
Pemilikan Langsung	1,627,152	286,682	47	(663,418)	1,250,369	Construction in Progress
Sewa Pembiayaan	12,986	2,520	--	(14,054)	1,452	Direct Ownership
Jumlah Biaya Perolehan	9,145,218	883,792	2,210	(150,097)	9,876,703	Under Capital Lease
						Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						
Pemilikan Langsung						
Bangunan, Prasarana dan Renovasi	690,017	182,717	60	--	872,674	Accumulated Depreciation
Taman dan Interior	17,864	626	--	--	18,490	Direct Ownership
Lapangan Golf dan Club House	179,020	1,966	--	--	180,986	Building, Infrastructure and Renovations
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	51,271	3,821	151	--	54,941	Parks and Interiors
Peralatan dan Perabot Kantor	887,919	222,189	115	31,361	1,141,354	Golf Course and Club House
Perlengkapan dan Peralatan Medis	1,646,786	260,852	1,145	34,343	1,940,836	Transportation Equipment and Vehicles
Mesin dan Peralatan Proyek	204,886	18,668	--	(87,248)	136,306	Furniture, Fixtures and Office Equipment
Mesin Bowling	14,448	2	--	(3)	14,447	Tools and Medical Equipment
Arena Bermain	3,140	178	--	--	3,318	Machinery and Project Equipment
Subjumlah	3,695,351	691,019	1,471	(21,547)	4,363,352	Bowling Machinery
Sewa Pembiayaan						Playground Areas
Perlengkapan dan Peralatan Medis	51,956	33,282	357	1,412	86,293	Subtotal
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3,747,307	724,301	1,828	(20,135)	4,449,645	Under Capital Lease
Penurunan Nilai Aset Tetap	—	58,028	--	--	58,028	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	5,397,911				5,369,030	Impairment
						Carrying Value



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2018					
	1 Januari/ January 1, Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	31 Desember/ December 31, Rp	
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung						
Tanah	660,355	86,903	--	18,731	765,989	<i>Acquisition Cost Direct Ownership Land</i>
Bangunan, Prasarana dan Renovasi	1,729,890	296,806	538	256,750	2,282,908	<i>Building, Infrastructure and Renovations</i>
Taman dan Interior	18,684	3,412	--	--	22,096	<i>Parks and Interiors</i>
Lapangan Golf dan Club House	178,712	1,841	--	--	180,553	<i>Golf Course and Club House</i>
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	64,074	4,218	1,811	585	67,066	<i>Transportation Equipment and Vehicles</i>
Peralatan dan Perabot Kantor	1,142,739	133,807	110,380	25,649	1,191,815	<i>Furniture, Fixtures and Office Equipment</i>
Perlengkapan dan Peralatan Medis	2,205,000	198,006	39,958	44,263	2,407,311	<i>Tools and Medical Equipment</i>
Mesin dan Peralatan Proyek	362,191	137,451	130,478	6,543	375,707	<i>Machinery and Project Equipment</i>
Mesin Bowling	14,571	--	--	--	14,571	<i>Bowling Machinery</i>
Arena Bermain	3,144	--	--	--	3,144	<i>Playground Areas</i>
Subjumlah	6,379,360	862,444	283,165	352,521	7,311,160	<i>Subtotal</i>
Sewa Pembiayaan						<i>Under Capital Lease</i>
Perlengkapan dan Peralatan Medis	193,362	24,292	--	(23,734)	193,920	<i>Tools and Medical Equipment</i>
Aset dalam Penyelesaian						<i>Construction in Progress</i>
Pemilikan Langsung	582,332	1,201,083	--	(156,263)	1,627,152	<i>Direct Ownership</i>
Sewa Pembiayaan	34,394	16,603	--	(38,011)	12,986	<i>Under Capital Lease</i>
Jumlah Biaya Perolehan	7,189,448	2,104,422	283,165	134,513	9,145,218	<i>Total Acquisition Cost</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated Depreciation Direct Ownership</i>
Pemilikan Langsung						
Bangunan, Prasaranan dan Renovasi	549,440	141,091	514	--	690,017	<i>Building, Infrastructure and Renovations</i>
Taman dan Interior	14,639	3,225	--	--	17,864	<i>Parks and Interiors</i>
Lapangan Golf dan Club House	177,214	1,806	--	--	179,020	<i>Golf Course and Club House</i>
Alat-alat Pengangkutan dan Kendaraan	47,205	5,500	1,434	--	51,271	<i>Transportation Equipment and Vehicles</i>
Peralatan dan Perabot Kantor	855,482	133,425	100,988	--	887,919	<i>Furniture, Fixtures and Office Equipment</i>
Perlengkapan dan Peralatan Medis	1,439,374	246,951	39,366	(173)	1,646,786	<i>Tools and Medical Equipment</i>
Mesin dan Peralatan Proyek	212,064	41,313	48,491	--	204,886	<i>Machinery and Project Equipment</i>
Mesin Bowling	14,443	5	--	--	14,448	<i>Bowling Machinery</i>
Arena Bermain	3,138	2	--	--	3,140	<i>Playground Areas</i>
Subjumlah	3,312,999	573,318	190,793	(173)	3,695,351	<i>Subtotal</i>
Sewa Pembiayaan						<i>Under Capital Lease</i>
Perlengkapan dan Peralatan Medis	21,991	29,792	--	173	51,956	<i>Tools and Medical Equipment</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3,334,990	603,110	190,793	--	3,747,307	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Tercatat	3,854,458				5,397,911	<i>Carrying Value</i>

Pada tahun 2019, penambahan aset tetap yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp79.135 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp53.201 merupakan penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak (Catatan 1.c dan 52).

Pada tahun 2018, pengurangan aset tetap yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp85.457 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.499 merupakan pengurangan sehubungan dengan dekonsolidasi entitas anak (Catatan 1.c dan 52).

Aset dalam penyelesaian merupakan bangunan rumah sakit, gedung dan mesin dan peralatan projek. Pada tanggal 31 Desember 2019, aset dalam penyelesaian telah mencapai 20% - 98% dan proyeksi penyelesaian berkisar antara tahun 2020 hingga 2022. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat hal yang mengakibatkan penyelesaiannya tidak dapat dicapai.

Jumlah pengeluaran kas atas aset tetap dalam penyelesaian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp239.109 dan Rp673.906.

In 2019, additional of property and equipment consist of acquisition cost amounted to Rp79,135 and accumulated depreciation amounted to Rp53,201 representing additional in relation with acquisition of a subsidiary (Notes 1.c and 52).

In 2018, disposal of property and equipment consist of acquisition cost amounted to Rp85,457 and accumulated depreciation amounted to Rp3,499 representing deduction in relation with deconsolidation of a subsidiary (Notes 1.c and 52).

Construction in progress represents hospitals, building and machinery and project equipment. As of December 31, 2019, construction in progress has reached 20% - 98% and estimated the completion within 2020 until 2022. Management believes that there is no other matter which will hinder the completion.

Total cash expenditures of property and equipment construction in progress for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp239,109 and Rp673,906, respectively.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 40)	272,751	257,570	Cost of Revenues (Note 40)
Beban Penjualan (Catatan 41)	34,870	39,773	Selling Expenses (Note 41)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 41)	363,479	305,044	General and Administrative Expenses (Note 41)
Jumlah	671,100	602,387	Total

Rincian pelepasan aset tetap Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan	2,210	197,708	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	1,471	187,294	Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat Neto	739	10,414	Net Carrying Value
Harga Jual	333	11,590	Selling Price
Laba (Rugi) Pelepasan Aset Tetap (Catatan 43)	(406)	1,176	Gain (Loss) on Disposal on Property and Equipment (Note 43)

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp69.036 dan Rp66.589.

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset tetap.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Depreciation charges that were allocated in the consolidated of profit or loss are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 40)	272,751	257,570	Cost of Revenues (Note 40)
Beban Penjualan (Catatan 41)	34,870	39,773	Selling Expenses (Note 41)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 41)	363,479	305,044	General and Administrative Expenses (Note 41)
Jumlah	671,100	602,387	Total

Details of the disposal on property and equipment of the Group for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Acquisition cost of property and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp69,036 and Rp66,589, respectively.

There is no borrowing cost capitalized into property and equipment.

The Group's management is in the opinion that there is no impairment in the carrying value of property and equipment as of December 31, 2019.

14. Goodwill

14. Goodwill

	2019				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31 Rp	
Biaya Perolehan Goodwill	622,888	82,614	-	705,502	Acquisition Cost Goodwill
Akumulasi Penurunan Nilai Penurunan Nilai Goodwill	38,909	--	--	38,909	Accumulated Impairment Impairment of Goodwill
Nilai Tercatat	583,979			666,593	Carrying Value
	2018				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31 Rp	
Biaya Perolehan Goodwill	622,888	--	--	622,888	Acquisition Cost Goodwill
Akumulasi Penurunan Nilai Penurunan Nilai Goodwill	38,909	--	--	38,909	Accumulated Impairment Impairment of Goodwill
Nilai Tercatat	583,979			583,979	Carrying Value



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Rincian nilai tercatat *goodwill* adalah sebagai berikut:

The details of goodwill are as follows:

Entitas Pengakuisisi/ Acquirer Entity	Perolehan Saham pada/ Share Acquisition in	Tahun Perolehan/ Year of Acquisition	Nilai Neto/Net Value	
			31 Desember/ December 31, 2019 Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
PT Mandiri Cipta Gemilang	PT Gunung Halimun Eloq	2019	77,078	--
PT Mahkota Buana Selaras	PT Grha Ultima Medika	2017	61,937	61,937
PT Mahkota Buana Selaras	PT Sumber Bahagia Sentosa	2017	25,431	25,431
PT Tunggal Pilar Perkasa	PT Lishar Sentosa Pratama	2017	22,518	22,518
PT Tunggal Pilar Perkasa	PT Rashal Siar Cakra Medika	2014	101,777	101,777
PT Manunggal Bumi Sejahtera	PT Asiatic Sejahtera Finance	2014	64,794	64,794
PT Koridor Usaha Maju	PT Medika Sarana Triliansia	2013	132,007	132,007
PT Persada Mandiri Dunia Niaga	PT Ekaputra Kencana Abadi	2012	15,050	15,050
PT Prawira Tata Semesta	PT Balikpapan Damai Husada	2011	27,481	27,481
PT Siloam International Hospitals	PT Prawira Tata Semesta	2011	14,146	14,146
PT Graha Jaya Pratama	PT Nuansa Indah Lestari	2004	38,110	38,110
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000) / Others (each below Rp10,000)			86,264	80,728
Jumlah - Neto/ Net			666,593	583,979

Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang telah dilakukan, manajemen berpendapat penyisihan penurunan nilai *goodwill* tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on the impairment tests, the management believes that the impairment on goodwill is adequate to cover the possibility of impairment in value that incurred as of December 31, 2019 and 2018.

15. Aset Takberwujud

Rincian nilai tercatat aset takberwujud adalah sebagai berikut:

15. Intangible Assets

Details of carrying value of intangible assets are as follows:

	2019				<i>Acquisition Cost Direct Ownership Software</i>
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31 Rp	
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung					
Perangkat Lunak	222,097	33,841	22,514	233,424	<i>Under Capital lease Software</i>
Sewa Pembiayaan					
Perangkat Lunak	894	--	--	894	<i>Total Acquisition Cost</i>
Jumlah Biaya Perolehan	222,991	33,841	22,514	234,318	<i>Accumulated Amortization Direct Ownership Software</i>
Akumulasi Amortisasi Kepemilikan Langsung					<i>Under Capital lease Software</i>
Perangkat Lunak	99,118	49,504	8,693	139,929	<i>Carrying Value</i>
Sewa Pembiayaan					
Perangkat Lunak	228	88	--	316	
Amortisasi Perangkat Lunak	99,346	49,592	8,693	140,245	
Nilai Tercatat	123,645			94,073	

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2018				
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung					Acquisition Cost Direct Ownership
Perangkat Lunak	152,038	70,059	--	222,097	Software
Sewa Pembiayaan					Under Capital lease
Perangkat Lunak	894	--	--	894	Software
Jumlah Biaya Perolehan	152,932	70,059	--	222,991	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Kepemilikan Langsung					Direct Ownership
Perangkat Lunak	53,989	45,129	--	99,118	Software
Sewa Pembiayaan					Under Capital lease
Perangkat Lunak	228	--	--	228	Software
Amortisasi Perangkat Lunak	54,217	45,129	--	99,346	Amortization of Software
Nilai Tercatat	98,715			123,645	Carrying Value

Beban amortisasi atas perangkat lunak untuk tahun berjalan dicatat sebagai beban amortisasi pada beban lain-lain.

Manajemen berpendapat bahwa identifikasi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah dilakukan melalui penelaahan yang memadai.

Amortization expenses of software for the current year was recorded as amortization expenses in other expenses.

The management believes that the identification of impairment as of December 31, 2019 and 2018 have been assessed adequately.

16. Uang Muka

16. Advances

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Lancar:			Current:
Pembelian Tanah	--	608,263	Land Acquisition
Tidak Lancar:			Non-Current:
Pembelian Aset Tetap	839,194	1,057,679	Acquisition of Property and Equipment
Konstruksi	124,343	261,298	Construction
Pembelian Tanah - Pihak Ketiga	99,181	219,135	Land Acquisition - Third Parties
Lain-lain	92,350	128,024	Others
Subjumlah	1,155,068	1,666,136	Subtotal
Jumlah	1,155,068	2,274,399	Total

Berdasarkan perjanjian tanggal 8 Januari 2018 yang telah diubah pada tanggal 8 Januari 2019, PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, telah menandatangani kesepakatan dengan PT Metropolis Propertindo Utama (MPU), pihak ketiga, untuk tujuan pengadaan sejumlah tanah sesuai kebutuhan LC untuk pengembangan dan pembangunan proyek real estat yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, jumlah dana yang sudah disetorkan ke MPU adalah sebesar Rp608.263. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, dalam hal MPU tidak dapat memperoleh tanah sesuai kriteria LC sampai dengan tanggal 8 Januari 2020, maka MPU wajib menyediakan dan menyerahkan tanah MPU sendiri dan/ atau entitas anaknya yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau mengembalikan dana

Based on agreement dated January 8, 2018 that amended on January 8, 2019, PT Lippo Cikarang Tbk (LC), a subsidiary, entered into an agreement with PT Metropolis Propertindo Utama (MPU), a third party, to supply several lands according to LC's needs for development and construction real estate project located at Cikarang, Bekasi, West Java. Until December 31, 2018, total fund payment has been done to MPU amounted to Rp608,263. In accordance with the agreement, if the MPU can not find the land that meet the LC's criterias until January 8, 2020, the MPU must provide and give the MPU's owned land and/ or its subsidiary that meet the criterias dicided or give back the fund to LC. The repayment of fund as describe above, will be settled in the short-term period and charged no interest. On October 1, 2019, the sale and purchase



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

tersebut kepada LC. Pengembalian dana sebagaimana disebut di atas, dilakukan dalam waktu jangka pendek dan tidak dikenakan bunga. Pada tanggal 1 Oktober 2019, telah dilakukan perikatan perjanjian jual beli untuk realisasi uang muka pembelian tanah ini.

Sampai dengan 31 Desember 2019, LC melakukan beberapa perjanjian jual beli tanah terutama berlokasi di Desa Cibatu dan Hegarmukti dengan nilai pembayaran uang muka yang telah dilakukan adalah sebesar Rp84.220. Pada tahun 2019, uang muka tanah sebesar Rp44.728 telah dilakukan perikatan jual beli.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 uang muka pembelian aset tetap terutama terdiri atas uang muka pembelian peralatan medis, tanah dan bangunan untuk Rumah Sakit Siloam masing-masing sebesar Rp809.918 dan Rp866.758.

Uang muka konstruksi merupakan uang muka yang dibayarkan kepada kontraktor untuk pembangunan dan renovasi properti rumah sakit serta proyek apartemen Orange County.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

agreement was signed to realize the down payment for purchase of this land.

Until December 31, 2019, LC entered several sales and purchase agreement of the land mainly in Cibatu and Hegarmukti village with advance payment made amounted to Rp84,220. On 2019, advance for land amounted to Rp44,728 have been entered to sales and purchase agreements.

As of December 31, 2019 and 2018, advances for acquisition of property and equipment mainly represent advances for purchase of medical equipment, land and building for Siloam Hospitals amounted to Rp809,918 and Rp866,758, respectively.

Advance for construction mainly represents advance payment to contractors for the construction and renovation of hospital properties and Orange County apartment.

17. Tanah untuk Pengembangan

17. Land for Development

	2019		2018	
	Luas/ Area m ² / Sqm	Nilai/ Value Rp	Luas/ Area m ² / Sqm	Nilai/ Value Rp
Perusahaan/ the Company	1,421,937	289,885	1,421,937	289,398
Entitas Anak/ Subsidiaries :				
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	2,039,459	390,408	2,042,673	405,743
PT Lippo Cikarang Tbk	528,243	225,997	771,243	286,819
PT Muliäsentosa Dinamika	803,413	112,456	803,413	112,456
PT Erabaru Realindo	596,821	18,935	596,821	18,935
PT Surya Makmur Alam Persada	36,775	7,253	36,775	6,340
PT Bahtera Pratama Wirasakti	14,618	2,265	14,618	1,940
Jumlah/ Total	5,441,266	1,047,199	5,687,480	1,121,631

Tanah untuk pengembangan seluas 146.558 m² milik PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, entitas anak, dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 22).

Tanah untuk pengembangan milik Grup, berlokasi di Desa Curug Wetan, Curug Kulon, Sukabakti di Kecamatan Curug; Desa Serdang Wetan, Rancagong di Kecamatan Legok; Desa Ciakar, Serdang Kulon, Cukang Galih, Kabupaten Tangerang, Banten; Desa Cipambuan di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Sukaresmi, Cibatu, Cicau, Sukamukti, Sinarjati, Jayamukti, Pasirsari di Kecamatan Lemahabang, Karawang, Provinsi Jawa Barat; Desa Tanjung

Land for development with an area of 146,558 sqm owned by PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, a subsidiary, were pledged as collateral for loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 22).

Land for development of the Group are located at Curug Wetan Village, Curug Kulon, Sukabakti in Curug District; Serdang Wetan Village, Rancagong in Legok District; Ciakar Village, Serdang Kulon, Cukang Galih, Tangerang Regency, Banten; Cipambuan Village in Citeureup District, Bogor Regency, West Java; Sukaresmi, Cibatu, Cicau, Sukamukti, Sinarjati, Jayamukti, Pasirsari in Lemahabang District, Karawang, West Java Province; Tanjung Merdeka Village,

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Merdeka, Barombong, Maccini Sombala,
Tamanyeleng, Mariso, Benteng Somba Opu di
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Tanah-tanah tersebut telah memperoleh izin
lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi
setempat.

18. Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya

	2019 Rp	2018 Rp	
Sewa	207,954	211,221	Rental
Piutang Lainnya Jangka Panjang	114,957	--	Long-term Other Receivables
Jaminan	22,548	52,682	Deposits
Lain-lain	16,842	17,984	Others
Jumlah	362,301	281,887	Total

Sewa dibayar di muka merupakan sewa
bangunan rumah sakit Siloam Bogor kepada
PT Girimulia Perkasa Jaya, pihak ketiga,
selama 16 tahun (Catatan 46.b).

Piutang lainnya jangka panjang merupakan
piutang dari PT Bangun Karya Semesta (BKS)
dan PT Tunas Bedah Sinar (TBS). Piutang dari
BKS sejumlah Rp109.957 memiliki jangka
waktu 10 tahun sampai tahun 2029 dan bunga
7% per tahun.

Piutang dari TBS sejumlah Rp5.000 memiliki
jangka waktu 2 tahun sampai tahun 2021 dan
tidak dikenakan bunga. Saham PT Gamma
Knife Center Indonesia (GKCI), entitas anak,
yang dimiliki oleh TBS dijaminkan atas piutang
ini dengan nilai per lembar saham yang
dijaminkan sebesar USD5,882.

19. Utang Usaha

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 9)	73,533	68,016	Related Parties (Note 9)
Pihak Ketiga			Third Parties
Pemasok	786,400	660,667	Suppliers
Kontraktor	181,915	509,381	Contractors
Jasa Dokter	161,655	135,361	Doctor Fees
Subjumlah - Pihak Ketiga	1,129,970	1,305,409	Subtotal - Third Parties
Jumlah	1,203,503	1,373,425	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup
atas perolehan utang ini.

Utang usaha didenominasi dalam mata uang
Rupiah dan mata uang asing. Utang usaha
dalam mata uang asing disajikan pada Catatan
48.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Barombong, Maccini Sombala, Tamanyeleng,
Mariso, Benteng Somba Opu in Makassar,
South Sulawesi.

Site development permits of each land have
been obtained from their respective local
governors.

18. Other Non-Current Non-Financial Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Sewa	207,954	211,221	Rental
Piutang Lainnya Jangka Panjang	114,957	--	Long-term Other Receivables
Jaminan	22,548	52,682	Deposits
Lain-lain	16,842	17,984	Others
Jumlah	362,301	281,887	Total

Prepaid rental of Siloam Bogor hospital building
to PT Girimulia Perkasa Jaya, third party, for
period of 16 years (Note 46.b).

Long-term other receivables consist of
receivables from PT Bangun Karya Semesta
(BKS) dan PT Tunas Bedah Sinar (TBS).
Receivable from BKS amounted to Rp109,957
has a term of 10 years until 2029 and interest
7% per annum.

Receivable from TBS amounted to Rp5,000 has
a term of 2 years until 2021 and non-interest
bearing. Shares of PT Gamma Knife Center
Indonesia (GKCI), a subsidiary, owned by TBS
are pledged as collateral for these receivables
with value per share of the pledged shares of
USD5,882.

19. Trade Accounts Payable

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 9)	73,533	68,016	Related Parties (Note 9)
Pihak Ketiga			Third Parties
Pemasok	786,400	660,667	Suppliers
Kontraktor	181,915	509,381	Contractors
Jasa Dokter	161,655	135,361	Doctor Fees
Subjumlah - Pihak Ketiga	1,129,970	1,305,409	Subtotal - Third Parties
Jumlah	1,203,503	1,373,425	Total

There is no collateral given by the Group on
these payables.

Trade accounts payable denominated in Rupiah
and foreign currencies. Trade accounts payable
denominated in foreign currencies are
presented in Note 48.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

20. Perpajakan

a. **Beban Pajak**

Beban Pajak Final

Jumlah beban pajak final untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp143.075 dan Rp177.780.

Rincian beban pajak final Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pendapatan Sewa - 10%	20,859	19,044	<i>Rental Income - 10%</i>
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan - 2,5% dan 5%	19,480	3,700	<i>Transfer Land and Building Right - 2.5% and 5%</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Pendapatan Sewa - 10%	55,051	30,849	<i>Rental Income - 10%</i>
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan - 2,5% dan 5%	47,685	124,187	<i>Transfer Land and Building Right - 2.5% and 5%</i>
Jumlah Beban Pajak Final	143,075	177,780	Total Final Income Tax

Beban Pajak Kini dan Tangguhan

Current Tax and Deferred Tax

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Pajak Kini/ Current Tax Expenses	1,273	404,061	<i>Perusahaan/ the Company</i>
Koreksi Periode Lalu/ Previous Period Correction	--	(5,511)	<i>Entitas Anak/ Subsidiaries</i>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Expenses (Benefits)	2,974	(6,544)	<i>Konsolidasian/ Consolidated</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan/ Total Income Tax	4,247	392,006	Perusahaan/ the Company
			Entitas Anak/ Subsidiaries
			Konsolidasian/ Consolidated
			2018
			Perusahaan/ the Company
			Entitas Anak/ Subsidiaries
			Konsolidasian/ Consolidated
			Rp

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan taksiran laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit (loss) before tax as presented in the consolidated statements of profit or loss and the Company's estimated fiscal income is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(1,665,165)	2,060,165	<i>Profit (Loss) before Tax as Presented in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi: Laba Entitas Anak, Asosiasi dan Ventura Bersama sebelum Pajak	(57,795)	(4,100,519)	<i>Deduct: Income of Subsidiaries, Associates and Joint Venture before Tax</i>
Rugi Komersial Perusahaan	(1,722,960)	(2,040,354)	<i>Commercial Loss of the Company</i>
Perbedaan Waktu			<i>Temporary Differences</i>
Penyusutan Aset Tetap Pemilikan Langsung	(7,567)	(5,902)	<i>Depreciation of Direct Ownership of Property and Equipment</i>
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	(7,303)	(7,303)	<i>Deferred Gain on Sale and Leaseback Transactions</i>
Subjumlah	(14,870)	(13,205)	<i>Subtotal</i>
Perbedaan Tetap			<i>Permanent Differences</i>
Pendapatan dan beban yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	1,800,818	2,061,307	<i>Revenue and Expenses Subjected to Final Tax</i>
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	(57,898)	(2,904)	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Sumbangan dan Jamuan	1,277	321	<i>Donation and Representation</i>
Subjumlah	1,744,197	2,058,724	<i>Subtotal</i>
Taksiran Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	6,367	5,165	<i>Estimated Taxable Income for Current Year</i>
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	1,273	1,291	<i>Estimated Current Tax - the Company</i>

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2018 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Perhitungan beban Pajak kini akan dijadikan basis dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2019 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Perhitungan taksiran pajak kini dan utang pajak Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	1,273	1,291	<i>Estimated Current Tax - the Company</i>
Kredit Pajak	(842)	(789)	<i>Tax Credit</i>
Taksiran Utang Pajak Kini - Perusahaan	431	502	<i>Estimated Current Tax Payable - Company</i>
Taksiran Laba Kena Pajak Entitas Anak	2,604,915	1,807,648	<i>Estimated Income Tax - Subsidiaries</i>
Beban Pajak Kini	404,061	390,609	<i>Current Tax Expenses - Non Final</i>
Kredit Pajak	(312,352)	(250,391)	<i>Tax Credit</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang - Tahun Berjalan	90,888	140,218	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 28.A - Tahun Berjalan	(4,052)	--	<i>Current Period</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Sebelumnya	29,455	--	<i>Prepaid Income Tax Article 28.A -</i>
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	120,343	140,218	<i>Current Period</i>
Entitas Anak	120,343	140,218	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	120,774	140,720	<i>Subsidiaries</i>
Konsolidasian	120,774	140,720	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 28.A	(4,052)	--	<i>Consolidated</i>
Entitas Anak	(4,052)	--	<i>Prepaid Income Tax Article 28.A -</i>
			<i>Subsidiaries</i>

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dengan hasil perkalian laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian <i>Dikurangi:</i> Laba Entitas Anak, Asosiasi dan Ventura Bersama sebelum Pajak	(1,665,165)	2,060,165	<i>Profit (Loss) before Tax as Presented in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
	(57,795)	(4,100,519)	<i>Deduct: Income of Subsidiaries, Associates and Joint Venture before Tax</i>
Rugi Komersial Perusahaan Sebelum Pajak - Neto	(1,722,960)	(2,040,354)	<i>Loss before Company's Income Tax - Net</i>
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif efektif Pendapatan dan Beban yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(344,592)	(510,088)	<i>Income Tax Expense at Effective Tax Rate</i>
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	360,164	515,327	<i>Revenue and expenses Subjected to Final Tax</i>
Sumbangan dan Jamuan	(11,580)	(726)	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Koreksi Pajak Tahun-tahun Sebelumnya	255	80	<i>Donation and Representation</i>
Jumlah Beban Pajak Perusahaan	--	949	<i>Previous Years Tax Correction</i>
	4,247	5,542	<i>Total Tax Expense of the Company</i>
Beban Pajak Entitas Anak	(6,544)	1,052	<i>Tax Expense of the Subsidiaries</i>
Pajak Tangguhan	398,550	390,886	<i>Deferred Tax</i>
Pajak Kini dan Koreksi Periode Lalu	392,006	391,938	<i>Current Tax and Previous Period Correction</i>
Jumlah Beban Pajak Entitas Anak	396,253	397,480	<i>Total Subsidiaries Tax Expenses</i>
Jumlah	396,253	397,480	<i>Total</i>

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The Company has reported its Annual Tax Return (SPT) 2018 to the tax office.

Calculation of estimated current tax will become the basis on reported its Annual Tax Return (SPT) 2019 to the tax office.

Calculation of estimated current tax and tax payable of the Company and subsidiaries is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	1,273	1,291	<i>Estimated Current Tax - the Company</i>
Kredit Pajak	(842)	(789)	<i>Tax Credit</i>
Taksiran Utang Pajak Kini - Perusahaan	431	502	<i>Estimated Current Tax Payable - Company</i>
Taksiran Laba Kena Pajak Entitas Anak	2,604,915	1,807,648	<i>Estimated Income Tax - Subsidiaries</i>
Beban Pajak Kini	404,061	390,609	<i>Current Tax Expenses - Non Final</i>
Kredit Pajak	(312,352)	(250,391)	<i>Tax Credit</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang - Tahun Berjalan	90,888	140,218	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 28.A - Tahun Berjalan	(4,052)	--	<i>Current Period</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Sebelumnya	29,455	--	<i>Prepaid Income Tax Article 28.A -</i>
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	120,343	140,218	<i>Current Period</i>
Entitas Anak	120,343	140,218	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	120,774	140,720	<i>Subsidiaries</i>
Konsolidasian	120,774	140,720	<i>Income Tax Payable Article 29 -</i>
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 28.A	(4,052)	--	<i>Consolidated</i>
Entitas Anak	(4,052)	--	<i>Prepaid Income Tax Article 28.A -</i>
			<i>Subsidiaries</i>

The reconciliation between the Company's tax expense and the multiplication of the consolidated profit before income tax with the prevailing tax rate is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian <i>Dikurangi:</i> Laba Entitas Anak, Asosiasi dan Ventura Bersama sebelum Pajak	(1,665,165)	2,060,165	<i>Profit (Loss) before Tax as Presented in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
	(57,795)	(4,100,519)	<i>Deduct: Income of Subsidiaries, Associates and Joint Venture before Tax</i>
Rugi Komersial Perusahaan Sebelum Pajak - Neto	(1,722,960)	(2,040,354)	<i>Loss before Company's Income Tax - Net</i>
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif efektif Pendapatan dan Beban yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(344,592)	(510,088)	<i>Income Tax Expense at Effective Tax Rate</i>
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	360,164	515,327	<i>Revenue and expenses Subjected to Final Tax</i>
Sumbangan dan Jamuan	(11,580)	(726)	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Koreksi Pajak Tahun-tahun Sebelumnya	255	80	<i>Donation and Representation</i>
Jumlah Beban Pajak Perusahaan	--	949	<i>Previous Years Tax Correction</i>
	4,247	5,542	<i>Total Tax Expense of the Company</i>
Beban Pajak Entitas Anak	(6,544)	1,052	<i>Tax Expense of the Subsidiaries</i>
Pajak Tangguhan	398,550	390,886	<i>Deferred Tax</i>
Pajak Kini dan Koreksi Periode Lalu	392,006	391,938	<i>Current Tax and Previous Period Correction</i>
Jumlah Beban Pajak Entitas Anak	396,253	397,480	<i>Total Subsidiaries Tax Expenses</i>
Jumlah	396,253	397,480	<i>Total</i>



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

b. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan
Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax Asset and Liabilities
Details of the Group's deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi Konsolidasian/ Charged (Credited) to Consolidated Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Reklasifikasi/ Reclassification	Entitas Aksuisision Acquired Entity	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(26,347.00)
Perusahaan							
Amortisasi Laba Ditangguhan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik							
Transaksi Jual dan Sewa Balik	5,372	(1,461)	--	--	--	3,911	The Company Amortization of Deferred Gain on Sale and Leaseback Transactions
Penyisihan Penurunan Nilai	3,198	--	--	--	--	3,198	Allowance for Impairment in Value
Penyusutan	(15,899)	(1,513)	--	--	--	(17,412)	Depreciation
	(7,329)	(2,974)	--	--	--	(10,303)	
Entitas Anak	(55,721)	(398)	293	--	(3,663)	(59,489)	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan	(63,050)	(3,372)	293	--	(3,663)	(69,792)	Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak							Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan	66,774	6,942	6,346	--	27,209	107,271	Deferred Tax Assets
	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi Konsolidasian/ Charged (Credited) to Consolidated Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Reklasifikasi/ Reclassification	Entitas Aksuisision Acquired Entity	31 Desember/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Perusahaan							
Amortisasi Laba Ditangguhan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik							
Transaksi Jual dan Sewa Balik	7,198	(1,826)	--	--	--	5,372	The Company Amortization of Deferred Gain on Sale and Leaseback Transactions
Penyisihan Penurunan Nilai	3,198	--	--	--	--	3,198	Allowance for Impairment in Value
Penyusutan	(14,423)	(1,476)	--	--	--	(15,899)	Depreciation
	(4,027)	(3,302)	--	--	--	(7,329)	
Entitas Anak	(46,704)	(5,308)	528	(4,237)	--	(55,721)	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan	(50,731)	(8,610)	528	(4,237)	--	(63,050)	Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak							Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan	56,297	4,256	1,984	4,237	--	66,774	Deferred Tax Assets

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui laba kena pajak di masa mendatang.

Management believes that the deferred tax assets can be recovered through taxable profits in the future.

c. Pajak Dibayar di Muka

c. Prepaid Taxes

	2019		
	Perusahaan/ the Company	Entitas Anak/ Subsidiaries	Konsolidasi/ Consolidated
	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan/ Income Tax			
Pasal/ Article 4 (2)		29,632	331,610
Pasal/ Article 28.A		--	4,052
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax		--	325,463
Jumlah/ Total	29,632	631,493	661,125
	2018		
	Perusahaan/ the Company	Entitas Anak/ Subsidiaries	Konsolidasi/ Consolidated
	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan/ Income Tax			
Pasal/ Article 4 (2)		33,026	344,017
Pasal/ Article 21		--	404
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax		2,431	178,241
Jumlah/ Total	35,457	487,205	522,662

Pajak Penghasilan/ Income Tax
Pasal/ Article 4 (2)
Pasal/ Article 21
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax

Jumlah/ Total

Pajak Penghasilan/ Income Tax
Pasal/ Article 4 (2)
Pasal/ Article 21
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax

Jumlah/ Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

d. Utang Pajak

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

d. Taxes Payable

Pajak Penghasilan/ Income Tax	2019	2018
Pasal/ Article 4 (2)	13,556	45,049
Pasal/ Article 21	--	7,741
Pasal/ Article 22	--	--
Pasal/ Article 23	535	101
Pasal/ Article 25	104	47
Pasal/ Article 26	--	9,261
Pasal/ Article 29	431	502
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	100	--
Pajak Hotel dan Restoran/ Hotel and Restaurant Tax	1,478	2,165
Jumlah/ Total	16,204	64,895
	268,350	266,286
	284,554	331,181

Pajak Penghasilan/ Income Tax	2019	2018
Pasal/ Article 4 (2)	13,556	45,049
Pasal/ Article 21	--	7,741
Pasal/ Article 22	--	--
Pasal/ Article 23	535	101
Pasal/ Article 25	104	47
Pasal/ Article 26	--	9,261
Pasal/ Article 29	431	502
Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Tax	100	--
Pajak Hotel dan Restoran/ Hotel and Restaurant Tax	1,478	2,165
Pajak Hiburan/ Entertainment Tax	--	29
Jumlah/ Total	16,204	64,895
	268,350	266,286
	284,554	331,181

e. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PERPU) No 1 tahun 2020, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta sebesar 20% untuk tahun pajak berikutnya.

e. Administration

Fiscal laws in Indonesia requires that each company calculate, determine and pay the amount of tax payable individually.

Based on Laws and Regulation (PERPU) No. 1 tahun 2020, there change in the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and 2021 and by 20% for the next fiscal year.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

21. Beban Akrual

21. Accrued Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Taksiran Biaya untuk Pembangunan	645,733	704,043	<i>Estimated Cost for Construction</i>
Beban Pokok Pendapatan	226,882	121,973	<i>Cost of Goods Sold</i>
Denda	213,203	--	<i>Penalty</i>
Bunga	153,658	168,782	<i>Interest</i>
<i>Endowment Care Funds</i>	127,373	115,071	<i>Endowment Care Funds</i>
<i>Contract Service</i>	80,335	76,593	<i>Contract Service</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	280,707	158,627	<i>Others (below Rp50,000 each)</i>
Jumlah	1,727,891	1,345,089	Total

Taksiran biaya untuk pembangunan merupakan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengembangan tanah dan pembangunan rumah hunian dan apartemen yang sudah terjual.

Estimated cost for construction represents estimated cost to complete the land development and the construction of residential houses and apartments which have been sold.

Beban akrual denda merupakan biaya yang masih harus dibayar atas keterlambatan serah terima unit apartemen.

Accrued penalty represents accrued for late handover of apartment units.

Beban akrual beban pokok pendapatan merupakan biaya yang masih harus dibayar atas beban pokok pendapatan rumah sakit yang belum diterbitkan tagihan. Akun ini akan direklasifikasi ke akun yang sesuai setelah faktur diterbitkan.

Accrued cost of goods sold represents accrued on unbilled hospitals cost of goods sold. This account will be reclassified to the appropriate account after the invoice is issued.

22. Utang Bank Jangka Pendek

22. Short-Term Bank Loans

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank ICBC Indonesia	400,000	70,000	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100,000	270,000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70,000	70,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	67,700	--	<i>PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	15,474	--	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Pinjaman Sindikasi UBS AG dan Deutsche Bank	--	724,050	<i>Syndicated Loans UBS AG and Deutsche Bank</i>
PT Bank Mega Tbk	--	250,000	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
Jumlah	653,174	1,384,050	Total

PT Bank ICBC Indonesia

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir kali diubah dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 143/ICBC-MK/PTD/X/2011/P9 tanggal 25 Oktober 2019, Perusahaan, memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp385.000 (PTD A). Fasilitas ini dikenakan bunga mengambang sebesar 11% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober

PT Bank ICBC Indonesia

The Company

Based on Credit Agreement No 85 dated October 25, 2010 which was made in the presence of Mellyani Noor Shandra, S.H., a Notary in Jakarta and last amended in Extention Credit Agreement No.143/ICBC-MK/PTD/X/2011/P9 dated October 25, 2019, the Company obtained Credit Facility with maximum credit limit amounted to Rp385,000 (PTD A). This facility bears floating interest of 11% per annum and will mature on October 25, 2020. This Loan is secured by a land with

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

2020. Pinjaman dijamin dengan tanah seluas
94.500 m² (SHGB 2014/Sukaresmi) dan seluas
2.500 m² (SHGB 2012/Sukaresmi) (Catatan 6).

Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis terhadap hal-hal berikut:

- Membagikan dividen kepada pemegang saham;
- Perubahan pemegang saham pengendali;
- Perubahan negatif atas usaha yang mengakibatkan ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi pembayaran kepada bank;
- Menjual dan/ atau mentransfer dan/ atau melepaskan dan/atau menyewakan bagian dari asetnya yang merupakan transaksi material dengan nilai minimal 20% dari ekuitas Perusahaan;
- Memberikan pinjaman atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga, dengan nilai minimal 20% dari ekuitas Perusahaan;
- Menjadi Penjamin utang pihak lain serta menjaminkan aset Perusahaan dengan nilai minimal 20% dari ekuitas Perusahaan; dan
- Melakukan merger/konsolidasi/ akuisisi atau investasi atau transaksi lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan pembayaran.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang disyaratkan.

Bunga dan biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam akun persediaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp38.385 (Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo terutang fasilitas ini masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp70.000.

PT Lippo Cikarang Tbk (LC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diperbarui beberapa kali dan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui perpanjangan perjanjian kredit Nomor: 144/ICBC-MK/PTD/X/2011/P9, LC, entitas anak, memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap on Demand dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar maksimum Rp215.000 (PTD A) dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan akan jatuh tempo

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

an area of 94,500 sqm (SHGB 2014/Sukaresmi)
and 2,500 sqm (SHGB 2012/Sukaresmi) (Note 6).

The Company shall notify in writing the following matters:

- *Distribution of dividend to the shareholders;*
- *Change of controlling shareholder;*
- *Negative changes of businesses resulting in the Company's inability to meet payments to the bank;*
- *Sell and/or transfer and/or dispose and/or lease part of its assets, which is a material transaction with a minimum value of 20% of the Company's equity;*
- *Give loans or lend the money to the third parties, with a minimum value of 20% of the Company's equity;*
- *Become a Guarantor of the other party's and secured the Company's assets with a minimum value of 20% of the Company's equity; and*
- *Conducting mergers/ consolidations/ acquisitions or investments or other transactions resulting in inadequate repayments.*

As of December 31, 2019 and 2018 the Company has complied with the covenants as required.

Interest and borrowing costs capitalized to inventory for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounting to nil and Rp38,385, respectively (Note 6).

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance for this facility amounted to Rp200,000 and Rp70,000, respectively.

PT Lippo Cikarang Tbk (LC)

Based on Deed of Loan Agreement No. 86 dated October 20, 2010 which was made in the presence of Mellyani Noor Shandra, S.H., a Notary in Jakarta, and has been amended several times and the latest amended on October 25, 2019 through the extension of credit agreement No: 144/ICBC-MK/PTD/X/2011/P9, LC, a subsidiary, obtained Fixed Loan facility on Demand from PT Bank ICBC Indonesia with maximum credit limit amounted to Rp215,000 (PTD A) and bears an interest of 11% per annum and will due on October 25, 2020.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

pada tanggal 25 Oktober 2020. Pinjaman
dijamin dengan sebidang tanah seluas 38.901
m² dengan HGB No. 178/Sukaresmi terdaftar
atas nama PT Waska Sentana, entitas anak
(Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018 saldo terutang fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp200.000 dan nihil.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan

- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34
tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat
di hadapan H. Zamri, S.H., Notaris
di Jakarta dan terakhir kali diubah dalam
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
No. (15) 34 tanggal 05 November 2019,
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit
Modal Kerja (KMK) dengan jumlah
maksimum sebesar Rp250.000. Fasilitas
pinjaman ini dikenakan bunga sebesar
11,5% per tahun dan jatuh tempo pada
tanggal 12 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp100.000 dan Rp250.000.

- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 44
tanggal 29 Maret 2007 yang dibuat
di hadapan H. Zamri, S.H., Notaris
di Jakarta dan terakhir kali diubah dalam
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
No. (14) 44 tanggal 5 November 2019,
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit
Modal Kerja (KMK) dengan jumlah
maksimum sebesar Rp20.000. Fasilitas
pinjaman ini dikenakan bunga sebesar
11,5% per tahun dan jatuh tempo pada
tanggal 12 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
saldo terutang fasilitas ini masing-masing
sebesar nihil dan Rp20.000.

Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam
akun persediaan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
masing-masing sebesar nihil dan Rp33.329
(Catatan 6).

Pada tanggal 29 Mei 2019 kedua fasilitas
pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan
memperoleh pencairan atas fasilitas pertama
sebesar Rp100.000.

***PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)***

*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

*This loan is secured by land with an area of
38,901 sqm, with the Building Rights (HGB)
No. 178/Sukaresmi registered under the name
of PT Waska Sentana, a subsidiary (Note 6).*

*As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balance for this facility amounted to
Rp200,000 and nil, respectively.*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
The Company

- *Based on Credit Agreement No. 34 dated
October 30, 2006 which was made in the
presence of H. Zamri, S.H., a Notary in
Jakarta and last amended in Approval of
Changes in Credit Agreement No. (15)
34 dated November 05, 2019, the Company
obtained Working Capital Facility (KMK) with
maximum loan amounted to Rp250,000. This
facility bears an interest of 11.5% per annum
and has maturity date on June 12, 2020.*

*As of December 31, 2019 and 2018,
the outstanding balances for this facility
amounted to Rp100,000 and Rp250,000,
respectively.*

- *Based on Credit Agreement No. 44 dated
March 29, 2007 which was made in
the presence of H. Zamri, S.H., a Notary in
Jakarta and last amended in Approval of
Changes in Credit Agreement No. (14) 44
dated November 5, 2019, the Company
obtained Working Capital Facility (KMK) with
maximum loan amounted to Rp20,000.
This facility bears an interest of 11.5% per
annum and has maturity date on
June 12, 2020.*

*As of December 31, 2019 and 2018,
the outstanding balances for this facility
amounting to nil and Rp20,000, respectively.*

*Interest expenses capitalized to inventory for the
years ended December 31, 2019 and 2018
amounted to nil and Rp33,329, respectively
(Note 6).*

*On May 29, 2019, these loan facilities have
been fully paid.*

*On December 26, 2019, the Company received
a drawdown of the first facility amounted to
Rp100,000.*

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
(GMTD)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 23 April 2015 yang telah diadendum pada tanggal 18 Januari 2019, GMTD, entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 10,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada 21 Januari 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah untuk pengembangan milik GMTD seluas 146.558 m², terdiri dari 114.828 m² di Desa Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan 31.730 m² di Desa Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Catatan 17).

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, GMTD tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Melakukan perubahan anggaran dasar terkait permodalan dan pemegang saham.
- Membagikan dividen lebih dari 30% dari keuntungan neto setelah pajak.
- Memindah tanggalkan agunan kredit aset kecuali atas rumah hunian dan tanah yang diperjualbelikan secara wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, GMTD telah memenuhi pembatasan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp70.000.

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, SIH, entitas anak, memperoleh fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 10,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 8 Oktober 2020. Pinjaman dijamin dengan piutang usaha SILO yang dimiliki dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp240.000 (Catatan 4).

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo terutang fasilitas ini masing sebesar Rp67.700.

***PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)***

*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
(GMTD)**

Based on Credit Agreement No. 5, dated April 23 2015, which was amended on January 18, 2019, GMTD, a subsidiary, obtained Working Capital Loan (KMK) facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the maximum credit limit of Rp200,000. This facility bears interest rate of 10.75% per annum and will mature on January 21, 2021.

The facility is secured by a land for development of GMTD with an area of 146,558 sqm, which consists of 114,828 sqm located at Sub-District Barombong, District Tamalate, Makassar, and 31,730 sqm located in Sub-District Tanjung Merdeka, District Tamalate, Makassar (Note 17).

During the period of loan facility, without the written consent from the lender, GMTD does not allow for, among others:

- Change the articles of association related to capital and shareholders.
- Distribute dividend more than 30% of net profit after tax.
- Transfer of mortgaged assets except for residential houses and land which are traded fairly.

As of December 31, 2019 and 2018, GMTD has complied with the covenants as required.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance for this facility amounted to Rp70,000, respectively.

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

Based on Deed of Credit Agreement No. 56 dated October 8, 2019 made in the presence of Hannywati Gunawati, S.H., a Notary in Jakarta, SIH, a subsidiary, obtained Working Capital Loan Facility on Demand From PT KEB Hana Indonesia with credit limit amounted Rp200,000 and bears an interest of 10.5% per annum and will mature on October 8, 2020. This loan is secured by SILO trade receivables with the highest value Rp240,000 (Note 4).

As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to Rp67,700.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT Bank Central Asia Tbk

PT Golden First Atlanta (GFA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat di hadapan Yandes Effriady, S.H., Notaris di Jambi dan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 0242/JAM/2010 tanggal 3 Februari 2010, Perubahan PK No. 54 tanggal 19 Juli 2010 dihadapan Notaris Hasan S.H., Notaris di Jambi, yang terakhir diperbarui dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 0107-ADD-2019 tanggal 5 September 2019, GFA, entitas anak, memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.

Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik GFA seluas 7.132 m² di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, (Catatan 13).

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp15.474 dan nihil.

Pinjaman Sindikasi UBS AG dan Deutsche Bank

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman yang diatur oleh Deutsche Bank AG Cabang Singapura dan UBS AG Cabang Singapura berupa:

- Kredit Modal Kerja sebesar maksimum USD50,000,000, dengan suku bunga Libor+5,25%. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2018 dengan perpanjangan maksimal dua kali.
- Kredit Berjangka sebesar maksimum USD65,000,000, dengan suku bunga Libor+5,25%. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo terutang fasilitas kredit modal kerja ini sebesar USD50,000,000 (setara dengan Rp724.050).

Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam akun persediaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp25.339 (Catatan 6).

Pada tanggal 29 Maret 2019, fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya.

***PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)***
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018*
*(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

PT Bank Central Asia Tbk

PT Golden First Atlanta (GFA)

Based on Deed of Credit Agreement No. 1 dated April 1, 2003 made in the presence of Yandes Effriady, S.H., a Notary in Jambi, and the Notification Letter of Credit No. 0242/JAM/2010 dated February 3, 2010, as amended by Credit Agreement No. 54 dated July 19, 2010 in the presence of Hasan S. H., a Notary in Jambi and the latest by Change of Credit Agreement No. 0107-ADD-2019 dated September 5, 2019, GFA, a subsidiary, obtained Local Credit Facility (Current Account) at the maximum credit limit of Rp20,000.

The facility is secured by property and equipment of GFA with an area of 7,132 sqm located at Sub-District Paal Merah, District Jambi Selatan, Jambi (Note 13).

This facility bear an annual interest rate of 10.25% per annum and will mature on November 5, 2020.

As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to Rp15,474 and nil, respectively.

Syndicated Loans UBS AG and Deutsche Bank

The Company

Based on Credit Agreement dated July 18, 2016, the company obtained credit facilities arranged by Deutsche Bank AG Singapore Branch and UBS AG Singapore Branch as follows:

- *Working Capital Facility with the maximum credit limit of USD50,000,000, bears an interest at Libor+5.25%. This facility will due on September 26, 2018 with a maximum two times of extension.*
- *Term Credit Facility with maximum credit limit of USD65,000,000, bears an interest at Libor+5.25%. This facility will due on April 30, 2019.*

As of December 31, 2018, the outstanding balance of this working capital facility was USD50,000,000 (equivalent to Rp724,050).

Interest expenses capitalized to inventory for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to nil and Rp25,339, respectively (Note 6).

On March 29, 2019, the facilities have been fully paid.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT Bank Mega Tbk**Perusahaan**

Berdasarkan perjanjian kredit No. 44 tanggal 7 Desember 2016 yang telah diadendum pada tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 39, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah maksimum sebesar Rp800.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga mengambang sebesar 14% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Desember 2019.

Pada tanggal 18 Juni 2019 fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya.

Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam akun persediaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp106.108 (Catatan 6).

23. Liabilitas Keuangan**a. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			
Pengembalian Uang Muka Pelanggan	265,404	--	
Utang Kepada Pemegang Saham Nonpengendali pada Entitas Anak	155,200	153,605	
Utang Kepada Entitas yang Telah Dilepas Pengendaliannya	97,523	272,508	
Utang Titipan	68,398	101,241	
Utang atas Pembelian Saham Entitas Anak	37,200	18,120	
Kontraktor	24,052	31,525	
Utang Alih Hak	8,035	23,755	
Utang Lain-lain	369	36,109	
Jumlah	656,181	636,863	

Utang kepada entitas yang telah dilepas pengendaliannya merupakan utang non-usaha yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo.

Utang titipan merupakan penerimaan pembayaran atas tagihan yang belum diterbitkan oleh Grup.

Utang alih hak merupakan penerimaan pembayaran atas pengurusan sertifikat yang belum diterbitkan oleh Grup.

Utang atas pembelian saham entitas anak merupakan utang atas akuisisi rumah sakit PT Lishar Sentosa Pratama (LSP), PT Sumber Bahagia Sentosa (SBS) dan PT Anugrah Sentra Medika (ASM) kepada pemegang saham lama.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

PT Bank Mega Tbk**The Company**

Based on Credit Agreement No. 44 dated December 7, 2016 which was amended on December 17, 2018 based on the Credit Agreement No. 39, the Company obtained Working Capital Facility (KMK) with maximum credit limit of Rp800,000. This facility bears floating interest of 14% per annum. This loan due on December 7, 2019.

On June 18, 2019, the facility has been fully paid.

Interest expenses capitalized to inventory for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to nil and Rp106,108, respectively (Note 6).

23. Financial Liabilities**a. Other Current Financial Liabilities**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			
Pengembalian Uang Muka Pelanggan	265,404	--	
Utang Kepada Pemegang Saham Nonpengendali pada Entitas Anak	155,200	153,605	
Utang Kepada Entitas yang Telah Dilepas Pengendaliannya	97,523	272,508	
Utang Titipan	68,398	101,241	
Utang atas Pembelian Saham Entitas Anak	37,200	18,120	
Kontraktor	24,052	31,525	
Utang Alih Hak	8,035	23,755	
Utang Lain-lain	369	36,109	
Jumlah	656,181	636,863	

Payable to non-controlling entities represents non-interest bearing other payables and without maturity date.

Unidentified payments represent receipt of collection have not yet identifiable by the Group.

Transfer of tittles payables represent receipt of certificate collection have not yet identifiable by the Group.

Payable on purchasing of shares of subsidiaries represent acquisition hospitals of PT Lishar Sentosa Pratama (LSP), PT Sumber Bahagia Sentosa (SBS) and PT Anugrah Sentra Medika (ASM) to the previous shareholders.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

b. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Jaminan pelanggan merupakan penerimaan jaminan pembayaran atas sewa bangunan dan pemeliharaan lingkungan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 saldo jaminan pelanggan masing-masing sebesar Rp266.482 dan Rp281.254.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

b. Other Non-Current Financial Liabilities

Customer guarantee represent received deposit payment of rental building and environmental maintenance.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of customer guarantee amounting to Rp266,482 and Rp281,254, respectively.

24. Utang Bank Jangka Panjang

24. Long-Term Bank Loans

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank ICBC Indonesia	91,540	130,765	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia	83,162	83,742	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	67,892	109,660	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	22,581	38,627	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank CIMB Niaga	--	134,750	PT Bank CIMB Niaga
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	--	1,493	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Jumlah	<u>265,175</u>	<u>499,037</u>	Total
Bagian Jangka Pendek	<u>(94,259)</u>	<u>(111,162)</u>	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	<u>170,916</u>	<u>387,875</u>	Non-current portion

PT Bank ICBC Indonesia

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 23 Desember 2016 dan No. 1 tanggal 4 Juli 2017, ASF, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp100.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2021 dan 15 September 2022. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha ASF (Catatan 4) dengan rincian:

- Piutang dari pembiayaan harus dalam kondisi lancar dengan *coverage ratio* 125%.
- Apabila piutang yang dijaminkan mengalami penurunan kualitas, maka harus segera digantikan dengan piutang yang bersifat lancar. Kualitas piutang sebaiknya diuji setiap triwulan.

Atas pinjaman ini, ASF harus menjaga rasio keuangan *Total Debt to Equity* maksimum 8 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ASF telah memenuhi rasio-rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

PT Bank ICBC Indonesia

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Based on Credit Agreement Deeds No. 42 dated December 23, 2016 and No. 1 dated July 4, 2017, ASF, a subsidiary, obtained credit facility with maximum limit amounted to Rp100,000 and Rp100,000, respectively. These facilities bear interest of 12% per annum and will due on December 27, 2021 and September 15, 2022, respectively. These facilities are secured by ASF's trade accounts receivable (Note 4) with the following details:

- Receivables from financing have to be in current condition with a coverage ratio of 125%.
- If the receivables pledged decrease in quality, it should be replaced with the current immediately. The quality of receivables should be tested in quarterly basis.

For these facilities, ASF should maintain financial ratio of *Total Debt to Equity* maximum 8 times.

As of December 31, 2019 and 2018 ASF has complied with the financial ratios and covenants as required.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar Rp91.540 dan Rp130.765.

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56
tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat
di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris
di Jakarta, SIH, entitas anak, memperoleh
fasilitas Pinjaman Investasi dari PT Bank KEB
Hana Indonesia sebesar Rp50.000 dengan
suku bungan 11% per tahun dan akan jatuh
tempo pada 8 Oktober 2023. Pinjaman dijamin
dengan peralatan medis milik SIH dengan nilai
setinggi-tingginya Rp60.000 (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo
terutang fasilitas ini masing sebesar Rp17.385.

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 28
tanggal 10 Nopember 2017, ASF, entitas anak,
memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja
sebesar maksimum Rp100.000, dengan suku
bunga 11,5% per tahun untuk Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) yang sisa jatuh temponya
kurang dari 5 (lima) tahun. Pinjaman ini
digunakan sebagai pembiayaan KPR properti
di Grup, kecuali proyek Monaco Bay dan
Embarcadero. Pinjaman ini akan jatuh tempo
pada tanggal 27 Desember 2022.

Atas pinjaman ini ASF, harus menjaga rasio
keuangan berdasarkan laporan keuangan yang
diaudit sebagai berikut:

- Piutang dari pembiayaan harus dalam
kondisi lancar dengan *coverage ratio* 125%.
- *Gearing ratio* maksimum 6 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018, ASF telah memenuhi
ratio-ratio dan pembatasan yang disyaratkan.

Piutang usaha milik ASF masing-masing
sebesar Rp82.665 dan Rp109.986 pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dijadikan
jaminan atas fasilitas kredit ini (Catatan 4).

Pembayaran pinjaman untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018 masing-masing sebesar Rp17.965 dan
Rp15.762.

***PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)***
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

*As of December 31, 2019 and 2018, the
outstanding balance of these facilities
amounting to Rp91,540 and Rp130,765,
respectively.*

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

*Based on Deed of Credit Agreement No. 56
dated October 8, 2019 made in the presence of
Hannywati Gunawah, S.H., a Notary in Jakarta,
SIH, a subsidiary, obtained Investment Loan
Facility from PT KEB Hana Indonesia with
credit limit amounted Rp50,000 and bears
an interest of 11% per annum and will mature
on October 8, 2023. This loan is secured by list
of the Company's medical equipment with
the highest value Rp60,000 (Note 13).*

*As of December 31, 2019, the outstanding
balance of this facility amounted to Rp17,385.*

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

*Based on Notarial Deed of Credit No. 28 dated
November 10, 2017, ASF, a subsidiary,
obtained a Working Capital Credit facility with
a maximum limit of Rp100,000, bears an
interest rate of 11.5% per annum for the
purpose of financing of Mortage Agreement
(KPR) which will mature not more than 5 (five)
years. This facility is used to funding of KPR
Group's property, except Monaco Bay and
Embarcadero projects. This loan will mature on
December 27, 2022.*

*For this facility, ASF is required to maintain
financial ratios based on audited financial
statements as follows:*

- *Receivables from financing have to be in
current condition with a coverage ratio of
125%.*
- *Gearing Ratio at a maximum 6 times.*

*As of December 31, 2019 and 2018, ASF has
complied with the financial ratios and
covenants as required.*

*Trade accounts receivable of ASF amounted to
Rp82,665 and Rp109,986 as of December 31,
2019 and 2018 are pledged as collateral for
this facility (Note 4).*

*The payment of this loan for the years ended
December 31, 2019 and 2018 amounted to
Rp17,965 and Rp15,762, respectively.*



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo terutang atas fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp65.777 dan Rp83.742.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 28 Oktober 2015, ASF, entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar maksimum Rp240.000 dengan suku bunga 12,75% per tahun untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sisa jatuh temponya kurang dari 5 (lima) tahun dan 13% per tahun untuk pembiayaan KPR yang jatuh temponya antara 5-15 tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai pembiayaan KPR properti di Grup. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2023.

Atas pinjaman ini ASF harus menjaga rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit sebagai berikut:

- Piutang dari pembiayaan harus dalam kondisi lancar dengan *coverage ratio* 125%.
- *Gearing ratio* maksimum 9 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, ASF telah memenuhi rasio-rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Piutang usaha milik ASF masing-masing sebesar Rp90.059 dan Rp157.053 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dijadikan jaminan atas fasilitas kredit ini (Catatan 4).

Pembayaran pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp41.768 dan Rp50.765.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 saldo terutang atas fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp67.892 dan Rp109.660.

PT Bank Ganesha Tbk

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 92 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, ASF, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk *fixed loan executing (FL Exe)* sebesar maksimum Rp45.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan konsumen. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo 30 Januari 2023.

***PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)***
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018*
*(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to Rp65,777 and Rp83,742, respectively.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Based on Credit Agreement Deed No. 21 dated October 28, 2015, ASF, a subsidiary, obtained a Term Installment Credit facility with a maximum credit limit of Rp240,000 with an interest rate of 12.75% per annum for the purpose of financing of Mortage Agreement (KPR) which will mature not more than 5 (five) years and 13% per annum for financing of KPR that will due between 5-15 years. This facility was used to funding of KPR Group's property. This loan will mature on April 18, 2023.

For this facility, ASF is required to maintain financial ratios based on audited financial statements as follows:

- *Receivables from financing have to be in current condition with a coverage ratio of 125%.*
- *Gearing Ratio at a maximum 9 times.*

As of December 31, 2019 and 2018, ASF has complied with the financial ratios and covenants as required.

Trade accounts receivable of ASF amounted to Rp90,059 and Rp157,053 as of December 31, 2019 and 2018 are pledged as collateral for this facility (Note 4).

The payment of this loan for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp41,768 and Rp50,765, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp67,892 and Rp109,660, respectively.

PT Bank Ganesha Tbk

PT Asiatic Sejahtera Finance (ASF)

Based on credit agreement No. 92, dated January 29, 2018, which was made in presence of Mellyani Noor Shandra, S.H., a Notary in Jakarta, ASF, a subsidiary, obtained fixed loan executing (FL Exe) facility (on liquidation basis) with the maximum credit limit of Rp45,000 which used for consumer financing. This facility bear an interest of 12% per annum and will due on January 30, 2023.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pinjaman ini dijamin dengan piutang ASF dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya 120% dari plafond atau Rp27.440 (Catatan 4).

Pembayaran pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.046 dan Rp6.373.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo terutang atas fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp22.581 dan Rp38.627.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Pamor Paramita Utama (PPU)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diperbarui dengan Akta No. 18 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, PPU, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus (*on liquidation basis*).

Pinjaman Transaksi Khusus B (PTK *Tranche B*) dengan kredit maksimum sebesar Rp150.000 digunakan untuk pembiayaan pembangunan hotel bintang 5 (lima) di Kuta - Bali. Jangka waktu fasilitas kredit selama 7 tahun atau 84 bulan dengan suku bunga 11,5% per tahun. *Tranche B* yang telah digunakan PPU sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp150.000.

Pembayaran fasilitas pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp134.750 dan Rp13.750.

Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam akun persediaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp16.820 (Catatan 6).

Saldo terutang fasilitas *Tranche B* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp134.750.

**Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara**

PT Balikpapan Damai Indah (BDH)

Berdasarkan perjanjian kredit No.005/870/9200/KI.59/BPDKP/2008 tanggal 25 Februari 2008, BDH, entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi (Non PRK) sebesar maksimum Rp50.000, dengan suku bunga 11,5% per

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

This facility is secured by ASF receivables with collateral at least 120% from plafond or Rp27,440 (Note 4).

The payment of this loan for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp16,046 and Rp6,373, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to Rp22,581 and Rp38,627, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Pamor Paramita Utama (PPU)

Based on credit agreement No. 23, dated August 18, 2015 and has amended with agreement No. 18 dated May 31, 2017, which was made in presence of Unita Christina Winata, S.H., a Notary in Jakarta, PPU, a subsidiary, obtained special transaction loan facilities (on liquidation basis).

Special Transaction B facility (PTK Tranche B) with maximum credit limit of Rp150,000 used for funding the construction of 5 stars Hotel in Kuta – Bali. The maturity of this credit facility is 7 years or 84 months, with an interest rate of 11.5% per annum. Tranche B facility has been used by PPU until December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp150,000, respectively.

The payment of this facility for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp134,750 and Rp13,750, respectively.

Interest expenses capitalized to inventory for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to nil and Rp16,820, respectively (Note 6).

As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of the Tranche B facility amounted to nil and Rp134,750, respectively.

**Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara**

PT Balikpapan Damai Indah (BDH)

Based on Deed of Credit Agreement No.005/870/9200/KI.59/BPDKP/2008 dated February 25, 2008, BDH, a subsidiary, obtained an Investment Credit facility (Non-PRK) with a maximum amount of Rp50,000,



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai tambahan dana investasi untuk membiayai pembangunan rumah sakit dan melunasi pinjaman sebelumnya yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2019 dan telah dilunasi seluruhnya.

Pembayaran pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.493 dan Rp8.392.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp1.493.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

bears an interest rate of 11.5% per annum. This loan was used to fund development of hospitals and pay its loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. This loan is due on February 25, 2019 and have been fully paid

Payments of the principal amount of the loan for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp1,493 and Rp8,392, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp1,493, respectively.

25. Utang Sewa Pembiayaan

25. Finance Lease Obligations

	2019	2018	
	Rp	Rp	
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	126,998	141,993	PT Century Tokyo Leasing Indonesia
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	23,907	34,597	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
Jumlah	150,905	176,590	Total

Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments based on lease agreement are as follows:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
2019	--	68,264	2019
2020	75,238	68,081	2020
2021	61,804	54,682	2021
2022	23,208	16,052	2022
2023	11,962	4,806	2023
2024	4,130	--	2024
Jumlah	176,342	211,885	Total
<i>Dikurangi : Bagian Bunga</i>	<i>(25,437)</i>	<i>(35,295)</i>	<i>Less: Interest Portion</i>
Utang Sewa Pembiayaan - Neto	150,905	176,590	Obligations under Finance Leases - Net
Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	61,156	45,186	Obligations under Finance Leases - Current Maturities
Utang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	89,749	131,404	Obligations under Finance Leases - Net of Current Maturities

Rincian Fasilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The details of finance lease facilities are as follows:

a. **PT Century Tokyo Leasing Indonesia (CTL)**

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, SIH, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan dari CTLI untuk pembiayaan

a. **PT Century Tokyo Leasing Indonesia (CTL)**

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

For the years ended December 31, 2019 and 2018, SIH, a subsidiary, obtained finance lease facilities from CTLI for purchase of medical equipment with

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

peralatan medis dengan periode pembayaran selama 60 bulan dan dikenakan tingkat bunga efektif masing-masing sebesar 10,20% - 12,65%.

Saldo terutang atas fasilitas ini pada pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp126.998 dan Rp141.993.

b. PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MUFG)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 31 Desember 2019 dan 2018, SIH, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan dari MUFG untuk pembiayaan peralatan medis dengan periode pembayaran selama 60 bulan dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun.

Saldo terutang atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp23.907 dan Rp34.597.

26. Pinjaman Anjak Piutang

	2019 Rp	2018 Rp
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20,665	--
PT Bank KEB Hana Indonesia	--	74,000
Jumlah	20,665	74,000

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Siloam International Hospital Tbk (SIH)

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Piutang No. 009/PKS/CIMBN-VC/2019 tanggal 8 Mei 2019, SIH, entitas anak memperoleh fasilitas pembiayaan anjak piutang (Factoring with Recourse) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas fasilitas sebesar Rp100.000. Jangka waktu fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan dengan biaya pembiayaan 9% per tahun.

Pada 31 Desember 2019, saldo terutang fasilitas ini sebesar Rp20.665 yang dijamin dengan piutang usaha (Catatan 4).

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospital Tbk (SIH)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.62 tanggal 19 Oktober 2018, SIH, entitas anak, memperoleh fasilitas

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

repayment period of 60 months and bear an effective annual interest of 10.20% - 12.65%, respectively.

The outstanding balance of this facility as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp126,998 and Rp141,993, respectively.

b. PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MUFG)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH)

For the years ended December 31, 2019 and 2018, SIH, a subsidiary, obtained finance lease facilities from MUFG for purchasing of medical equipment with repayment period of 60 months and bear interest of 11.25% per annum.

The outstanding balance of this facility as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp23,907 and Rp34,597, respectively.

26. Factoring Loan

PT Bank CIMB Niaga Tbk	PT Bank KEB Hana Indonesia	Total
------------------------	----------------------------	--------------

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Siloam International Hospital Tbk (SIH)

Based on Deed of Receivable Transfer Agreement No No. 009/PKS/CIMBN-VC/2019 on May 8, 2019, SIH, a subsidiary obtained factoring facilities (Factoring with Recourse) from PT Bank CIMB Niaga Tbk with facility limit amounting to Rp100,000. The period of the facility is 12 (twelve) months with an annual factoring cost of 9% per annum.

As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to Rp20,665 guaranteed by trade receivables (Note 4).

PT Bank KEB Hana Indonesia

PT Siloam International Hospital Tbk (SIH)

Based on Deed of Receivable Transfer Agreement No.62 on October 19, 2018, SIH, a subsidiary, obtained factoring facilities



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

pembiayaan anjak piutang (*Factoring with Recourse*) dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan batas fasilitas sebesar Rp100.000. Jangka waktu fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan dengan biaya pembiayaan 9,5%-10% per tahun.

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, nilai fasilitas ini masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp74.000 (Catatan 4).

Pada tanggal 9 Oktober 2019, fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

(*Factoring with Recourse*) from PT Bank KEB Hana Indonesia with facility limit amounting to Rp100,000. The period of this facility is 12 (twelve) months with an annual factoring cost of 9.5%-10%.

As of December 31, 2019 and 2018, the amount of this facility are nil and Rp74,000 respectively (Note 4).

On October 9, 2019, the facility has been fully paid.

27. Utang Obligasi

27. Bonds Payable

	2019 Rp	2018 Rp	
Nominal (2019: USD826,330,000 dan 2018: USD910,000,000)	11,486,812	13,177,710	Face Value (2019: USD826,330,000 and 2018: USD910,000,000)
Premium - Neto	92,354	129,952	Premium - Net
Biaya Emisi Obligasi - Neto	(417,617)	(570,016)	Bond Issuance Cost - Net
Jumlah	11,161,549	12,737,646	Total
Premium (Neto Setelah Dikurangi Diskonto) <i>Dikurangi:</i> Akumulasi Amortisasi	273,398	288,642	Premium (Net of Discount) Less: Accumulated Amortization
Premium Obligasi Belum Diamortisasi	92,354	129,952	Unamortized Premium
Biaya Emisi Obligasi <i>Dikurangi:</i> Akumulasi Amortisasi	1,012,790	1,044,927	Bond Issuance Cost Less: Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	417,617	570,016	Unamortized Bond Issuance Cost

Grup melakukan beberapa pendanaan dengan utang obligasi untuk mendukung bisnis Grup.

Pada tanggal 11 April 2014, Theta Capital (TC), entitas anak, menerbitkan obligasi (*unsecured bond*) dengan nilai nominal sebesar USD150,000,000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dan terdaftar pada Bursa Efek Singapura. Pada tanggal 27 Maret 2019, dilakukan pelunasan sebagian, sehingga nilai nominal obligasi ini menjadi USD149,300,000. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Beban bunga yang masih harus dibayar masing-masing sebesar USD2,293,414 dan USD2,304,167 (setara dengan Rp31.881 dan Rp33.366) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pada tanggal 19 Maret 2020, utang obligasi ini telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 10 Agustus 2016, TC, entitas anak, menerbitkan obligasi (*unsecured bond*) dengan nilai nominal sebesar USD260,000,000

The Group's initiated several fund raising by issuing bonds to support the Group's business.

On April 11, 2014, Theta Capital (TC), a subsidiary, issued unsecured bonds with a face value of USD150,000,000 with a fixed annual interest rate of 7% and are listed on Singapore Stock Exchange. On March 27, 2019 the bond was partially paid, thus the face value of this bond is amounted to USD149,300,000. The bonds will mature on April 11, 2022 and payment of interest is conducted every 6 months. As of December 31, 2019 and 2018, accrued interest expenses amounted to USD2,293,414 and USD2,304,167 (equivalent to Rp31,881 and Rp33,366) as of December 31, 2019 and 2018, respectively. On March 19, 2020, the bond payable has been fully paid.

On August 10, 2016, TC, a subsidiary, issued unsecured bonds with a face value of USD260,000,000 with a fixed interest rate of

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dan terdaftar pada Bursa Efek Singapura. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Beban bunga yang masih harus dibayar masing-masing sebesar USD3,993,889 (setara dengan Rp55.519 dan Rp57.836) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pada tanggal 24 Februari 2020, dilakukan pelunasan seluruhnya.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, TC, entitas anak, menerbitkan obligasi (*unsecured bond*) dengan nilai nominal sebesar USD425,000,000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan terdaftar pada Bursa Efek Singapura. Pada tanggal 27 Maret 2019 dilakukan pelunasan sebagian, sehingga nilai obligasi ini menjadi USD417,030,000. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2026 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Beban bunga yang masih harus dibayar masing-masing USD4,691,588 dan USD4,781,250 (setara dengan Rp65.218 dan Rp69.237) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 5 Juni 2018, TC, entitas anak, menerbitkan obligasi (*unsecured bond*) dengan nilai nominal sebesar USD75,000,000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% per tahun dan terdaftar pada Bursa Efek Singapura. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2020 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Beban bunga yang masih harus dibayar masing-masing sebesar USD501,302 (setara dengan Rp7.259) pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 5 Agustus 2019, TC telah melakukan pembayaran lebih awal seluruh saldo obligasi ini.

Bunga dan biaya pinjaman ini dikapitalisasi ke dalam akun persediaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp583.924 (Catatan 6).

Obligasi ini telah memperoleh peringkat B- dari Standard & Poor's, B- dari Fitch dan peringkat B3 dari Moody's.

Trustee atas seluruh obligasi ini adalah Deutsche Bank (Hong Kong) Limited.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu atas seluruh obligasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Offering Circular*.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

7% per annum and are listed on Singapore Stock Exchange. These bonds will mature on April 11, 2022 and payment of interest is conducted every 6 months. As of December 31, 2019 and 2018, accrued interest expenses amounted to USD3,993,889 (equivalent to Rp55,519 and Rp57,836), as of December 31, 2019 and 2018, respectively. On February 24, 2020, the bond payable has been fully paid.

On October 31, 2016, TC, a subsidiary, issued unsecured bonds with a face value of USD425,000,000 with a fixed interest rate of 6.75% per annum and are listed on the Singapore Stock Exchange. On March 27, 2019, the bond was partially paid, thus the face value of this bond is amounted to USD417,030,000. These bonds will mature on October 31, 2026 and payment of interest is conducted every 6 months. As of December 31, 2019 and 2018, accrued interest expenses amounted to USD4,691,588 and USD4,781,250 (equivalent to Rp65,218 and Rp69,237), respectively.

On June 5, 2018, TC, a subsidiary, issued unsecured bonds with a face value of USD75,000,000 with a fixed interest rate of 9.625% per annum and are listed on Singapore Stock Exchange. These bonds will mature on June 5, 2020 and payment of interest is conducted every 6 months. As of December 31, 2018, accrued interest expenses amounted to USD501,302 (equivalent to Rp7,259). On August 5, 2019, TC has made early repayment the whole balance of this bond.

Borrowing costs capitalized into land under development for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounting to nil and Rp583,924, respectively (Note 6).

These bonds have been rated B- by Standard & Poor's, B- by Fitch and B3 by Moody's.

Trustee of these bonds is Deutsche Bank (Hong Kong) Limited.

The Company has complied for all series of bonds certain restrictions under bond covenants as stipulated in the Offering Circular.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian fasilitas *Non-Deliverable USD Call Spread Option* dengan beberapa pihak ketiga sebagai lindung nilai atas valuta asing obligasi (Catatan 46.d).

28. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Imbalan Pascakerja-Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan

Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Manajemen telah melakukan pencadangan liabilitas imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutup liabilitas yang dimaksud.

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	Present Value of Defined Benefits Obligation, end of Year
Nilai Kini			
Kewajiban Imbalan Pasti, Akhir Tahun	370,952	345,699	
Nilai Wajar Aset Program	--	--	
Jumlah	370,952	345,699	Total

Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	44,897	41,767	Current Services Cost
Biaya Bunga	12,202	11,703	Interest Expenses
Jumlah	57,099	53,470	Total

Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	345,699	371,640	Beginning Balance
Penyesuaian Liabilitas (Aset)	2,104	(2,671)	Liabilities (Assets) Adjustment
Pembayaran Imbalan Kerja	(78,008)	(78,755)	Payment of employees' Benefits
Penghasilan Komprehensif Lain	44,058	2,015	Other Comprehensive Income
Biaya Jasa Kini dan Bunga	57,099	53,470	Current service cost and interest Expenses
Saldo Akhir	370,952	345,699	Ending Balance

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)**

The Company entered into Non-Deliverable USD Call Spread Option facility agreements with certain third parties to hedge foreign exchange fluctuation risk on these foreign currency denominated bonds (Note 46.d).

28. Post-employment Benefits Liabilities

Post-Employment Benefits – No Funding Defined Benefit Plan

Group appointed independent actuary to determine post-employment liability in accordance with the existing manpower regulations. The management has provided reserve on post-employment benefits liability as of December 31, 2019 and 2018. The management believes that the estimate of post-employment benefits is sufficient to cover such liabilities.

Post-employment benefits recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

The details of post-employment benefits expense recognized in the consolidated profit or loss are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	44,897	41,767	Current Services Cost
Biaya Bunga	12,202	11,703	Interest Expenses
Jumlah	57,099	53,470	Total

Post-employment benefits expense is recorded as part of salaries and employees' benefits expense.

Reconciliation of changes in liabilities recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	345,699	371,640	Beginning Balance
Penyesuaian Liabilitas (Aset)	2,104	(2,671)	Liabilities (Assets) Adjustment
Pembayaran Imbalan Kerja	(78,008)	(78,755)	Payment of employees' Benefits
Penghasilan Komprehensif Lain	44,058	2,015	Other Comprehensive Income
Biaya Jasa Kini dan Bunga	57,099	53,470	Current service cost and interest Expenses
Saldo Akhir	370,952	345,699	Ending Balance

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban,			<i>Present Value of Defined Benefits Obligation</i>
Awal Tahun	345,699	371,640	<i>at Beginning Year</i>
Penyesuaian Liabilitas (Aset)	2,104	(2,671)	<i>Liabilities (Assets) Adjustment</i>
Biaya Jasa Kini	44,897	41,767	<i>Current Services Cost</i>
Biaya Bunga	12,202	11,703	<i>Interest Expenses</i>
Pembayaran Imbalan Kerja	<u>(78,008)</u>	<u>(78,755)</u>	<i>Payment of employees' benefits</i>
Nilai Kini Kewajiban Yang Diharapkan			<i>Expected Present Value of Defined Benefits Obligation at End of Year</i>
Akhir Tahun	326,894	343,684	
Nilai Kini Kewajiban Aktual			<i>Actual Present Value of Defined Benefits Obligation at End of Year</i>
Akhir Tahun	<u>370,952</u>	<u>345,699</u>	
Kerugian Aktuarial Tahun Berjalan	<u>(44,058)</u>	<u>(2,015)</u>	<i>Actuarial Loss Current Year</i>

Mutasi dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(62,968)	(60,953)	<i>Beginning Balance</i>
Kerugian Komprehensif Lain			<i>Other Comprehensive Loss</i>
Tahun Berjalan	<u>(44,058)</u>	<u>(2,015)</u>	<i>Current Year</i>
Saldo Akhir	<u>(107,026)</u>	<u>(62,968)</u>	<i>Ending Balance</i>

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Reconciliation of changes in present value of defined benefits obligation is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban,			<i>Present Value of Defined Benefits Obligation at Beginning Year</i>
Awal Tahun	345,699	371,640	<i>Liabilities (Assets) Adjustment</i>
Penyesuaian Liabilitas (Aset)	2,104	(2,671)	<i>Current Services Cost</i>
Biaya Jasa Kini	44,897	41,767	<i>Interest Expenses</i>
Biaya Bunga	12,202	11,703	<i>Payment of employees' benefits</i>
Pembayaran Imbalan Kerja	<u>(78,008)</u>	<u>(78,755)</u>	
Nilai Kini Kewajiban Yang Diharapkan			<i>Expected Present Value of Defined Benefits Obligation at End of Year</i>
Akhir Tahun	326,894	343,684	
Nilai Kini Kewajiban Aktual			<i>Actual Present Value of Defined Benefits Obligation at End of Year</i>
Akhir Tahun	<u>370,952</u>	<u>345,699</u>	
Kerugian Aktuarial Tahun Berjalan	<u>(44,058)</u>	<u>(2,015)</u>	<i>Actuarial Loss Current Year</i>

Movement of consolidated of other comprehensive income is as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(62,968)	(60,953)	<i>Beginning Balance</i>
Kerugian Komprehensif Lain			<i>Other Comprehensive Loss</i>
Tahun Berjalan	<u>(44,058)</u>	<u>(2,015)</u>	<i>Current Year</i>
Saldo Akhir	<u>(107,026)</u>	<u>(62,968)</u>	<i>Ending Balance</i>

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits plan gives the Group exposure of interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, oleh karenanya, penurunan suku bunga obligasi pemerintah meningkatkan liabilitas program.

Interest Risk

The present value of the defined benefits plan liability is calculated using the interest of government bond, therefore, the decreasing in the government bond interest rate will increase defined benefits plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji di masa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk

The present value of the defined benefits plan is calculated using the assumption of future salaries increase, therefore, the increasing of salary percentage will increase defined benefits plan liability.

Analisis Sensitivitas

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, akan berakibat pada penurunan beban imbalan pascakerja sebesar Rp4.615 dan menurunkan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp41.854.

Sensitivity analysis

Increasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2019, will impact to the decrease of post-employment benefits expenses amounted to Rp4,615 and the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp41,854.



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, akan berakibat pada peningkatan beban imbalan pascakerja sebesar Rp5.467 dan meningkatkan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp37.600.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2019, beban imbalan pascakerja akan naik sebesar Rp5.423 dan liabilitas imbalan pascakerja akan naik sebesar Rp37.250.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan turun 1% dari yang diasumsikan pada 31 December 2019, beban imbalan pascakerja akan turun sebesar Rp4.652 dan liabilitas imbalan pascakerja akan turun sebesar Rp42.159.

Nilai kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Tingkat Diskonto	7.62% - 8.01%	8.17% - 8.31%	<i>Discount Rates</i>
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8.00%	8.00%	<i>Salary Increase Projection Rate</i>
Tingkat Mortalita	TMI-2011	TMI-2011	<i>Mortality Rate</i>
Tingkat Cacat Tetap	10% x TMI-2011	10% x TMI-2011	<i>Permanent Disability Rate</i>
Tingkat Pengunduran Diri	5.00% - 8.50%	5.00% - 8.50%	<i>Resignation Rate</i>
Usia Normal Pensiun (dalam tahun)	55 - 56	55 - 56	<i>Normal Retirement Age (in years)</i>

29. Uang Muka Pelanggan

29. Advances from Customers

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Apartemen	1,354,547	1,905,373	Apartments
Rumah Hunian dan Rumah Toko	445,820	771,492	Residential Houses and Shophouses
Pusat Belanja	35,512	219,046	Shopping Centers
Lahan Siap Bangun	157,683	286,545	Land Lots
Jumlah	1,993,562	3,182,456	Total
Bagian Jangka Pendek	(1,398,259)	(2,290,423)	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	595,303	892,033	Non-Current Portion

Rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

Details of the percentage of advances from customer to sales price are as follows:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
100%	1,256,719	2,075,643	100%
50% - 99%	337,899	425,595	50% - 99%
20% - 49%	33,154	240,203	20% - 49%
Di bawah 20%	365,790	441,015	Below 20%
Jumlah	1,993,562	3,182,456	Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

30. Pendapatan Ditangguhkan**30. Deferred Income**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Sewa (Catatan 9 dan 46.b)	361,254	404,543	Rental (Notes 9 and 46.b)
Pihak Ketiga			Third Parties
Sewa	252,037	274,720	Rental
Lain-lain	63,012	36,638	Others
Subjumlah	315,049	311,358	Subtotal
Jumlah	676,303	715,901	Total
Bagian Jangka Pendek	(344,876)	(352,809)	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	331,427	363,092	Non-current Portion

**31. Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual
dan Sewa Balik****31. Deferred Gain on Sale and
Leaseback Transactions**

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan	1,171,730	1,171,730	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	(132,327)	(132,327)	Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	1,039,403	1,039,403	Carrying Value
Hasil yang Diperoleh	3,148,235	3,148,235	Proceeds
<i>Dikurangi</i> : Laba yang Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	73,495	73,495	<i>Less: Gain Credited to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa-Balik	2,035,337	2,035,337	Deferred Gain on Sale and Leaseback Transaction
Penyesuaian Translasi	235,582	244,517	Foreign Exchange Translation
Akumulasi Amortisasi	(1,350,376)	(1,199,179)	Accumulated Amortization
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa-Balik - Neto	920,543	1,080,675	Deferred Gain on Sale and Leaseback - Net
Bagian Jangka Pendek	156,102	153,462	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	764,441	927,213	Non-current Portion

32. Modal Saham**32. Capital Stock**

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company stockholders' composition as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Pemegang Saham/ Stockholders	Jumlah Saham/ Total Shares (Lembar/ Shares)	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	2019	
			Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Rp	
PT Inti Anugerah Pratama	15,657,156,727	22.18	1,565,716	
Sierra Corporation	11,929,552,267	16.90	1,192,955	
PT Primantara Utama Sejahtera	7,371,500,000	10.44	737,150	
John Riady (Direktur/ Director)	527,000	0.00	53	
Publik/ Public (masing-masing kurang dari/ below 5% each)	35,633,177,875	50.48	3,563,318	
Subjumlah/ Subtotal	70,591,913,869	100.00	7,059,192	
Saham Treasuri/ Treasury Stock	306,104,500		30,610	
Jumlah/ Total	70,898,018,369		7,089,802	



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Pemegang Saham/ Stockholders	Jumlah Saham/ Total Shares (Lembar/ Shares)	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Rp
PT Inti Anugerah Pratama	10,576,984,488	46.45	1,057,698
PT Metropolis Propertindo Utama	2,012,280,000	8.84	201,228
PT Multipolar Tbk	1,223,588,800	5.37	122,359
Publik/ Public (masing-masing kurang dari/ below 5% each)	8,958,731,831	39.34	895,874
Subjumlah/ Subtotal	22,771,585,119	100.00	2,277,159
Saham Treasuri/ Treasury Stock	306,104,500		30,610
Jumlah/ Total	23,077,689,619		2,307,769

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of number of outstanding shares as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Saham Beredar	2019 Rp	2018 Rp	Outstanding Shares
Jumlah Saham Beredar - Awal	22,771,585,119	22,771,585,119	Number of Outstanding Shares - Beginning
<i>Ditambah:</i>			Addition:
Penawaran Umum Terbatas IV (Catatan 1.b)	47,820,328,750	--	Limited Public Offering IV (Note 1.b)
Jumlah Saham Beredar - Akhir	70,591,913,869	22,771,585,119	Outstanding Shares - Ending

Rincian perolehan kembali saham adalah sebagai berikut:

The details acquisition of treasury stock are as follows:

Periode Perolehan/ Aquired Period	No Surat Lapor ke Bapepam - LK/ No Register Letter to Bapepam - LK	Jumlah Saham/ Total Shares (Lembar/ Shares)	Harga Perolehan/ Acquisition Cost (Rp)
2011	005/LK-COS/I/2012 Tanggal 15 Nopember/ Dated November 15, 2011	96,229,500	61,577
2012	175/LK-COS/VII/2012 Tanggal 13 Juli/ Dated July 13, 2012	209,875,000	154,947
Jumlah/ Total		306,104,500	216,524

33. Tambahan Modal Disetor – Neto

33. Additional Paid in Capital – Net

	2019 Rp	2018 Rp
Agio Saham - Neto/ Paid in Capital Excess of Par - Net	10,492,783	4,043,613
Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali - Neto/ <i>Difference in Value from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control - Net</i>	19,535	19,535
Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak/ <i>Differences Between Tax Amnesty Assets and Liabilities</i>	17,622	17,622
Jumlah/ Total	10,529,940	4,080,770

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Agio Saham – NetoPenawaran Umum I/ *Rights Issue I*

Agio Saham/ *Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock*
Biaya Emisi Saham/ *Stock Issuance Cost*
SubJumlah/ *Subtotal*

Penawaran Umum II/ *Rights Issue II*

Agio Saham/ *Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock*
Biaya Emisi Saham/ *Stock Issuance Cost*
SubJumlah/ *Subtotal*

Agio atas Pelaksanaan Waran Seri I

Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock on Exercising Warrant Series I

Kelebihan Harga Pasar atas Nilai Nominal Saham yang Diterbitkan Dalam

Penggabungan Usaha yang Menggunakan Metode Pembelian/
Excess of Market Value Over Par Value of Stock Issued
in Business Combination Exercised under Purchase Method

Penawaran Umum III/ *Rights Issue III*

Agio Saham/ *Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock*
Biaya Emisi Saham/ *Stock Issuance Cost*
SubJumlah/ *Subtotal*

Penambahan Modal Tanpa HMETD/ *Issuance of Capital Stock - Non-Preemptive Rights Issuance*

Agio Saham/ *Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock*
Biaya Emisi Saham/ *Stock Issuance Cost*
SubJumlah/ *Subtotal*

Penawaran Umum IV/ *Rights Issue IV*

Agio Saham/ *Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock*
Biaya Emisi Saham/ *Stock Issuance Cost*
SubJumlah/ *Subtotal*

Jumlah Agio Saham - Neto/ Total Paid in Capital Excess of Par - Net

Pada tanggal 18 April 2019, Perusahaan melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD sejumlah 47.820.328.750 lembar saham (Catatan 1.b).

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp6.449.170, setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp6.575 dicatat sebagai bagian dari “tambahan modal disetor” (Catatan 1.b).

Pada tanggal 31 Mei 2011, Perusahaan melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD sejumlah 1.450.000.000 lembar saham (Catatan 1.b).

Kelebihan harga pasar atas nilai nominal saham yang diterbitkan dalam penggabungan usaha yang menggunakan metode pembelian merupakan selisih antara harga saham tertinggi selama 90 hari sebelum pengumuman penggabungan usaha dengan nilai nominal saham yang dikeluarkan Perusahaan.

Agio atas Pelaksanaan Waran Seri I merupakan selisih antara harga pelaksanaan waran dengan nilai nominal saham.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Paid in Capital Excess of Par – Net

	2019 Rp	2018 Rp
Agio Saham/ <i>Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock</i>	87,284	87,284
Biaya Emisi Saham/ <i>Stock Issuance Cost</i>	(11,844)	(11,844)
SubJumlah/ <i>Subtotal</i>	<u>75,440</u>	<u>75,440</u>
Agio Saham/ <i>Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock</i>	485,048	485,048
Biaya Emisi Saham/ <i>Stock Issuance Cost</i>	(7,443)	(7,443)
SubJumlah/ <i>Subtotal</i>	<u>477,605</u>	<u>477,605</u>
Agio atas Pelaksanaan Waran Seri I	659,476	659,476
Kelebihan Harga Pasar atas Nilai Nominal Saham yang Diterbitkan Dalam Penggabungan Usaha yang Menggunakan Metode Pembelian/ <i>Excess of Market Value Over Par Value of Stock Issued in Business Combination Exercised under Purchase Method</i>	91,701	91,701
Agio Saham/ <i>Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock</i>	1,946,492	1,946,492
Biaya Emisi Saham/ <i>Stock Issuance Cost</i>	(18,495)	(18,495)
SubJumlah/ <i>Subtotal</i>	<u>1,927,997</u>	<u>1,927,997</u>
Agio Saham/ <i>Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock</i>	812,000	812,000
Biaya Emisi Saham/ <i>Stock Issuance Cost</i>	(606)	(606)
SubJumlah/ <i>Subtotal</i>	<u>811,394</u>	<u>811,394</u>
Agio Saham/ <i>Paid in Capital Excess of Par - Net on Stock</i>	6,455,745	--
Biaya Emisi Saham/ <i>Stock Issuance Cost</i>	(6,575)	--
SubJumlah/ <i>Subtotal</i>	<u>6,449,170</u>	<u>--</u>
Jumlah Agio Saham - Neto/ Total Paid in Capital Excess of Par - Net	10,492,783	4,043,613

On April 18, 2019, the Company issued new 47,820,328,750 shares through issuance of non-preemptive rights capital stock (HMETD) (Note 1.b).

The excess amount received from the issuance of shares over its par value amounting to Rp6,449,170, after deducting shares issuance cost of Rp6,575 is recorded as part of “additional paid-in capital” account, (Note 1.b).

On May 31, 2011, the Company issued new 1,450,000,000 shares through issuance of non-preemptive rights capital stock (HMETD) (Note 1.b).

The excess of market value over the par value of stock issued during the business combination exercised under purchase method represents the difference between the highest share price reached during the 90 days prior to the announcement of the business combination and par value of the Company’s issued shares.

Premium on exercising Warrant Series I represents the difference between warrant execution price and par value.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas
Sepengendali – Neto**

Transaksi yang Berasal dari Sebelum Penggabungan Usaha/
Transaction Before Business Combination:

Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> PT Saptapersada Jagatnusa	323
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(5,000)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences Value</i>	<u>(4,677)</u>

Transaksi yang Berasal dari Penggabungan Usaha/
Transaction from Business Combination:

Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Siloam	275,837
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(85,174)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>190,663</u>
Realisasi/ <i>Realization</i>	<u>(84,028)</u>
Neto/ <i>Net</i>	<u>106,635</u>
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Lippo Land	69,228
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(265,747)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>(196,519)</u>
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Aryaduta	199,315
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(39,638)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>159,677</u>
Realisasi/ <i>Realization</i>	<u>(45,581)</u>
Neto/ <i>Net</i>	<u>114,096</u>

Jumlah - Neto/ *Net*

Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali PT Saptapersada Jagatnusa (SPJN) timbul pada saat transaksi perolehan SPJN oleh Perusahaan pada tahun 2001.

Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali dari transaksi penggabungan usaha sebesar Rp190.663, (Rp196.519) dan Rp159.677 masing-masing berasal dari transaksi penggabungan usaha eks-Siloam (termasuk eks-Sumber Waluyo), eks-Lippo Land dan eks Aryaduta ke dalam Perusahaan pada tahun 2004. Selisih tersebut berasal dari perbedaan antara aset bersih eks - Siloam (termasuk eks-Sumber Waluyo), eks-Lippo Land dan eks-Aryaduta dengan jumlah nominal saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan.

34. Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali

Pada tanggal 20 November 2018, LK Reit Management Pte. Ltd., entitas anak, menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Bowsprit Capital Corporation Ltd (Bowsprit) kepada OUE Limited dan OUE Lippo Healthcare Limited, keduanya pihak berelasi dengan nilai pelepasan sebesar SGD98,883,620 (Rp1.040.386) (Catatan 1.c). Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebesar Rp45.890 yang sebelumnya dicatat atas perolehan saham Bowsprit direklasifikasi ke laba rugi.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)**

**Difference in Value from Restructuring
Transactions between Entities Under
Common Control Net**

	Rp
Transaksi yang Berasal dari Sebelum Penggabungan Usaha/ <i>Transaction Before Business Combination:</i>	
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> PT Saptapersada Jagatnusa	323
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(5,000)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences Value</i>	<u>(4,677)</u>
Transaksi yang Berasal dari Penggabungan Usaha/ <i>Transaction from Business Combination:</i>	
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Siloam	275,837
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(85,174)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>190,663</u>
Realisasi/ <i>Realization</i>	<u>(84,028)</u>
Neto/ <i>Net</i>	<u>106,635</u>
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Lippo Land	69,228
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(265,747)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>(196,519)</u>
Nilai Aset Neto/ <i>Net Asset Value</i> Aryaduta	199,315
Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	<u>(39,638)</u>
Selisih Nilai/ <i>Differences in Value</i>	<u>159,677</u>
Realisasi/ <i>Realization</i>	<u>(45,581)</u>
Neto/ <i>Net</i>	<u>114,096</u>
Jumlah - Neto/ <i>Net</i>	19,535

Difference in value from the restructuring transactions between entities under common control from PT Saptapersada Jagatnusa (SPJN) was incurred during the Company's acquisition of SPJN in 2001.

Difference in value from restructuring transactions between entities under common control from business combination amounting to Rp190,663, (Rp196,519) and Rp159,677, respectively, were incurred from the merger of ex-Siloam (including ex-Sumber Waluyo), ex-Lippo Land, and ex-Aryaduta in 2004. The difference was determined from the difference in net asset value of ex-Siloam (including ex-Sumber Waluyo), ex-Lippo Land, and ex-Aryaduta and the nominal value of new shares issued by the Company.

**34. Difference in Transactions with
Non-Controlling Interest**

On November 26, 2018, LK Reit Management Pte. Ltd., a subsidiary, disposed all its shares ownership in Bowsprit Capital Corporation Ltd (Bowsprit) to OUE Limited and OUE Lippo Healthcare Limited, both related parties, with disposal value of SGD98,883,620 (Rp1,040,386) (Note 1.c). Previously recorded difference in transaction with non-controlling interest on acquisition of Bowsprit's shares amounted to Rp45,890 was reclassified to profit and loss.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 7 Juni 2018, PT Siloam International Hospitals (SIH) dan PT Guchi Kencana Emas, keduanya entitas anak, mengakuisisi 0,01% dan 99,99% kepemilikan saham di PT Golden First Atlanta (GFA) dengan nilai akuisisi sebesar Rp11.450. Pada saat akuisisi, SIH mencatat selisih transaksi pihak nonpengendali sebesar Rp12.367.

Pada tanggal 7 Juni 2018, PT Prawira Tata Semesta (PTS), entitas anak, mengakuisisi 83% kepemilikan saham di PT Balikpapan Damai Husada (BDH) dengan nilai akuisisi sebesar Rp2.304. Pada saat akuisisi, SIH mencatat selisih transaksi pihak nonpengendali sebesar Rp419.

Berikut perhitungan selisih transaksi pihak nonpengendali:

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

On June 7, 2018, PT Siloam International Hospitals (SIH) and PT Guchi Kencana Emas (GKE), both subsidiaries, acquired 0.01% and 99.99% shares ownership in PT Golden First Atlanta (GFA) with acquisition cost of Rp11,450. At the acquisition date, SIH recorded difference in transactions with non-controlling interest amounted to Rp12,367.

On June 7, 2018, PT Prawira Tata Semesta (PTS) acquired 83% shares ownership in PT Balikpapan Damai Husada (BDH) with acquisition cost of Rp2,304. At the acquisition date, SIH recorded difference in transactions with non-controlling interest amounted to Rp419.

The following is the calculation of the difference in transactions with non-controlling interest:

	2019 Rp	2018 Rp	
Perolehan Saham dari Pihak Nonpengendali			<i>Shares Acquired from Non-Controlling Interest</i>
Biaya Perolehan	(502,916)	(502,916)	Acquisition Cost
Aset Neto yang Diperoleh	195,239	195,239	Net Asset Value of Acquired
Dampak Perubahan Translasi Kurs Mata Uang Asing	(21,106)	(21,106)	<i>Difference from Foreign Currency Translations</i>
Subjumlah	<u>(328,783)</u>	<u>(328,783)</u>	<i>Subtotal</i>
Pelepasan Saham kepada Pihak Nonpengendali			<i>Shares Disposal to Non-Controlling Interest</i>
Harga Pelepasan	4,290,661	4,290,661	Purchase Consideration
Aset Neto yang Dilepas	(1,420,979)	(1,420,979)	Net Assets Disposed
Subjumlah	<u>2,869,682</u>	<u>2,869,682</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u><u>2,540,899</u></u>	<u><u>2,540,899</u></u>	<i>Total</i>

35. Komponen Ekuitas Lainnya

35. Other Equity Component

	2019 Rp	2018 Rp	
Perubahan Kepemilikan pada Entitas Anak	4,116,406	2,108,102	<i>Change Ownership in Subsidiaries</i>
Selisih Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada Entitas Anak	7,036	7,036	<i>Differences Between Tax Amnesty Assets and Liabilities in Subsidiaries</i>
Uang Muka Setoran Modal pada Entitas Anak	<u>1,097,144</u>	<u>1,097,144</u>	<i>Advances for Subscription of Stocks in Subsidiaries</i>
Jumlah	<u><u>5,220,586</u></u>	<u><u>3,212,282</u></u>	<i>Total</i>

Pada tahun 2019, PT Bangun Bina Bersama (BBB), entitas anak, menerbitkan saham baru dengan nilai Rp379.437. Atas penerbitan saham pada entitas anak, BBB mencatat agio saham sebesar Rp375.518. Agio pada entitas anak tersebut sebesar Rp274.278 dicatat sebagai komponen ekuitas lain (Catatan 1.c).

In 2019, PT Bangun Bina Bersama (BBB), a subsidiary, issued new shares with a value of Rp379,437. Upon the issuance of shares in a subsidiary, BBB recorded additional paid-in capital excess of par amounted to Rp375,518. The additional paid-in capital excess of par Rp274,278 in the subsidiary were recorded as other equity components (Note 1.c).



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2019, PT Lippo Cikarang Tbk, entitas anak, melakukan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal dengan HMETD. Atas selisih setoran modal dengan nilai transaksi sebesar Rp1.734.026 dicatat sebagai perubahan kepemilikan pada entitas anak (Catatan 1.c).

Pada tahun 2018, penurunan uang muka setoran modal pada entitas anak sebagai akibat dari hilangnya pengendalian atas PT Mahkota Sentosa Utama (Catatan 1.c).

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

In 2019, PT Lippo Cikarang Tbk, a subsidiary, issued new shares through issuance of preemptive rights capital stock with HMETD. The difference between paid in capital and transaction value amounted to Rp1,734,026 recorded as change ownership in subsidiary (Note 1.c).

In 2018, decreasing of advances for subscription of stocks in subsidiary as a result of losing of control in PT Mahkota Sentosa Utama (Note 1.c).

36. Dividen Tunai dan Dana Cadangan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Tahunan No.42 tanggal 18 April 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2018 untuk memperkuat struktur modal, sehingga untuk tahun buku tersebut, Perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui antara lain, pembagian dividen tunai sebesar Rp61.484 dan penyisihan tambahan dana cadangan sebesar Rp1.000 dari saldo laba tahun 2017.

36. Cash Dividend and Reserved Fund

Based on Deed of General Meeting of Stockholders and Deed of Annual General Meeting of Stockholders No. 42 dated April 18, 2019 which was made in the presence of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta, the stockholders approved to use net income of 2018 to strengthen capital structure, and consequently for such book year, the Company did not distribute dividend to the stockholders.

Based on Deed of Annual General Meeting of Stockholders No.14 dated June 5, 2018 which was made in the presence of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company's stockholders approved the payment of dividend amounting to Rp61,484 and increased the reserved fund amounting to Rp1,000 from retained earnings of 2017.

37. Penghasilan Komprehensif Lainnya

37. Other Comprehensive Income

	2019 Rp	2018 Rp	
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	573,036	762,724	<i>Gain from Translations Financial Statements in Foreign Currency</i>
Laba belum Direalisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	32,382	28,182	<i>Gain on Changes in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets</i>
Jumlah	605,418	790,906	<i>Total</i>

Laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan laba yang belum direalisasi atas investasi pada saham KIJA setelah dikurangkan bagian kepentingan nonpengendali (Catatan 5).

Unrealized gain on changes in fair value of available-for-sale financial assets represents of unrealized gain on investments in KIJA net of the noncontrolling portion (Note 5).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

38. Kepentingan Nonpengendali

Berikut adalah rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
PT Siloam International Hospitals Tbk	2,992,845	3,142,470	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Lippo Cikarang Tbk	2,301,018	3,536,679	PT Lippo Cikarang Tbk
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	258,882	326,847	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
PT Bina Bangun Bersama	104,944	--	PT Bina Bangun Bersama
PT Satyagraha Dinamika Unggul	(143,376)	(51,644)	PT Satyagraha Dinamika Unggul
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	87,009	54,807	Others (below Rp50,000 each)
Jumlah	5,601,322	7,009,159	Total

39. Pendapatan

	2019	2018	
	Rp	Rp	
<i>Real Estate Development:</i>			<i>Real Estate Development:</i>
Apartemen	1,258,234	1,151,673	Apartments
Lahan Siap Bangun	758,986	949,350	Land Lots
Rumah Hunian dan Rumah Toko	535,128	577,418	Residential Houses and Shophouses
Pengelolaan Kota	166,692	153,407	Town Management
Pengelolaan Air dan Limbah	122,943	120,466	Water and Sewage Treatment
Asset Enhancements	46,389	84,977	Asset Enhancements
Lain-lain	86,374	55,780	Others
Subjumlah	2,974,746	3,093,071	Subtotal
<i>Real Estate Management & Services:</i>			<i>Real Estate Management & Services:</i>
<i>Healthcare</i>			<i>Healthcare</i>
Pasien Rawat Inap:			<i>Inpatient Department:</i>
Jasa Penunjang Medis dan			Medical Support Services and
Jasa Tenaga Ahli	1,471,856	1,267,034	Professional Fees
Obat dan Perlengkapan Medis	1,281,521	1,091,699	Drugs and Medical Supplies
Kamar Rawat Inap	611,098	503,226	Ward Fees
Fasilitas Rumah Sakit	372,895	335,968	Hospitals Facilities
Kamar Operasi	190,471	136,371	Operating Theater
Pendapatan Administrasi dan Lainnya	164,650	188,441	Administration Fees and Others
Pasien Rawat Jalan:			<i>Outpatient Department:</i>
Jasa Penunjang Medis dan			Medical Support Services and
Jasa Tenaga Ahli	1,794,135	1,500,526	Professional Fees
Obat dan Perlengkapan Medis	909,565	730,903	Drugs and Medical Supplies
Fasilitas Rumah Sakit	154,985	146,476	Hospitals Facilities
Lain-lain	66,744	64,006	Others
Subjumlah - Healthcare	7,017,920	5,964,650	Subtotal - Healthcare
<i>Asset Enhancements</i>	506,340	403,802	<i>Asset Enhancements</i>
Parkir	417,574	425,078	Parking
Hotel dan Restoran	388,498	378,307	Hotels and Restaurants
Pengelolaan Kota	252,269	246,310	Town Management
Jasa Manajemen	237,248	238,615	Management Fees
Memorial Park	124,347	153,264	Memorial Park
Golf and Club House	64,236	64,680	Golf and Club House
Food Business	55,300	149,525	Food Business
Pembentukan Kembali	55,049	64,444	Consumer Financing
Pengelolaan Air dan Limbah	52,465	48,246	Water and Sewage Treatment
Lain-lain	49,083	9,518	Others
Subjumlah	9,220,329	8,146,439	Subtotal
<i>Fund Management / Investments:</i>			<i>Fund Management / Investments:</i>
Jasa Manajemen	125,173	213,289	Management Fees
Jumlah	12,320,248	11,452,799	Total



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pendapatan *asset enhancements* merupakan pendapatan yang berasal dari penyewaan aset-aset yang dimiliki oleh Grup. Tidak terdapat pelanggan dengan nilai penjualan di atas 10% dari pendapatan neto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pendapatan jasa manajemen merupakan pendapatan yang berasal dari jasa pengelolaan pusat belanja dan pengelolaan REIT.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Assets *enhancement revenues* represent revenue from leasing of the Group's assets. There are no sales above 10% of net revenues for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Management fees revenue represent revenue from management services of shopping centers and manager of REIT.

40. Beban Pokok Pendapatan

40. Cost of Revenues

	2019	2018	
	Rp	Rp	
<i>Real Estate Development:</i>			<i>Real Estate Development:</i>
Apartemen	1,181,634	588,402	Apartments
Lahan Siap Bangun	423,137	213,393	Land Lots
Rumah Hunian dan Rumah Toko	239,932	263,058	Residential Houses and Shophouses
Pengelolaan Kota	107,185	76,230	Town Management
Pengelolaan Air dan Limbah	57,017	47,974	Water and Sewage Treatment
<i>Asset Enhancements</i>	4,281	10,900	Asset Enhancements
Lain-lain	67,081	39,174	Others
Subjumlah	<u>2,080,267</u>	<u>1,239,131</u>	Subtotal
<i>Real Estate Management & Services:</i>			<i>Real Estate Management & Services:</i>
<i>Healthcare</i>			<i>Healthcare</i>
Departemen Rawat Inap			<i>Inpatient Department</i>
Jasa Tenaga Ahli, Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	1,392,112	1,091,863	Professional Fees, Salaries and employee allowance
Obat dan Perlengkapan Medis	895,903	771,384	Drugs and Medical Supplies
Penyusutan (Catatan 13)	158,722	148,821	Depreciation (Note 13)
Perlengkapan Klinik	108,279	124,472	Clinical Supplies
Makanan dan Minuman	3,956	74,362	Food and Beverages
Biaya Rujukan	95,022	67,101	Referral Fees
Lain-lain	105,827	99,837	Others
Departemen Rawat Jalan			<i>Outpatient Department</i>
Jasa Tenaga Ahli, Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	956,377	826,060	Professional Fees, Salaries and Employee Benefits
Obat dan Perlengkapan Medis	711,388	551,401	Drugs and Medical Supplies
Penyusutan (Catatan 13)	114,029	108,749	Depreciation (Note 13)
Biaya Rujukan	98,610	81,695	Referral Fees
Perlengkapan Klinik	21,046	22,911	Clinical Supplies
Lain-lain	69,246	67,139	Others
Subjumlah - <i>Healthcare</i>	<u>4,730,517</u>	<u>4,035,795</u>	Subtotal - Healthcare
Parkir	348,258	349,685	Parking
Pengelolaan Kota	184,702	160,942	Town Management
Hotel dan Restoran	157,552	165,386	Hotels and Restaurants
<i>Food Business</i>	49,204	90,181	Food Business
Jasa Manajemen	41,630	20,140	Management Fees
Pembayaran Kembali	37,576	46,137	Consumer Financing
Pengelolaan Air dan Limbah	27,268	28,226	Water and Sewage Treatment
<i>Golf and Club House</i>	22,605	22,139	Golf and Club House
<i>Memorial Park</i>	17,541	21,013	Memorial Park
<i>Asset Enhancements</i>	1,334	4,299	Asset Enhancements
Lain-lain	25,552	17,709	Others
Subjumlah	<u>5,643,739</u>	<u>4,961,652</u>	Subtotal
Jumlah	<u>7,724,006</u>	<u>6,200,783</u>	Total

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Tidak terdapat pembelian kepada vendor
di atas 10% dari pendapatan neto untuk
masing-masing tahun.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

*There are no purchases to vendor above 10%
of net revenues for respective years.*

41. Beban Usaha**41. Operating Expenses**

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Penjualan			Selling Expenses
Iklan dan Pemasaran	156,635	226,993	Advertising and Marketing
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	118,206	178,624	Salaries and Employee Benefits
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	57,090	57,661	Depreciation (Notes 12 and 13)
Listrik dan Air	37,926	32,234	Electricity and Water
Perbaikan dan Pemeliharaan	27,688	41,906	Repairs and Maintenance
Sewa	20,662	28,384	Rental
Jasa Manajemen	13,492	26,372	Management Fees
Perlengkapan Kantor	3,898	11,065	Office Supplies
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	57,817	48,323	Others (below Rp10,000 each)
Subjumlah	<u>493,414</u>	<u>651,562</u>	Subtotal
Beban Umum dan Administrasi			
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	1,365,258	935,319	Salaries and Employee Benefits
Sewa	714,111	683,045	Rental
Penyusutan (Catatan 13)	363,479	305,044	Depreciation (Note 13)
Biaya Kantor	258,163	239,297	Office Expenses
Listrik dan Air	197,481	182,962	Electricity and Water
Jasa Profesional	131,099	132,386	Professional Fees
Perbaikan dan Pemeliharaan	112,409	112,923	Repairs and Maintenance
Transportasi dan Akomodasi	85,628	60,082	Transportation and Accommodation
Perlengkapan Kantor	56,818	56,018	Office Supplies
Komunikasi	50,857	43,881	Communication
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	174,712	184,948	Others (below Rp50,000 each)
Subjumlah	<u>3,510,015</u>	<u>2,935,905</u>	Subtotal
Jumlah	<u>4,003,429</u>	<u>3,587,467</u>	Total

42. Beban Keuangan - Neto**42. Financial Charges - Net**

	2019 Rp	2018 Rp	
Penghasilan Bunga	233,412	108,414	<i>Interest Income</i>
Beban Bunga:			<i>Interest Expenses:</i>
Obligasi	(833,532)	(451,857)	Bonds
Pinjaman Bank	(32,702)	(73,625)	Bank Loans
Sewa Pembiayaan	(27,538)	(21,755)	Finance Lease Obligations
Beban Keuangan	<u>(243,783)</u>	<u>(147,107)</u>	Financial Charges
Jumlah - Neto	<u>(904,143)</u>	<u>(585,930)</u>	Total- Net

Penghasilan bunga merupakan penghasilan bunga dari rekening bank, deposito berjangka, dana yang dibatasi penggunaannya dan investasi pada obligasi (Catatan 3 dan 8). Beban bunga merupakan beban bunga atas obligasi, pinjaman bank, anjak piutang dan sewa pembiayaan (Catatan 22, 24, 25, 26 dan 27) sedangkan beban keuangan merupakan biaya *hedging*, biaya administrasi bank, penggunaan mesin *electronic data capture* (EDC) dan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen.

Interest income represents interest income from bank accounts, time deposits, restricted funds and investment in bonds (Notes 3 and 8). Interest expenses represent interest expenses on bonds, bank loans, factoring and finance lease obligation (Notes 22, 24, 25, 26 and 27) while financial charges represent hedging cost, bank charges, usage of electronic data capture (EDC) machine and interest subsidy on mortgages for residential houses and apartments (KPR and KPA).



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

43. Penghasilan (Beban) Lain-lain

43. Other Income (Expenses)

	2019 Rp	2018 Rp	<i>Other Income</i>
Penghasilan Lainnya			
Laba atas Pelepasan Saham Entitas Anak, Asosiasi dan Ventura Bersama - Neto (Catatan 1.c., 10 dan 11)	410,499	2,360,678	<i>Gain on Disposal Shares of Subsidiaries, Associate and Joint Venture - Net (Notes 1.c, 10 and 11)</i>
Laba Selisih Kurs - Neto	170,981	--	<i>Gain on Foreign Exchange - Net</i>
Laba atas Pelepasan Investasi Lain (Catatan 8)	139,881	--	<i>Gain on Disposal of Other Investment (Note 8)</i>
Laba atas Penjualan Aset Tetap (Catatan 13)	--	1,176	<i>Gain on Sale of Property and Equipment (Note 13)</i>
Jumlah Penghasilan Lainnya	721,361	2,361,854	Total Other Income
Beban Lainnya			
Denda	520,283	247,381	<i>Penalty</i>
Rugi Penurunan Nilai Persediaan	443,121	200,283	<i>Impairment Loss of Inventories</i>
Rugi Penurunan Nilai Piutang Usaha	251,950	104,501	<i>Impairment Loss of Trade Accounts Receivable</i>
Beban Garansi Sewa	253,256	221,230	<i>Rental Guarantee Expenses</i>
Beban Amortisasi	194,069	186,804	<i>Amortization Expenses</i>
Rugi Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset yang Tidak Terealisirkan	165,898	13,746	<i>Impairment Losses of Property and Equipment and Unrealised Assets</i>
Rugi Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	65,816	--	<i>Impairment Loss of Other Accounts Receivable</i>
Beasiswa	28,433	17,219	<i>Scholarship</i>
Beban Pajak	20,918	--	<i>Tax Expenses</i>
Beban Provisi atas Kasus Hukum	8,339	--	<i>Provision Expense for Legal Cases</i>
Rugi atas Penurunan Nilai Investasi (Catatan 8)	6,993	--	<i>Loss on Impairment in Value of Investment (Note 8)</i>
Rugi atas Penjualan Aset Tetap (Catatan 13)	406	--	<i>Loss on Sale of Property and Equipment (Note 13)</i>
Rugi Selisih Kurs - Neto	--	888,168	<i>Loss on Foreign Exchange - Net</i>
Lainnya - Neto	115,840	28,090	<i>Others - Net</i>
Jumlah Beban Lainnya	2,075,322	1,907,422	Total Other Expenses

Rincian laba atas pelepasan entitas anak adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of subsidiaries are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd (Catatan/ Note 11)</i>	71,662	--
Laba atas Pelepasan Unit/ <i>Gain on Disposal Unit of First Real Estate Invesment Trust (Catatan/ Note 10)</i>	338,837	900,180
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of PT Mahkota Sentosa Utama (Catatan/ Note 1.c)</i>	--	755,320
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of Bowsprit Capital Corporation Ltd (Catatan/ Note 1.c)</i>	--	656,959
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of PT Surya Cipta Investama (Catatan/ Note 10)</i>	--	113,642
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of PT Gunung Halimun Elo</i>	--	17,658
Laba atas Pelepasan Saham/ <i>Gain on Disposal Shares of PT Asri Griya Terpadu</i>	--	641
Rugi atas Pelepasan Saham/ <i>Loss on Disposal Shares of PT Mapalus Mancacakti (Catatan/ Note 1.c)</i>	--	(83,722)
Jumlah - Neto/ Total - Net	410,499	2,360,678

Laba atas pelepasan saham entitas anak merupakan keuntungan atas pelepasan 14.000 saham di PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas anak, oleh Peak Asia Investments Pte. Ltd., (PEAK), entitas anak, kepada Mas Agoes Ismail Ning dengan harga pengalihan sebesar Rp14. Jumlah laba pelepasan saham tersebut adalah sebesar Rp755.320 sebagai selisih transaksi pihak nonpengendali.

Gain on disposal shares of subsidiary represent gain from divestment of 14,000 shares ownership in PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), a subsidiary, by Peak Asia Investment Pte. Ltd., (PEAK), a subsidiary, to Mas Agoes Ismail Ning with transfer price of Rp14. Gain on disposal of such shares was recorded as difference in transaction with non-controlling interest amounted to Rp755,320.

Sehubungan dengan penerbitan 14.000 saham di MSU yang berdampak pada hilangnya pengendalian pada MSU, laba pelepasan investasi saham entitas anak sebesar Rp755.320 yang sebelumnya dicatat pada selisih transaksi pihak nonpengendali direklasifikasi ke laba rugi (Catatan 1.c).

In relation with the issuance of 14,000 shares in MSU which was impacted to losing of control on MSU, gain on disposal shares of subsidiary of Rp755,320 that previously recorded as difference in transaction with non-control interest, was reclassified to profit or loss (Note 1.c).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**44. Keuntungan Pencatatan Investasi pada
Entitas Asosiasi dengan Nilai Wajar**

Akun ini merupakan selisih antara nilai investasi pada entitas anak sebelum hilangnya pengendalian dengan bagian investasi yang diukur nilai wajarnya pada saat hilangnya pengendalian pada PT Mahkota Sentosa Utama (Catatan 1.c).

Perhitungan keuntungan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dengan nilai wajar adalah sebagai berikut:

	Rp
Nilai Investasi pada Entitas Anak Sebelum Hilangnya Pengendalian/ <i>Investment Value on a Subsidiary Before Loss of Control</i>	1,263,852
Nilai Wajar atas Bagian Investasi pada Saat Hilangnya Pengendalian/ <i>Fair Value of Investment Portion at the Time of Loss of Control</i>	<u>2,239,956</u>
Laba Atas Hilangnya Pengendalian Pada Entitas Anak/ <i>Gain on Lose of Control in a Subsidiary</i>	976,104

Nilai wajar investasi pada PT Mahkota Sentosa Utama saat hilangnya pengendalian dihitung berdasarkan berdasarkan Laporan Penilaian Independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan, penilai independen, pada tanggal 4 Oktober 2018 (Catatan 10).

45. Laba (Rugi) per Saham Dasar

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Rp	Rp
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah)	(1,983,299)	719,977
Jumlah Lembar Saham Beredar	45,242,885,599	22,771,585,119
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	(43.84)	31.62

45. Basic Earning (Loss) per Share

The calculation of basic earning (loss) per share are as follows:

Profit (Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent (Rupiah)
Number of Shares Outstanding
Weighted Average of Outstanding Shares (shares)
Basic Earning (Loss) per Share (Full Rupiah)

46. Ikatan dan Perjanjian Penting

a. Kerjasama Operasional dan Manajemen

- Pada tanggal 20 Agustus 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Untaian Rejeki Abadi (URA) di mana Perusahaan memberikan jasa teknik dan pemasaran atas bangunan usaha milik URA dengan luas bangunan 10.568 m². Perjanjian berlaku sampai dengan 27 Mei 2034 dan dapat diperpanjang. URA akan membayar sejumlah tertentu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian.

46. Commitments

a. Operational and Management Agreements

- On August 20, 2004, the Company entered into an agreement with PT Untaian Rejeki Abadi (URA) whereby the Company will provide technical and marketing services to URA's business property with an area of 10,568 sqm. The agreement will valid until May 27, 2034, and can be extended. URA shall pay a certain amount as specified in the agreement.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 9 April 2006, PT Lippo Malls Indonesia (LMI), entitas anak, mengadakan perjanjian pengelolaan pusat-pusat perbelanjaan dengan pemegang saham utama mereka untuk mengelola, memasarkan dan memelihara fasilitas pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Jumlah pendapatan honorarium adalah sebesar Rp139.082 dan Rp153.924 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
- LMIRT Management Ltd (LMIR TM), entitas anak, mengadakan perjanjian dengan HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (HSBC), sebagai trustee dari Lippo-Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) yang berlaku efektif sejak *listing date* dari LMIR Trust (14 Nopember 2007). Efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, HSBC digantikan oleh Perpetual (Asia) Limited. Berdasarkan perjanjian tersebut LMIR TM akan memberikan jasa manajemen, antara lain, strategi investasi dan rekomendasi investasi maupun divestasi kepada LMIR Trust. Atas jasa yang diberikan, LMIR TM akan memperoleh sejumlah tertentu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Grup mengadakan perjanjian dengan beberapa kontraktor untuk pengembangan proyek. Jumlah perjanjian kontrak pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.894.468 serta yang belum direalisasi adalah sebesar Rp1.266.980 dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.322.384 serta yang belum direalisasi adalah sebesar Rp1.179.948.

b. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Pihak Penyewa/ Lessee	Pihak yang Menyewakan/ Lessor	Objek Sewa/ Lease Object	Periode Sewa/ Lease Period	Beban Sewa/ Rental Expenses	
					2019 Rp	2018 Rp
1	Perusahaan/ <i>The Company</i>	PT Karya Sentra Sejahtera	Bangunan Imperial Aryaduta Hotel & Country Club/ <i>Imperial Aryaduta Hotel & Country Club Building</i> *)	2006 - 2021	22,813	22,692
2	Perusahaan/ <i>The Company</i>	PT Graha Indah Pratama	Bangunan Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk/ <i>Siloam Hospital Kebon Jeruk Building</i> *)	2006 - 2021	47,038	46,789
3	Perusahaan/ <i>The Company</i>	PT Tata Prima Indah	Bangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya/ <i>Siloam Hospital Surabaya Building</i> *)	2006 - 2021	18,601	18,503
4	Perusahaan/ <i>The Company</i>	PT Sentra Dinamika Perkasa	Bangunan Rumah Sakit Siloam Lippo Village/ <i>Siloam Hospital Lippo Village Building</i> *)	2006 - 2021	82,995	82,556

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- On April 9, 2006, PT Lippo Malls Indonesia (LMI), a subsidiary, entered into shopping centers management agreement with their main stockholders to manage, to sell and maintain the shopping centers' facilities. Total management fee earned for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp139,082 and Rp153,924, respectively.
- LMIRT Management Ltd (LMIR TM), a subsidiary, entered into an agreement with HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (HSBC), as a trustee of Lippo-Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) effective from the listing date of LMIR Trust (November 14, 2007). Effective from January 2, 2018, HSBC was replaced by Perpetual (Asia) Limited. Based on the agreement, LMIR TM will provide management services to LMIR Trust, among others, investment strategic and investment as well as divestment recommendations. For such services, LMIR TM shall receive certain compensation as stated in the agreement.
- Group entered into several agreements with contractors for the development of their projects. As of December 31, 2019, the outstanding commitments amounted to Rp11,894,468 with commitments not yet realized amounted to Rp1,266,980 and as of December 31, 2018, the outstanding commitments amounted to Rp11,322,384 with commitments not yet realized amounted Rp1,179,948.

b. Rental Agreements

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

No.	Pihak Penyewa/ Lessee	Pihak yang Menyewakan/ Lessor	Objek Sewa/ Lease Object	Periode Sewa/ Lease Period	Beban Sewa/ Rental Expenses	
					2019 Rp	2018 Rp
5	PT East Jakarta Medika	PT Graha Pilar Sejahtera	Bangunan Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang/ Siloam Hospital Lippo Cikarang Building *) ¹⁾	2010 - 2025	19,183	19,568
6	Perusahaan/ The Company	PT Primatama Cemerlang	Bangunan Rumah Sakit Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre/ Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre Hospital Building *) ¹⁾	2010 - 2025	139,689	141,515
7	PT Rumah Sakit Siloam Hospital Sumsel	PT Metropolis Propertindo Utama	Bangunan Rumah Sakit Siloam Palembang/ Siloam Hospital Palembang Building *) ¹⁾	2013 - 2028	7,252	6,976
8	Perusahaan/ The Company	PT Menara Abadi Megah	Bangunan Hotel Aryaduta dan Rumah Sakit Siloam Hospitals Manado/ Hotel Aryaduta and Siloam Hospital Manado Building *) ¹⁾	2012 - 2027	58,918	60,742
9	Perusahaan/ The Company	PT Bayutama Sukses	Bangunan Rumah Sakit Siloam Makassar/ Siloam Hospital Makassar Building *) ¹⁾	2012 - 2027	40,331	41,579
10	Perusahaan/ The Company	PT Dasa Graha Jaya	Bangunan Rumah Sakit Siloam Bali/ Siloam Hospital Bali Building *) ¹⁾	2013 - 2028	76,578	76,890
11	Perusahaan/ The Company	PT Perisai Dunia Sejahtera	Bangunan Rumah Sakit Siloam TB Simatupang/ Siloam Hospital TB Simatupang Building *) ¹⁾	2013 - 2028	73,298	73,574
12	PT Diagram Healthcare Indonesia	PT Anadi Sarana Tatahusada	Bangunan Rumah Sakit Siloam Cinere/ Siloam Hospital Cinere Building	2005 - 2023	385	922
13	PT Berlian Cahaya Indah	PT Metropolis Propertindo Utama	Bangunan Rumah Sakit Siloam Purwakarta/ Siloam Hospital Purwakarta Building *) ¹⁾	2014 - 2029	7,919	7,569
14	PT Krisolis Jaya Mandiri	PT Nusa Bahana Niaga	Bangunan Rumah Sakit Siloam Kupang/ Siloam Hospital Kupang Building *) ¹⁾	2014 - 2029	2,541	4,955
15	PT Lintas Buana Jaya	PT Prima Labuan Bajo	Bangunan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo/ Siloam Hospital Labuan Bajo Building *) ¹⁾	2016 - 2031	13,264	14,157
16	PT Pamor Paramita Utama	PT Rekreasi Pantai Terpadu	Beberapa area Lippo Mall Kuta/ Several Area of Lippo Mall Kuta	2016 - 2021	43,281	32,461
17	PT Bina Bahtera Sejati	PT Buton Bangun Cipta	Bangunan Rumah Sakit Siloam Buton/ Siloam Hospital Buton Building *) ¹⁾	2017 - 2032	12,294	13,301
18	PT Taruna Perkasa Megah	PT Yogyakarta Central Terpadu	Bangunan Rumah Sakit Siloam Yogyakarta/ Siloam Hospital Yogyakarta Building *) ¹⁾	2017 - 2032	15,069	17,031
19	PT Tataka Bumi Karya	PT Girimulia Perkasa Jaya	Bangunan Rumah Sakit Siloam Bogor/ Siloam Hospital Bogor Building *) ¹⁾	2017 - 2033	15,940	15,940

No.	Pihak Penyewa/ Lessee	Pihak yang Menyewakan/ Lessor	Objek Sewa/ Lease Object	Pendapatan Sewa/ Rental Income		
				2019 Rp	2018 Rp	
1	PT Mulia Persada Pertiwi	PT Villa Permata Cibodas	Beberapa area Cyberpark/ Several areas of Cyberpark	2015 - 2030	6,241	6,241
2	PT Mulia Persada Pertiwi	PT Direct Power	Beberapa area Bellanova Country Mall/ Several areas of Bellanova Country Mall	2008 - 2033	3,526	3,526
3	PT Matahari Putra Prima Tbk	PT Mandiri Cipta Gemilang	Beberapa area Lippo Mall Puri/ Several Areas of Lippo Mall Puri	2014 - 2034	10,900	12,160
4	PT Matahari Putra Prima Tbk	PT Andromeda Sakti	Beberapa area Lippo Buton/ Several Areas of Lippo Buton	2014 - 2024	3,798	3,798

*) Merupakan transaksi jual dan sewa balik/ represent sale and lease-back transaction

1) Tarif sewa terdiri dari tarif sewa pokok dan tarif sewa variabel. Tarif sewa pokok ditentukan pada saat kesepakatan sewa dan selanjutnya disesuaikan, sedangkan tarif variabel diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari gross revenue/ rental fee consist of base rent and variable rent. Base rent was determined when entered into agreement and will be adjusted subsequently, while variable rent will be commenced based on certain percentage of gross revenue

c. Master Agreement antara PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), entitas anak, dengan PT Metropolis Propertindo Utama (MPU)

Pada tanggal 30 April 2013, SIH menandatangani Perjanjian Pendahuluan dengan MPU yang meliputi:

- Jual beli saham Siloam Hospitals Malang, Siloam Hospitals Salemba dan Siloam Hospitals Surabaya Sea Master;

c. Master Agreement between PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), a subsidiary, with PT Metropolis Propertindo Utama (MPU)

On April 30, 2013, SIH entered into a preliminary agreement with MPU which include:

- Sale and purchase of shares of Siloam Hospitals Malang, Siloam Hospitals Salemba and Siloam Hospitals Surabaya Sea Master;



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- Hak untuk membangun properti yang akan digunakan sebagai Siloam Hospitals Padang, Siloam Hospitals Bangka Belitung, Siloam Hospitals Semarang Srondol, Siloam Hospitals Bogor Internusa, Siloam Hospitals Jember, Siloam Hospitals Bluemall Bekasi, Siloam Hospitals Bekasi Grand Mall, Siloam Hospitals MT Haryono, Siloam Hospitals Salemba dan Siloam Hospitals Lampung;
- Perjanjian sewa properti yang akan digunakan sebagai Siloam Hospitals Surabaya Sea Master, Siloam Hospitals Pluit dan Siloam Hospitals Cempaka Putih; dan
- Perjanjian penawaran properti tertentu untuk dioperasikan sebagai Siloam Hospitals Purwakarta, Siloam Hospitals Ambon, Siloam Hospitals Lubuk Linggau, Siloam Hospitals Manado Kairagi, Siloam Hospitals Serang dan Siloam Hospitals Pekanbaru.

d. Perjanjian Fasilitas Lindung Nilai atas Utang Obligasi Berdenominasi US Dollar

Berikut adalah perjanjian fasilitas lindung nilai *non-deliverable USD call spread option* dengan BNP Paribas (BNP), Deutsch Bank AG (DBAG), J.P Morgan (S.E.A) Limited (JPM), Morgan Stanley & Co International Plc (MS) dan Nomura International Plc (NI) (Catatan 5):

Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Tanggal Transaksi/ Date of Transaction	Nilai/ Amount	Tingkat Premi per Tahun/ Annual Premium Rate	Harga Strike/ Strike Price	Tanggal Pengakhiran/ Due Date	Nilai Wajar pada/ Fair Value as of		Nilai Wajar pada/ Fair Value as of	
						31 Desember/ December 31,		31 Desember/ December 31,	
						2019 ^{*)}	2018 ^{**)}	2019 ^{*)}	2018 ^{**)}
			USD	Rp		USD	Rp	USD	Rp
JPM	8 April / April 8, 2019	9,300,000	2.210% ¹⁾	11,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	858,153	11,929	844,153	12,224
JPM	16 Agustus / August 16, 2016	50,000,000	0.320% ¹⁾	11,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	6,924,708	96,260	6,772,084	98,067
JPM	7 November / November 7, 2016	140,000,000	0.300% ²⁾	11,500 - 14,500	31 Oktober / October 31, 2026	16,247,249	225,853	11,932,965	172,801
JPM	7 Juli / July 7, 2017	150,000,000	0.515% ¹⁾	13,300 - 17,000	31 Oktober / October 31, 2026	371,344	5,162	33,068	479
BNP	16 Agustus / August 16, 2016	100,000,000	0.385% ²⁾	11,500 - 12,500	11 April / April 11, 2022	5,338,438	74,210	6,073,771	87,954
BNP	5 Mei / May 5, 2014	50,000,000	1.140% ¹⁾	11,500 - 13,500	11 April / April 11, 2022	4,597,576	63,911	4,814,614	69,720
BNP	8 Juni / June 8, 2016	100,000,000	0.490% ¹⁾	13,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	1,464,960	20,364	1,538,864	22,284
BNP	7 Nopember / November 7, 2016	115,000,000	0.155% ²⁾	12,500 - 14,000	31 Oktober / October 31, 2026	9,114,633	126,703	8,576,724	124,200
BNP	7 Nopember / November 7, 2016	30,000,000	0.335% ¹⁾	12,500 - 14,500	31 Oktober / October 31, 2026	2,018,318	28,057	1,962,659	28,421
BNP	7 November / November 7, 2016	63,000,000	0.325% ²⁾	11,500 - 12,500	31 Oktober / October 31, 2026	1,580,522	21,971	2,277,484	32,980
BNP	7 November / November 7, 2016	14,030,000	1.300% ²⁾	11,500 - 14,500	31 Oktober / October 31, 2026	698,521	9,710	1,036,901	15,015
BNP	7 Juli / July 7, 2017	125,000,000	0.518% ²⁾	13,300 - 17,000	31 Oktober / October 31, 2026	476,180	6,619	27,557	400
DBAG	16 Agustus / August 16, 2016	50,000,000	0.485% ¹⁾	11,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	6,718,701	93,397	6,672,866	96,630
DBAG	16 Agustus / August 16, 2016	25,000,000	0.120% ¹⁾	12,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	2,041,125	28,374	1,979,059	28,659
DBAG	5 Mei / May 5, 2014	50,000,000	1.205% ¹⁾	11,500 - 13,500	11 April / April 11, 2022	4,476,460	62,227	4,537,576	65,709
DBAG	7 November / November 7, 2016	75,000,000	0.330% ²⁾	11,500 - 12,500	31 Oktober / October 31, 2026	1,807,213	25,122	2,577,733	37,328
MS	8 Juni / June 8, 2016	50,000,000	0.480% ¹⁾	13,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	750,577	10,434	936,943	13,568
MS	16 Agustus / August 16, 2016	50,000,000	0.800% ¹⁾	12,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	4,172,515	58,002	3,906,575	56,571
MS	7 November / November 7, 2016	118,000,000	0.155% ²⁾	12,500 - 14,500	31 Oktober / October 31, 2026	9,305,498	129,356	7,899,905	114,399
MS	7 November / November 7, 2016	50,000,000	0.330% ²⁾	11,500 - 12,500	31 Oktober / October 31, 2026	1,242,905	17,278	1,718,488	24,885
MS	7 Juli / July 7, 2017	150,000,000	0.520% ¹⁾	13,300 - 17,000	31 Oktober / October 31, 2026	456,352	6,344	33,068	479
NI	16 Agustus / August 16, 2016	25,000,000	0.050% ¹⁾	12,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	2,083,324	28,960	1,891,836	27,396
NI	16 Agustus / August 16, 2016	50,000,000	0.450% ²⁾	11,500 - 14,000	11 April / April 11, 2022	6,746,350	93,781	6,182,118	89,523
NI	24 April / April 24, 2014	50,000,000	1.200% ¹⁾	11,500 - 13,500	11 April / April 11, 2022	4,511,696	62,717	4,148,211	60,070
NI	7 November / November 7, 2016	75,000,000	0.390% ²⁾	11,500 - 12,500	31 Oktober / October 31, 2026	1,507,356	20,953	1,674,829	24,253
Jumlah/ Total						95,510,674	1,327,694	90,050,051	1,304,015

¹⁾ Beban premium dibayar setiap tanggal 11 April dan 11 Oktober/ Premium will be paid every April 11 and October 11

²⁾ Beban premium dibayar setiap tanggal 30 April dan 31 Oktober/ Premium will be paid every April 30 and October 31

^{*)} Nilai Wajar Pada tahun 2019 menggunakan laporan *Mark to Market* Bank/ Fair Value In 2019 using Banks *Mark to Market* report

^{**) Nilai Wajar Pada tahun 2018 menggunakan laporan *KJPP*/ Fair Value In 2018 using the *KJPP* report}

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- Right to build properties that will be used as Siloam Hospitals Padang, Siloam Hospitals Bangka Belitung, Siloam Hospitals Semarang Srondol, Siloam Hospitals Bogor Internusa, Siloam Hospitals Jember, Siloam Hospitals Bluemall Bekasi, Siloam Hospitals Bekasi Grand Mall, Siloam Hospitals MT Haryono, Siloam Hospitals Salemba and Siloam Hospitals Lampung;
- Property lease agreement that will be used as Siloam Hospitals Surabaya Sea Master, Siloam Hospitals Pluit and Siloam Hospitals Cempaka Putih; and
- The agreement to offer certain property to be operated as Siloam Hospitals Purwakarta, Siloam Hospitals Ambon, Siloam Hospitals Lubuk Linggau, Siloam Hospitals Manado Kairagi, Siloam Hospitals Serang and Siloam Hospitals Pekanbaru.

d. Hedging Facilities Agreements on Bonds denominated in U.S. Dollar

The following are non-deliverable USD call spread option hedging agreements with BNP Paribas (BNP), Deutsch Bank AG (DBAG), J.P Morgan (S.E.A) Limited (JPM) Morgan Stanley & Co International Plc (MS) and Nomura International Plc (NI) (Note 5):

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

e. Perjanjian Jual Beli dan Swap

Pada tanggal 20 Oktober 2015, PT Saputra Karya (SK), entitas anak, dan PT Tata Prima Indah (TPI), entitas anak dari First REIT, entitas asosiasi, menandatangani perjanjian jual, beli, bangun dan swap tanah dan properti Rumah Sakit Siloam Hospitals Surabaya (SHS lama) yang berlokasi di Gubeng, Surabaya. Pada perjanjian tersebut disepakati bahwa SK akan membeli sebidang tanah yang dimiliki oleh TPI yang berlokasi di Gubeng Surabaya, dimana tanah tersebut berdampingan dengan tanah milik SK dengan harga Rp79.150. Atas pembelian tanah milik TPI, SK berkewajiban untuk membangun Rumah Sakit Siloam Hospitals Surabaya yang baru (SHS baru) di atas tanah miliknya (tanah lama dan tanah yang baru dibeli dari TPI). Setelah SHS baru selesai dibangun, SK akan menjual SHS baru kepada TPI dengan harga sebesar Rp873.190. Setelah proses pengalihan SHS baru selesai dilakukan, TPI akan menjual kembali SHS lama kepada SK dengan harga sebesar Rp265.450.

Pada tanggal 10 Januari 2020, Bowsprit Capital Corporation Limited, sebagai manager dari First Real Estate Investment Trust (First Reit), mengumumkan bahwa kejadian amblesnya jalan di Gubeng, Surabaya akan berdampak signifikan terhadap Perjanjian Jual, Beli, Bangun dan Swap Tanah dan Properti Rumah Sakit yang berlokasi di Gubeng, Surabaya yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2015 antara PT Saputra Karya, entitas anak dan PT Tata Prima Indah, entitas anak dari First Reit, entitas asosiasi.

Amblesnya jalan ini akan berdampak serius terhadap penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah sakit baru di lokasi tersebut yang saat ini sudah tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditangguhkan diantaranya karena menunggu hasil dari investigasi.

Pada tanggal 18 Mei 2020, First Reit mengumumkan pembaharuan mengenai kelanjutan dari proses proyek tersebut, dimana berdasarkan Perjanjian Jual, Beli, Bangun dan Swap Tanah dan Properti Rumah Sakit, TPI memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian jika pekerjaan pembangunan tidak selesai pada tanggal 28 Juni 2020. First Reit bermaksud untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan telah melakukan diskusi dengan semua pemangku kepentingan untuk penyelesaian masalah ini.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

e. Sale Purchases and Swap Agreement

On October 20, 2015, PT Saputra Karya (SK), a subsidiary, and PT Tata Prima Indah (TPI), a subsidiary of First REIT, an associate, entered into an agreement of sales, purchase, construct and swap of land and property of Siloam Hospitals Surabaya (existing SHS) located in Gubeng Surabaya. As agreed in the agreement, SK will buy a parcel of land owned by TPI, located next to the land owned by SK in Gubeng, Surabaya, at the price of Rp79,150. Upon the purchasing of TPI's land, SK has the obligation to construct the new Siloam Hospitals Surabaya (new SHS) on its land (existing land and the land purchased from TPI). After the new SHS construction completed, SK will sell the new SHS to TPI with at the price of Rp873,190. After the new SHS transferred process completed, TPI will sell back the existing SHS to SK at the price of Rp265,450.

On January 10, 2020, Bowsprit Capital Corporation Limited, as manager of First Real Estate Investment Trust (First Reit), announced that the road subsidence in Gubeng, Surabaya will have a significant impact to the Sale, Purchase, Construct and Swap of Land and Property of Hospital Agreement located in Gubeng, Surabaya signed on October 20, 2015 between PT Saputra Karya, a subsidiary and PT Tata Prima Indah, a subsidiary of First Reit, an associate.

The road subsidence has had a serious impact on the development works of new hospital building in that location, which are currently no longer progressing on the proposed timetable and are on hold pending amongst other things the outcome of the investigations.

On May 18, 2020, First Reit announced update on the continuation of the project process, which under the Sale, Purchase, Construct and Swap of Land and Property of Hospital Agreement, TPI have rights to terminate the agreement. First reit intends to terminate the agreement and had conducted discussions with all stakeholders to reach a settlement on this matter.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Grup telah membentuk cadangan kemungkinan kerugian atas kejadian ini.

f. Perjanjian Operasi Bersama

PT Megakreasi Cikarang Damai, entitas anak, membuat perjanjian Kerjasama Operasi atas pengelolaan Delta Silicon 8 dengan PT Cikarang Hijau Indah sebagai pemilik tanah seluas 227 hektar. Berdasarkan akta No. 26 tanggal 24 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notaris di Tangerang, kerjasama operasi dilakukan untuk merencanakan, mengembangkan, membangun, memasarkan, menjual, menyewakan dan mengelola lahan kerjasama sebagai kawasan industri berikut infrastruktur dan fasilitasnya. Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dan akan otomatis diperpanjang jika penjualan mencapai 50% dari keseluruhan tanah tersedia.

Pada tahun 2019, perjanjian tersebut diadendum sesuai dengan akta No.45 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notaris di Tangerang. Para pihak mengakui dan sepakat bahwa lahan kerjasama seluas 227 hektar setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi sebesar lebih kurang 224 hektar. Jangka waktu perjanjian diperpanjang 1 tahun sejak tanggal addendum perjanjian, kecuali diperpanjang melalui kesepakatan tertulis para pihak.

Penjualan tanah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing telah mencapai 111 hektar dan 86 hektar.

**g. Fasilitas Jual dan Sewa Balik dari
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
(MUFG)**

Pada tanggal 2 Desember 2019, PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), entitas anak, memperoleh fasilitas jual dan sewa balik dari MUFG dengan batas fasilitas sebesar Rp62.000.

Pada 31 Desember 2019 nilai fasilitas ini adalah nihil.

**h. Rencana Pembelian Kembali Saham dalam
Rangka Management Stock Ownership
Program (“MESOP”)**

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), entitas anak, No. 17 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The Group has provided allowance for possible losses of this event.

f. Joint operation Agreement

PT Megakreasi Cikarang Damai, a subsidiary, entered the joint operation agreement for managing Delta Silicon 8 with PT Cikarang Hijau Indah as the owner's of the 227 hectare of land. Based on the Deed No. 26 dated July 24, 2014 which was made in the presence of Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notary in Tangerang, the joint operation includes planning, development, construction, marketing, selling, rental and managing of land area of the joint operation as the industrial area including its infrastructures and facilities. Term of the agreement is two (2) years and will be automatically extended if sales have been reached 50% of the total available land.

In 2019, there was an addendum to the agreement in accordance with deed No.45 dated January 29, 2019 which was made in the presence of Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notary in Tangerang. The parties acknowledge and agree that the cooperation land area of 227 hectares after remeasurements be of approximately 224 hectares. The term of the agreement is extended by 1 year from the date of the addendum to the agreement, unless extended by written agreement of the parties.

Sales of land for the years ended December 31, 2019 and 2018, had reached 111 hectares and 86 hectares, respectively.

**g. Sale and Leaseback Facility from
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
(MUFG)**

On December 2, 2019, PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), a subsidiary, obtained sale and leaseback facility from MUFG with facility limit amounting Rp62,000.

As of December 31, 2019, the amount of this facility is nil.

**h. Share Buyback Plan for Management Stock
Ownership Program (“MESOP”)**

Based on the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders' PT Siloam International Hospitals Tbk (SIH), a subsidiary, No. 17 dated 9 December 2019 made before Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, the shareholders' SIH agreed on the plan

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

SIH menyetujui atas rencana pembelian kembali saham SIH, sebanyak-banyaknya 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam SIH atau sebanyak-banyaknya 16.257.600 lembar saham dalam rangka pelaksanaan program MESOP. Sampai pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, SIH belum melaksanakan pembelian kembali saham tersebut.

i. Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBG.CB1/SPPK.155/2019 tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp700.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan. Sampai pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah mencairkan fasilitas ini sebesar Rp400.000.

47. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang mempunyai aktivitas bisnis di mana hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen secara berkala, dan informasi keuangannya dapat disajikan secara terpisah.

Perusahaan memiliki 3 (tiga) segmen operasi, yaitu:

- (i) *Real Estate Development*, meliputi antara lain usaha-usaha bidang real estat pada pengembangan perkotaan dan pembangunan sarana dan prasarana, food business serta investasi lainnya, real estat pada proyek pembangunan terpadu berskala besar dan pembangunan sarana dan prasarana.
- (ii) *Real Estate Management & Services*, meliputi antara lain usaha-usaha bidang real estat pada proyek pembangunan dan pengelolaan pusat belanja, pelayanan kesehatan, perhotelan dan restoran, pengelolaan kota dan air, jasa rekreasi, jasa transportasi dan jasa perbaikan.
- (iii) *Fund Management / Investments*, meliputi antara lain usaha-usaha bidang jasa manajemen.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
*For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)*

to buyback SIH's shares at a maximum of 1% of the issued and paid-up capital of SIH or up to 16,257,600 shares in the framework of implementing the MESOP program. As of the issuance date of the consolidated financial statements, SIH has not executed the buyback of shares.

i. Credit Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Credit Agreement No. CBG.CB1/SPPK.155/2019 dated December 6, 2019, the Company obtained Working Capital Loan (KMK) facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the maximum credit limit of Rp700,000. This facility bears interest rate of 10.5% per annum and the term of the facility is 12 (twelve) months. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has drawn down this facility amounted to Rp400,000.

47. Operating Segment

An operating segment is a component of the entity that engages in business activity whose operating results are regularly reviewed by management, and its financial information can be presented separately.

The Company has 3 (three) operating segments i.e.:

- (i) Real Estate Development, which comprises, among others, activities in real estate in urban development and development of facilities and its infrastructure, food business and other investments, real estate in large scale integrated development project and its infrastructure development.*
- (ii) Real Estate Management & Services, which comprises among others, activities in real estate in developing and managing shopping center, health services, hotels, restaurants, town management and water and sewage treatment, recreation center, transportation and maintenance services.*
- (vi) Fund Management / Investments, which comprises, among others, activities in management services.*



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Berikut segmen operasi Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The following are Group's operating segment for the years ended December 31, 2019 and 2018:

	2019				
	Real Estate Development	Real Estate Management & Services	Fund Management / Investments	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan/ Revenue	3,098,036	9,220,329	125,173	(123,290)	12,320,248
Beban Pajak Final/ Final Tax Expenses	(89,769)	(53,306)	--	--	(143,075)
Pendapatan Neto/ Net Revenues	3,008,267	9,167,023	125,173	(123,290)	12,177,173
Laba Bruto/ Gross Profit	927,999	3,523,285	125,173	(123,290)	4,453,167
Beban Penjualan/ Selling Expenses	(153,175)	(342,045)	(220)	2,026	(493,414)
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administration Expenses	(1,261,374)	(2,319,930)	(49,975)	121,264	(3,510,015)
Penghasilan Bunga/ Interest Income	220,472	12,786	154	--	233,412
Beban Bunga dan Keuangan/ Interest Expenses and Financial Charges	(1,082,424)	(54,736)	(395)	--	(1,137,555)
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Neto/ Other Income (Expenses) - Net	(818,963)	(533,856)	(1,142)	--	(1,353,961)
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama-Neto/ Share in the Profit of Associates and Joint Venture-Net	141,964	1,237	--	--	143,201
Rugi Sebelum Beban Pajak/ Loss Before Tax	(2,025,501)	286,741	73,595	--	(1,665,165)
Manfaat (Beban) Pajak/ Tax Benefits (Expenses)					
Kini/ Current	(185,658)	(216,132)	1,967	--	(399,823)
Tangguhan/ Deferred	7,273	(3,703)	--	--	3,570
Rugi Tahun Berjalan/ Loss for the Year	(2,203,886)	66,906	75,562	--	(2,061,418)
Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada/ Loss for the Year attributable to:					
Pemilik Entitas Induk/ Owners of the Parent	(2,119,985)	61,124	75,562	--	(1,983,299)
Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interests	(83,900)	5,781	--	--	(78,119)
(2,203,885)	66,905	75,562	--	--	(2,061,418)
Aset Segmen/ Segment Assets	38,645,723	11,833,562	135,656	(26,678)	50,588,263
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Investments in Associates and Joint Venture	4,385,484	105,838	--	--	4,491,322
Jumlah Aset/ Total Assets	43,031,207	11,939,400	135,656	(26,678)	55,079,585
Liabilitas Segmen/ Segment Liabilities	17,300,865	3,407,726	21,333	(26,678)	20,703,246
Belanja Modal/ Capital Expenditures	66,010	572,283	--	--	638,293
Penyusutan/ Depreciation	63,101	636,681	6,002	--	705,784
Beban Non Kas Selain Penyusutan/ Non-Cash Expenses Other than Depreciation	681,281	260,194	--	--	941,475

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2018				
	Real Estate Development	Real Estate Management & Services	Fund Management / Investments	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan/ Revenue	3,208,623	8,146,439	213,289	(115,552)	11,452,799
Beban Pajak Final/ Final Tax Expenses	(143,305)	(34,475)	--	--	(177,780)
Pendapatan Neto/ Net Revenues	3,065,318	8,111,964	213,289	(115,552)	11,275,019
Laba Bruto/ Gross Profit	1,958,558	2,799,466	431,764	(115,552)	5,074,236
Beban Penjualan/ Selling Expenses	(366,568)	(199,775)	(86,685)	1,466	(651,562)
Beban Umum dan Administrasi/ <i>General and Administration Expenses</i>	(1,071,342)	(1,828,228)	(150,421)	114,086	(2,935,905)
Penghasilan Bunga/ Interest Income	86,930	17,661	3,823	--	108,414
Beban Bunga dan Keuangan/ <i>Interest Expenses and Financial Charges</i>	(651,212)	(43,078)	(54)	--	(694,344)
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Neto/ <i>Other Income (Expense)-Net</i>	1,721,695	(213,908)	(77,251)	--	1,430,536
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama-Neto/ <i>Share in the Profit (loss) of Associates and Joint Venture-Net</i>	(273,414)	--	2,204	--	(271,210)
Laba Sebelum Beban Pajak/ Profit Before Tax	1,404,647	532,138	123,380	--	2,060,165
Manfaat (Beban) Pajak/ Tax Benefits (Expenses)					
Kini/ Current	(196,905)	(172,969)	(23,252)	--	(393,126)
Tangguhan/ Deferred	5,565	733	(10,652)	--	(4,354)
Laba Tahun Berjalan/ Profit for the Year	1,213,307	359,902	89,476	--	1,662,685
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada/ <i>Profit for the Year attributable to:</i>					
Pemilik Entitas Induk/ Owners of the Parent	272,545	347,185	100,247	--	719,977
Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-Controlling Interests</i>	940,762	12,717	(10,771)	--	942,708
1,213,307	359,902	89,476	--	1,662,685	
Aset Segmen/ Segment Assets	32,873,423	10,550,848	958,981	--	44,383,252
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ <i>Investments in Associates and Joint Venture</i>	4,554,223	145,985	--	--	4,700,208
Jumlah Aset/ Total Assets	37,427,646	10,696,833	958,981	--	49,083,460
Liabilitas Segmen/ Segment Liabilities	21,427,262	2,573,796	335,334	--	24,336,392
Belanja Modal/ Capital Expenditures	103,368	809,429	4,746	--	917,543
Penyusutan/ Depreciation	71,461	546,859	12,455	--	630,775
Beban Non Kas Selain Penyusutan/ <i>Non-Cash Expenses Other than Depreciation</i>	294,390	69,280	26,234	--	389,904

**48. Aset dan Liabilitas Moneter dalam
Mata Uang Asing**

Sehubungan dengan saldo liabilitas dalam mata uang asing, Perusahaan telah melakukan beberapa kontrak derivatif dengan pihak lain untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing (Catatan 46.d).

**48. Monetary Assets and Liabilities Denominated in
Foreign Currencies**

In relation with liability balances denominated in foreign currencies, the Company has entered into several derivative contracts with other parties to manage the risk of foreign currency exchange rates (Note 46.d).



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019							
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies							
	USD	SGD	EUR	AUD	GBP	ZAR		
Aset							Assets	
Kas dan Setara Kas	130,406,720	69,470,063	178,596	381,006	314,858	7,959,933	Cash and Cash Equivalents	
Piutang Usaha	--	20,689	--	--	--	--	Trade Accounts Receivable	
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	13,486,149	--	--	--	--	Other Current Financial Assets	
Piutang Pihak Bereaksi Non-Usaha	2,356,975	--	--	--	--	--	Due from Related Parties Non-Trade	
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	12,487,692	--	--	--	--	Other Non-Current Financial Assets	
Jumlah Aset	132,763,695	95,464,593	178,596	381,006	314,858	7,959,933	Total Assets	
Liabilitas							Liabilities	
Utang Usaha	632,870	--	10,354,836	--	--	--	Trade Accounts Payable	
Beban Akrual	12,561,799	--	1,115,324	--	--	--	Accrued Expenses	
Utang Obligasi	826,330,000	--	--	--	--	--	Bonds Payable	
Jumlah Liabilitas	839,524,669	--	11,470,160	--	--	--	Total Liabilities	
Jumlah Aset (Liabilitas) - Neto	(706,760,974)	95,464,593	(11,291,564)	381,006	314,858	7,959,933	(9,002,231)	Total Assets (Liabilities) - Net

	2018							
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies							
	USD	SGD	EUR	AUD	GBP	ZAR		
Aset							Assets	
Kas dan Setara Kas	6,670,889	5,943,218	59,809	44,567	312,750	7,809,596	Cash and Cash Equivalents	
Piutang Usaha	1,380,769	580,171	--	--	--	--	Trade Accounts Receivable	
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	13,221,099	--	--	--	--	Other Current Financial Assets	
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	3,740,283	--	--	--	--	Other Non-Current Financial Assets	
Jumlah Aset	8,051,658	23,484,771	59,809	44,567	312,750	7,809,596	Total Assets	
Liabilitas							Liabilities	
Utang Usaha	828,933	20,632,671	--	--	--	--	Trade Accounts Payable	
Beban Akrual	13,244,437	1,252,859	--	--	--	--	Accrued Expenses	
Utang Bank Jangka Pendek	50,000,000	--	--	--	--	--	Short-Term Bank Loans	
Utang Obligasi	910,000,000	--	--	--	--	--	Bonds Payable	
Jumlah Liabilitas	974,073,370	21,885,530	--	--	--	--	Total Liabilities	
Jumlah Aset (Liabilitas) - Neto	(966,021,712)	1,599,241	59,809	44,567	312,750	7,809,596	(13,956,957)	Total Assets (Liabilities) - Net

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, Rupiah melemah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat senilai 6% dan Dolar Singapura senilai 1%. Jika aset dan liabilitas moneter di atas diukur dengan menggunakan kurs tersebut, dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak tahun berjalan berkurang sebesar Rp617.009.

Until the issuance of the consolidated financial statements, the Rupiah had weakened against United States Dollar by 6% and Singapore Dollar by 1%. If the above monetary asset and liabilities are measured using those exchange rates, with all other variables remain constant, profit before current income tax would have been lower by Rp617,009.

49. Kasus-Kasus Hukum

Berikut merupakan kasus-kasus hukum grup pada tanggal 31 Desember 2019:

a. Sebagai Penggugat

1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Tergugat/ Defendant	Status Terakhir Perkara/ Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara/ Object of the Case
Najmiah Muin dan/and Fatimah Kalla	Masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under Judicial Review Process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dinyatakan kalah di tingkat kasasi di Mahkamah Agung/ <i>GMTD lost the case by cassation in Supreme Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 60,000 m ² / sqm
John Tandary	Masih dalam melakukan upaya hukum pidana dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali/ <i>Still under conducting a criminal lawsuit with the intention of being used to conduct a judicial review</i>	GMTD dinyatakan kalah di tingkat kasasi di Mahkamah Agung/ <i>GMTD lost the case by cassation in Supreme Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 68,929 m ² / sqm
Tajuddin Molla	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 84,141 m ² / sqm

49. Litigation Cases

As of December 31, 2019, litigation cases of Group are as follows:

a. As a Plaintiff

1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Tergugat/ Defendant	Status Terakhir Perkara/ Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara/ Object of the Case
H Najmiah Muin, Muhyina Muin, Muh. Nur Majnul Muin, Bobby Sunardi Edward, Lenny Setiono, Daeng Bombong, BPN Kota Makassar	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung/ <i>GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 21,023 m ² / sqm
Kantor Pertanahan kota Makassar/ Land Office of Makassar	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD telah dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/ <i>GMTD has lost the case in Makassar State Administrative High Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 4,691 m ² / sqm

b. Sebagai Tergugat**1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk**

Penggugat/ Plaintiff	Status Terakhir Perkara/ Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara/ Object of the Case
Mutiara Dg Ngintang	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 12,700 m ² / sqm
Hj Diana Chaeruddin	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court of the Republic of Indonesia.</i>	Tanah Seluas/ Land of 19,995 m ² / sqm
Drs H. Andi Mappaturung	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Still under cassation process in <i>Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD lost the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 10,358 m ² / sqm
Siti Aminah	Masih dalam upaya hukum peninjauan kembali II di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under a judicial review II in Supreme Court of the Republic of Indonesia.</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung/ <i>GMTD lost the case by judicial review in Supreme Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 7,613 m ² / sqm
Kartini	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 40,040 m ² / sqm
Junaid Dg Sanre	Masih dalam upaya hukum proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>Still under review in High Court of Makassar.</i>	GMTD dinyatakan menang di Pengadilan Negeri Makassar/ <i>GMTD won the case in Makassar District Court.</i>	Tanah Seluas/ Land of 19,288 m ² / sqm
Mariama Dg Bau	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD lost the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 20,000 m ² / sqm
Andi Mappaturung	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 20,134 m ² / sqm
Josef Lirungan	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 2,117 m ² / sqm
Chiandra Th dan/and Cicilia	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 9,173 m ² / sqm

b. As a Defendant**1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk**



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Penggugat/ <i>Plaintiff</i>	Status Terakhir Perkara/ <i>Latest Status of the Case</i>	Putusan Terakhir <i>Latest Decision</i>	Objek Perkara/ <i>Object of the Case</i>
Abdul Karim Dg Sirua	Masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>Still under appeal process in High Court of Makassar</i>	--	Tanah Seluas/ Land of 49,550 m ² / sqm
Sona Dg Selo	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar/ <i>GMTD won the case in High Court of Makassar.</i>	Tanah Seluas/ Land of 60,000 m ² / sqm

2. PT Lippo Cikarang Tbk (LC)

Penggugat/ <i>Plaintiff</i>	Status Terakhir Perkara/ <i>Latest Status of the Case</i>	Putusan Terakhir <i>Latest Decision</i>	Objek Perkara/ <i>Object of the Case</i>
Tarman Bin H. Kiman, Sarkinah Binti H. Kiman, Dede Marwati Binti H. Kiman, Emar Martinah Binti H. Kiman, H.J. Ich Binti H. Bahrudin, H. Engkos Binti H. Bahrudin, H.J. Nesih	Kasasi telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Cassation has processed in Still under cassation process in Supreme Court of Republic of Indonesia</i>	LC dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Mahkamah Agung/ <i>LC lost the case in Supreme Court</i>	Tanah Seluas/ Land of 38,770 m ² / sqm
Udi Bin Uji, H. Karna Alias H. Samin Bin Karim Tatang Suganda Bin Rohadi, Titin Kartika Binti Rohadi, Ade Handri Bin Rohadi, Linda Wati Binti Rohadi, Euis Sutari Binti Rohadi Purnamasari Binti Rohadi, Nining Hasanah Binti Rohadi, Karyati Sri Muningsih Binti Rohadi, Nurlela Sari Binti Rohadi, Undar Prayoga Alias Jusup N.	Berencana untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Plan to conduct judicial review to Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	LC dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di tingkat Mahkamah Agung/ <i>LC lost the case in Supreme Court</i>	Tanah Seluas/ Land of 36,320 m ² / sqm
Udi Bin Uji	Masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ <i>Still under cassation process in Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	LC dalam perkara tersebut dinyatakan kalah di Pengadilan Tinggi Jawabarat/ <i>LC lost the case in West Java High Court</i>	Tanah Seluas/ Land of 15,620 m ² / sqm

c. Sejak tanggal 15 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang atas dugaan suap terkait pengajuan perijinan proyek Meikarta yang dimiliki oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas asosiasi. Sampai dengan tanggal persetujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, kasus ini telah memasuki tahap persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung. Manajemen PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, sedang melakukan evaluasi atas hasil persidangan dan penyelesaian kasus ini dan belum dapat mengambil kesimpulan serta terdapat ketidakpastian atas potensi dampak hukum yang mungkin dapat ditimbulkan dari proses pemeriksaan kasus ini terhadap LC dan MSU, entitas asosiasi.

c. Since October 15, 2018, the Corruption Eradication Commission has examined several person for alleged bribery related to the submission of permits for the Meikarta's project that owned by PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), an associate. Until the date of approval for the issuance of the interim consolidated financial statements, this case has entered the trial phase in Bandung Corruption Court. PT Lippo Cikarang Tbk (LC)'s management still evaluate the results of the trial and adjudication of this case and is not able to have a conclusion and there is uncertainties on the potential law suit that might arised from the investigation of the case to LC and MSU, an associate.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

**50. Instrumen Keuangan dan Manajemen
Risiko Keuangan**

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas, risiko bunga dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

Direksi telah menelaah kebijakan manajemen risiko keuangan secara berkala.

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha, aset keuangan tidak lancar lainnya dan investasi tersedia untuk dijual. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018		<i>Total maximum credit risk exposure of financial assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:</i>
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	
Aset Keuangan					<i>Financial Assets</i>
Diukur pada nilai wajar Melalui laba rugi					<i>Fair value through profit or loss</i>
<i>Call Spread Option</i>	1,327,694	1,327,694	1,304,015	1,304,015	<i>Call Spread Option</i>
Aset Keuangan Lancar Lainnya	116,112	116,112	145,726	145,726	<i>Other Current Financial Assets</i>
Pinjaman yang diberikan dan piutang					
Kas dan Setara Kas	4,685,129	4,685,129	1,818,430	1,818,430	<i>Loans and Receivables</i>
Piutang Usaha	2,151,980	2,151,980	2,401,538	2,401,538	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Aset Keuangan Lancar Lainnya	164,883	164,883	271,664	271,664	<i>Trade Accounts Receivable</i>
Piutang Pihak Berelasi Non-usaha	40,494	40,494	447,082	447,082	<i>Other Current Financial Assets</i>
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	598,517	598,517	652,092	652,092	<i>Due from Related Parties Non-trade</i>
Tersedia untuk Dijual					<i>Other Non-Current Financial Assets</i>
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	230,139	230,139	217,529	217,529	<i>Available-for-Sale Financial Assets</i>
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	277,293	277,293	415,134	415,134	<i>Other Non-Current Financial Assets</i>
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					<i>Held-to-Maturity Investments</i>
Investasi pada Obligasi	1,959	1,959	1,985	1,985	<i>Investments in Bond</i>
Jumlah Aset Keuangan	9,594,200	9,594,200	7,675,195	7,675,195	Total Financial Assets

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan perusahaan global dan domestik.

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum jatuh tempo dan tidak

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

50. Financial Instruments and Financial Risk Management

The main financial risks faced by the Group are credit risk, foreign exchange rate risk, liquidity risk, interest risk and price risk. Attention of managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in Indonesian and international markets.

The Directors have reviewed the financial risk management policy regularly.

(i) Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that potentially contain credit risk are cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other current financial assets, due from related parties, other non-current financial assets and investment available for sale. The maximum total credit risks exposure is equal to the amount of the respective accounts.

Total maximum credit risk exposure of financial assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Group manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for respective customers and being more selective in choosing global and domestic company.

The following table analyzes asset was due but not impaired and not yet due but not impaired and financial assets that



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

mengalami penurunan nilai serta aset keuangan
yang ditentukan secara individu mengalami
penurunan nilai:

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

are individually to be impaired:

Mengalami Penurunan Nilai Individual/ Individually Impaired	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Overdue But not Impaired			Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Not Yet Due and Not Impaired		Jumlah/ Total
	0 - 90 Hari/ Days	91 - 180 Hari/ Days	> 181 Hari/ Days	Perusahaan Global/ Global Company	Perusahaan Domestik/ Domestic Company	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan/ Financial Assets						
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	--	--	--	1,327,694	--	1,327,694
<i>Call Spread Option</i>	--	--	--	--	--	--
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets	--	--	--	--	116,112	116,112
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	--	--	--	123,587	4,561,542	4,685,129
Piutang Usaha/ Trade Accounts Receivable	262,972	776,755	177,416	185,638	--	1,012,171
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets	123,625	--	--	--	52,976	111,907
Piutang Pihak Berelasi Non-usaha/ Due from Related Parties Non-trade	11,522	--	--	--	--	40,494
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	--	--	--	--	48,267	550,250
Tersedia untuk Dijual/ Available-for-Sale				230,139	--	230,139
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Available-for-Sale Financial Assets	--	--	--	--	--	--
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	--	--	--	--	277,293	277,293
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/ Held-to-Maturity					1,959	1,959
Investasi pada Obligasi/ Investment in Bond	--	--	--	--	--	--
Jumlah/ Total	398,119	776,755	177,416	185,638	1,782,663	6,671,728
						9,992,319
2018						
Mengalami Penurunan Nilai Individual/ Individually Impaired	0 - 90 Hari/ Days	91 - 180 Hari/ Days	> 181 Hari/ Days	Perusahaan Global/ Global Company	Perusahaan Domestik/ Domestic Company	Jumlah/ Total
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan/ Financial Assets						
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss	--	--	--	1,304,015	--	1,304,015
<i>Call Spread Option</i>	--	--	--	--	--	--
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets	--	--	--	--	145,726	145,726
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	--	--	--	106,028	1,712,402	1,818,430
Piutang Usaha/ Trade Accounts Receivable	225,405	1,089,796	169,013	410,809	92,000	639,920
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets	57,809	--	--	--	55,186	216,478
Piutang Pihak Berelasi Non-usaha/ Due from Related Parties Non-trade	12,816	--	--	--	--	447,082
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	--	--	--	--	39,658	612,434
Tersedia untuk Dijual/ Available-for-Sale					45,712	217,529
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Available-for-Sale Financial Assets	--	--	--	--	171,817	217,529
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	--	--	--	--	131,710	283,424
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/ Held-to-Maturity						415,134
Investasi pada Obligasi/ Investment in Bond	--	--	--	--	--	--
Jumlah/ Total	296,030	1,089,796	169,013	410,809	1,774,309	4,231,268
						7,971,225

Grup telah mencatat penyisihan penurunan nilai
piutang usaha dan piutang lain-lain yang telah
jatuh tempo (Catatan 4 dan 5).

Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang
terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan
setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset

The Group has provided allowance for
impairment in value of trade accounts
receivable and other accounts receivable
(Notes 4 and 5).

Not yet due financial assets which have
indication of credit risks are mainly from cash
and cash equivalents, trade accounts

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

keuangan tersedia untuk dijual, asset keuangan lancar lainnya dan dana yang dibatasi penggunaannya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang belum jatuh tempo tidak memiliki risiko kredit yang signifikan, karena piutang usaha atas penjualan unit properti, dijamin dengan properti yang sama, di mana jumlah eksposur risikonya lebih rendah dari nilai jaminannya, sedangkan piutang usaha nonproperti berasal dari pelanggan-pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik.

Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain hanya diberikan kepada *counterpart* yang memiliki rekam jejak yang baik.

(ii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:

	2019				Jumlah/ Total	
	Akan Jatuh Tempo dalam/ <i>Will Due In</i>			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ <i>Maturity not Determined</i>		
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less Than 1 Year</i>	1 - 5 Tahun/ <i>1 - 5 Years</i>	Lebih dari 5 Tahun/ <i>More than 5 Years</i>			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dikur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Measured at amortized cost</i>						
Utang Usaha/ <i>Trade Accounts Payable</i>	1,203,503	--	--	--	1,203,503	
Beban Akrual/ <i>Accrued Expenses</i>	1,727,891	--	--	--	1,727,891	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ <i>Short-Term Employment Benefits Liability</i>	280,631	--	--	--	280,631	
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loans</i>	653,174	--	--	--	653,174	
Pinjaman Anjak Piutang/ <i>Factoring Loan</i>	20,665	--	--	--	20,665	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Current Financial Liabilities</i>	656,181	--	--	--	656,181	
Utang Bank Jangka Panjang/ <i>Long-Term Bank Loans</i>	94,259	170,916	--	--	265,175	
Utang Sewa Pembiayaan/ <i>Finance Leases Obligation</i>	61,156	89,749	--	--	150,905	
Utang Obligasi/ <i>Bonds Payable</i>	--	6,546,266	4,615,283	--	11,161,549	
Utang Pihak Berelasi Non-usaha/ <i>Due to Related Parties Non-trade</i>	--	--	--	1,384	1,384	
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/ <i>Other Long-Term Financial Liabilities</i>	--	--	--	266,482	266,482	
Jumlah/ <i>Total</i>	4,697,460	6,806,931	4,615,283	267,866	16,387,540	

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

receivable, other receivables, available for sales financial assets, other current financial assets, and restricted fund.

Management is of the opinion that there is no significant credit risk on placements in banks, due to fund placements only to reputable and creditworthy banks.

Management believes that not yet due accounts receivable have no significant credit risk, because receivables from selling units of property are secured by the related properties, where as the risks exposure are lower than the security, while accounts receivable non-property are arisen from customers who have good track record.

Management believes that other receivables are given to counter parties who have good track record.

(ii) Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group manage this liquidity risk by maintaining an adequate level of cash and cash equivalents to cover Group's commitment in normal operation and regularly evaluates the projected and actual cash flow, as well as maturity date schedule of their financial assets and liabilities.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities based on maturity:



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	Akan Jatuh Tempo dalam/ Will Due In			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ Maturity not Determined	Jumlah/ Total
	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years			
	Rp	Rp	Rp		
<i>Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Measured at amortized cost</i>					
Utang Usaha/ <i>Trade Accounts Payable</i>	1,373,425	--	--	--	1,373,425
Beban Akrual/ <i>Accrued Expenses</i>	1,345,089	--	--	--	1,345,089
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ <i>Short-Term Employment Benefits Liability</i>	107,271	--	--	--	107,271
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loans</i>	1,384,050	--	--	--	1,384,050
Pinjaman Anjak Piutang/ <i>Factoring Loan</i>	--	74,000	--	--	74,000
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Current Financial Liabilities</i>	636,863	--	--	--	636,863
Utang Bank Jangka Panjang/ <i>Long-Term Bank Loans</i>	111,162	387,875	--	--	499,037
Utang Sewa Pembiayaan/ <i>Finance Leases Obligation</i>	45,186	131,404	--	--	176,590
Utang Obligasi/ <i>Bonds Payable</i>	--	6,896,625	5,841,021	--	12,737,646
Utang Pihak Berelasi Non-usaha/ <i>Due to Related Parties Non-trade</i>	--	--	--	2,205	2,205
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/ <i>Other Long-Term Financial Liabilities</i>	--	--	--	281,254	281,254
Jumlah/ <i>Total</i>	5,003,046	7,489,904	5,841,021	283,459	18,617,430

(iii) Risiko Pasar

Risiko pasar yang dihadapi Grup terutama adalah risiko nilai tukar mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, asset keuangan lancar lainnya, asset keuangan tidak lancar lainnya, utang usaha, beban akrual, utang bank, dan utang obligasi.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perusahaan telah melakukan beberapa kontrak derivatif dengan pihak lain (Catatan 46.d).

Penyajian jumlah aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan jenis mata uang asing disajikan pada Catatan 48.

Analisa Sensitivitas

Dengan hipotesis pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar 10%, akan menurunkan laba sebelum pajak sebesar Rp982.469 (2018: Rp1.268.407).

(iii) Market Risk

Market risks facing by the Group are mainly currency exchange rate risk, interest rate risk and price risk.

a. Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in the foreign exchange rates.

The Group's financial instruments that potentially contain foreign exchange rate risk are cash and cash equivalents, trade accounts receivable, available for sale financial assets, other current financial assets, other non-current financial assets, trade accounts payable, accrued expenses bank loans and bond payables.

To manage foreign exchange rate risk, the Company has entered into several derivative agreements with certain third parties (Note 46.d).

Presentation of total financial assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 and 2018 presented on Note 48.

Sensitivity analysis

A hypothetical 10% decrease in the exchange rate of the Rupiah against the USD currency would decrease profit before tax by Rp982,469 (2018: Rp1,268,407).

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Dengan hipotesis pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Singapura sebesar 10%, akan meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp98.527 (2018: Rp266.706).

Analisis di atas didasarkan pada asumsi bahwa pelemahan dan penguatan terhadap semua mata uang asing dengan pola yang sama, tetapi tidak benar-benar terjadi pada kenyataannya. Analisis tersebut belum memperhitungkan dampak efektivitas instrumen derivatif sebagai lindung nilai.

b. Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Grup memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Untuk mengelola risiko tingkat bunga, Grup membuat kombinasi utang dan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap dan mengambang.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

A hypothetical 10% decrease in the exchange rate of the Rupiah against the SGD currency would increase profit before tax by Rp98,527 (2018: Rp266,706).

The analysis above is based on assumption that Rupiah weakened or strengthened against all of the currencies in the same direction and magnitude, but it may not be necessarily true in reality. The analysis is not determine impact of the effectiveness of derivative financial instruments of a hedge.

b. Interest Rate Risk

The Group exposure to interest rate risk is primarily related to financial liabilities. The Group has long-term loans to banks that use market interest rate. To manage interest rate risk, the Group makes a combination of debt and long-term loans with fixed and floating interest rates.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities by type of interest:

2019					
Akan Jatuh Tempo dalam/ Will Due In					Jumlah/ Total
Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ Maturity not Determined		Rp
Tanpa Bunga/ Non-Interest Bearing Interest					
Bunga Tetap/ Fixed Rate	3,868,206	--	--	267,866	4,136,072
Bunga Mengambang/ Floating Rate	329,254	6,806,931	4,615,283	--	11,751,468
Jumlah/ Total	500,000	--	--	--	500,000
	4,697,460	6,806,931	4,615,283	267,866	16,387,540

2018					
Akan Jatuh Tempo dalam/ Will Due In					Jumlah/ Total
Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ Maturity not Determined		Rp
Tanpa Bunga/ Non-Interest Bearing Interest					
Bunga Tetap/ Fixed Rate	3,462,648	--	--	283,459	3,746,107
Bunga Mengambang/ Floating Rate	816,348	7,415,904	5,841,021	--	14,073,273
Jumlah/ Total	724,050	--	--	--	724,050
	5,003,046	7,415,904	5,841,021	283,459	18,543,430

Analisa Sensitivitas

Dengan hipotesis peningkatan 1% bunga pinjaman, akan menurunkan laba sebelum pajak sebesar Rp3.750.

Sensitivity analysis

A hypothetical 1% increase in the interest rate of the debt will decrease profit before income tax by Rp3,750.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Analisis di atas didasarkan pada asumsi bahwa pelemahan dan penguatan terhadap semua tingkat bunga dengan pola yang sama terhadap seluruh utang bank, tetapi tidak benar-benar terjadi pada kenyataannya.

c. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Grup memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Grup mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar global.

Analisa Sensitivitas

Dengan hipotesis penurunan nilai AFS di pasar sebesar 1% akan menurunkan laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp2.506 (2018: Rp27.868).

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar masing-masing kategori aset dan liabilitas keuangan:

	2019		2018		<i>Financial Assets</i>
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Aset Keuangan					
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					<i>Fair value through profit or loss</i>
<i>Call Spread Option</i>	1.327.694	1.327.694	1.304.015	1.304.015	<i>Call Spread Option</i>
Aset Keuangan Lancar Lainnya	116.112	116.112	145.726	145.726	<i>Other Current Financial Assets</i>
Pinjaman yang diberikan dan piutang					<i>Loans and Receivables</i>
Kas dan Setara Kas	4.685.129	4.685.129	1.818.430	1.818.430	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang Usaha	2.151.980	2.151.980	2.401.538	2.401.538	<i>Trade Accounts Receivable</i>
Aset Keuangan Lancar Lainnya	164.883	164.883	271.664	271.664	<i>Other Current Financial Assets</i>
Piutang Pihak Berelasi Non-usaha	40.494	40.494	447.082	447.082	<i>Due from Related Parties Non-trade</i>
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	598.517	598.517	652.092	652.092	<i>Other Non-Current Financial Assets</i>
Tersedia untuk Dijual					<i>Available-for-Sale</i>
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	230.139	230.139	217.529	217.529	<i>Available-for-Sale Financial Assets</i>
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	277.293	277.293	415.134	415.134	<i>Other Non-Current Financial Assets</i>
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					<i>Held-to-Maturity</i>
Investasi pada Obligasi	1.959	1.959	1.985	1.985	<i>Investments in Bonds</i>
Jumlah Aset Keuangan	9.594.200	9.594.200	7.675.195	7.675.195	Total Financial Assets

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

The analysis above is based on assumption that interest rate increased or decreased against all of the bank loans in the same direction and magnitude, but it may not be necessarily true in reality.

c. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuation in the value of financial instruments as a result of changes in market price. The Group are exposed to price risk because they own an investment classified as AFS financial assets.

The Group manages this risk by regularly evaluating the financial performance and market price of their investment and continuously monitor the global market developments.

Sensitivity analysis

A hypothetical 1% decrease in the AFS price in the market would decrease unrealized gain on changes in fair value of available-for-sale financial assets by Rp2,506 (2018: Rp27,868).

Fair Value Estimation

The schedule below presents the carrying amount of the respective categories of financial assets and liabilities:

	2019	2018	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp
Aset Keuangan			
<i>Financial Assets</i>			
<i>Fair value through profit or loss</i>			
<i>Call Spread Option</i>	1.327.694	1.327.694	1.304.015
<i>Other Current Financial Assets</i>	116.112	116.112	145.726
<i>Loans and Receivables</i>			
<i>Cash and Cash Equivalents</i>	4.685.129	4.685.129	1.818.430
<i>Trade Accounts Receivable</i>	2.151.980	2.151.980	2.401.538
<i>Other Current Financial Assets</i>	164.883	164.883	271.664
<i>Due from Related Parties Non-trade</i>	40.494	40.494	447.082
<i>Other Non-Current Financial Assets</i>	598.517	598.517	652.092
<i>Available-for-Sale</i>			
<i>Available-for-Sale Financial Assets</i>	230.139	230.139	217.529
<i>Other Non-Current Financial Assets</i>	277.293	277.293	415.134
<i>Held-to-Maturity</i>			
<i>Investments in Bonds</i>	1.959	1.959	1.985
Jumlah Aset Keuangan	9.594.200	9.594.200	7.675.195
Total Financial Assets			

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019		2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi					
Utang Usaha	1,203,503	1,203,503	1,373,425	1,373,425	Financial Liabilities Measured at amortized cost
Beban Akrual	1,727,891	1,727,891	1,345,089	1,345,089	Trade Accounts Payable Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	280,631	280,631	107,271	107,271	Post Employee Benefits
Utang Bank Jangka Pendek	653,174	653,174	1,384,050	1,384,050	Short-Term Banks Loans Factoring Loan
Pinjaman Anjak Piutang	20,665	20,665	74,000	74,000	Other Current Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan					
Jangka Pendek Lainnya	656,181	656,181	636,863	636,863	Long-Term Banks Loans
Utang Bank Jangka Panjang	265,175	265,175	499,037	499,037	Finance Lease Obligation
Utang Sewa Pembiayaan	150,905	150,905	176,590	176,590	Due to Related Parties Non-trade
Utang Pihak Berelasi Non-usaha	1,384	1,384	2,205	2,205	Bonds Payable
Utang Obligasi	11,161,549	12,290,067	12,737,646	10,614,123	Other Long-Term Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan					
Jangka Panjang Lainnya	266,482	266,482	281,254	281,254	Total Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	16,387,540	17,516,058	18,617,430	16,493,907	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya.

Aset derivatif merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar secara berulang dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat diobservasi (Tingkat 2).

Asumsi penting yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar derivatif adalah sebagai berikut:

- Menggunakan model *Black-Scholes*.
- Menggunakan *yield* yang berasal dari informasi Bloomberg yang jatuh tempo yang sama dengan instrumen opsi.
- Menggunakan standar deviasi nilai tukar Rupiah terhadap USD selama 10 tahun sampai dengan tanggal penilaian.
- Menggunakan tingkat kurs pada tanggal penutupan laporan.
- Menggunakan harga kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *call spread option*.

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar secara berulang dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari harga kuotasi di pasar aktif (Tingkat 1).

Nilai wajar utang obligasi diperoleh dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat diobservasi (Tingkat 2) yaitu dihitung berdasarkan *yield* obligasi dengan rating yang sama/ identik dengan jatuh tempo sisanya umur utang obligasi.

As of December 31, 2019 and 2018, management estimates that the carrying value of short-term financial assets and liabilities and those which maturity not determined have reflected their fair value.

Derivative assets represent financial assets continuously measured at fair value using valuation techniques with observable input portion (Level 2).

Critical assumptions used in the computation of fair value of derivatives are as follows:

- Using Black-Scholes model.
- Using the yield obtain from Bloomberg with the same maturity as an option instrument.
- Using deviation standard of exchange rate of Rupiah to USD for 10 years until valuation date.
- Using rate of exchange at the closing date of the reporting.
- Using the same strike prices as stated in the call spread option agreement.

Available for sales financial assets represent financial assets continuously measured at the fair value using quotation price in an active market (Level 1).

The fair values of bond payables are estimated using valuation techniques with observable input portion (Level 2). Which calculated based on bond yield at the same/ identical rating with the remaining maturity of the bond.



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Aset keuangan tidak lancar lainnya saham KIJA dalam penyelesaian merupakan aset keuangan yang diukur pada perolehannya.

Aset keuangan tidak lancar lainnya terdiri dari investasi pada PT Supermall Karawaci, PT East Jakarta Industrial Park dan PT Spinindo Mitradaya dinilai pada harga perolehannya.

Berikut hierarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat menggunakan nilai wajar, yaitu:

	31 Desember/ December 31, 2019	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar					Fair value through profit or loss
Call Spread Option	1,327,694	--	1,327,694	--	Call Spread Option
Aset Keuangan Lancar Lainnya	116,112	116,112	--	--	Other Current Financial Assets
Aset Tersedia untuk Dijual					Available-for-Sale
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	230,139	230,139	--	--	Available-for-Sale Financial Assets
<hr/>					
	31 Desember/ December 31, 2018	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar					Fair value through profit or loss
Derivatif	1,304,015	--	1,304,015	--	Derivative
Aset Keuangan Lancar Lainnya	145,726	145,726	--	--	Other Current Financial Assets
Aset Tersedia untuk Dijual					Available-for-Sale
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	217,529	217,529	--	--	Available-for-Sale Financial Assets

51. Kombinasi Bisnis

Akuisisi PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI)

GKCI merupakan entitas asosiasi dari PT Prima Mugi Jaya (PMJ), entitas anak, yang diakuisisi pada tanggal 21 Desember 2018 dengan kepemilikan sebesar 20%. Nilai investasi per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp4.117 (Catatan 10). Pada tanggal 13 Februari 2019, PMJ telah mengakuisisi 30,9% saham GKCI senilai Rp12.747, sehingga kepemilikan PMJ atas GKCI menjadi 50,9% (Catatan 1.c).

Tabel berikut merangkum jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi GKCI:

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Other non-current financial assets of KIJA shares in settlement represent financial assets continuously measured at cost.

Other non-current financial assets consist of investments in PT Supermall Karawaci, PT East Jakarta Industrial Park and PT Spinindo Mitradaya valued at cost.

The fair value hierarchy for financial assets at years end were recorded using their fair value, are as follows:

51. Business Combination

Acquisition of PT Gamma Knife Center Indonesia (GKCI)

GKCI is an associate of PT Prima Mugi Jaya (PMJ), a subsidiary, that was acquired on December 21, 2018 with total ownership 20%. As of December 31, 2018, the investment is amounted to Rp4,117 (Note 10). On February 13, 2019, PMJ acquired 30.9% shares of GKCI amounting to Rp12,747, thus total ownership of PMJ in GKCI became 50.9% (Note 1.c).

The following table summarises the identifiable assets acquired and the liabilities taken over at the acquisition date of GKCI:

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Aset Neto yang Diperoleh	Rp	Net Assets Acquired
Kas dan Setara Kas	9,213	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	4,713	Trade Accounts Receivable
Persediaan	110	Inventories
Beban Dibayar di Muka	249	Prepaid Expenses
Aset Tetap	25,934	Property and Equipment
Aset Pajak Tangguhan	224	Deferred Tax Assets
Utang Usaha - Pihak Ketiga	(5,833)	Trade Accounts Payable - Third Parties
Utang Pajak	(1,927)	Taxes Payable
Beban Akrual	(268)	Accrued Expenses
Liabilitas Pajak Tangguhan	(3,663)	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	(6,560)	Other Current Financial Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	(921)	Long Term Employment Benefit Liabilities
Jumlah Aset Neto	21,271	Net Assets
Porsi Kepemilikan yang Diperoleh	30.90%	Portion Ownership Acquired
Porsi Kepemilikan atas Nilai Wajar Aset Neto	6,573	Portion Ownership of Fair Value of Net Assets
<i>Goodwill</i>	6,174	Goodwill
Aset Pajak Tangguhan	(638)	Deferred Tax Assets
<i>Goodwill</i> - Neto	5,536	<i>Goodwill</i> - Net
Jumlah Nilai Pengalihan	12,747	Total Purchase Consideration

Nilai wajar aset tetap dihitung berdasarkan Laporan Penilaian Independen.

The fair value of property and equipment was calculated based on the Independent Appraisal Report.

Goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yaitu rumah sakit pada entitas yang diakuisisi.

Goodwill was allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units is the acquired hospital.

Goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut adalah sebesar Rp5.536 (Catatan 14) yang merupakan hasil bisnis entitas anak yang menunjang dan bersinergi dengan bisnis inti Grup.

Goodwill arising from the acquisition amounted to Rp5,536 (Note 14) represents subsidiary business results that support and synergy with the core business of the Company and its subsidiaries.

Kepentingan nonpengendali diukur berdasarkan persentase kepemilikan pihak nonpengendali dengan nilai wajar aset neto GKCI. Saldo kepentingan nonpengendali atas akuisisi ini adalah Rp10.443.

Non-controlling interest was measured by the percentage of the non-controlling ownership of the fair value from net assets GKCI. The balance of non-controlling interest on this acquisition was Rp10,443.

Beban terkait akuisisi tersebut tidak diperhitungkan dalam kombinasi bisnis ini karena tidak material dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Expenses related to the acquisition are not taken into account in the business combination because it is not material and have been charged to the current year of consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka laporan keuangan GKCI terhitung sejak tanggal akuisisi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

In connection with the acquisition, GKCI financial statements since date of acquisition are consolidated to financial statements of the Group.

Jumlah pendapatan usaha dan laba sebelum pajak penghasilan GKCI sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Total revenues and profit before income tax GKCI since date of acquisition which are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.033 dan Rp1.699.

Pendapatan usaha dan laba dari GKCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seolah-olah GKCI telah dikonsolidasi sejak tanggal 1 Januari 2019 masing-masing sebesar Rp17.890 dan Rp1.773.

Akuisisi PT Gunung Halimun Elok (GHE)

Pada tanggal 11 April 2019, PT Mandiri Cipta Gemilang (MCG) dan PT Wisma Jatim Propertindo (WJP) mengakuisisi kepemilikan saham GHE masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dalam rangka perluasan usaha yang memiliki nilai strategis dan mendukung kegiatan usaha Grup.

Tabel berikut merangkum jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi GHE:

Aset Neto yang Diperoleh

	Rp
Kas dan Setara Kas	3,315
Piutang Lain-lain	310,911
Persediaan	305,966
Pajak Dibayar Di Muka	31,587
Beban Dibayar Di Muka	30
Uang Muka Pembelian	2,127
Aset Tetap	7,037
<i>Restricted Fund</i>	8,306
Utang Usaha	(25,073)
Utang Lain-lain	(311,724)
Beban Akrual	(43,246)
Utang Pajak	(1,094)
Uang Muka Pelanggan	(381,296)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	(1,183)
Jumlah Aset Neto	(94,337)
Porsi Kepemilikan yang Diperoleh	100.00%
Porsi Kepemilikan atas Nilai Wajar Aset Neto	(94,337)
<i>Goodwill</i>	104,287
Aset Pajak Tangguhan	(27,209)
<i>Goodwill - Neto</i>	77,078
Jumlah Nilai Pengalihan	9,950

Goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut adalah sebesar Rp77.078 yang merupakan hasil bisnis entitas anak yang menunjang dan bersinergi dengan bisnis inti Grup.

Perusahaan melalui entitas anak melakukan akuisisi 100% kepemilikan sehingga tidak terdapat saldo nonpengendali.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

for the year ended December 31, 2019, amounted to Rp17,033 and Rp1,699, respectively.

Operating revenues and profit from GKCI for the year ended December 31, 2019, as if GKCI has been consolidated from January 1, 2019 amounted to Rp17,890 and Rp1,773, respectively.

Acquisition of PT Gunung Halimun Elok (GHE)

On April 11, 2019, PT Mandiri Cipta Gemilang (MCG) and PT Wisma Jatim Propertindo (WJP) acquired 99.99% and 0.01% shares ownership of GHE in line with the strategic business expansion which support the Group's business activities.

The following table summarises the identifiable assets acquired and the liabilities taken over at the acquisition date of GHE:

	Net Assets Acquired
Cash and Cash Equivalents	Cash and Cash Equivalents
Other Receivables	Other Receivables
Inventories	Inventories
Prepaid Tax	Prepaid Tax
Prepaid Expenses	Prepaid Expenses
Advances	Advances
Property and Equipment	Property and Equipment
Restricted Fund	Restricted Fund
Trade Accounts Payable	Trade Accounts Payable
Other Payables	Other Payables
Accrued Expenses	Accrued Expenses
Taxes Payable	Taxes Payable
Advances from Customers	Advances from Customers
Post Employment Benefits Liability	Post Employment Benefits Liability
Net Assets	Net Assets
Portion Ownership Acquired	Portion Ownership Acquired
Portion Ownership of Fair Value of Net Assets	Portion Ownership of Fair Value of Net Assets
Goodwill	Goodwill
Deferred Tax Assets	Deferred Tax Assets
Goodwill - Net	Goodwill - Net
Total Purchase Consideration	Total Purchase Consideration

Goodwill arising from the acquisition amounted to Rp77,078 represents subsidiary business results that support and synergy with the core business of the Group.

The Company through its subsidiaries acquire 100% ownership therefore there is no non-controlling interest balance.

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Beban terkait akuisisi tersebut tidak diperhitungkan dalam kombinasi bisnis ini karena tidak material dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka laporan keuangan GHE terhitung sejak tanggal akuisisi dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Jumlah pendapatan usaha dan rugi sebelum pajak penghasilan GHE sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp189.201.

Pendapatan usaha dan rugi dari GHE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seolah-olah GHE telah dikonsolidasi sejak tanggal 1 Januari 2019 masing-masing sebesar Rp76.839 dan Rp189.201.

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Expenses related to the acquisition are not taken into account in the business combination because it is not material and have been charged to the current year of consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

In connection with the acquisition, GHE financial statements since the date of acquisition are consolidated to the financial statements of the Group.

Total revenues and loss before income tax GHE since the date of acquisition which are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2019, amounted to nil and Rp189,201, respectively.

Operating revenues and loss from GHE for the year ended December 31, 2019, as if GHE has been consolidated from January 1, 2019 amounted to Rp76,839 and Rp189,201, respectively.

52. Transaksi Non-kas

a. Transaksi Non-kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

52. Non-Cash Transactions

a. Non-Cash Transaction

The following are investing and financing activities which do not affect cash flows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Penambahan utang obligasi melalui amortisasi	144,477	116,417	<i>Additional of bond payable through amortization</i>
Penambahan properti investasi melalui reklasifikasi aset tetap	129,962	–	<i>Addition of investment property through reclassification of property and equipment</i>
Penambahan aset tetap melalui realisasi uang muka	138,359	873,963	<i>Addition of property and equipment through realization of advances</i>
Reklasifikasi uang muka ke aset keuangan tidak lancar lainnya	109,957	–	<i>Reclassification advances to other non current financial assets</i>
Penambahan aset tetap melalui entitas akuisision	79,135	219,222	<i>Addition of property and equipment from acquired entity</i>
Penambahan investasi pada entitas asosiasi pada LMIR Trust melalui pembayaran biaya manajemen	74,232	140,460	<i>Addition of investment in associate of LMIR Trust through payment of management fees</i>
Akuisisi entitas anak yang masih terutang	19,080	18,120	<i>Acquired entity remaining payable</i>



PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	26,589	40,895	<i>Addition of property and equipment through finance lease obligation</i>
Penambahan aset tetap yang masih terutang	26,036	--	<i>Addition of property and equipment remaining payable</i>
Reklasifikasi uang muka ke aset keuangan lancar lainnya	8,500	--	<i>Reclassification advances to other current financial assets</i>
Penambahan (pengurangan) utang obligasi melalui selisih kurs	(557,865)	762,922	<i>Additional (deduction) of bond payable through foreign exchange</i>
Penambahan aset tetap melalui reklassifikasi dari persediaan	--	120,679	<i>Addition of property and equipment through reclassification from inventory</i>
Pengurangan aset tetap dari entitas yang didekonsolidasi	--	85,457	<i>Deduction of property and equipment through deconsolidation a subsidiary</i>
Penambahan investasi pada entitas asosiasi pada First REIT melalui pembayaran biaya manajemen	--	73,117	<i>Addition of investment in associate of First REIT through payment of management fees</i>
Pengurangan anjak piutang melalui pelepasan entitas anak	--	20,183	<i>Deduction of factoring loan through deconsolidation a subsidiary</i>
Kompensasi kinerja yang masih terutang	--	18,000	<i>Performance compensation remaining payable</i>
Pengurangan aset tetap melalui pelepasan entitas anak	--	17,811	<i>Deduction of property and equipment through disposal of subsidiaries</i>
Penambahan aset tetap dari entitas yang dikonsolidasi	--	1,374	<i>Addition of property and equipment from consolidated entity</i>
Pembagian dividen yang yang masih terutang	--	124	<i>Dividend declared remaining payable</i>

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut:

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2019 and 2018, as follows:

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan Non Kas/ Non Cash Movement				31 Desember/ December 31, 2019
			Dekonsolidasi Entitas Anak <i>Deconsolidated a Subsidiary</i>	Pergerakan Valuta Asing/ Movement Foreign Exchange Rate	Amortisasi/ Amortization	Penambahan Aset Tetap/ Addition of Property and Equipment	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Pihak Berelasi Non Usaha/ <i>Due To Related Parties-Non Trade</i>							
2,205	(821)		--	--	--	--	1,384
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loans</i>	1,384,050	(730,876)	--	--	--	--	653,174
1,384,050	(730,876)						
Utang Bank Jangka Panjang/ <i>Long-Term Bank Loans</i>	499,037	(233,862)	--	--	--	--	265,175
499,037	(233,862)						
Utang Sewa Pembiayaan/ <i>Finance Leases Obligation</i>	176,590	(52,274)	--	--	--	26,589	150,905
176,590	(52,274)						
Utang Obligasi/ <i>Bonds Payable</i>	12,737,646	(1,162,709)	--	(557,865)	144,477	--	11,161,549
12,737,646	(1,162,709)						
Pinjaman Anjak Piutang/ <i>Factoring Loan</i>	74,000	(53,335)	--	--	--	--	20,665
74,000	(53,335)						

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	1 Januari/ January 1, 2018	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan Non Kas/ Non Cash Movement				31 Desember/ December 31, 2018
			Dekonsolidasi Entitas Anak Deconsolidated a Subsidiary	Pergerakan Valuta Asing/ Movement Foreign Exchange Rate	Amortisasi/ Amortization	Penambahan Aset Tetap/ Addition of Property and Equipment	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Pihak Berelasi Non Usaha/ <i>Due To Related Parties-Non Trade</i>	2,226	(21)	--	--	--	--	2,205
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loans</i>	1,338,400	(1,000)	--	46,650	--	--	1,384,050
Utang Bank Jangka Panjang/ <i>Long-Term Bank Loans</i>	1,469,582	(970,545)	--	--	--	--	499,037
Utang Sewa Pembiayaan/ <i>Finance Leases Obligation</i>	173,133	(37,438)	--	--	--	40,895	176,590
Utang Obligasi/ <i>Bonds Payable</i>	10,830,302	1,028,005	--	762,922	116,417	--	12,737,646
Pinjaman Anjak Piutang/ <i>Factoring Loan</i>	18,604	75,579	(20,183)	--	--	--	74,000

53. Manajemen Permodalan

Tujuan manajemen permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan (*going concern*), memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Berikut ringkasan data kuantitatif pengelolaan permodalan pada 31 Desember 2019 dan 2018:

53. Capital Management

The objective of capital management is to safeguard the Company's ability as a going concern, maximize the returns to stockholders and benefits for other stockholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company regularly reviews and manages the capital structure to ensure that the return to stockholders is optimal, by considering the capital needs in the future and the Company's capital efficiency, profitability in the present and the future, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected opportunities of strategic investment.

Summary of quantitative data for capital management as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas Neto:			Net Liabilities:
Jumlah Liabilitas	20,703,246	24,336,392	Total Liabilities
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	(4,685,129)	(1,818,430)	Less: Cash and Cash Equivalents
Jumlah Liabilitas Neto	16,018,117	22,517,962	Total Net Liabilities
Jumlah Ekuitas	34,376,339	24,747,068	Total Equity
<i>Dikurangi:</i>			<i>Less:</i>
Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali	19,535	19,535	<i>Difference in Value from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control</i>
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	2,540,899	2,540,899	<i>Difference in Transactions with Non-Controlling Interest</i>
Komponen Ekuitas lainnya	5,220,586	3,212,282	<i>Other Equity Component</i>
Penghasilan Komprehensif Lainnya	605,418	790,906	<i>Other Comprehensive Income</i>
Kepentingan Nonpengendali	5,601,322	7,009,159	<i>Non-Controlling Interests</i>
Jumlah	13,987,760	13,572,781	Total
Modal Disesuaikan	20,388,579	11,174,287	Adjusted Equity
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal Disesuaikan	0.79	2.02	Net Liabilities Ratio to Adjusted Equity



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

54. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a) Pada tanggal 8 Januari 2020, LMIRT Management Ltd. ("LMIRT"), manager dari Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust"), entitas anak, mengumumkan bahwa LMIR Trust telah menandatangani perjanjian jual beli ("CSPA") dengan NWP Retail atas penjualan dua mall yaitu Pejaten Village dan Binjai Supermall, aset yang dimiliki oleh LMIR Trust, entitas asosiasi, dengan total nilai penjualan sebesar Rp1.280.700 (ekuivalen SGD124,300,000). NWP Retail merupakan perusahaan kerjasama antara Warburg Pincus dengan PT City Retail Developments.
- b) Pada 22 Januari 2020, Theta Capital Pte Ltd (TC), entitas anak, menerbitkan obligasi (*unsecured bond*) dengan nilai nominal sebesar USD325,000,000 dengan tingkat bunga 8,125% per tahun dan tercatat pada Bursa Efek Singapura. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2025 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Obligasi ini diterbitkan untuk penebusan sebagian dan penebusan penuh obligasi masing-masing sebesar USD150,000,000 dan USD260,000,000. Seluruhnya dengan tingkat bunga 7% per tahun dan jatuh tempo pada 11 April 2022.

TC selanjutnya menerbitkan tambahan obligasi (*unsecured bond*) sebesar USD95,000,000 dengan tingkat bunga 8,125% dan tercatat pada Bursa Efek Singapura. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 22 Januari 2025 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Obligasi ini diterbitkan untuk pelunasan sisa obligasi sebesar USD150,000,000. Obligasi ini dikonsolidasikan sepenuhnya dan membentuk satu seri dengan obligasi sebesar USD325,000,000.

- c) Pada tanggal 6 Februari 2020, Bridgewater International Limited, entitas anak, telah melakukan pelepasan atas seluruh investasi sebesar 34.469.984 unit di First Reit.
- d) Pada Maret 2020, PT Mandiri Cipta Gemilang, entitas anak, dengan PT Puri Bintang Terang melakukan perubahan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat atas penjualan Lippo Mall Puri dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat menjadi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020 (atau tanggal lain yang akan disepakati secara tertulis).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

54. Events After Reporting Period

- a) On January 8, 2020, LMIRT Management Ltd. ("LMIRT"), manager of Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust"), a subsidiary, announced that it has entered into a conditional sale and purchase agreement with NWP Retail for the sale of two malls, Pejaten Village and Binjai Supermall, assets owned by LMIR Trust, an associate, with total purchase consideration of Rp1,280,700 (equivalent to SGD124,300,000). NWP Retail is a joint venture company between Warburg Pincus and PT City Retail Developments.
- b) On January 22, 2020, Theta Capital Pte Ltd (TC), a subsidiary, issued unsecured bond with a face value of USD325,000,000 with a fixed annual interest rate of 8.125% and are listed on Singapore Stock Exchange. The bond will mature on January 22, 2025 and payment of interest is conducted every 6 months. The bond was issued for the purpose of partial and full redemption of bond amounting to USD150,000,000 and USD260,000,000, respectively. All bonds are with a fixed annual interest rate of 7% and due on April 11, 2022.

TC further issued additional unsecured bond with a face value amounted to USD95,000,000 with a fixed annual interest rate of 8.125% and are listed on Singapore Stock Exchange. The bond will mature on January 22, 2025 and payment of interest is conducted every 6 months. The bond issued for the redemption of the remaining bond amounted to USD150,000,000. The bond will be fully consolidated and form a single series with bond amounted to USD325,000,000.

- c) As of February 6, 2020, Bridgewater International Limited, a subsidiary, has disposed all of its investment of 34,469,984 units in First Reit.
- d) In March 2020, PT Mandiri Cipta Gemilang, a subsidiary, with PT Puri Bintang Terang amended the Conditional Sale and Purchase Agreement for Sale of Lippo Mall Puri to extend the deadline for the completion to be no later than December 31, 2020 (or such other dates as may be agreed in writing).

**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- e) Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan bermaksud melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan yang telah diterbitkan dan tercatat pada BEI sesuai dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ('POJK No. 2/2013') dan SEOJK No. 3/2020 dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan peraturan terkait lainnya ('Rencana Buyback').

Perusahaan akan mengalokasikan sejumlah dana yang sampai sebanyak-banyaknya Rp75.000. Jumlah tersebut termasuk biaya transaksi, biaya perantara pedagang efek, dan biaya lain yang terkait dengan Rencana Buyback.

Dengan asumsi seluruh dana digunakan dalam Rencana Buyback, jumlah saham yang dibeli kembali tersebut ditambahkan dengan jumlah saham treasury, Perusahaan tidak akan melebihi batas persentasi saham buyback yaitu kurang dari 20% dan jumlah saham beredar tidak kurang dari free float yang diijinkan yaitu tidak kurang dari 7,5% sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 3/2020.

- f) Pada bulan April 2020, PT Kemuning Satiatama, entitas anak, melakukan pembelian saham PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas anak, sebanyak 80.000.000 saham melalui bursa. Sehingga kepemilikan Grup terhadap LC meningkat menjadi 84%.

Pada bulan April 2020, PT Megapratama Karya Persada, entitas anak, melakukan pembelian saham PT Siloam International Hospital Tbk (SIH), entitas anak, sebanyak 70.000.000 saham melalui bursa. Sehingga kepemilikan Grup terhadap SIH meningkat menjadi 55,4%.

- g) Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah,

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- e) On April 1, 2020, the Company intends to repurchase the Company's issued and listed shares on the IDX pursuant to the OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 regarding Buyback of Shares Issued by Issuer or Public Companies due to Significant Fluctuation of Market Conditions ('POJK No. 2/2013') and SEOJK No. 3/2020 by taking into considering the Company's capability and other prevailing regulations ('Buyback Plan').

The Company will allocate an aggregate funds of up to Rp75,000, for the Buyback Plan. This allocation includes transaction costs, brokerage fees and other costs associated with the Buyback Plan.

Assuming the funds are fully used for the Buyback Plan, the total of such buyback shares and the current treasury stock of the Company, shall not exceed the limit of percentage of buyback shares which is 20% or the free float shares will not be less than 7.5% as governed by SEOJK No. 3/2020.

- f) On April 2020, PT Kemuning Satiatama, a subsidiary, purchased 80,000,000 shares of PT Lippo Cikarang Tbk (LC), a subsidiary, through the stock exchange. So, the Group ownership in LC increased to 84%.

On April 2020, PT Megapratama Karya Persada, a subsidiary, purchased 70,000,000 shares of PT Siloam International Hospital Tbk (SIH), a subsidiary, through the stock exchange. So, the Group ownership in SIH increased to 55.4%.

- g) In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "the Specific Emergency Disasters Corona Virus Outbreak Status" after the discovery of several people who were identified as being affected by the corona virus (Covid-19). This emergency condition, together with the global economic situation affected by the Covid-19 pandemic, caused a downturn in the domestic economy in early 2020, which was characterized by a weakening of the rupiah exchange rate,



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal dan dampak terhadap bisnis di masa mendatang.

Grup telah berhasil menerapkan beberapa langkah pencegahan untuk memperkuat posisi keuangan dengan langkah-langkah yang telah diambil untuk secara efektif mengambil tindakan yang diperlukan menghadapi ketidakpastian pasar yang senantiasa berubah akibat pandemi virus corona (COVID-19). Grup saat ini memiliki lebih dari Rp3.500.000 dalam bentuk tunai, secara substansial semuanya dalam USD dan SGD. Tingkat utang bersih terhadap ekuitas tetap sebesar 21%. Hal ini memastikan Grup berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi dampak pandemi global. Selain itu, manajemen juga telah melakukan sejumlah inisiatif positif sejak 1 Januari 2020, meliputi:

- PT Lippo Cikarang Tbk, entitas anak berhasil meluncurkan proyek residensial yang baru yang menunjukkan adanya kepulihan bisnis intinya.
- Penyelesaian divestasi seluruh investasi di First REIT pada Februari 2020.
- Menyesuaikan strategi lindung nilai (hedging) pada awal kuartal pertama 2020 ketika nilai tukar Rupiah terhadap USD berada pada Rp13.700 per USD. Grup menghasilkan sekitar USD60,000,000 dengan memindahkan *hedging* dari Rp15.000 ke Rp17.500 untuk nilai pokok utang obligasi.
- Penyelesaian semua obligasi yang jatuh tempo hingga 2022 melalui pembiayaan kembali obligasi senilai USD409,300,000 dari tahun 2022 menjadi tahun 2025.
- Melakukan pinjaman modal kerja senilai Rp700.000 dari bank pada Maret 2020. Pinjaman akan menyediakan likuiditas tambahan bagi Perusahaan, jika diperlukan.
- Melakukan sejumlah inisiatif penghematan biaya yang akan menurunkan biaya operasional pada tahun fiskal 2020. Inisiatif akan menargetkan pengurangan lebih lanjut dalam hal biaya operasional, belanja modal dan modal kerja.
- Grup telah mengumumkan pengurangan jam operasional di berbagai mal-mall dan hotel-hotel yang dimiliki oleh Grup. Hal ini akan menghasilkan strategi penghematan biaya untuk beberapa bulan ke depan.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

a decline in the prices of securities on the capital market and impact to business in the future.

Group has successfully implemented several precautionary measures to strengthen its financial position. These measures to respond effectively in the rapidly changing market uncertainty created by the coronavirus (COVID-19) pandemic. Group currently has over Rp3,500,000 in cash, substantially held in USD and SGD. The net debt to equity level remains at 21%. This ensuring Group is well positioned to withstand the impact of the global pandemic. In addition, we have undertaken number of positive initiatives since January 1, 2020, including:

- *PT Lippo Cikarang Tbk, a subsidiary, successfully launched its new landed residential project and validates the core business turn around.*
- *Settlement of divestment of investment in First REIT completed in February 2020.*
- *Adjusted hedging strategy in early first quarter 2020, when the Rupiah to USD exchange rate was at Rp13,700 per USD. Group raised around USD60,000,000 by moving our hedges out from Rp15,000 to Rp17,500 for the principal value of bonds.*
- *Cleared up all maturities of bonds until 2022 by refinancing our USD409,300,000 due 2022 bonds into due 2025 bond.*
- *Obtain a working capital loan from bank for Rp700,000 in March 2020. The loan will provide additional liquidity for the Company, if necessary.*
- *Executed number of costs saving initiatives that will allow to lower operating costs in fiscal year 2020. This includes targeting further reductions in operating expenses, capital expenditures and working capital.*
- *Group announced reduced hours of operation at our malls and hotels. The reduction is the initiate cost saving strategy for the next several months.*

PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

55. Reklasifikasi Akun

Akun pendapatan dan beban pokok pendapatan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	2018		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification
	Rp	Rp	Rp
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan	11,056,978	395,821	11,452,799
Beban Pokok Pendapatan	(5,804,962)	(395,821)	(6,200,783)
Laporan Arus Kas			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	11,742,915	395,821	12,138,736
Pembayaran kepada Pemasok	(11,270,676)	(395,821)	(11,666,497)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Revenue		Cost of Revenue	
Statement of Cash Flows			
Cash Flows from Operating Activities		Cash Receipts from Customers Payments to Suppliers	

Reklasifikasi ini tidak menimbulkan dampak pada laba bruto, laba usaha dan jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah dilaporkan sebelumnya.

56. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru dan amandemen standar baru, serta interpretasi atas standar, namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf";

PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

55. Reclassification of Accounts

Revenue and cost of revenue accounts in consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income and consolidated statements of cash flow for the year ended December 31, 2018 were reclassified to conform with presentation for the year ended December 31, 2019 as follows:

	2018		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification
	Rp	Rp	Rp
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan	11,056,978	395,821	11,452,799
Beban Pokok Pendapatan	(5,804,962)	(395,821)	(6,200,783)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Revenue		Cost of Revenue	
Statement of Cash Flows			
Cash Flows from Operating Activities		Cash Receipts from Customers Payments to Suppliers	

The reclassification does not have impact to the gross profit, profit from operation and total comprehensive income for the year ended December 31, 2018 as previously reported.

56. New Accounting and Interpretation Standards Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued the following new standards and amendments standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

The following are new standard and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted:

- PSAK 71: "Financial Instrument";
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Longterm Interests in Associates and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- PSAK 112 "Accounting for Endowments";



**PT LIPPO KARAWACI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- PSAK 1 (Amandemen 2018) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang judul laporan keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian 2018) "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Standar dan amandemen berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amandemen): "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotoriasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

**57. Tanggung Jawab Manajemen
dan Otorisasi Penerbitan Laporan
Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penerbitan laporan keuangan konsolidasian yang telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 22 Mei 2020.

**PT LIPPO KARAWACI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- PSAK 1 (Amendment 2018) "Presentation of Financial Statements" about titles of financial statements";
- PSAK 1 (Improvement 2018) "Presentation on Financial Statements";
- ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";
- PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- ISAK 101: "Recognition of Resilient Murabahah Revenues without Significant Risk Related to Ownership of Inventory";
- ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables".

Standard and amendment effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted are as follows:

- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 22 (Amendment): "Business Combination: Definition of a Business".

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments of these standards.

**57. Management Responsibility
and Issuance Authorization of
the Consolidated Financial Statements**

The management of the Company is responsible for the issuance of the consolidated financial statements which were authorized to be issued by Directors on May 22, 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

GENERATIONAL CHANGE:
LIPPO KARAWACI'S
PIVOT TO
THE FUTURE



PT Lippo Karawaci Tbk
Menara Matahari 22nd Floor
7 Boulevard Palem Raya
Lippo Karawaci
Tangerang 15811
Banten, Indonesia

Tel. (62-21) 2566-9000
Fax. (62-21) 2566-9098
Email: corsec@lippokarawaci.co.id
website: www.lippokarawaci.co.id